

ISSN 2722-9475 (Cetak)  
ISSN 2722-9467 (Online)

**Vol.2 No.11**  
**April 2022**

# **Jurnal** **Inovasi** **Penelitian**



**Sekolah Tinggi Pariwisata**  
**Mataram**

# SUSUNAN REDAKSI JURNAL INOVASI PENELITIAN

## Penanggung Jawab

Ketua STP Mataram  
Dr. Halus Mandala, M.Hum

## Pimpinan Redaksi

Kepala Pusat Kajian Pariwisata  
Dr. I Made Suyasa, M.Hum

## Editor In Chef/Pelaksana

Lalu Masyhudi, M.Si

## Section Editor

Husnul Harifandi, ST

## Reviewer

Prof. Adrian Vickers, The University of Sydney  
Prof. Badaruddin Mohamed, M.Sc.,Ph.D., University Sains Malaysia  
Paul Green, Ph.D., School of Social and Political Sciences  
Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Lit., Universitas Udayana  
Drs. I Putu Gede, M.Par, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram  
Lalu Yulendra, M.Par, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram  
I Wayan Suteja, M.Par, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram  
Sri Susanty, M.Par, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram  
Muh. Jumail, M.Par, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

## Copy Editor

Ida Nyoman Tridarma Putra, M.Pd,  
Ni Putu Ade Resmayani, M.Pd  
Sri Wahyuningsih, M.Pd  
Lia Rosida, M.Dev

## Layout Editor

Rizal Kurniansah, M.Par  
Murianto, M.Par

## Proofreader

Drs. I Ketut Bagiastra, M.Pd  
Drs. Siluh Putu Damayanti, M.Pd  
Ander Sriwi, M.Par

# PANDUAN PENULISAN NASKAH JURNAL INOVASI PENELITIAN

JUDUL NASKAH PUBLIKASI MAKSIMUM 12 KATA DLM BHS.IND

Oleh

First Author, Second Author & Third Author

<sup>1,2</sup>Institution/affiliation author 1,2; address, tel/fax of institution/affiliation

<sup>3</sup>Institution/affiliation author 3; address, tel/fax of institution/affiliation

Email: <sup>1</sup>xxxx@xxxx.xxx, <sup>2</sup>xxx@xxxx.xxx, <sup>3</sup>xxx@xxxx.xxx

## Abstrak

Abstrak Maksimal 200 kata berbahasa Indonesia/English dengan Times New Roman 12 point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

**Kata Kunci: 3-5 kata kunci, istilah A, istilah B & kompleksitas**

## PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yang diselesaikan, ulasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian

## LANDASAN TEORI

Pengacuan pustaka dilakukan dengan menuliskan [nomor urut pada daftar pustaka] mis. [1], [1,2], [1,2,3]. Sitasi kepustakaan harus ada dalam Daftar Pustaka dan Daftar Pustaka harus ada sitasinya dalam naskah. Pustaka yang disitasi pertama kali pada naskah [1], harus ada pada daftar pustaka no satu, yang disitasi ke dua, muncul pada daftar pustaka no 2, begitu seterusnya. Daftar pustaka urut kemunculan sitasi, bukan urut nama belakang. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang benar benar disitasi pada naskah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi analisa, arsitektur, metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah, implementasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil percobaan sebaiknya ditampilkan dalam berupa grafik atau pun tabel.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan dapat berupa paragraf, namun sebaiknya berbentuk point-point dengan menggunakan numbering atau bullet.

### Saran

Saran-saran untuk penelitian lebih lanjut untuk menutupi kekurangan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- **Buku** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, *judul buku* (harus ditulis miring) volume (jika ada), edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit .  
[1] Castleman, K. R., 2004, *Digital Image Processing*, Vol. 1, Ed.2, Prentice Hall, New Jersey.
- **Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah:**  
Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, *nama majalah* (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.  
[3] Yusoff, M, Rahman, S.,A., Mutalib, S., and Mohammed, A. , 2006, Diagnosing Application Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network Technique, *Journal of Information Technology*, vol 18, hal 152-159.
- **Pustaka dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi** dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul skripsi, *Skripsi/Tesis/Disertasi* (harus ditulis miring), nama fakultas/ program pasca sarjana, universitas, dan kota.  
[4] Prasetya, E., 2006, Case Based Reasoning untuk mengidentifikasi kerusakan bangunan, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Komputer, Univ. Gajah Mada, Yogyakarta.
- **Pustaka dalam bentuk Laporan Penelitian:**  
Urutan penulisan: Peneliti, tahun, judul laporan penelitian, *nama laporan penelitian* (harus ditulis miring), nama proyek penelitian, nama institusi, dan kota.  
[5] Ivan, A.H., 2005, Desain target optimal, *Laporan Penelitian Hibah Bersaing*, Proyek Multitahun, Dikti, Jakarta.

**Daftar Pustaka hanya memuat semua pustaka yang diacu pada naskah tulisan, bukan sekedar pustaka yang terdaftar.**

**ISSN 2722-9475 (Cetak)**  
**ISSN 2722-9467 (Online)**

**Vol.2 No.11**  
**April 2022**

### Indexed



### REFERENCE MANAGEMENT TOOLS



**Print ISSN: 2722-9475**



**Online ISSN: 2722-9467**





ISSN 2722-9475 (Cetak)  
ISSN 2722-9467 (Online)

**Jurnal Inovasi Penelitian**  
**Vol.2 No.11 April 2022**

**DAFTAR ISI**

1	<b>HUBUNGAN ANTARA KETERTARIKAN MAHASISWA DENGAN LAGU TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA INGGRIS</b> Oleh : Megawati, Dini Fitriani, Neng Nurwiatin, Ivon Mukaddamah	3551-3556
2	<b>ANALISIS MEKANISME PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI SELEBGRAM</b> Oleh : Puspa Amelia Komala Sari, Waluyo, Spto Hermawan	3557-3566
3	<b>PENINGKATAN KERJASAMA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK PADA MATA KULIAH KAPITA SELEKTA FISIKA SEKOLAH</b> Oleh Indica Yona Okyranida	3567-3572
4	<b>UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR EKONOMI DENGAN METODE PEMBELAJARAN INQUIRI</b> Oleh : Latifah, Cita Ayni Putri Silalahi	3573-3578
5	<b>ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP FASILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PENGGUNA TRANS JAKARTA</b> Oleh : Agus Dharmanto, Novita Wahyu Setyawati, Dewi Sri Woelandari PG	3579-3590
6	<b>PERMASALAHAN SERTA SOLUSI DALAM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZIS DI LAZISMU KOTA MEDAN</b> Oleh : Ahmad Fuadi Tanjung, Yenni Samri Juliati Nasution	3591-3598
7	<b>ANALISIS TITIK IMPAS USAHATANI CABAI MERAH (<i>Capsicum annum</i>, L) (STUDI KASUS DI DESA PAYA MEULIGOE KECAMATAN PEURUELAH KABUPATEN ACEHTIMUR)</b> Oleh : Mukti Ramadhani, Muhammad Jamil, Cut Gustiana	3599-3604
8	<b>UPAYA APOTEKER KOMUNITAS DALAM PENGENDALIAN INFEKSI COVID-19: TINJAUAN LITERATUR</b> Oleh : Fitria Maesaroh, Ida Ayu Eka Widiastuti, Candra Eka Puspitasari	3605-3610
9	<b>REVIEW OF THE DEATH PENALTY AGAINST PERPETRATORS OF NARCOTICS CRIME BASED ON SOCIOLOGY OF LAW</b> Oleh : Itok Dwi Kurniawan, Vincentius Patria Setyawan	3611-3620
10	<b>HUBUNGAN ANTARA KETERTARIKAN MAHASISWA DENGAN LAGU TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA INGGRIS</b> Oleh : Megawati, Dini Fitriani, Neng Nurwiatin, Ivon Mukaddamah	3621-3626
11	<b>KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SUKABUMI</b> Oleh : Ghenni Noviar Afghani, Dine Meigawati, Yana Fajar Basori	3627-3640
12	<b>FACTORS ASSOCIATED WITH UNSAFE BEHAVIOR ON WORKERS IN THE PRODUCTION DIVISION OF PALM OIL PROCESSING PT. X</b> Oleh : Meisye Herlen Selfia, T Samsul Hilal, Entianopa	3641-3646
13	<b>PERALIHAN MATA PENCAHARIAN WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT</b> Oleh Bintang Virgo	3647-3652

14	<b>PENGARUH PEMBERIAN PUPUK BOKASHI SLUDGE BIOGAS PADA LEVEL BERBEDA ( 0; 7,5; 15 DAN 22,5 TON/HA) TERHADAP PERTUMBUHAN KEMBALI RUMPUT ODOT (<i>Pennisetum purpureum cv. Mott</i>)</b> Oleh : Yizrael Kamara Praing, I Made Adi Sudarma	3653-3658
15	<b>PERTUMBUHAN KEMBALI RUMPUT ODOT YANG DI BERIKAN PUPUK BOKASHI SLUDGE BIOGAS DENGAN LEVEL 0, 10 DAN 20 TON/HEKTAR DI KABUPATEN SUMBA TIMUR</b> Oleh : Ningsihyani Kuku Yowa, I Made Adi Sudarma	3659-3664
16	<b>DILEMA ETIS PEKERJA SOSIAL DALAM MENERAPKAN NILAI DAN ETIKA PEKERJAAN SOSIAL TERHADAP PENANGANAN PERKAWINAN ANAK USIA DINI</b> Oleh : Evi Melda, Kurniati	3665-3674
17	<b>KONVERGENSI MEDIA DAN MEMORI KOLEKTIF MASYARAKAT INDONESIA</b> Oleh Deby Puspitaningrum	3675-3686
18	<b>ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI SEDOTAN BAMBU DESA SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT</b> Oleh Amelia R Alamanda	3687-3690
19	<b>PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA PARTISIPATIF BERBASIS MASYARAKAT DI DESA WISATA LALANG, KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR</b> Oleh : Wahyuni Pratiwi Ningsih, Edwin Rizal, Ute Lies Siti Khadijah	3691-3698
20	<b>ANALISIS STRATEGI PROMOSI JASA MAKE-UP ARTIST MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS MUA RIAS ATHIF)</b> Oleh : Wilna Julia, Muhammad Rahmat,& Sari Wulandari	3699-3704
21	<b>KONSELING KELOMPOK MENGURANGI KECEMASAN RESIDEN REHABILITASI DENGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA</b> Oleh Anisa Pauzana	3705-3708
22	<b>PENGARUH ASPEK PRILAKU TERHADAP PENDAPATAN PETERNAK SAPI ACEH (<i>BOS-BIBOS</i>) DI KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA</b> Oleh : M.Khairul Fadli, Cut Gustiana, Faoeza Hafiz Saragih, Kiagus M. Zain Basriwijaya	3709-3718
23	<b>MEKANISME PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI PT. RIMBA MUJUR MAHKOTA</b> Oleh : Ayu Sundari, Tri Reni Novita	3719-3724
24	<b>KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DIMASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP NASABAH (STUDY KASUS) PT BANK SUMUT KCP. MANDALA BY PASS, MEDAN DENAI KOTA MEDAN</b> Oleh : Siti Dea Nur Halizah Hsb, Adawiyah Nasution	3725-3730
25	<b>PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI UPAYA ARBITRASE</b> Oleh : Suci Indah Lestari, Tri Reni Novita	3731-3736
26	<b>PROSES PEMULIHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF) DI BALAI REHABILITAS SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA “INSYAF” MEDAN SUMATERA UTARA.</b> Oleh : Suharniyati, Mahzaniar	3737-3744
27	<b>PENGEMBANGAN SYSTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIK UNTUK MENCIPTAKAN SEORANG PENDIDIK YANG PROFESSIONAL</b> Oleh : M. Nugroho Adi Saputro, Bachtiar Hadi	3745-3764

28	<b>ANALISIS PENGARUH PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IKAN BANDENG (<i>Chanos chanos</i>) DI KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG</b> Oleh : Mutia Ardini, Cut Gustiana, Silvia Anzitha	3765-5772
29	<b>OPTIMALISASI INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI</b> Oleh : Hukman Faathir Turmuji, Mubarak, Engkus	3773-3786
30	<b>PENGARUH SENAM HAMIL DENGAN KEJADIAN RUPTURE PERIMEUM DI PUSKESMAS MINASAUPA MAKASSAR TAHUN 2021</b> Oleh: Ninda Sari L, Zulaeha A.Amdadi, Hidayati	3787-3794

---

**HUBUNGAN ANTARA KETERTARIKAN MAHASISWA DENGAN LAGU  
TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA INGGRIS****Oleh****Megawati<sup>1)</sup>, Dini Fitriani<sup>2)</sup>, Neng Nurwiati<sup>3)</sup>, Ivon Mukaddamah<sup>4)</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>STKIP Kusumanegara****Email: <sup>1</sup>[Megawati86@stkipkusumanegara.ac.id](mailto:Megawati86@stkipkusumanegara.ac.id), <sup>2</sup>[Dinifitriani@stkipkusumanegara.ac.id](mailto:Dinifitriani@stkipkusumanegara.ac.id),  
<sup>4</sup>[Nengnurwiati30@gmail.com](mailto:Nengnurwiati30@gmail.com), <sup>4</sup>[Ivon@stkipkusumanegara.ac.id](mailto:Ivon@stkipkusumanegara.ac.id)****Abstract**

This study aims to know the relation between students' interest song on their speaking skill. There are some problems such as what are the interest students in song has relation with their speaking skill. This study was conducted to the first semester students at STKIP Kusumanegara Jakarta. Reasearch of the method is quantitative with twenty students as the sample. Data was collected by speaking test, questionnaire which has relation students' interest in song. This study use two variable. Independent variable is students' interest in song and dependent variable is speaking skill. The result from this study, it was gotten sig. (2.tailed)  $0.014 < 0.05$ , it means high score in speaking skill influenced by students' interest in song. There is positive relation between students' interest in song on their speaking skill. Coefficient correlation  $0.539 > 0.05$ , it means if students' interest is high so speaking skill is high and if students' interest in song is low so their speaking skill is low.

**Keywords: Relation, Students' interest In Song, Speaking Skill****PENDAHULUAN**

Dalam menyongsong era digital 4.0 menuju era 5.0 diharapkan para generasi muda dapat memiliki kesadaran dalam berbahasa Inggris yang baik. Dengan demikian mereka tidak akan tertinggal dengan teknologi baru yang serba menggunakan digital dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman akan tertinggal dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan layak. Segala aktifitas saat ini telah banyak menggunakan digital, diantaranya penggunaan angkutan yang berbasis online. Segala yang menggunakan aplikasi dalam penerapannya menggunakan bahasa inggris dalam instruksinya, oleh karena itu pentingnya pemahaman berbahasa inggris. Mahasiswa dapat mudah memahami penggunaannya apabila mereka terbiasa menggunakan bahasa inggris. Pembelajaran bahasa Inggris yang masih menggunakan metode konvensional dirasa sulit dipahami dan akan membuat mahasiswa merasa jenuh dan bosan. Oleh karena itu, para

pendidik diharapkan dapat mengetahui latar belakang yang menjadikan mereka terkendala dalam pemahaman kosakata sehingga mahasiswa sulit untuk berbicara bahasa inggris. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar hubungan antara ketertarikan mahasiswa dalam lagu-lagu dengan kemampuan berbicara. Apakah ada kaitan ketertarikan mahasiswa dengan lagu-lagu dengan kemampuan berbicara itu sendiri. Apakah mahasiswa yang tertarik dengan lagu-lagu memiliki kemampuan berbicara yang lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa yang tidak tertarik dengan lagu-lagu. Menarik merupakan suatu keinginan manusia untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. Ketertarikan adalah suatu perasaan ingin mengetahui dengan mempelajari sesuatu yang lebih. Menurut Slameto (2003:57) menyatakan menarik adalah memberikan perhatian yang lebih serta ingin mengingatnya. Menurut Slameto (2003) dalam Muhibbin (1995:136) mendefinisikan menarik adalah sesuatu kesenangan yang sangat terhadap sesuatu yang berkaitan dengan

kebahagiaan. According to Slameto (2003) mahasiswa yang tertarik dalam pembelajaran memiliki karakteristik diantaranya :

- a. memiliki kecenderungan untuk mengingat serta memberikan perhatian yang lebih dalam mempelajari sesuatu dengan berkelanjutan
- b. memiliki perasaan sayang dan senang terhadap sesuatu yang menarik
- c. memperoleh kesenangan serta kepuasan terhadap sesuatu yang menarik diantaranya rasa kebersamaan melakukan sesuatu yang menarik tersebut
- d. diwujudkan dalam partisipasi suatu kegiatan dan aktivitas

Dapat disimpulkan menjadi beberapa indikator sebagai berikut :

- a. kesenangan  
suatu aspek yang secara langsung manusia merasa puas dan membuatnya untuk melakukan kembali
- b. pengharapan  
suatu aspek dimana ingin menghasilkan, memperhatikan serta berkecimpung dengan suatu hal tanpa adanya paksaan
- c. kesadaran  
suatu aspek dimana seseorang ingin melakukan sesuatu serta peduli dan menyadari terhadap aktifitas yang sedang dikerjakannya
- d. perhatian  
aspek dimana menunjukkan seseorang terhadap ketertarikan suatu hal

Menurut Ifadah (2012:363) lagu merupakan sebuah teks yang dinyanyikan. Lagu berasal dari sebuah karya tertulis yang diperdengarkan dengan iringan musik. Harmer (2007: 133) menyatakan peserta didik yang mendengar dan memahami bahasa Inggris yang dibicarakan berarti mereka dapat memahami intonasi. Penekanan dan suara yang diucapkan baik oleh pembicara maupun yang mendengarkan. Keuntungan menggunakan lagu Murphey (1992:3) Lagu dapat mengingatkan seseorang akan suatu hal, hal ini dapat dipengaruhi baik dari bait lirik ataupun

musik yang dimainkan. Selain itu dapat merelaksasikan pikiran yang tegang. Lagu dapat memotivasi anak-anak, remaja dan dewasa dengan syair yang menggembirakan. Brewster, Ellis, & Girard (1992) menyatakan bahwa lagu merupakan suatu strategi yang tepat dalam pembelajaran bahasa. Karena di dalam lagu terdapat pengulangan kosakata, struktur bahasa serta irama yang dapat menimbulkan ketertarikan bagi pembelajar bahasa. Susunan kosakata yang terstruktur dalam sebuah teks lirik memiliki sebuah makna yang mengandung arti, apabila di dengarkan maka dapat menjadi motivasi dan penyemangat tersendiri. Menurut Griffie (1988) lagu memiliki banyak manfaat yang dapat membantu dalam pembelajaran. Lagu dan musik dapat meminimalisir kecemasan, jika pembelajar diperkenalkan dengan lagu dan musik sejak awal pembelajaran bahasa maka mereka dapat menurunkan tingkat kecemasan. Lagu bermanfaat dalam pembelajaran kosakata. Selain itu lagu juga sebagai sarana atau bahan dalam pembelajaran listening. Lagu dapat digunakan sebagai tambahan di akhir pembelajaran kosakata. Serta dapat mendukung pembelajaran grammar dan dapat membawa suasana yang berbeda dalam suasana kelas. Lagu yang memiliki lirik bahasa asing seperti bahasa Inggris tanpa disadari bagi pendengar, akan belajar memahami isi atau makna yang terdapat di dalam lagu tersebut. Lagu merupakan ungkapan isi hati dan pikiran dari penulis lagu akan suatu hal yang ingin disampaikan kepada pendengar melalui lantunan nada-nada, melodi dan irama musik. Dengan mendengarkan lagu, dapat menjadi penyemangat tersendiri terutama mahasiswa yang ingin mempelajari bahasa Inggris. Mahasiswa yang tertarik dengan lagu maka akan menumbuhkan keinginan untuk menghafalkan kosakata bahasa Inggris serta menjadikan mereka aktif untuk meniru pengucapan bahasa Inggris atau yang disebut dengan *pronunciation*. Berbicara merupakan salah satu kemampuan dasar dalam bahasa

Inggris. Selain itu terdapat kemampuan yang lain seperti mendengarkan, menulis, dan membaca. Kemampuan berbicara perlu dipelajari secara serius agar mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Bjorklund (2005) dalam perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan berbicara. Apabila seorang anak memiliki perkembangan berbicara yang baik maka perkembangan bahasanya pun baik begitu pula sebaliknya. Menurut Megawati (2019: 118) *Speaking is the performance skills in English. When students learn English, they have to practice and also produce words, sentence by speech.* Berbicara merupakan suatu keahlian yang dapat dilihat, ketika mahasiswa mempelajari bahasa Inggris, maka mereka dapat mempraktikkannya serta mengasikkan kata, kalimat dengan ucapan. Berbicara merupakan suatu kemampuan yang terlihat, maksudnya adalah kemampuan yang dapat dilihat oleh orang lain ketika berbicara. Menurut Megawati (2018:17) *By speaking students can communicate and interaction with other people. The students can utterance their feeling, idea, and giving opinion.* Mahasiswa yang memiliki kemampuan berbicara maka mereka akan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain, selain itu dapat melakukan ujaran yang artinya mahasiswa dapat menuangkan perasaan, ide pemikiran serta memberikan pendapat atau opini atas hal yang mereka pahami. Untuk mendapatkan kemampuan berbicara yang baik, mahasiswa memerlukan kosakata-kosakata yang kemudian drangkai menjadi frase atau kalimat. Selain itu pemahaman dalam penggunaan grammar juga diperlukan dalam berbahasa Inggris. Agar pendengar atau orang yang diajak bicara dapat memahami kapan kejadian terjadinya, apakah baru selesai terjadi ataukah masih berlangsung. Dalam berbicara bahasa Inggris dibutuhkan beberapa kriteria sehingga mudah dipahami orang lain. Kriteria atau elemen tersebut yang menjadikan pembicara memiliki kemampuan berbicara yang baik. Menurut Brown

(2004:172) elemen atau unsur berbicara dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut :

1. *Grammar* yang berarti kemampuan mahasiswa dalam memahami native speaker atau pembicara asal yang menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara
2. *Vocabulary* yang berarti pemahaman kosakata atau istilah-istilah dalam berbicara
3. *Comprehension* yang artinya memahami sebuah pertanyaan singkat, pernyataan, penyampaian sebuah ucapan, pengulangan serta mengerti dengan paraphrase
4. *Fluency* yang artinya kecakapan dalam berbicara seperti pembicara asli
5. *Pronunciation* yang artinya aksen atau dialek yang diucapkan

Apabila kelima elemen unsur dalam kemampuan berbicara tersebut terpenuhi maka mahasiswa telah memiliki kemampuan berbicara yang baik. Untuk dapat memenuhi unsur berbicara maka mahasiswa menyenangi mendengar lagu-lagu dengan berbahasa Inggris.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kuantitatif, dengan menggunakan sampel mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sebanyak 20 mahasiswa di STKIP Kusuma Negara Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua variabel, *variable dependen* dan *variable independen*. Variabel independent adalah ketertarikan mahasiswa terhadap lagu dan *variable dependen* adalah kemampuan berbicara. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner ketertarikan mahasiswa terhadap lagu serta test berupa speaking skill. Kuesioner yang diberikan sebanyak 20 pertanyaan yang setiap pertanyaan memiliki jawaban A, B, C dan D, dimana jawaban A yang berarti selalu, B yang berarti sering, C yang berarti kadang-kadang dan D yang berarti tidak pernah dengan skor tertinggi 100 dan skor terendah 25.

Variabel	Indikator
Hubungan antara ketertarikan mahasiswa dengan lagu terhadap kemampuan berbicara	- Frekuensi mendengarkan lagu berbahasa Inggris - Kesenangan atau ketertarikan - Kemauan untuk tertarik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran dengan ketertarikan</li> <li>- Perhatian dengan ketertarikan</li> <li>- Tipe-tipe lagu</li> </ul>
--	--

**Teknik Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner dan tes berbicara maka Dosen melakukan analisa. Adapun tahapan analisa tersebut adalah sebagai berikut :

Dosen melakukan manajemen data yang berarti data yang telah didapatkan kemudian dicek kelengkapannya serta dilakukan penyusunan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Setelah itu dosen melakukan pengklasifikasian, berdasarkan kesenangan yaitu selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Misalnya apakah sering mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Kemudian Dosen melakukan pendeskripsian, yang artinya menggolongkan hasil kuesioner mahasiswa yang senang dan kurang menyenangkan lagu-lagu, lalu melakukan penginterpretasian yang artinya menafsirkan data agar dapat menentukan pemberian skoring atau nilai.

Koefisien korelasi diklasifikasikan dalam tabel dibawah ini menurut Burns (2000:235)

Koefisien	Korelasi
0.90-1.00	Sangat tinggi
0.70-0.90	Tinggi
0.40-0.70	Sedang
0.20-0.40	Rendah
Kurang dari 0.20	Sangat rendah

Koefisien korelasi menunjukkan hubungan antara kedua variable apakah memiliki hubungan yang positif atau negative. Hubungan kedua variable yang kuat dapat digambarkan dengan (+) atau (-). Apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan maka koefisien korelasi adalah (0).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam test berbicara, mahasiswa diberikan waktu lima menit untuk menjelaskan tempat objek wisata secara lisan. Kemudian diberikan kuesioner yang berkaitan dengan ketertarikan mahasiswa dengan lagu-lagu

berbahasa Inggris. Dari tabel dibawah terdapat nilai atau skor minimum mahasiswa 65 untuk tes berbicara dan skor maksimum adalah 86. Sedangkan untuk ketertarikan terhadap lagu berbahasa inggris skor minimum adalah 30 dan skor maksimum adalah 47. Rata-rata kemampuan berbicara adalah 77.95 sedangkan untuk ketertarikan terhadap lagu berbahasa inggris adalah 37.20.

**Statistics**

	Ketertarikan mahasiswa terhadap lagu	Kemampuan Berbicara
N Valid	20	20
Missing	0	0
Mean	37.20	77.95
Median	36.00	78.50
Std. Deviation	4.641	6.168
Variance	21.537	38.050
Minimum	30	65
Maximum	47	86

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kemampuan berbicara adalah 77.95, mahasiswa dengan nilai tertinggi 86 dan nilai terendah 65 dengan standar deviasi adalah 6.168 dan rata-rata ketertarikan mahasiswa terhadap lagu berbahasa inggris adalah 37.20 dengan standar deviasi adalah 4.641. N adalah jumlah sampel sebanyak 20 mahasiswa. Diketahui hubungan antara ketertarikan mahasiswa terhadap kemampuan berbicara dengan nilai Sig. (2-tailed) >0.05 ; yang berarti hypothesis awal diterima. Maksudnya adalah bahwa data berdistribusi normal.

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Ketertarikan mahasiswa terhadap lagu	Kemampuan Berbicara
N	20	20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	37.20
	Std. Deviation	4.641
		6.168
Most Extreme Differences	Absolute	.182
	Positive	.182
	Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z	.815	.642
Asymp. Sig. (2-tailed)	.520	.805

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Setelah melakukan uji normalitas, peneliti melanjutkan dengan mencari hubungan antara ketertarikan mahasiswa dengan lagu berbahasa Inggris dengan kemampuan berbicara.

Correlations

		Ketertarikan mahasiswa terhadap lagu	Kemampuan Berbicara
Ketertarikan mahasiswa terhadap lagu	Pearson Correlation	1	.539
	Sig. (2-tailed)		.014
	N	20	20
Kemampuan Berbicara	Pearson Correlation	.539	1
	Sig. (2-tailed)	.014	
	N	20	20

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasar tabel dia atas, dapat terlihat bahwa koefisien korelasi untuk ketertarikan mahasiswa terhadap lagu berbahasa Inggris adalah 0.539, ini yang berarti *Pearson Product Momen* koefisien korelasi adalah (+) positive korelasi antara ketertarikan mahasiswa terhadap lagu dengan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Kemudian pada tabel terlihat skor signifikan adalah 0.014 dengan kata lain ( $H_a$ ) diterima dan ( $H_0$ ) ditolak. Jika Sig. (2-tailed) adalah  $0.014 < 0.05$ , yang berarti terdapat hubungan antara ketertarikan mahasiswa terhadap lagu dengan kemampuan berbicara bahasa Inggris.

Tujuan dalam penelitian ini adalah menentukan apakah ada hubungan antara ketertarikan mahasiswa dengan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Terdapat hubungan yang positif antara ketertarikan mahasiswa dengan kemampuan berbicara dengan koefisien korelasi  $0.014 < 0.05$ . Tanda positive (+) menunjukkan bahwa semakin tinggi ketertarikan mahasiswa terhadap lagu maka semakin besar nilai kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Lagu memiliki daya tarik tersendiri bagi mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. Kesulitan mahasiswa untuk menghafal kosakata baru akan menghambat mereka dalam memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris. Mahasiswa yang tertarik dengan lagu berbahasa

Inggris cenderung memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris yang baik. Mereka akan banyak mengetahui dan memahami berbagai kosakata serta dapat melafalkan kata-kata sesuai dengan native speaker. Apabila mahasiswa lebih menyukai lagu berbahasa Inggris dengan aksen *British* maka mereka lebih menguasai dialek *British* begitupun dengan aksen Amerika. Dalam penelitian tersebut di dapatkan hasil ada hubungan yang positif koefisien korelasi antara ketertarikan mahasiswa dengan lagu terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris. Mahasiswa yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap lagu berbahasa Inggris maka mereka akan memiliki kemampuan berbicara yang tinggi pula. Agar mahasiswa memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang baik, maka diperlukan kesenangan dalam mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Sehingga mereka dapat menambah kosakata-kosakata baru sehingga terbiasa dan lancar dalam berbicara bahasa Inggris.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Burns, R.B. (2000). *Introduction To Research Methods: 4<sup>th</sup> Edition*. New South Wales: Longman
- [2] Bjorklund, David F. (2005). *Children's Thinking: Cognitive Development and Individual Differences*. Australia: Wadsworth.
- [3] Brewster, J., Ellis, G., & Gurrard, D. (1992). *The Primary English Teacher's Guide*. Penguin English.
- [4] Griffe, D.T. (1990). *Hey Baby! Teaching Short and Slow Songs in the ESL Classroom*. TESL Reporter 23 (4): 64-72
- [5] Harmer, J. (2007). *How to Teach English*. Harlow: Longman.
- [6] Ifadah, Uthimatul dan Siti Aimah. (2012). *Kefektifan lagu sebagai media belajar dalam Pengajaran Pronunciation/Pengucapan*. Seminar Hasil-Hasil Penelitian-LPPM UNIMUS

2012. ISBN : 978-60218809-0-6.  
<http://jurnal.unimus.ac.id>
- [7] Megawati. (2019). *The Correlation Between Students' Anxiety and Speaking Skill at STKIP Kusuma Negara Jakarta (A survey Research First Semester Academic Year 2018/2019)*. Scope: Journal of English Language Teaching Volume 03, Issue 02, March 2019.
- [8] Megawati, M. (2018). Improving The Students' Speaking Skill Through Storytelling Technique Toward Eleventh Grade Students At SMK Swasta Cimanggis. *BRIGHT: A Journal of English Language Teaching, Linguistics and Literature*, 2(1).
- [9] Dzanic, Nihada Delibegovic and Alisa Peijic. (2016). *The Effect of Using Songs on Young Learners and Their Motivation For Learning English*. NETSOL An interdisciplinary Journal Volume 1, issue 2, October 2016, pp 40-54  
<https://www.researchgate.net/publication/312054146>

---

**ANALISIS MEKANISME PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK  
PENGHASILAN BAGI SELEBGRAM**

Oleh

Puspa Amelia Komala Sari<sup>1)</sup>, Waluyo<sup>2)</sup>, Sapto Hermawan<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir. Sutami No. 36, Surakarta

E-mail: <sup>1</sup>[puspaamelia37@student.uns.ac.id](mailto:puspaamelia37@student.uns.ac.id), <sup>2</sup>[waluyo.fh@staff.uns.ac.id](mailto:waluyo.fh@staff.uns.ac.id),  
<sup>3</sup>[saptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id)**Abstract**

Pajak adalah penghasilan yang sangat penting bagi keseimbangan pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai sistem pajak yang diberlakukan untuk selebgram instagram khususnya dalam usaha kegiatan *endorse*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan beberapa sumber literasi dan membahasnya dalam bentuk paragraf. Pajak di Indonesia sendiri sudah semakin berkembang dimana sistemnya mengikuti perkembangan teknologi *online*. Sosial media hari-hari ini mulai menjadi ladang usaha bagi para *influencer* atau selebgram. Kegiatan *endorse* menjadi cara mereka mendapatkan income. Dengan demikian, sistem pajak PPh memungkinkan mereka untuk membayar pajak. *self-assessment* dapat menjadi cara membayar pajak secara mandiri yang mempermudah mereka. Di Indonesia, orang atau selebgram jika tidak membayar maka akan dikenakan hukum pidana dan denda. Tentunya pekerjaan sebagai selebgram di Indonesia adalah pekerjaan yang memberikan income besar hingga harus diwajibkan pajak. Kenyataannya, masih banyak para selebgram yang tidak patuh pajak dengan menyembunyikan penghasilannya yang bersumber dari *endorse* kerjasama domestik dan luar negeri.

**Keywords: Selebgram, Pajak Penghasilan, Instagram****PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang memiliki makna bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Maka seluruh warga negara wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan dan hukum adalah konsep yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam.<sup>1</sup> Seperti yang sudah kita ketahui bahwa terdapat banyak macam pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak penghasilan

21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.<sup>2</sup>

Ketentuan perpajakan telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu “yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan dan bentuk usaha tetap”. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak (WP). Subjek pajak menjadi WP bila telah menerima

penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Fenomena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat meningkatnya penggunaan internet secara mendunia terutama Indonesia. Jumlah pengguna Instagram Indonesia per Juli 2021 sebesar 93 juta tiga peringkat di bawah pengguna Instagram India sebesar 180 berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Digital yang dikeluarkan oleh *Statista Research Department* (Statista, 2021).<sup>3</sup> Laporan ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia sebanyak 170 juta pengguna dengan persentase *platforms* media sosial yang paling aktif yakni *youtube* sebanyak 93,8%, *whatsapp* sebanyak 87,7%, *intagram* sebanyak 86,6% dan *facebook* sebanyak 85,5%.<sup>4</sup> Survei yang dilakukan oleh IPSOS atas sampel representatif (berdasar usia dan jenis kelamin) dengan komposisi 3.012 pengguna Instagram (*Instagrammer*) usia >13 tahun di Indonesia, 502 pengguna profil bisnis Instagram dari usaha kecil dan menengah (< 250 karyawan) menunjukkan hasil bahwa Instagram ialah salah satu medium bisnis populer digunakan di Indonesia dengan persentase 87% UKM Indonesia yang disurvei setuju bahwa penjualan mereka meningkat berkat Instagram, 82% pengusaha muda (dibawah 35 tahun) setuju bahwa Instagram mendongkrak pencapaian target.<sup>5</sup>

Meningkatnya penggunaan Instagram untuk profil bisnis membuat adanya kemunculan sebuah profesi baru yang disebut dengan Selebriti Instagram (*selebgram*). Kemunculan *selebgram* itu sendiri merupakan jawaban dari kerisauan para pemilik bisnis dari kalangan bawah sampai menengah keatas sebab seorang *selebgram* adalah seseorang yang dapat mempromosikan suatu produk atau jasa dengan *fee* atau bayaran yang tidak terlalu tinggi dan jangkauan untuk mensasar target pasar pun tinggi. *Selebgram* dituntut untuk memiliki ide dan kreativitas yang tinggi untuk memasarkan produk dari penyedia barang atau

jasa tersebut, seperti kemampuan fotografi, *editing* dan *public speaking* yang baik.

Selebgram mendapatkan pendapatan pada umumnya bersumber dari *Endorsement* yang di tawarkan oleh selebgram. *Endorsement* sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan selebgram melalui promosi produk atau jasa dengan ulasan positif dengan memposting foto atau video produk atau jasa melalui akun Instagram miliknya. Pendapatan yang diperoleh dari seorang selebgram dari kegiatan *endorsement* inilah yang menjadi perhatian Direktorat Jendral Pajak sebab penghasilan dari selebgram ini berpotensi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang disalurkan melalui adanya pemungutan pajak.<sup>6</sup>

Sistem pemungutan di Indonesia menganut *Self Assesment System*, yakni dimana untuk perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak diberikan tanggung jawab sepenuhnya oleh para Wajib Pajak. Oleh Karena itu penghasilan *endorsement* yang diperoleh selebgram akan dihitung sendiri dan akan dilaporkan dalam SPT Tahunan. Sistem pemungutan pajak dengan *self assesment system* berdampak pada kurangnya kesadaran dan kepatuhan Selebgram dalam membayar pajak atas penghasilannya. Selebgram yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sudah seharusnya menjadi Wajib Pajak, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk dalam hal membayar pajak.

Saat ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki suatu sistem yang disebut dengan SONETA atau *Social Network Analytics* yang digunakan untuk menganalisis penyandingan data yang dapat terintegrasi pada setiap media sosial Wajib Pajak baik untuk Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).<sup>7</sup> Namun pada faktanya sistem yang telah dibuat dan dijalankan sejak tahun 2018 tersebut sampai saat ini penggunaannya baru dilaksanakan secara manual dan belum terintegrasi pada masing-masing KPP.

Sedangkan apabila DJP dapat memaksimalkan penggunaan SOETA maka dengan mudah DJP dapat mengawasi pengenaan pajak bagi selebgram.<sup>8</sup> Berbeda dengan Singapura yang menggunakan *Essential Tax Information* yang diterbitkan oleh *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*.

Pengaturan mengenai pajak *endorsement* yang tercantum dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan masih sulit untuk diterapkan karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Pemerintah memiliki peran penting dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan pemerintah juga perlu melakukan pembaruan terhadap hukum sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sistem pajak yang sudah canggih dalam sistem online ternyata masih dapat dihindari. Tidak jarang beberapa orang terkenal yang bekerja di dunia digital mengemplang pajak untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji mengenai mekanisme pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan bagi selebgram.

## LANDASAN TEORI

Hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Menurut Satjipto Rahardjo, dengan adanya penegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>9</sup> Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan penegakkan hukum, apabila pelaksanaan hukum tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku maka penegakkan hukum akan diterapkan.

### Tinjauan Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soeparman Soemahamidjaja berpendapat bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa (pemerintah) berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 23A yang menyatakan: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*" Artinya setiap pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh negara kepada warga negara (wajib pajak) untuk keperluan negara harus diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa "*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut beberapa system antara lain<sup>11</sup>: *Official Assessment System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

- a) *Self assessment system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- b) *With Holding System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Selebgram atau akronim dari selebritis dan Instagram merupakan seseorang yang dikenal oleh masyarakat umum melalui platform Instagram. Selebgram memiliki peran yang sama dengan selebritis hanya berbeda penggunaan media saja. Para pengikut yang dimiliki oleh selebgram biasanya menjadikan selebgram tersebut sebagai acuan dalam berbusana maupun membeli produk produk yang digunakan oleh selebgram tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer maupun sekunder sehingga dalam penelitian ini dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sifat penelitian hukum adalah preskriptif dan terapan yaitu menelaah instrument dalam hukum yang digunakan untuk melaksanakan aturan hukum.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan *library research* (studi kepustakaan) dengan sumber data yang digunakan yaitu wawancara di Direktorat Jenderal Pajak Kota Surakarta serta melakukan wawancara dengan beberapa

responden selebgram melalui *platform* zoom. Penelitian menggunakan teknik analisis bahan hukum bersifat deduktif, dengan menganalisis data yang bersumber dari studi kepustakaan dan dari hasil wawancara di lapangan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang nantinya akan dideskripsikan melalui penggambaran berdasarkan realita di lapangan sehingga dapat diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum pemungutan PPh di Indonesia diatur dalam UU PPh, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 1 UU PPh mendefinisikan Pajak Penghasilan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa PPh merupakan pajak subjektif yang berarti pajak untuk dipikul sendiri dan tidak bisa dilimpahkan kepada subjek lainnya. Subjek PPh akan dikenakan pajak apabila ada objek PPh, yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Subjek PPh yang telah mendapatkan penghasilan akan berubah menjadi Wajib Pajak PPh.

Pada dasarnya, UU PPh di Indonesia mengadopsi dua prinsip pemajakan yang berlaku secara umum, yaitu *global taxation system* dan *schedular taxation system* (Supramono, 2010). *Global taxation system* dalam UU PPh di Indonesia diejawantahkan dalam bentuk PPh bersifat tidak final. Pengadopsian prinsip *global taxation system* tercermin dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU PPh, yaitu bahwa Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal *a quo*, pajak akan tetap

dikenakan dengan tidak memperhatikan asal muasal penghasilan tersebut

Dasar pemungutan PPh (*tax base income*) adalah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak (PKP), yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan (*tax reliefs*). Tarif PPh digunakan bersifat umum dan progresif. Tujuan dari tarif progresif untuk mencapai suatu keadilan (*equality*).

Prinsip *schedular taxation system* dalam UU PPh di Indonesia diejawantahkan dalam bentuk PPh bersifat final. Pengadopsian prinsip *schedular taxation system* secara gamblang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Prinsip *schedular tax system* tidak memperkenankan pengurangan yang diperbolehkan (*tax reliefs*) yang berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Struktur tarif PPh yang digunakan adalah proporsional yang berarti persentase tetap dan tidak berubah-ubah dan khusus untuk kategori penghasilan tersebut.<sup>12</sup> Terkait dengan timbulnya utang Pajak Penghasilan disebabkan karena adanya *tatbestand*, yaitu rangkaian perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Ditinjau dari timbulnya utang Pajak Penghasilan, pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan terhadap selebgram termasuk ke dalam klasifikasi utang pajak yang timbul karena perbuatan. Artinya, penghasilan yang menimbulkan utang pajak ada karena perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal ini menjalankan usaha promosi yang dilakukan melalui sosial media dalam hal ini, Instagram. Pajak yang diterima dari pengguna akun media yang menjual barang maupun menawarkan jasa atau dikenal selebgram dari penjual lain dan mempromosikan di media sosial diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan cara setiap kegiatan ekonomi endorse selebgram media sosial. Semakin tahun aktivitas masyarakat di media sosial semakin meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan

APJII yang menyatakan setiap tahunnya selalu ada orang yang menjadi artis di *platform* ini atau orang yang memiliki, sehingga perusahaan tertarik untuk menggunakan akun mereka di medsos untuk mempromosikan produk dagangannya.<sup>13</sup>

Skema yang berlaku terhadap selebgram tidak jauh berbeda dengan pajak dari Sales Promotion Girl (SPG). Sehingga skema pengenaan pajak yang dilakukan adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) (Arianti, 2015). Pekerjaan selebgram ini adalah mempromosikan suatu produk tertentu dengan *platform* instagram miliknya. Karena *followers* yang cenderung tinggi, selebgram memamerkan brand atau produk tertentu guna menyampaikan suatu produk ke masyarakat.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pemungutan PPh bersifat final diatur dengan Peraturan Pemerintah. Frasa “diatur dengan” memiliki konsekuensi yuridis harus diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Sehingga, Indikator paling mudah untuk membedakan suatu penghasilan dikenakan PPh bersifat tidak final atau final adalah dilihat dari jenis peraturan yang mengatur mengenai penghasilan tersebut apakah diatur dengan Peraturan Pemerintah atau tidak. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diatur juga di dalam Peraturan Menteri Keuangan sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 15 UU PPh, yaitu:

- a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/201 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang

Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.

- c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
- e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerja sama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (“*Built Operate And Transfer*”).

Penghasilan yang oleh selebgram pada dasarnya diakomodasi diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan sehubungan dengan PPh Pasal 22 atau Keputusan Menteri Keuangan sehubungan dengan PPh Pasal 15. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasal 2:<sup>14</sup>

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final
- 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
  - b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah

dalam 1 (satu) tahun pajak. Pasal 3 (Nurhayat, 2017):

- c) Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar pertahun dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif hanya 1% dari peredaran bruto. Sesuai dengan pasal 4 peraturan pajak Pajak wajib dikenakan kepada mereka yang penghasilannya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), jadi kalau penghasilan dari selebgram dan youtuber masih di bawah PTKP perbulan tidak perlu dikenakan pajak penghasilan. Selama memenuhi syarat maka harus dikenakan pajak penghasilan.<sup>15</sup>

Pernyataan Administrasi Negara Perpajakan Kementerian Keuangan memandang fenomena selebritis sebagai pajak potensial bagi wajib pajak orang pribadi (WP) yang berpenghasilan. Pajak yang dihasilkan oleh imbalan selebritas atas layanan mereka ketika mereka mempromosikan barang yang dikirim oleh toko *online* dalam bentuk uang atau barang. Adapun pajak yang dibayarkan adalah Pajak Penghasilan (PPh), karena penghasilan yang diperoleh selebritis melalui kegiatan *endorsement* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sumber pajak penghasilan lainnya, namun cara yang digunakan untuk memperoleh penghasilan berbeda yaitu pajak yang dibayarkan melalui media sosial Instagram. Fungsi tersebut meliputi fungsi *Regularend* yaitu pajak yang dibayarkan oleh program kepada pemerintah khususnya Administrasi Negara Perpajakan dan Kementerian Keuangan, dan diharapkan program tersebut dapat memenuhi peraturan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Mekanisme pemungutan pajak bagi selebgram dibagi menjadi dua. Pertama, apabila dalam proses pembayaran tersebut melalui *management*, maka pajak tersebut adalah Pajak Final sebagaimana dalam pasal 23 Undang-

Undang Pajak Penghasilan.<sup>16</sup> Kedua, jika *onlineshop* tersebut melakukan pembayaran langsung kepada Selebgram yang bersangkutan, maka kewajiban bagi selebgram tersebut untuk melaporkan penghasilan yang diterima di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di akhir tahun, diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan hal ini disebut dengan Pajak Tidak Final.

Menurut Direktur Eksekutif *Center For Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Penghitungan pajak bagi Selebgram tidak berbeda dengan wajib pajak lainnya, mereka dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan Pasal 21<sup>17</sup>. Selebgram wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika tidak mempunyai NPWP harus segera mendaftar dan wajib membayar pajak ketika total penghasilan mereka dari kegiatan *Endrose* melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sekitar Rp. 4.500.000,- per bulan. Penghasilan yang di hasilkan apabila mencapai Rp.50.000.000,- per tahun, maka akan dikenakan tarif sebesar 5% , penghasilan diatas Rp.50.000.000,- hingga Rp. 250.000.000,- per tahun dikenai tarif 15%, penghasilan diatas Rp. 250.000.000,- hingga Rp. 500.000.000,- per tahun dikenakan tarif 25%, dan penghasilan diatas Rp. 500.000.000,- per tahun dikenakan tarif 30%, apabila wajib pajak yang diketahui tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.<sup>18</sup>

Kemajuan teknologi kini semakin berkembang cepat membuat jarak yang jauh terasa dekat, Selebgram akan sulit menolak ketika mendapatkan tawaran *Endorsement* dari luar negeri, banyak selebgram, mengungkapkan bahwa selain dengan *olshop* indonesia mereka juga kerjasama dengan *onlineshop* maupun perusahaan luar negeri seperti Singapura, Australia, Swiss dan Hongkong. Kurang lebih tugasnya sama yaitu mempromosikan barang berupa jam tangan, dompet, tas, pakaian, serta aksesoris dari luar negeri. Sistemnya bukan merupakan bayaran

dengan uang, namun selebgram diberikan keleluasaan untuk memilih barang yang disukai sebagai imbalan jasa telah melakukan promosi, sebagaimana telah diatur dalam atau perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>19</sup> Asas pemungutan pajak yang cocok diterapkan dalam kasus ini adalah Asas Kebangsaan, yaitu setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia<sup>19</sup> dan dikenakan Pasal 26 ayat 1 huruf d Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan tersebut diklasifikasikan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dikenakan kewajiban untuk memotong pajak sebesar 20% (dua Puluh Persen) dari jumlah bruto.

Sedangkan untuk *Endorsement* yang ditujukan kepada Selebgram di luar negeri, dapat dikenakan pajak dengan Asas Sumber yaitu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara maka negara tersebut hendak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.<sup>20</sup> Hal tersebut merupakan sebageian kecil dari kegiatan *Endorse* baik dari dalam maupun dari luar negeri, perbedaan waktu dan tempat sudah tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk melakukan *endorse*, berbekal *smartphone* yang dimilikinya semua hal yang sebelumnya dianggap mustahil sekarang menjadi mudah, perlu ketelitian dan kecermatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan untuk melacak setiap kegiatan *Endorse* yang khususnya terjadi di wilayah Indonesia. Mengawasi Aktifitas *Endorsement* dari dan keluar negeri bukanlah perkara mudah perlu kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan pihak lain yang bersangkutan, sehingga kedepannya aktifitas *Endorsement* dari dan ke luar negeri dapat dilacak, sehingga mempermudah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keunagan dalam

memungut pajak hasil dari kegiatan *Endorsement*.

Upaya pemerintah dalam pemungutan pajak Selebgram terbagi menjadi dua skema yaitu *Withholding System* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu *Self assessment system* yaitu suatu sistem yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.<sup>[21]</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sistem pajak yang digunakan untuk pajak penghasilan bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. Sistem pemungutan pajak yang diberlakukan kepada selebgram merupakan hutang pajak akibat dari tindakan yaitu *endorsement*. Selebgram wajib membayar pajak ketika total penghasilan dari *endorsement* melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Upaya pemerintah dalam pemungutan pajak selebgram terbagi menjadi dua skema yaitu *withholding system* dan *self assessment*.

### Saran

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa saran yang diberikan. Bagi para pembaca, disarankan agar membaca dengan baik penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai sistem pajak. Untuk para peneliti, disarankan agar penelitian ini bisa menjadi acuan serta pendukung penelitian yang lainnya demi menunjang penelitian yang baru yang berkaitan dengan pemungutan pajak *endrose* yang dibebankan kepada para selebgram.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Ilyas, B. W., Rudy, S., 2007, Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

- [2] Aristanti W., 2011, Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map, ALFABETA, Bandung.
- [3] Statista, 2021, Countries with the most Instagram users 2021, (<https://www.statista.com/statistic/578364/countries-with-most-instagram-users>), diakses tgl 17 September 2021.
- [4] Kemp, Simon., 2021, Digital 2021 : Indonesia, Global Digital Insights, (<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>), diakses tgl 8 Agustus 2021.
- [5] Anonim, 2018, Danpak Instagram pada Usaha di Indonesia, [https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-11/instagram\\_report\\_bahasa\\_version.pdf](https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-11/instagram_report_bahasa_version.pdf), diakses tgl 9 April 2021.
- [6] Novitasari, I., 2020, Selebgram Dikenakan Pajak?, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, vol 3, hal 54-68.
- [7] Vikansari, N. P. S., & Parsa, I. W. 2019. Pengawasan penenaan pajak penghasilan terhadap youtubers sebagai pelaku influencer di platform media sosial youtube. 1–15.
- [8] Asmara, C. G. 2019. Hai Selebgram yang Banyak Follower, Ditjen Pajak Mengintaimu!, (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190425093036-17-68748/haiselebgram-yang-banyak-follower-ditjen-pajak-mengintaimu>), diakses tgl 25 Agustus 2019.
- [9] Satjipto, R., 2009, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.
- [10] Saidi, M. D., 2010, Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta.
- [11] Waluyo, W. B. I., 2005, Perpajakan Indonesia, Salemba 4, Jakarta.
- [12] Soemitro, R., 2010, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Eresco, Jakarta.

- [13] Ariyanti, S. L., 2017, Hubungan Forgiveness dan Kecerdasan Emosi dengan Psychological Well-Being pada Mahasiswa, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- [14] Dian, A, 2015, PPh Final dan PPh Tidak Final,  
(<http://ichakanya.blogspot.com/2015/09/pph-final-dan-pph-tidak-final.html>), diakses tgl 14 September 2021.
- [15] Nurhayat, W, 2017, Hitung-hitung Besaran Pajak yang Dikenakan Selebgram,  
(<https://kumparan.com/@kumparannews/iitung-hitungan-besaran-pajak-yang-dikenakan-ke-selebgram>), diakses tgl 8 Oktober 2021.
- [16] Putri, R, D, 2018, Menghitung Pajak Youtuber dan Selebgram,  
(<https://tirto.id/menghitung-pajak-youtuber-dan-selebgram-cESF>), diakses tgl 7 September 2021.
- [17] Siahaan, M, P, 2016, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta.
- [18] Antini, 2016, Asas-asas Pemungutan Pajak,  
(<https://wordpress.com/2016/01/17/asas-asas-pemungutan-pajak>), diakses tgl 20 November 2021.
- [19] Ilyas, W, B., Richard, B, 2007, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- [20] Dwinanda, R., 2016, Dirjen Pajak Kaji Mekanisme Pengenaan Pajak Selebgram,  
(<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/10/14/of088t414-dirjen-pajak-kaji-mekanisme-pengenaan-pajak-selebgram>), diakses tgl 28 Agustus 2021.
- [21] Jefriando, M., 2016, Begini Skema Pengenaan Pajak Selebgram,  
(<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3319905/begini-skema-pengenaan-pajak-selebgram>), diakses tgl 15 September 2021.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

---

**PENINGKATAN KERJASAMA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK PADA MATA KULIAH KAPITA SELEKTA FISIKA SEKOLAH**

Oleh

Indica Yona Okyranida

Pendidikan Fisika, Universitas Indraprasta PGRI

E-mail: [indicayona@gmail.com](mailto:indicayona@gmail.com)**Abstract**

Penelitian ini merupakan PTK (Penelitian Tindak Kelas) yang diterapkan pada mahasiswa semester 5 tahun ajaran 2021/2022 dengan mata kuliah kapita selekta fisika sekolah. Rendahnya tingkat kerjasama mahasiswa pada pelaksanaan pembelajaran daring memicu sikap individualis antar sesama yang menyebabkan rendahnya kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran. Pengambilan data menggunakan observasi dan angket. Pembelajaran proyek yang dilakukan pada penelitian ini mampu memberikan solusi akan hal tersebut, peningkatan hasil Kerjasama mahasiswa pada siklus I dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 64,09 (Siklus I) dan 81,09 (Siklus II), meskipun dilakukan pembelajaran secara *daring*. Interaksi dalam bekerjasama antar mahasiswa sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

**Keywords: Kerjasama, Model Pembelajaran, Proyek, Kapita Selekt Fisika****PENDAHULUAN**

Mata kuliah kapita selekta fisika sekolah memiliki 2 sks dan diajarkan untuk mahasiswa pendidikan fisika Universitas Indraprasta PGRI semester 5. Mata kuliah ini berisikan tentang solusi yang diberikan oleh calon pendidik untuk menghadapi materi fisika di sekolah agar tercapai tujuan pembelajaran. Tujuan dari mata kuliah ini untuk menciptakan tenaga pendidik yang memiliki solusi dari permasalahan yang sering dihadapi saat melakukan pembelajaran di sekolah.

Pembelajaran fisika disekolah masih memiliki berbagai kendala karena banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran fisika. Alasan siswa tidak menyukai pembelajaran fisika karena materinya sulit, abstrak, banyak hitungannya, dan pemahaman konsep sangat dibutuhkan. Pendidik harus memiliki solusi dari setiap permasalahan yang menjadi kendala sulitnya fisika disekolah yang dapat memicu rendahnya minat dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada mata kuliah kapita selekta sekolah dengan sistem pembelajaran yang

dilakukan secara *daring* karena pandemi *covid-19* yang masih mewabah, banyak mahasiswa yang tidak paham akan materi yang diajarkan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan jaringan internet, sehingga harus mencari letak tempat yang memiliki kestabilan jaringan (Zhafira, dkk, 2020) [1]. Pada saat pembelajaran berlangsung secara online menggunakan *google meet*, terdapat mahasiswa yang *offcamera* dan tidak memperhatikan pembelajaran sehingga menyebabkan tidak paham akan materi pembelajaran.

Pada saat diskusi kelompok menggunakan *whatsapp group* banyak mahasiswa yang tidak merespon, sehingga pembelajaran sangat sulit terkendali dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kurangnya rasa percaya diri saat mengemukakan pendapat dan menyebabkan tidak ada kesinambungan antara materi dan pendapat mahasiswa. Kurangnya interaksi antar sesama mahasiswa, sehingga tidak terjalin komunikasi yang bagus dan mengakibatkan sifat individualis muncul.

Hal tersebut mempengaruhi hasil belajar mahasiswa menjadi rendah karena

pengemasam pembelajaran kapita selekta sekolah masih monoton dengan menggunakan ceramah. Diperlukan model pembelajaran yang sesuai untuk memunculkan kerjasama mahasiswa. Kerjasama memiliki aspek-aspek kemampuan keterampilan berkomunikasi lisan, berkoordinasi, berkooperasi, dan saling tukar informasi antar kelompok.

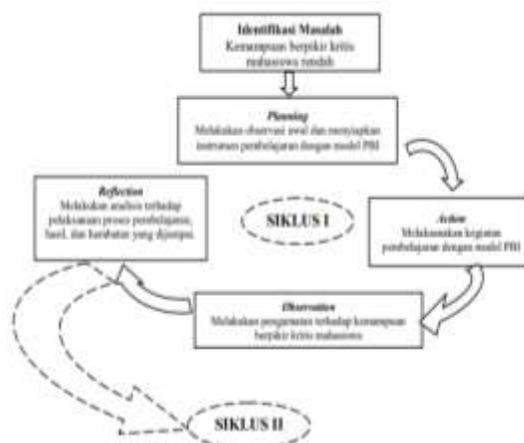
Pelaksanaan pembelajaran kapita selekta fisika sekolah seharusnya memunculkan pembelajaran yang aktif dalam mengemukakan pendapat, kritis dalam menanggapi pendapat, saling bekerjasama antar siswa dalam mencari solusi dalam permasalahan yang didapat, dan dapat merealisasikan solusi tersebut. Model pembelajaran berbasis proyek dalam melakukan proyek, mahasiswa di kelas dapat dibagi menjadi dua atau tiga tim dengan masing-masing tim bertanggung jawab untuk menangani keseluruhan masalah serta menghasilkan benda-benda yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.

Sintak-sintak model pembelajaran berbasis proyek yaitu 1) menentukan pertanyaan mendasar, 2) mendesain perencanaan proyek, 3) menyusun jadwal, 4) memonitor kemajuan proyek, 5) menguji proses dan hasil belajar. 6) evaluasi pengalaman.

Pembelajaran proyek memberikan pengaruh cukup baik untuk diterapkan pada pembelajaran fisika (Kristanti& Subiki, 20 17) [2]. Pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan pengalaman langsung pada mahasiswa, sehingga memberikan pembelajaran bermakna. Mulai dari mahasiswa menemukan permasalahan, dilanjutkan dengan mengkaji permasalahan melalui sumber penelitian yang ada, selanjutnya dapat memberikan solusi dari permasalahan yang tersebut. Sikap Kerjasama dapat meningkatkan hasil proyek belajar mahasiswa sehingga dapat diaplikasikan menjadi solusi bagi permasalahan pembelajaran fisika di sekolah.

## METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan fisika yang menempuh mata kuliah kapita selekta fisika sekolah tahun akademik 2021/2022. PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung (Warso, 2013)[3]. Setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus yang prosedur percobaan dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1.** Alur Pelaksanaan PTK

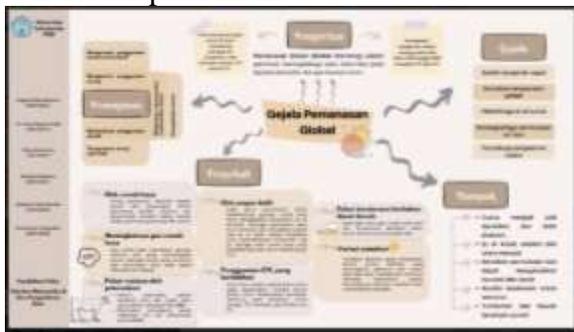
Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi dan angket. Instrument yang diberikan berupa lembar observasi untuk mengetahui hasil proyek mahasiswa dan angket untuk mengetahui kerjasama mahasiswa terhadap proyek yang mereka hasilkan. Tolak ukur dari hasil penelitian ini terdapat pada hasil proyek yang mahasiswa hasilkan dan Kerjasama dalam pelaksanaan proyek yang semakin baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Siklus pertama dosen memberikan arahan dan menjelaskan tujuan model pembelajaran proyek beserta langka-langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Pada siklus I terjadi kesulitan yang dialami oleh mahasiswa dalam melakukan kerjasama karena dilakukan secara daring melalui *Whatshapp Group* dan *Gmeet*. Dosen memantau jalannya diskusi dan hanya ada 3 kelompok yang aktif sementara terdapat

10 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 mahasiswa. Dalam masing-masing kelompok hanya 1 sampai 2 orang saja yang aktif dalam melakukan diskusi. Hasil yang diperoleh dari siklus I dijadikan refleksi yang kemudian dilanjutkan pembelajaran pada siklus II.

Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek pada siklus II berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Mahasiswa lebih aktif dalam kerjasama dalam membuat proyek yang dibuatnya. Hasil proyek yang dihasilkan bervariasi yaitu peta konsep, video pembelajaran, modul pembelajaran *flipbook*, dan modul praktikum.



Gambar 2. Proyek Peta Konsep

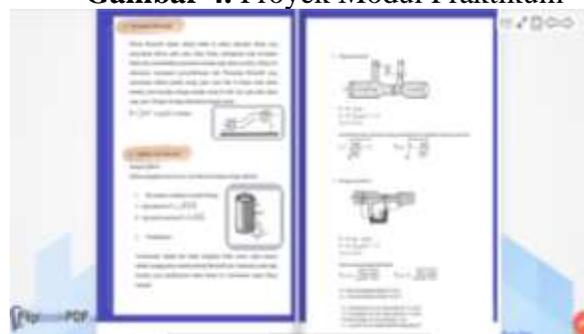


Gambar 3. Proyek Video Pembelajaran

Tugas proyek dibuat sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan mahasiswa di sekolah yang dituju dengan menganalisis hal yang terjadi disana. Observasi dilakukan dengan wawancara secara langsung ataupun secara virtual dengan guru sekolah untuk menentukan solusi yang digunakan untuk sekolah. Solusi yang diberikan berupa pengembangan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan.



Gambar 4. Proyek Modul Praktikum



Gambar 5. Proyek Flipbook

Hasil siklus I ke siklus II mengalami peningkatan seperti yang disajikan dalam tabel 1 hasil kerjasama mahasiswa. Terdapat peningkatan dari 10 aspek yang dikembangkan dalam penilaian dengan jumlah rata-rata pada siklus I 64,09 dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata 81,09. Peningkatan hasil yang diperoleh pada penilaian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kerjasama antar mahasiswa.

Pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian (Mulyana, 2020) [4]. Dalam kondisi pembelajaran secara daring kerjasama yang dapat memicu hubungan timbal balik antar mahasiswa sangat dibutuhkan karena dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa.

Tabel 1. Hasil Kerjasama Mahasiswa

No.	Komponen	Rata-rata	
		Siklus I	Siklus II

1.	Bertanya	67,8	78,2
2.	Menjawab	65,2	77,1
3.	Mengemukakan pendapat	62,3	80,1
4.	Menanggapi pendapat	60,8	81,8
5.	Mempresentasikan hasil diskusi	61,1	82,3
6.	Interaksi dengan sesama mahasiswa	66,5	84,4
7.	Ketepatan dalam pemilihan proyek	61,1	78,8
8.	Mengidentifikasi permasalahan	68,8	88,1
9.	Ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas	66,1	79,9
10.	Membuat kesimpulan	61,2	80,2
Jumlah		640,9	810,9
Rata-rata		64,09	81,09

Sumber: Dokumen Penelitian



Gambar 6. Diagram Batang Hasil Siklus I dan Siklus II

Sumber: hasil pengolahan data

Hasil penelitian mengalami peningkatan dalam pelaksanaan dikarenakan 3 faktor yang pertama mahasiswa antusias dalam melakukan tugas proyek berupa observasi langsung ke sekolah dan menentukan solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Kedua, mahasiswa antusias dalam pelaksanaan pelaporan hasil observasi karena dilakukan diberbagai daerah seperti Jakarta, Bekasi, Sumatera Barat, Depok, dan Madiun. Pelaksanaan observasi dilakukan diberbagai daerah karena mahasiswa masih melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga observasi dilakukan di masing-masing daerah. Pembelajaran menggunakan metode proyek memberikan dampak yang lebih baik daripada metode eksperimen karena memberikan pengalaman langsung data dilakukannya pembelajaran tersebut (Okyranida, dkk, 2015)[5].

Ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil dari proyek semaksimal mungkin karena pada tiap proyek tidak dibatasi penentuan materi dan media. Mahasiswa mampu berkreasi dengan hasil observasi yang dituangkan pada hasil karya proyek. Proyek dapat mengajarkan mahasiswa menjadi lebih mudah dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan pada saat melakukan observasi, sehingga dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa situasi dan kondisi yang ada (Latifah&Kusmanto, 2018)[6].

Pembelajaran berbasis proyek dapat dipadukan dengan pembelajaran kooperatif ataupun pembelajaran yang lainnya sehingga dapat memunculkan rasa tanggung jawab peserta didik (Zatturahmi, dkk, 2017)[7]. Tanggung jawab mahasiswa berhubungan erat dengan sikap Kerjasama yang dilakukan saat melakukan observasi sampai mengumpulkan tugas proyek. Hasil proyek mahasiswa juga dapat mencerminkan Kerjasama yang dibangun saat pembuatan proyek. Penerapan Kerjasama dalam hal yang positif merupakan bekal yang harus tetap dikembangkan bagi tiap individual.

Dosen dan tenaga pendidik wajib memfasilitasi pendidikan yang baik untuk para peserta didik. Karakter yang ditamamkan saat pembelajaran sangat penting untuk perkembangan mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja. Media pembelajaran dapat dikembangkan sebagai sarana dalam mengembangkan kreativitas peserta didik (Novianto, 2018). [8]

**PENUTUP**  
**Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini dapat meningkatkan hasil Kerjasama antar mahasiswa dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 64,09 (Siklus I) dan 81,09 (Siklus II), meskipun dilakukan pembelajaran secara daring. Interaksi antar mahasiswa sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kelebihan hasil

yang diperoleh mahasiswa dapat disebarkan ke sekolah dalam sebagai solusi pembelajaran. Kekurangan dalam penelitian ini hasil dari karya mahasiswa dapat dipraktekkan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran secara langsung, namun belum dapat terlaksana karena pandemi covid-19.

#### Saran

Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut untuk menutup kekurangan penelitian ini dengan mengembangkan pada mata kuliah lain dan dapat dikembangkan pada tingkatan sekolah dalam jenjang lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zhafira, N.H., Ertika, Y. and Chairiyaton, C., 2020. Persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan daring sebagai sarana pembelajaran. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 4(1).
- [2] Kristanti, Y.D. and Subiki, S., 2017. Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning Model) Pada Pembelajaran Fisika Disma. *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 5(2), pp.122-128.
- [3] Warso, Agus Wasisto Dwi Doso. 2013. *Publikasi Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Graha Cendekia
- [4] Mulyana, A., 2020. PENGERTIAN DAN SINTAKS MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PBP). JELAJAH INFORMASI.
- [5] Okyranida, I.Y., 2015. Pembelajaran Fisika Problem Based Learning (PBL) Menggunakan Metode Eksperimen dan Metode Proyek Ditinjau dari Kemampuan Berpikir Abstrak dan Kemampuan Berpikir Kreatif pada Materi Cahaya SMP/MTs Kelas VIII (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- [6] Latifah, E. and Kuswanto, H., 2018. Pengembangan Blog sebagai Media Pembelajaran Berbasis Proyek. *Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains*, 4(1), pp.93-104.
- [7] Zaturrahmi, Z., Hamdi, H. and Ratnawulan, R., 2017. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe stad berbasis proyek membuat alat eksperimen sederhana untuk meningkatkan aktivitas belajar dan kompetensi fisika siswa di kelas XI TKR SMK Adzkie Padang. *Gravity: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Fisika*, 3(2).
- [8] Novianto, N.K., Masykuri, M. and Sukarmin, S., 2018. Pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis proyek (project based learning) pada materi fluida statis untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa kelas X SMA/MA. *Inkuiri: Jurnal Pendidikan IPA*, 7(1), pp.81-92.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

---

**UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR EKONOMI  
DENGAN METODE PEMBELAJARAN INQUIRI**

Oleh

Latifah<sup>1)</sup>, Cita Ayni Putri Silalahi<sup>2)</sup><sup>1,2</sup>Pendidikan Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah MedanE-mail:<sup>1</sup>[latifah310598@gmail.com](mailto:latifah310598@gmail.com)**Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi dengan metode pembelajaran inquiri. Metode pembelajaran inquiri adalah cara penyampaian bahan pengajaran dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mengembangkan potensi intelektualnya dalam jalinan kegiatan yang disusunnya sendiri untuk menemukan sesuatu sebagai jawaban yang menyakinkan terhadap permasalahan yang dihadapkan kepada melalui proses pelacakan data dan informasi serta pemikiran yang logis, kritis dan sistematis. Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research yang dilaksanakan di perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara analisis kuantitatif untuk menghitung presentase ketuntasannya. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari ketiga penelitian bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap jurnalnya. Data dari sampel 3 buah skripsi yang diteliti oleh Ummu Arifah R, Muhammad Fadli Syahputra dan M.Yusril, diperoleh nilai rata-rata sebesar 80,47. Kesimpulan penelitian ini adalah metode pembelajaran Inquiri dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi.

**Keywords: Hasil Belajar, Metode Pembelajaran, Inquiri.****PENDAHULUAN**

Dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus mempunyai kemampuan mengajar secara professional dan terampil dalam menggunakan metode dan media yang tepat. Seorang guru harus menguasai materi yang akan disampaikan dan juga harus pandai menciptakan situasi dan kondisi belajar mengajar yang kondusif serta harus berperan aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga peserta didik dapat menjadi pribadi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, lembaga pendidikan berusaha meningkatkan kualitas dan proses hasil pembelajaran. Usaha-usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain mengembangkan media pembelajaran, menerapkan media pembelajaran, serta memilih dan menetapkan jenis media pembelajaran yang akan digunakan. Pengembangan dan penerapan

media pembelajaran diharapkan dapat memberikan motivasi belajar terhadap siswa sehingga berdampak pula pada prestasi belajarnya. Hasil belajar yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik (Mansur, 2018).

Meningkatnya motivasi siswa ketika mengikuti pembelajaran, tentu akan berdampak pada hasil belajarnya. Menurut (Achdiyat & Utomo, 2018) bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka setelah menjalani proses pembelajaran.. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada pengalaman langsung.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan metode pembelajaran Inquiri. Metode Inquiri adalah cara

penyampaian bahan pengajaran dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mengembangkan potensi intelektualnya dalam jalinan kegiatan yang disusunnya sendiri untuk menemukan sesuatu sebagai jawaban yang menyakinkan terhadap permasalahan yang dihadapkan kepada melalui proses pelacakan data dan informasi serta pemikiran yang logis, kritis dan sistematis. Menurut Sri Anitah (2011), Bahwa metode inquiri adalah bentuk perluasan metode *discovery* yang berarti proses mental dalam mendorong peserta didik untuk menjawab problema, merancang eksperimen, mengumpulkan data, melaksanakan eksperimen, membuat kesimpulan serta mampu untuk menganalisisnya. Sedangkan menurut (W. Gulo:2002) Metode inquiri adalah cara belajar dengan menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri dan mengembangkan keaktifannya untuk memecahkan masalah serta guru bertindak sebagai fasilitator, narasumber, dan penyuluh kelompok. Pada metode pembelajaran Inquiri, guru memilih topik dan menetapkan arah. Siswa-siswa bertanya yang nantinya akan menentukan arah baru. Metode inquiri sebenarnya merupakan sebuah siklus yang terdiri atas empat langkah, yaitu 1) merumuskan masalah, 2) mengumpulkan data melalui pengamatan, 3) menganalisis dan menyajikan dalam tulisan, laporan, gambar dan lain-lain, 4) menyajikan hasil karya kepada pembaca baik teman sekelas maupun pada orang lain yang lain (Tukiran Taniredja, 2011: 252).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Inquiri adalah metode mengajar yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan yang sebelumnya belum mereka ketahui. Sedangkan tujuan dari metode ini adalah untuk membantu siswa dalam mengembangkan intelektual dan keterampilannya yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan dan menyelidikinya untuk

mendapatkan jawaban sesuai dengan keinginan mereka.

Berdasarkan dari penelitian yang dijadikan sampel sebanyak 3 buah skripsi yang diambil dari perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, dari ketiga penelitian tersebut ditemui bahwa permasalahan yang dijumpai adalah bagaimana cara meningkatkan hasil belajar ekonomi menggunakan metode pembelajaran inquiri. Mengenai penerapan metode inquiri menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran berlangsung dalam penerapannya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok satu dan dua, di mana pembelajaran siswa kelompok satu beraktifitas dengan baik. Siswa kelompok satu menyenangi kegiatan yang memerlukan interaksi antara siswa dengan siswa.

Dari uraian di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah dengan penerapan metode pembelajaran Inquiri dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi pada siswa?”

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil dari peningkatkan belajar ekonomi dengan metode pembelajaran Inquiri siswa SMA.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Dalam penelitian ini adalah dari hasil dari penelitian yang terdahulu dijadikan sumber data penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2021 di Perpustakaan UMN Al-Washliyah Medan.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ummu Arifah R (Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas FKIP UMN Al-Washliyah) Penerapan Inquiri Dengan Media Peralatan Kantor Dalam Meningkatkan Belajar Siswa Di SMK Yaspi Labuhan Deli Tahun Ajaran

- 2014/2015. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. X1.1
- Muhammad Fadli Syahputra ((Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas FKIP UMN Al-Washliyah) Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi Dengan Menerapkan Pembelajaran *Inquiri* Pada Siswa Kelas X SMA PAB 9 Patumbak TA.2019/2020. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. X1.2
  - M. Yusril (Fakultas ekonomi Universitas Negeri Makassar) Penerapan Model Pembelajaran *Inquiri* Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA IT Wahdah Islamiyyah Makassar TA.2020. <https://core.ac.uk/download/pdf/286697535.pdf> .X1.3

Menurut Sugiyono (2017,194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang diambil dari hasil penelitian yang disajikan sampel. Dikarenakan kondisi yang sedang terjadi saat ini yaitu adanya virus *Covid-19*, maka penelitian ini berubah yaitu dengan melakukan kajian pustaka. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mencari Jurnal
- Mengumpulkan Data
- Mengolah Data

Teknik analisis data dilakukan cara berikut, setelah terkumpul diperoleh dari kelas pembelajaran merode *Inquiri*, maka hipotesis penelitian dapat diuji sebagai berikut:

$$Me = \frac{\sum Xi}{N}$$

Keterangan :

*Me* = Rata-rata atau mean

*Xi* = Jumlah semua nilai

*N* = Jumlah individu

Pembelajaran dikatakan optimal untuk setiap siklus jika ada peningkatan Hasil Belajar Siswa jika dibandingkan dengan siklus sebelumnya. (Sugiyono, 2012:49).

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

*P* = Persentase siswa yang tuntas

*F* = Jumlah siswa yang memperoleh nilai > 75

*N* = Jumlah siswa yang mengikuti tes

Suatu tindakan kelas dikatakan berhasil apabila mampu mencapai kriteria yang telah ditentukan. Dilihat dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun social dalam pembelajaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan subjek data dari karya ilmiah yang ada diperpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan kemudian dicari rata-rata dari masing-masing data tersebut. Hasil penelitian dari 3 buah skripsi yang dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

- Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Arifah R (11364038), diperoleh nilai rata-rata sebesar 81,71, Dengan jumlah responden 35 siswa. X1.1

**Tabel .1**  
**Data Hasil Nilai X1.1**

Keterangan	Pretes	Siklus I	Siklus II
Rata-rata	62	69,71	81,71
Ketuntasan	34,28	62,86	88,57

Hasil yang diperoleh sebelum adanya tindakan penelitian diperoleh nilai dengan rata-rata sebesar 62 dan ketika dilakukan tindakan penelitian siklus I, Peningkatan hasil belajar siswa diperoleh dengan nilai rata-rata sebesar 69,71 dan pada tindakan penelitian siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 81,71.

Dengan menggunakan metode pembelajaran *Inquiri* hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan dilihat melalui rata-rata yang diperoleh siswa, mulai dari sebelum dilakukan adanya tindakan penelitian lanjut ke siklus I dan yang terakhir siklus II. Dari perolehan persentase ketuntasan pra siklus sebesar 34,28 (12 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal (KBM) dari 35 peserta didik), siklus I Memperoleh 62,86 (22 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal (KBM) dari 35 peserta didik) dan siklus II memperoleh 88,57 (31 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal (KBM) dari 35 siswa peserta didik).

Berdasarkan dari nilai rata-rata skor data penelitian yang diteliti oleh Ummu Arifa R diperoleh nilai sebesar 81,71. Ini menunjukkan hasil yang sangat baik, sehingga model pembelajaran *Inquiri* baik diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,83 dengan jumlah responden 43 siswa. X1.2

**Tabel .2**  
**Data Hasil Nilai X1.2**

Keterangan	Pretes	Siklus I	Siklus II
Rata-rata	56,86	67,79	78,83
Ketuntasan	44,18	39,53	69,76

Hasil yang diperoleh sebelum adanya tindakan penelitian diperoleh nilai dengan rata-rata sebesar 56,86 dan ketika dilakukan tindakan penelitian siklus I, Peningkatan hasil belajar siswa diperoleh dengan nilai rata-rata sebesar 67,79, dan pada tindakan penelitian siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,83.

Dengan menggunakan metode pembelajaran *Inquiri* hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan dilihat melalui rata-rata yang diperoleh siswa, mulai dari sebelum dilakukan adanya tindakan penelitian lanjut ke siklus I dan yang terakhir siklus II. Siklus I Memperoleh 39,53 (26 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal (KBM) dari 43 peserta didik mata pelajaran ekonomi) dan

siklus II memperoleh 69,76 (30 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal (KBM) dari 43 siswa peserta didik mata pelajaran ekonomi.

Berdasarkan dari nilai rata-rata skor data penelitian yang diteliti oleh Muhammad Fadli Syahputra diperoleh nilai sebesar 78,83. Ini menunjukkan hasil yang sangat baik, sehingga model pembelajaran *Inquiri* baik diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M.Yusril diperoleh nilai rata-rata sebesar 80,88, dengan responden 17 siswa.

**Tabel .3**  
**Data Hasil Nilai X1.3**

Keterangan	Pretes	Siklus I	Siklus II
Rata-rata	58,82	76,52	80,88
Ketuntasan	11,76	64,70	82,35

Hasil yang diperoleh sebelum adanya tindakan penelitian diperoleh nilai dengan rata-rata sebesar 58,82 dan ketika dilakukan tindakan penelitian siklus I, Peningkatan hasil belajar siswa diperoleh dengan nilai rata-rata sebesar 76,52, dan pada tindakan penelitian siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 80,88.

Dengan menggunakan metode pembelajaran *Inquiri* hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan dilihat melalui rata-rata yang diperoleh siswa, mulai dari sebelum dilakukan adanya tindakan penelitian lanjut ke siklus I dan yang terakhir siklus II. Dari perolehan persentase ketuntasan pra siklus sebesar 11,76 (2 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal (KBM) dari 17 peserta didik mata pelajaran ekonomi), siklus I Memperoleh 64,70 (11 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal (KBM) dari 17 peserta didik mata pelajaran ekonomi) dan siklus II memperoleh 82,35 (17 siswa mencapai belajar minimal (KBM) dari 17 siswa peserta didik mata pelajaran ekonomi).

Berdasarkan dari nilai rata-rata skor data penelitian yang diteliti oleh M.Yusril diperoleh nilai sebesar 75,58. Ini menunjukkan hasil yang sangat baik, sehingga model pembelajaran

Inquiri baik diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dari data diatas maka dapat dihitung rata-rata yaitu model pembelajaran Inquiri sebagai berikut:

$$Me = \frac{Xi}{N}$$

$$Me = \frac{81,71 + 78,83 + 80,88}{3}$$

$$Xi = \frac{241,42}{3}$$

$$Xi = 80,47$$

**Tabel .4**  
**Hasil Nilai Akhir**

No	Hasil Data	N
1	Data Nilai 1	81,71
2	Data Nilai 2	78,83
3	Data Nilai 3	80,88
$Xi = 241,42$		
$Xi = 80,47$		

Untuk dinyatakan telah tuntasnya daya serap yang terdapat pada penelitian terdahulu terdapat 75% siswa telah mencapai nilai minimal. Selanjutnya untuk pesentasi tingkat kecapaian ketuntasan (TPK) dari penelitian yang terdapat dari jurnal secara keseluruhan, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{73}{95} \times 100\%$$

$$P = 76,84\%$$

Setelah dilakukan pengujian hasil data yang diperoleh pengelolaan data adalah sebesar 76,84. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang didapat  $\geq 75$ , artinya “ada peningkatan hasil belajar ekonomi dengan metode pembelajaran Inquiri”.

Penelitian ini menggunakan Studi Dokumen dari hasil penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara penelusuran sebuah jurnal dari perputakaan Universita Muslim Nusantara Al-Washliyah. Medan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ummu Arifa R dengan hasil nilai akhir sebersar 81,71 dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli Syahputra

dengan hasil nilai akhir sebesar 78,83 dan penelitian yang dilakukan oleh M.Yusril dengan hasil nilai akhir sebesar 80,88. Dengan rata-rata (*me*) yang sudah didapatkan dari ketiga penelitian tersebut X1.1(81,71) X1.2 (78,83) X1.3 (80,88) untuk mengetahui jumlah semua nilai (*Xi*), kita perlu menambahkan ketiga rata-rata tersebut lalu dibagi tiga.

$$Me = \frac{81,71 + 78,83 + 80,88}{3}$$

Maka akan didapat jumlah semua nilai *Xi* sebesar 80,47. Selanjutnya untuk mengetahui persentase siswa yang tuntas *P* dapat dengan mengkalikan jumlah siswa yang memperoleh nilai  $>75$  F (73) dengan 100% , lalu dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes *N* (95). Maka akan diperoleh pengelolaan data adalah sebesar 76,84.

**PENUTUP**  
**Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian analisis data , dapat ditarik kesimpulan bahwa, secara umum dalam penelitian ini terjadi peningkatan hasil belajar diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisan data dari penelitian yang dilakukan oleh Ummu Arifa R, “Penerapan Metode Inquiri Dengan Media Peralatan Kantor Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMK Yaspi Labuhan Deli TA.2014/2015”, diperoleh nilai rata-rata sebesar 81,71.
2. Berdasarkan analisan data dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli Syahputra, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Inquiri Pada Siswa Kelas X SMA PAB 9 Patumbak. TA.2019/2020”, diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,83.
3. Berdasarkan analisan data dari penelitian yang dilakukan oleh M.Yusril, “Penerapan Model Pembelajaran Inquiri Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Masa Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA IT Wahdah

- Islamiyah Makasar.TA.2019/2020”, diperoleh nilai rata-rata sebesar 80,88.
4. Dari ketiga penelitian tersebut maka dapat diperoleh rata-rata yaitu 80,47 dan dijelaskan sebagai berikut, dipenelitian yang dilakukan oleh *Ummu Arifa R* diperoleh peningkatan setelah dilakukan tindakan siklus I dan siklus II, siklus I memperoleh persentase sebesar 62,86 (22 siswa yang mencapai ketuntasan belajar minimal dari 35 peserta didik) dan siklus II memperoleh persentase sebesar 88,57 (31 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal dari 35 peserta didik). Dan penelitian kedua yang dilakukan oleh *Muhammad Fadli* mengalami peningkatan setelah dilakukan tindakan siklus I memperoleh 39,53 (26 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal dari 43 peserta didik) dan siklus II memperoleh 69,76 (30 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal dari 43 peserta didik). Dan penelitian ketiga yang dilakukan oleh *M.Yusril* mengalami peningkatan setelah dilakukan tindakan siklus I memperoleh persentase 64,70 (11 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal dari 17 peserta didik). Dan siklus II memperoleh 82,35 (17 siswa mencapai ketuntasan belajar minimal dari 17 peserta didik).
- [4] M. Yusril. 2020. *Penerapan Model Pembelajaran Inquiri Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA IT Wahdah Islamiyyah Makassar TA.2020*. Universitas Negeri Makassar <https://core.ac.uk/download/pdf/286697535.pdf>.
- [5] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- [6] Tukiran Taniredja, dkk. 2011. *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Ummu Arifah R. 2015. *Penerapan Inquiri Dengan Media Peralatan Kantor Dalam Meningkatkan Belajar Siswa Di SMK Yaspi Labuhan Deli Tahun Ajaran 2014/2015*. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
- [8] W Gulo Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Grasindo 2002), h.71.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achdiyati, M., & Utomo, R. (2018). kemampuan numerik, dan prestasi belajar matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 7(3).
- [2] Mansur, R. (2018). Belajar jalan perubahan menuju kemajuan. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).
- [3] Muhammad Fadli Syahputra. 2020. *Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi Dengan Menerapkan Pembelajaran Inquiri Pada Siswa Kelas X SMA PAB 9 Patumbak TA.2019/2020*. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

---

**ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP FASILITAS PELAYANAN  
PUBLIK PADA PENGGUNA TRANS JAKARTA****Oleh****Agus Dharmanto<sup>1</sup>, Novita Wahyu Setyawati<sup>2</sup>, Dewi Sri Woelandari PG<sup>3</sup>,  
<sup>1,2,3</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta  
Raya Bekasi****E-mail : [1:agus.dharmanto@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:agus.dharmanto@dsn.ubharajaya.ac.id)****Abstract**

Public transportation activities are developing so rapidly, so that every public transportation business, one of which is the Trans Jakarta public transportation, is renovating and improving services from all aspects. Where these aspects start from the renovation of the bus stop, comfort, service and security in Trans Jakarta as well as the accuracy of arrival and departure schedules. The forms of service improvement as described above make Trans Jakarta service users feel satisfied. In marketing strategy, to increase sales, an important factor that needs to be considered is the level of customer satisfaction. Monitoring customer satisfaction that is carried out properly is a material for conducting accountable evaluations for decision making related to improving Trans Jakarta services, fulfilling service processes needed by customers, and improving service processes to customers. The purpose of this study is to see the extent to which public service facilities are influenced by the quality of service for trans Jakarta users. In addition, to see how much public service facilities are affected by the quality of service for Trans Jakarta users. The method used in this study is a quantitative method using SPSS 24.0 software

**Keywords: Customer Satisfaction, Public Service.****PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Dewasa ini kegiatan angkutan umum berkembang demikian pesatnya, sehingga setiap usaha angkutan umum salah satunya angkutan trans Jakarta melakukan peningkatan pelayanan dari segala aspek. Dimana aspek tersebut mulai dari perenovasian halte, kenyamanan, pelayanan dan keamanan. Bentuk-bentuk perubahan yang dilakukan Trans Jakarta menjadikan para pengguna layanan Trans Jakarta merasa puas.

Dalam strategi pemasaran, salah satu faktor penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan adalah tingkat kepuasan pelanggan. Dimana sangat tergantung pada kinerja karyawan, produk dan jasa pendukung lainnya serta standar yang digunakan pelanggan untuk mengevaluasi kinerja. Dengan adanya pemantauan kepuasan pelanggan, diharapkan hasilnya dapat dijadikan

bahan evaluasi yang dapat dipertanggung-jawabkan, terutama ketika akan melakukan pengambilan keputusan terkait dengan peningkatan pengguna/penumpang trans Jakarta, proses layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan, dan perbaikan dalam rangka meningkatkan proses pelayanan pelanggan. Yang pada akhirnya fasilitas pelayanan dapat meningkatkan tingkat kepuasan terhadap pelanggan.

**Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang diatas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai analisis kepuasan pelanggan terhadap fasilitas pelayanan publik pada pengguna trans Jakarta di Jakarta.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah :  
Untuk melihat seberapa besar fasilitas pelayanan public pada pengguna trans Jakarta dipengaruhi faktor-faktor kepuasan pelanggan.

### Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini mengimplementasikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap fasilitas pelayanan publik pada pengguna trans Jakarta yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

### Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diantaranya, yaitu :

1. Mempelajari mutu pelayanan yang pada akhirnya pelanggan merasa puas dan secara terus menerus melakukan kerja sama.
2. Mengetahui apakah kebutuhan, keinginan, serta persyaratan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima sesuai dengan yang disediakan perusahaan disaat sekarang dan akan datang.
3. Meningkatkan mutu pelayanan agar sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan.
4. Menyusun rencana kerja serta melakukan penyempurnaan kualitas pelayanan dimasa akan datang.

### LANDASAN TEORI

#### Kepuasan Pelanggan

Zeithaml dan Bitner (2000:75), menyatakan bahwa kepuasan merupakan respon dari konsumen ketika kebutuhannya terpenuhi. Kepuasan juga dapat dikatakan sebagai penilaian atas keistimewaan produk atau jasa yang berkaitan dengan tingkat kesenangan dan terpenuhinya kebutuhan konsumen. Sementara itu menurut Hunt et al. (2012), kepuasan pada dasarnya merupakan penilaian individu atas kinerja versus harapan.

Kepuasan dapat tercipta melalui pelayanan, kualitas, dan juga nilai.

Kualitas. Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan yang dirasakan konsumen. Kualitas dapat membuat konsumen terdorong untuk menjalin hubungan yang erat dan dekat dengan perusahaan, dengan ikatan ini perusahaan dapat memahami apa yang diharapkan dan dibutuhkan konsumen. Kualitas memuaskan yang diberikan perusahaan pada konsumen mereka, akan membuat konsumen puas dan

pada akhirnya konsumen akan loyal terhadap produk ataupun layanan yang diberikan oleh perusahaan.

Pelayanan konsumen, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan ataupun keluhan yang dirasakan konsumen atas produk atau layanan yang tidak memuaskan bagi mereka, namun lebih pada solusi pemecahan setelah terjadinya pembelian. Menurut Ganguly dan Gupta (2008), layanan konsumen mencakup segala upaya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan berasal dari informasi terkait apa yang dibutuhkan konsumen serta dipengaruhi oleh tingkat harapan dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam situasi pemberian layanan dibutuhkan interaksi interpersonal antara pelanggan dengan penyedia layanan. Perilaku yang ditunjukkan oleh penyedia layanan dalam membentuk evaluasi pelanggan terhadap layanan yang didapatkan.

Menurut Kotler (2000) nilai pelanggan merupakan yaitu manfaat pelanggan dari produk ataupun jasa dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan (yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menggunakan, serta membuang produk atau jasa). Inti dari konsep nilai secara sistemik adalah penciptaan nilai pelanggan (Bowman dan Ambrosini, 2000; Clulow et al., 2007), dan untuk mengalahkan pesaing perusahaan harus dapat memberikan nilai yang ditawarkan lebih tinggi daripada pesaing dimata pelanggan (Bowman dan Ambrosini, 2000). Oleh karena itu perusahaan harus memahami apa yang dibutuhkan pelanggan dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut.

Kepuasan pelanggan tergantung pada persepsi maupun ekspektasi pelanggan. Oleh karena itu perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Zeithaml et.al. (2000) terdapat empat faktor, yaitu:

1. *Word of mounth communication*, merupakan faktor potensial dalam menentukan ekspektasi pelanggan.

2. Karakteristik individu dan kebutuhan pribadi (personnel needs) menentukan ekspektasi pelanggan.
3. Ekspektasi pelanggan dapat juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu (*past experience*) dalam menggunakan pelayanan.
4. Komunikasi dengan pihak eksternal (*external communication*) terutama dari penyedia layanan, terutama dalam memberikan pesan-pesan secara langsung maupun tidak langsung kepada pelanggannya. Eksternal communication merupakan harga yang harus dibayarkan atas biaya pelayanan yang diberikan dalam membentuk ekspektasi pelanggan.

Kepuasan pelanggan menurut Guiltinan yaitu kepuasan pelanggan adalah konsekuensi perbandingan antara apa yang dilakukan pelanggan pada level manfaat yang dirasakan terhadap manfaat yang diharapkan. Lebih jauh menurut Guiltinan, untuk menciptakan kepuasan pelanggan perusahaan harus mampu menawarkan kualitas yang baik atas produk maupun pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.

Sementara itu Pasuraman, Zeithaml, dan Berry, mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan adalah apa yang dirasakan pelanggan atas layanan yang didapatkan. Selanjutnya Lovelock menyatakan bahwa kepuasan merupakan keadaan emosional dan juga reaksi pasca pembelian yang didapatkan pelanggan, yang dapat berbentuk kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, kegembiraan, ataupun kesenangan. Hal ini membuat perusahaan menjadi terobsesi atas kepuasan pelanggan, dikarenakan keadaan emosional dan reaksi pelanggan berhubungan langsung dengan pasar dan keuntungan perusahaan. Lebih jauh Schiffman dan Kanuk memaparkan bahwa perasaan yang dirasakan seseorang atas kinerja produk atau layanan dibandingkan dengan harapan merupakan kepuasan pelanggan.

Konsep kepuasan pelanggan Zeithaml dan Bitner ini digunakan peneliti dalam penelitian ini dikarenakan dimensi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dapat mewakili objek penelitian. Sementara itu Lovelock, menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan berhubungan langsung dengan loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan juga keuntungan yang didapatkan perusahaan. Lebih jauh Schiffman dan Kanuk menandakan bahwa jika seseorang merasakan kebutuhannya terpenuhi bahkan melebihi harapan, maka orang tersebut dapat dikatakan merasa puas.

Lima aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan secara efektif, adalah sebagai berikut :

1. *Warranty costs*. Perusahaan menangani *warranty costs* atas produk/layanan mereka melalui persentase penjualan. Perusahaan dikatakan gagal memberi kepuasan pada pelanggan apabila perusahaan tidak memberi jaminan atas produk/layanan yang mereka jual kepada pelanggan..
2. *Customer complaint. Handling complain* pelanggan penting untuk selalu diperhatikan, namun demikian perusahaan seringkali terlambat menyadarinya. Apabila complain atau klaim pelanggan tidak secepatnya ditangani maka customer defections dapat terjadi dan tidak dapat dicegah.
3. *Market Share* harus diukur karena berkaitan dengan kinerja perusahaan, yaitu dengan cara mengukur kuantitas pelayanan perusahaan bukan dari kualitas pelayanan.
4. *Costs of Poor Quality* dapat bernilai memuaskan apabila perusahaan dapat memperkirakan biaya *defecting customer*.
5. *Industry Reports*, merupakan laporan yang fairnest, most accurate, dan most eagerly yang dibuat perusahaan (J.D Power dalam Bhote).

### **Mengukur Kepuasan Pelanggan**

Beberapa metode yang digunakan perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan serta kepuasan pelanggan

pesaing. Menurut Kotler, terdapat 4 metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu:

1. Sistem keluhan dan saran

Perusahaan yang fokus pada pelanggan akan mempermudah pelanggan untuk memberikan saran, pendapat, dan keluhan mereka atas layanan yang diberikan perusahaan.

2. Survei kepuasan pelanggan

Banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan menggunakan metode survei, yang dilakukan dengan menggunakan pos, telepon, maupun wawancara secara pribadi. Kepuasan pelanggan yang diukur dengan metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain adalah:

a *Directly Reported Satisfaction*, yaitu pengukuran yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan pertanyaan.

b *Derived Dissatisfaction*, ada 2 hal utama ketika pertanyaan diajukan kepada pelanggan, yaitu besarnya harapan pelanggan atas atribut tertentu dan besarnya kinerja yang diterima atau dirasakan pelanggan.

c *Problem Analysis*, terdapat 2 hal pokok yang harus diungkapkan ketika bertanya pada pelanggan yang dijadikan responden, yaitu: masalah yang dihadapi pelanggan terkait dengan penawaran manajemen serta memberikan saran agar perusahaan dapat melakukan perbaikan dimasa akan datang.

d *Importance-Performance Analysis*, pada teknik ini responden diminta meranking berbagai elemen yang ditawarkan berdasarkan derajat penting tidaknya setiap elemen. Kemudian responden diminta meranking kinerja perusahaan pada masing-masing elemen tersebut..

3. Belanja siluman (*Ghost shopping*).

Metode ini dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang *ghost shopper*, kemudian menyampaikan temuan-temuan yang berkaitan dengan kekuatan serta kelemahan produk perusahaan pesaing berdasarkan

pengalaman yang mereka dapatkan ketika membeli produk-produk tersebut. Para *ghost shopper* juga datang dan melihat langsung bagaimana interaksi yang terjadi antar karyawan dan bagaimana memperlakukan para pelanggannya. Pada metode ini karyawan tidak diperkenankan tahu kalau atasannya melakukan penilaian, karena outputnya nanti akan menjadi bias.

4. Analisis pelanggan yang hilang (*lost customer analysis*)

Pada metode ini perusahaan berusaha menghubungi lagi para pelanggan mereka yang sudah lama berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan lain, dengan harapan mereka memperoleh informasi, sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Tiga hal utama dalam konsep Service Quality (*ServQual*) adalah *system*, teknologi, dan manusia. Menurut Irawan (2008) terdapat lima dimensi dalam *ServQual* yaitu *tangible*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*.

a. Dimensi pertama adalah *tangible*, layanan (*service*) tidak dapat dilihat, dicium, dan tidak dapat diraba, sehingga aspek *tangible* menjadi penting dalam menukur pelayanan..

b. Dimensi kedua adalah *reliability* yaitu kehandalan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dari berbagai industri jasa, dimensi ini dipersepsikan paling penting dibandingkan empat dimensi lainnya.

c. Dimensi ketiga adalah *responsiveness*, adalah dimensi *ServQual* yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap pelayanan yang cepat dipastikan berubah dan memiliki kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Sama dengan dimensi lainnya kepuasan pada dimensi *responsiveness* diukur berdasarkan persepsi bukan actual.

- d. Dimensi keempat *assurance*, merupakan kemampuan perusahaan dan perilaku staf *front-line* dalam memberi keyakinan serta menanamkan rasa percaya pada para pelanggan.
- e. Dimensi kelima *emphaty*, yaitu persepsi yang dianggap kurang penting dibandingkan dimensi *reliability* maupun *responsiveness* dalam perspektif pelanggan.
- Aspek dalam kualitas pelayanan menurut Suryani (2008), yaitu:

- Berwujud (*tangible*) merupakan penampilan fisik dari jasa yang ditawarkan, peralatan, personil dan fasilitas komunikasi.
- Kehandalan (*reliability*) adalah kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang akurat, tepat waktu, serta dapat dipercaya.
- Ketanggapan (*responsiveness*) merupakan kemampuan perusahaan dalam rangka membantu pelanggan dengan cara memberikan pelayanan baik dan cepat.
- Empati (*emphaty*) yaitu berusaha mengetahui dan mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan secara individual.
- Keyakinan (*assurance*) merupakan pengetahuan dan keramahan personil serta kemampuan mereka agar meyakinkan dan dapat dipercaya oleh pelanggan.

Ari Wijayanti (2009) dan Rinawati (2009) membuktikan hal tersebut dengan menunjukkan bahwa *ServQual* berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan pelanggan.

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan masyarakat (*public service*) merupakan produk dari organisasi pemerintahan, dimana pelayanan diberikan untuk memenuhi apa yang menjadi hak masyarakat, baik layanan sipil maupun layanan publik. Kegiatan pelayanan menyangkut pemenuhan hak yang melekat pada setiap orang, baik secara individu maupun kelompok (organisasi) dan dilakukan secara universal.

Moenir (1998) menyatakan bahwa hak katas pelayanan sifatnya universal dan berlaku bagi siapa saja yang memiliki kepentingan atas hak tersebut, serta dilakukan oleh organisasi

yang tugasnya melakukan atau menyelenggarakan pelayanan.

### **Standar Pelayanan Publik**

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan.

Menurut LAN (2003), kriteria-kriteria pelayanan tersebut antara lain:

- Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan.
- Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam pencatatan data dan tepat waktu.
- Tanggung jawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan.
- Kecakapan para petugas pelayanan, bahwa para petugas pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.
- Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas. Petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak hanya dengan pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh

- karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperhatikan.
- f. Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian, dan persahabatan dalam kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan. Keramahan hanya diperlukan jika pelanggan termasuk dalam konsumen konkret.
  - g. Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gampang, meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain.
  - h. Komunikasi antara petugas dan pelanggan
  - i. Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dengan penyedia pelayanan.
  - j. Kejelasan dan kepastian yaitu mengenai tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut.
  - k. Keamanan, yaitu memberikan rasa aman dan bebas kepada pelanggan dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan.
  - l. Mengerti apa yang diharapkan pelanggan
  - m. Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa fasilitas fisik.
  - n. Efisien yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
  - o. Ekonomis yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.

## METODE PENELITIAN

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Data Primer

- a. Kuesioner/angket, adalah teknik dengan menggunakan instrument pengumpul data, dimana terjadi wawancara dan tatap muka langsung dengan responden.
- b. Wawancara, adalah teknik dengan mengajukan pertanyaan secara lisan/tatap muka langsung antara pengumpul data dengan responden.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tertulis (berbentuk dokumen) yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

### Data Sekunder

Data pendukung atau pelengkap data primer yang dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari data yang terkumpul akan diproses dengan menggunakan software SPSS 21.0.

### Uji Validitas

Menurut (Wiratna Sujarweni, 2015) uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil  $r$  hitung kita bandingkan dengan  $r$  table dimana  $df=n-2$  dengan sig. 5%

Dasar pengujian validitas adalah sebagai berikut :

1. Jika  $r$  hitung positif dan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka variabel tersebut valid.
2. Jika  $r$  hitung tidak positif dan  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka variabel tersebut tidak valid.

### Uji Reliabilitas

Menurut (Wiratna Sujarweni, 2015) reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji Reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha  $>$

0,60 maka reliabel. Dasar pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai Cronboach Alpha  $> 0,60$  maka data yang di uji dinyatakan reliabel.
2. Jika nilai Cronboach Alpha  $< 0,60$  maka data yang di uji dinyatakan tidak reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik model regresi dapat menghasilkan estimator linear tidak biasa yang terbaik jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik.

#### 1. Uji Normalitas

Menurut (Sujarweni, 2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan uji statistic kolmogrof. Kriteria jika :

Sig.  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.

Sig.  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinieritas

Menurut (Sujarweni, 2018) uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap dependen. Jika VIF yang dihasilkan di antara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau

disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola (Sujarweni, 2018).

### Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Wiratna Sujarweni, 2015) regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independent. Model persamaan regresi linier sederhana dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Kepuasan Pelanggan

a = konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi pertama

b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi kedua

X<sub>1</sub> = Pelayanan Publik

X<sub>2</sub> = Standar Pelayanan Publik

### Uji Hipotesis

#### 1. Uji Kelayakan (Uji F)

Menurut (Sujarweni, 2018) uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan data. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji F adalah :

Ho : tidak memenuhi kelayakan.

Ha : memenuhi kelayakan.

Kriteria :

Jika F hitung  $> F$  tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika F hitung  $< F$  tabel, maka Ho Diterima dan Ha ditolak.

Atau :

Jika  $p < 0,05$ , maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika  $p > 0,05$ , maka Ho diterima dan Ha ditolak.

#### 2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Menurut (Sujarweni, 2018) uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel variabel terkait secara parsial. Taraf signifikan 5%.

Ho : tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.

Ha : ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.

Kriteria :

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima.

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak.

Atau

Jika p < 0,05, maka Ho ditolak.

Jika p > 0,05, maka Ho diterima.

### 3. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah antara nol dan satu (Sujarweni, 2018).

$$R^2 = (r)^2 \times 100\%$$

Keterangan :

R<sup>2</sup> = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Relasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden pada penelitian ini, terlihat pada table 1 dibawah ini:

**Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki Laki	41	48.2	48.2	48.2
	Perempuan	44	51.8	51.8	100.0
Total		85	100.0	100.0	

**Sumber:** data primer diolah, 2022

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa jumlah penumpang Bis Trans Jakarta laki-laki dalam penelitian ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penumpang Bis Trans Jakarta perempuan (laki-laki sebanyak 51,8% dan perempuan sebanyak 48,2%).

**Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25	10	11.8	11.8	11.8
	26	10	11.8	11.8	23.5
	27	2	2.4	2.4	25.9
	28	3	3.5	3.5	29.4
	30	15	17.6	17.6	47.1
	31	1	1.2	1.2	48.2
	32	2	2.4	2.4	50.6
	34	2	2.4	2.4	52.9
	35	9	10.6	10.6	63.5
	37	2	2.4	2.4	65.9
	38	1	1.2	1.2	67.1
	39	1	1.2	1.2	68.2
	41	2	2.4	2.4	70.6
	44	17	20.0	20.0	90.6
	45	1	1.2	1.2	91.8
	47	2	2.4	2.4	94.1
	49	1	1.2	1.2	95.3
50	3	3.5	3.5	98.8	
51	1	1.2	1.2	100.0	
Total		85	100.0	100.0	

**Sumber:** data primer diolah, 2022

Berdasarkan usia terlihat bahwa jumlah penumpang Bis Trans Jakarta yang paling banyak menggunakan Bis Trans Jakarta dalam penelitian ini adalah penumpang yang berusia 44 Tahun yaitu sebanyak 20%, sedangkan penumpang yang paling jarang menggunakan Bis Trans Jakarta adalah penumpang yang berusia 31 tahun, 38 tahun, 39 tahun, 45 tahun, 49 tahun, dan 51 tahun yaitu masing-masing sebesar 1,2%.

**Tabel 3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	D1	8	9.4	9.4	9.4	
	D3	26	30.6	30.6	40.0	
	S1	30	35.3	35.3	75.3	
	S2	3	3.5	3.5	78.8	
	SD	2	2.4	2.4	81.2	
	SMA	12	14.1	14.1	95.3	
	SMP	4	4.7	4.7	100.0	
	Total		85	100.0	100.0	

**sumber:** data primer diolah, 2022

Berdasarkan pendidikan terlihat bahwa jumlah penumpang yang paling banyak menggunakan Bis Trans Jakarta dalam penelitian ini adalah penumpang yang jenjang pendidikannya S1 yaitu sebesar 35% dan yang paling jarang menggunakan Bis Trans Jakarta adalah penumpang dengan jenjang Pendidikan SD yaitu sebesar 2,4%.

**Pengujian Instrumen Penelitian**

Hasil pengujian instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Instrumen Penelitian Pelayanan Publik**

Korelasi Antara	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kesimpulan	Cronbach's Alpha
Pernyataan 1	0,480	0,211	Valid	0,618
Pernyataan 2	0,548	0,211	Valid	
Pernyataan 3	0,706	0,211	Valid	
Pernyataan 4	0,773	0,211	Valid	
Pernyataan 5	0,677	0,211	Valid	

Dari tabel 4 diatas didapatkan bahwa nilai  $r_{hitung}$  yang didapat untuk masing-masing item pertanyaan variabel memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$  yaitu sebesar 0,211. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lima butir pernyataan pada variabel pelayanan publik dinyatakan *valid*. Sementara nilai *cronbach's alpha* atas variabel pelayanan publik sebesar 0,618, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliabel* karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* > 0,600.

**Tabel 5. Hasil Uji Instrumen Penelitian Standar Pelayanan Publik**

Korelasi Antara	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kesimpulan	Cronbach's Alpha
Pernyataan 1	0,576	0,211	Valid	0,681
Pernyataan 2	0,699	0,211	Valid	
Pernyataan 3	0,707	0,211	Valid	
Pernyataan 4	0,679	0,211	Valid	

Dari tabel 5 diatas didapatkan bahwa nilai  $r_{hitung}$  yang didapat untuk masing-masing item pertanyaan variabel memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$  yaitu sebesar 0,211.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa empat butir pernyataan pada variabel standar pelayanan publik dinyatakan *valid*. Sementara nilai *cronbach's alpha* atas variabel standar pelayanan publik sebesar 0,681, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliabel* karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* > 0,600.

**Tabel 6. Hasil Uji Instrumen Penelitian Kepuasan Pelanggan**

Korelasi Antara	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kesimpulan	Cronbach's Alpha
Pernyataan 1	0,459	0,211	Valid	0,651
Pernyataan 2	0,803	0,211	Valid	
Pernyataan 3	0,698	0,211	Valid	
Pernyataan 4	0,673	0,211	Valid	
Pernyataan 5	0,610	0,211	Valid	

Dari tabel 6 diatas didapatkan bahwa nilai  $r_{hitung}$  yang didapat untuk masing-masing item pertanyaan variabel memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$  yaitu sebesar 0,211. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lima butir pernyataan pada variabel kepuasan pelanggan dinyatakan *valid*. Sementara nilai *cronbach's alpha* atas variabel kepuasan pelanggan sebesar 0,651 lebih besar dari nilai *cronbach's alpha* yaitu > 0,600, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliabel* dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

**Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas**

**Tabel 7. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a,b</sup> :	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.30725118
	Most Extreme Differences:	
	Absolute	.070
	Positive	.066
	Negative	-.070
Test Statistic:		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 7 diatas menunjukkan hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, menggambarkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari standar yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan residual terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pelayanan Publik	.817	1.224
	Standar Pelayanan Publik	.636	1.578

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Pada tabel 8 diketahui bahwa nilai *tolerance* berkisar antara 0,1 sampai dengan kurang dari 1, dimana nilai *tolerance* pelayanan public sebesar 0,817 sementara untuk nilai *tolerance* standar pelayanan publik sebesar 0,616 yaitu berda dalam jangkauan range 0,1 sampai 1. Semntara VIF dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10, yaitu nilai VIF variabel pelayanan publikbis Trans Jakarta sebesar 1,234 dan nilai VIF variabel standar pelayanan publik bis Trans Jakarta sebesar 1,578. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua data terbebas dari multikolinearita baik dilihat dari *tolerance* maupun dari VIF.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	4.503	1.432		4.140	.889
	Pelayanan Publik	.392	.170	.096	2.787	.433
	Standar Pelayanan Publik	.228	.199	.058	2.474	.637

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Dari tabel 9 diatas terlihat bahwa nilai sig pelayanan publik bis Trans Jakarta lebih besar dari 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,433, sementara standar pelayanan publik bis Trans Jakarta nilai sig. sebesar 0,637 lebih besar dari 0,05 (%) sehingga tidak terkena gejala heterokedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut.

**Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
		1	(Constant)	4.503	1.432	
	Pelayanan Publik	.392	.170	.096	2.787	.433
	Standar Pelayanan Publik	.228	.199	.058	2.474	.637

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan tabel bagian coefficients tersebut di atas, maka dapat dibuat model regeresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 4,503 + 0,392 + 0,228 + e$$

Nilai masing-masing koefisien regresi Variabel Independen dari model regresi linear tersebut memberikan gambaran bahwa :

- Koefisien regresi variabel pelayanan publik ( $X_1$ ) sebesar 0,392 menggambarkan bahwa pelayanan public bis Trans Jakarta mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan untuk menggunakan Bis Trans Jakarta, artinya semakin baik pelayanan publik maka kepuasan pelanggan untuk menggunakan Bis Trans Jakarta semakin tinggi.
- Koefisien regresi variabel standar pelayanan publik ( $X_2$ ) sebesar 0,228 menggambarkan bahwa standar pelayanan publik Bis Trans Jakarta mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan untuk menggunakan Bis Trans

Jakarta, artinya dengan semakin baiknya standar pelayanan Trans Jakarta maka kepuasan pelanggan untuk menggunakan Bis Trans Jakarta semakin tinggi,

### Pengujian Hipotesis

#### Uji T

Hasil Uji T dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut.

**Tabel 11. Hasil Uji T (Coefficients<sup>a</sup>)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.50	1.432		4.140	.002
		3				
	Pelayanan Publik	.392	.170	.096	2.787	.033
	Standar Pelayanan Publik	.228	.199	.058	2.474	.037
	Pelayanan Publik TJ					

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Uji Hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  atau melihat nilai signifikansinya. Nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel t, yaitu pada degree of freedom (df) sebesar 83 dan  $\alpha = 5\%$ , maka nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,989. Dari tabel 11 diatas maka dapat disimpulkan :

1. Variabel pelayanan public nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu sebesar  $2,787 > 1,989$ . Maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Artinya pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan untuk menggunakan bis Trans Jakarta
2. Variabel standar pelayanan public nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu sebesar  $2,474$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Artinya standar pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan untuk menggunakan bis Trans Jakarta.

#### Uji F

Hasil Uji F dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut.

**Tabel 12. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29.265	2	8.632	8.676	.002 <sup>b</sup>
	Residual	68.973	85	.769		
	Total	97.238	87			

a. Dependent Variable: Kepuasan\_Pelanggan

b. Predictors: (Constant), Standar\_Pelayanan\_Publik, Pelayanan\_Publik\_TJ

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan dari sebuah model dan untuk melihat uji F dapat menggunakan Tabel Anova, yaitu dengan cara membandingkan nilai  $f_{hitung}$  dengan nilai  $f_{tabel}$  atau melihat dari nilai signifikansinya. Sebuah model dikatakan layak bila nilai signifikansinya dibawah 5% (0,05). Dari tabel Anova diatas terlihat bahwa nilai signifikansi yang didapat adalah sebesar 0,02 yaitu dibawah 5% (0,05). Sehingga dapat dikatakan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak, artinya variabel pelayanan publik ( $X_1$ ) dan variabel standar pelayanan publik ( $X_2$ ) secara keseluruhan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan untuk menggunakan bis Trans Jakarta.

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary**

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 <sup>a</sup>	.349	1.134

a. Predictors: (Constant), Standar\_Pelayanan\_Publik, Pelayanan\_Publik

b. Dependent Variable: Kepuasan\_Pelanggan

Berdasarkan tabel 13 *model summary* diatas diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,327 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu pelayanan publik dan standar pelayanan publik mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan sebesar 32,7% dan sisanya yaitu sebesar 67,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

**PENUTUP****Kesimpulan**

Penelitian ini terfokus pada pelayanan publik dan standar pelayanan publik yang menggunakan fasilitas bis Trans Jakarta. Hal ini digunakan untuk melihat semakin baiknya pelayanan yang telah diberikan pihak bis Trans Jakarta kepada pelanggannya baik pelayanan maupun standar pelayanannya, sehingga dengan melihat peningkatan pelayanan yang diberikan maka akan semakin meningkat pula kepuasan pelanggannya.

Hasil dari penelitian ini dikemukakan bahwa pelayanan publik berpengaruh...pada kepuasan pelanggan pengguna bis Trans Jakarta, yang mana semakin baik pelayanan publik yang diberikan bis Trans Jakarta, maka kepuasan pelanggan akan semakin meningkat. Sementara itu standar pelayanan publik bis Trans Jakarta berpengaruh signifikan pada kepuasan pelanggan pengguna bis Trans Jakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi standar pelayanan publik bis Trans Jakarta yang diberikan kepada pelanggan, maka kepuasan pelanggan pengguna bis Trans Jakarta akan semakin meningkat.

**Saran**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat dilakukan penelitian selanjutnya dengan menambah variabel lain diluar variabel penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Agus Dwiyanto dan Bevaola Kusumasari "Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang Harus Dilakukan?" dalam Policy Brief, No. II/PB/2003.
- [2] Bhote, Keki R.1996.Beyond Customer Satisfaction to Customer Loyalty.American Management Association.Hal 56
- [3] Guilitnan,Joseph,P,Paul,Gordon W and Madden,Thomas J.1997.Marketing Management.6th edition.McGraw-HillCompanies.Hal 7
- [4] Guilitnan,Joseph,P,Paul,Gordon W and Madden,Thomas J.1997.Marketing Management.6th edition.McGraw-Hill Companies.Hal 6
- [5] Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, The New Public Service: Serving, not Steering, New York: ANSI, 2002.
- [6] Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde, Classics of Public Administration, USA: Harcourt Brace & company, 1978.
- [7] John Stuart Mill, Utilitarianism, On Liberty, Consideration on Representative Government, Vermont: Everyman, 1993.
- [8] Kotler, Philip. Marketing Management, 11th Edition. Prentice Hall Int'l, New Jersey, 2003, p.138
- [9] Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran : Analisis Perencanaan, Implementasi dan Kontrol, Edisi Milenium. PT. Prenhalindo, Yakarta, 2002, hal.38
- [10] Lovelock,Christopher.H dan Wright,Lauren.K.2005.Manajemen Pemasaran Jasa.Indeks.Hal 102
- [11] Lovelock,Christopher.H dan Wright,Lauren.K.2005.Manajemen Pemasaran Jasa.Indeks.Hal 104
- [12] Parasuraman.Valarie.A.Z and Berry.1990.Delivering Quality.Service McMilan.Hal 15
- [13] Rangkuti,Freddy.2002.Measuring Customer Satisfaction.Gramedia Pustaka Utama.Hal 23
- [14] Schiffman, Leon. G and Kanuk, Leslie Lazar.2004.Consumer Behavior 8th edition. Pearson Prentice Hall.Hal 14
- [15] Zeithaml, Valarie A. and Bitner, Mary Jo. Service Marketing. McGraw Hill Inc, Int'l Edition, New York, 2003, p.162
- [16] Zeithaml, Valarie A. and Bitner, Mary Jo. Service Marketing. McGraw Hill Inc, Int'l Edition, New York, 2003, p.85

PERMASALAHAN SERTA SOLUSI DALAM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN  
DANA ZIS DI LAZISMU KOTA MEDAN

Oleh

Ahmad Fuadi Tanjung<sup>1)</sup>, Yenni Samri Juliati Nasution<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: <sup>1</sup>[ahmadfuaditanjung@gmail.com](mailto:ahmadfuaditanjung@gmail.com), <sup>2</sup>[yenni.samri@uinsu.ac.id](mailto:yenni.samri@uinsu.ac.id)

**Abstract**

This research was carried out with the aim of knowing what problems and solutions this institution faced when collecting and distributing the ZIS funds. The subject of this research is the head of the fundraising division in the city of Medan. This study uses a descriptive type of research using qualitative data. The validity of this hypothesis uses observational techniques that are used to strengthen the problems in this study. The results of this study can be concluded that there is still a lack of public knowledge of this institution. Then, there are still people who distribute their zakat funds individually. This has become a problem in the collection and distribution of ZIS funds. there is still a lack of public knowledge of this institution. Then, there are still people who distribute their zakat funds individually. This has become a problem in the collection and distribution of ZIS funds. This study has limitations, among others, researchers cannot reach all respondents because they have separate sections and are busy with each other. These limitations are expected to be a lesson for researchers and can be avoided by further research

**Keywords:** ZIS, Management and Distribution, LAZISMU

**PENDAHULUAN**

NKRI merupakan salah satu negara dengan jumlah masyarakat yang beragam islam yang banyak.<sup>1</sup> Umat Islam di NKRI wajib menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintah Allah SWT. Rekan-rekan Muslim membantu mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan bantuan. Satu hal yang harus dilakukan Islam adalah bersama-sama membantu dan mengentaskan kemiskinan, memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, dan membantu mereka yang kondisi ekonominya sangat kurang memadai. Indonesia adalah negara yang sangat berkembang tetapi memiliki masalah, semakin tinggi harga barang, semakin rendah

pendapatannya, sehingga Indonesia memiliki jumlah penduduk kurang mampu yang besar.<sup>2</sup>

Menurut Islam, Zakat dapat menjadi solusi atas problematika perekonomian di seluruh wilayah. Karena zakat dilakukan sesuai dengan syaria'at Islam yang mengandung kebaikan dan kebajikan kepada seluruh alam. Konsep zakat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan manusia agar damai dan dapat merasakan makna kebersamaan. Penggunaan dana Zakat bukan tentang memberantas kemiskinan sepenuhnya, juga bukan tentang merampas kekayaan orang . Karena dari pembayaran zakat hanya beberapa persen saja dana yang di zakat kan dari sebagian harta kita. Tetapkan persentase dari 2,5% menjadi 20%.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Amin Farih," Konsistensi Nahdlatul Ulama' Dalam Mempertahankan Pancasila Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Politik Walisongo*, 1, 1-6, (2019).

<sup>2</sup> Indra Suhendra dkk," Distribusi Pendapatan: Konteks Provinsi Di Indonesia", *Jurnal Media Sains Indonesia*, (2021).

<sup>3</sup> Syahri Saparin," Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat Di

Soal zakat, isu yang paling tak terlupakan adalah peran zakat, infaq, dan sedekah sebagai pemegang otoritas dana zakat, lembaga atau lembaga pengelolanya. Dana yang dikumpulkan oleh amil zakat sudah banyak memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat keseluruhan terutama ummat Islam pada khususnya di bidang ekonomi. Karena kita mengeluarkan kewajiban zakat kita, kita menjadi orang yang tawadu' dan semakin bertambah keimanan dan ketaqwaan kita.<sup>4</sup>

Dana zakat atau dana lainnya seperti sedekah ataupun infaq merupakan dana yang diberikan muzaki kepada lazismu untuk dikelola serta disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan keputusan untuk menetapkan penerima penyaluran dana harus tepat sasaran dan berdasarkan tentang potensi penerimaan dana tersebut. Kebutuhan pengguna dan penggunaan zakat, infaq dan sedekah harus dilakukan, dan rencana yang dilaksanakan oleh Lazismu untuk memberdayakan zakat, infaq dan sedekah harus dipahami, sehingga Lazismu harus mengelola dan mengoperasikannya dengan benar dan dengan cara yang dapat dipercaya.

Masalah pengumpulan dana ini, ada beberapa sebab yang menjadi permasalahan dalam pengumpulan dana ini. Penyebab pertama dalam hal ini disebabkan oleh factor intern dan penyebab kedua disebabkan oleh factor extern. Dimana penyebab intern dari pengumpulan ini disebabkan oleh lembaga itu sendiri dan extern nya disebabkan oleh beberapa aspek.<sup>5</sup>

Salah satu pengurus dari lembaga pengelola dana ZIS mengidentifikasi bahwa faktor intern dari permasalahan ini terdapat minimnya SDM yang ada dilembaga tersebut. Sehingga, dana yang dikelola serta penyalurannya mengalami penghambatan sejenak karena keterbatasan tenaga kerja. Begitu juga perihal standarisasi dalam prosedur operasionalnya yang kurang valid yang membuat alokasi kerja serta pengukuran standar kerja kurang terlaksanakan dengan bagus.

Berdasarkan latar belakang diatas bisa peneliti mengambil pendapat bahwa dalam penghimpunan serta penyaluran dana ZIS mengalami beberapa problem. Disini peneliti akan memberikan apa saja permasalahan tersebut dan apa solusinya untuk memperkecil problem tersebut.

## KAJIAN TEORI

### Fundraising ( penghimpunan dana )

Fundraising adalah aktivitas yang utama terhadap sebuah forum. Terutama forum di lembaga amil ini.<sup>6</sup> Adanya fundraising ini diharapkan mampu menghimpun dana dari berbagai sumber yang halal yang mana efek dari bagusnya pergerakan ataupun kinerja dari fundraising ini dapat membuat dana yang dihimpun semakin baik dan banyak, agar yang dikelola serta dana yang disalurkan pun dapat diterima oleh orang banyak yang berhak menerimanya.<sup>7</sup>

Ada beberapa metode yang awamnya digunakan oleh fundraiser dalam mengumpulkan dana yakni pertama dengan menggunakan metode secara langsung atau

Kelurahan Tembilih Barat", (Skripsi – STAI Auliaurranyidin, Tembilihan Riau, 2021)

<sup>4</sup> Nur Indah Astuti Pajar, "Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid 19 Pada BAZNAS Di Kab. Luwu Utara," *Journal Economics Bosowa*, 7, 4, (2021).

<sup>5</sup> Atik Abidah, ' Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga

Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Kodifikasia*, 10, 1, (2016).

<sup>6</sup> Shafwan Bendadeh, " Progres Fundraising Zakat Pada Baitul Mall Aceh Periode 2016-2020", *Journal Of Islamic Law*, 3, 1, (2021).

<sup>7</sup> Mariya Ulpah, " Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta", *Madani Syariah*, 4, 2, (2021).

jumpa langsung dengan donatur. Biasanya proses interaksi dan komunikasi pada metode ini dilaksanakan dengan mendatangi sang donatur dan ingin mengetahui secara langsung bagaimana respon sang donatur. Kedua, dengan menggunakan metode secara tidak langsung. Metode ini dilaksanakan dengan tidak mendatangi donatur secara langsung akan tetapi memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika.<sup>8</sup>

### Penyaluran

Penyaluran atau bahasa lainnya bisa kita bilang distribusi. Penyaluran memiliki makna yakni menyalurkan, mengirimkan, memberikan barang atau jasa kepada orang atau ke suatu tempat.<sup>9</sup>

Penyaluran dalam Islam memiliki makna yakni suatu aktivitas yang dilakukan setelah seseorang atau suatu produk di produksi dan dikonsumsi. Setelah hasil tersebut diproduksi dan dikonsumsi, barulah di salurkan atau di distribusikan, disebar dan dipindahkan kegunaannya dari satu pihak ke pihak yang lain.<sup>10</sup>

Penyaluran dalam Islam menggunakan kinerja dengan cara pertukaran sistem pertukaran Mudharabah. Dimana hasil produksi satu pihak dengan pihak lainnya saling bekerjasama dalam mencapai keuntungan bersama. Dalam Islam bentuk distribusi ini dikategorikan dalam pembahasan tentang Aqd (transaksi).<sup>11</sup>

Di dalam ekonomi Islam makna distribusi mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur

produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing keduanya kaidah –kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.<sup>12</sup>

### Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Rukun Islam yang ke 4 yakni Zakat, memiliki makna dalam bahasa yakni suci, berkembang dan berkah. Sedangkan dalam istilah zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang mu'min atau badan usaha pada bulan Ramadhan untuk diberikan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

Zakat dalam makna syariat Islam yakni sebuah nama untuk sebuah harta yang sudah sampai syaratnya, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>14</sup>

Dalam rukun Islam yang ke 4, sudah jelas bahwa siapa saja yang muslim dan juga mu'min hendaknya mereka menunaikan zakat. Akan tetapi di dalam zakat ada syarat wajib zakat. Yang terdiri dari : 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.<sup>15</sup>

Di dalam zakat, ada 2 perbedaan dalam pembagian zakat, yakni yang pertama zakat

<sup>8</sup> Muhammad Ihsan, Ahmad Mulyadi, Sutisna, "Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4,2, (2021).

<sup>9</sup> Ag Maulana Dkk, "Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1, 2, (2021).

<sup>10</sup> Efri Syamsul Bahri Dkk, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional", *Journal Of Islamic Economics And Banking*, 1, 2, (2020).

<sup>11</sup> Bariyyatin Dkk, "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan", *Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 1 (2021).

<sup>12</sup> Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. (Medan: Febi UINSU Press, 2019), 162.

<sup>13</sup> Aulia Ranny Priyatna, "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Menurut Alqur'an Dan Sunnah", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6, 2, (2018).

<sup>14</sup> Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat", *Jurnal Islamic Circle*, 2, 1, (2021).

<sup>15</sup> Juwita Irma, Putri, "Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada

nafsy atau biasa orang menyebutnya Zakat Fitrah. Kemudian yang kedua yakni Zakat Harta atau yang sering kita sebut zakat Mall.<sup>16</sup> Dimana kedua zakat ini mempunyai satu tujuan yakni mensucikan jiwa, membersihkan harta dan mempererat tali silaturahmi antar seluruh ummat manusia terkhusus antar umat beragama Islam.

Di dalam zakat ada beberapa orang yang berhak dalam menerima zakat tersebut, atau biasa yang disebut Asnaf. Ada 8 Asnaf yang berhak menerima zakat, yakni :<sup>17</sup>

- [1] Fakir
- [2] Miskin
- [3] Amil
- [4] Muallaf
- [5] Riqab
- [6] Gharim
- [7] Fii sabilillah
- [8] Ibnu Sabil

#### **Infaq**

Infaq asal dasar kalimatnya “Anfaqa” artinya adalah keluar. Maknanya ialah mengeluarkan atau memberikan sebagian kepemilikan kita untuk kemaslahatan bersama serta mencari Ridho ilahi.<sup>18</sup> Sedangkan menurut terminologi infaq merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan pahala untuk di akhirat kelak bagi yang menginfaqkan nya secara ikhlas karena Allah. Tujuan dari infaq ini adalah untuk kemaslahatan bersama dan mencari Ridha nya Allah Ta’ala, agar kelak iman dan ketaqwaan serta rasa peduli kita antar sesama semakin meningkat.

#### **Shadaqah**

Shadaqah mempunyai makna kata lain ialah amanah atau jujur. Makna dari shadaqah

ini sama hal nya dengan infaq. Akan tetapi cakupannya tidak hanya perihal materi akan tetapi mencakup luas maknanya. Tidak hanya sekedar materi akan tetapi juga non materi. Seperti kita membaca tasbih, tahmid ,takbir, tahlil, senyum, menebarkan salam antar sesama muslim, mengerjakan amar ma’ruf dan menjauhi kemunkaran itu termasuk shadaqah non materi.<sup>19</sup>

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam studi kasus ini peneliti memperoleh informasi dengan menggunakan jenis penelitian deskriptive dengan menggunakan data kualitatif. Yang dimana data kualitatif tersebut memiliki makna sebuah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.<sup>20</sup> Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjectif. Data kualitatif melalui wawancara semi terstruktur dikumpulkan berasal dari ketua divisi utama Fundraising LAZISMU Medan. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik observasi dipergunakan untuk memberikan apa saja permasalahan serta solusi dari pengumpulan serta penyaluran dana ZIS di lazismu kota medan.

#### **HASIL PENELITIAN**

LAZISMU dalam menjalankan kiprahnya menjadi penghimpun dana serta penyaluran dana ZIS kepada masyarakat dengan melalui sistem layanan jemput , transfer via bank, dan self service center memiliki beberapa kendala dan tantangan. Meskipun Lazismu telah bagus dalam menghimpun dan

Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAZ) Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Cendikia Akutansi*, 2, 1, (2021).

<sup>16</sup> Mega Novita,” Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ummat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 2, (2021).

<sup>17</sup> Aria Sandra, Edwar,” Pemberian Harta Zakat Kepada Mesjid Menurut Wahbah Zuhaili”, *Journal Of Islamic Law*, 3, 2, (2021).

<sup>18</sup> Siti Nursalimah, Ifa, Arif,” Analisis Prioritas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Muzakki Dalam Berzakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid 19”, *Journal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 1, (2021).

<sup>19</sup> Ubabuddin, Umi Nasikhah,” Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan”, *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6, 1, (2021).

<sup>20</sup> Riduwan, *Pengantar Statistika Sosial*. (Bandung: ALFABETA, 2018), h.21

menyalurkan dana, masih saja memiliki kendala dan tantangan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kepada kepala fundraising bapak yudha, saya menemukan berita spesifik terkait problematika serta solusi dari penghimpunan serta penyaluran dana ZIS tersebut.

Berikut tabel ulasan pertanyaan dari wawancara tersebut :

**Tabel 1.1**  
**Format Tanya-Jawab ( Q & A )**

Bapak Yudha ( narasumber ) dan saya bertemu di kantor Lazismu Medan untuk memberikan informasi mengenai beberapa hal yang menjadi suatu problem dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS ini, serta apa solusi yang bisa beliau sampaikan untuk kedepannya.

P : Bagaimana menurut bapak, apa saja problem yang dialami forum ini dalam mengembankan amanahnya sebagai forum atau lembaga pengelola dan pendistribusian dana ZIS?

N : problem yang kita hadapi cukup banyak ya, apalagi kita sebuah lembaga yang mungkin masyarakat sebagian ada yang udh tau dan ada juga yang belum tahu. Jadi, ketika kita ingin menjalin kerjasama terhadap suatu forum kita harus lebih menjelaskan secara detail apa maksud tujuan adanya lazismu ini. Contohnya saja ketika staff fundraiser kita dalam melaksanakan salah satu program kita yakni fundraising, kita kan meletakkan kotak infak kita ke mesjid-mesjid atau ke perusahaan gitu. Nah, disitu bakalan muncul suatu problem dan juga tantangan bagi kita. Seperti problemnya itu ketika BKM mesjid yang sudah kita ajak untuk menjalin hubungan kerjasama selalu tidak jelas kepastiannya ketika ditanya, padahal ketika awal pertemuan sudah sepakat hari dan tanggalnya kapan di terimanya kotak infaq kita.

P : Apa saja tantangannya pak? Yang dihadapi oleh lembaga ini?

N : Tantangannya kita juga harus perbanyak sabar dan istiqomah, karena terkadang masyarakat tidak semuanya mau menerima kita dengan baik. Bahkan pernah salah satu staf kita dalam menjalankan tugasnya pernah diteriakin maling kotak infaq padahal setiap bulannya dana yang dihimpun dari kotak infaq di mesjid-mesjid itu dikumpulkan, tapi mungkin

karena bkm nya sedikit lupa dengan wajah dari staf fundraising kita ya..

P : Selain dari itu apa saja lagi menurut pengalaman bapak yang sudah mengabdikan di lembaga ini, apa saja problem dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ini pak ?

N : hmm...ada juga problem bagi kita yakni masyarakat masih membayar zakatnya secara langsung ke masjid. Mungkin karena sudah kebiasaan masyarakat kita ya dan udah ada undang-undang nya juga. Kemudian SDM disini juga belum memumpuni, masih butuh beberapa orang yang mau ikhlas hati dalam berpartisipasi untuk mengembankan amanah yang suci ini di lembaga Lazismu ini.

P : Menurut bapak apa saja solusi dan harapan bapak terhadap problem ini pak ?

N : Solusi yang kami berikan terhadap problem ini kami selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan pemanfaatan SDA dan SDM yang ada agar masyarakat lebih percaya terhadap lazismu ini. Dan mau berkontribusi di dalamnya. Dan harapan saya agar para warga kita ini menyalurkan dana ZIS nya melalui instansi atau lembaga khusus ZIS ketimbang perorangan. Karena kalau perorangan ini seringkali tidak mengalami pemerataan, terkadang nanti ada yang tidak kebagian ada juga salah sasaran. Maka dari itu warga kita ini hendaknya menyalurkan dana apapun itu baik zakat, infaq, shadaqah atau bantuan lainnya bagusnya lewat instansi saja agar lebih terstruktur penghimpunan dan penyalurannya.

P : ooo begitu pak, baiklah pak terimakasih atas kerjasama dan waktunya ya pak...

N : Iya sama-sama

Dilihat dari wawancara diatas dapat penulis temukan beberapa problem yang dihadapi oleh forum penghimpunan dan penyaluran dana ZIS Kota Medan ini. Bahwasanya mereka mengalami problematika seperti menghadapi bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini agar masyarakat mulai membiasakan diri untuk memberikan dana ZIS atau bantuan lainnya kepada lembaga instansi yang khusus dibidang tersebut. Agar dapat terjadinya pemerataan terhadap penduduk yang berhak menerima dana ZIS tersebut. Serta solusi dari permasalahan

tersebut lazismu terus berenovasi atas kesalahan yang terjadi dan memanfaatkan secara baik SDA dan SDM yang sudah ada.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Lazismu Kota Medan merupakan lembaga nasional yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Didalam mengembangkan amanahnya, ada beberapa problematika yang harus dihadapi serta tantangan yang harus dijalani. Seperti masih minimnya pengetahuan warga terhadap lembaga ini. Kemudian, masih adanya masyarakat yang menyalurkan dana zakatnya perorangan. Hal tersebut yang menjadi sebuah problem dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ini. Akan tetapi, dari wawancara yang sudah dilaksanakan, bapak yudha selaku kepala divisi fundraising, memberikan solusi dan harapan dari permasalahan tersebut. Solusinya yakni mereka akan terus bergerak dengan bagus dan memanfaatkan SDA dan SDM yang ada untuk membangun kepercayaan masyarakat menjadi bagus untuk lembaga ini. Dan beliau berharap agar warga kita ini memilih untuk menyalurkan dana ZIS atau bantuan apapun itu kepada lembaga atau instansi yang bergerak khusus dibidang tersebut. Agar dana yang disalurkan dapat diterima rata oleh yang membutuhkan dan berhak menerimanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ag Maulana Dkk,” Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat”, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 1 No 2, 2021.
- [2] Amin Farih,”Konsistensi Nahdlatul Ulama’ Dalam Mempertahankan Pancasila Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Politik Walisongo*, Vol 1 No 1-6, 2019.
- [3] Aria Sandra, Edwar,” Pemberian Harta Zakat Kepada Mesjid Menurut Wahbah Zuhaili”, *Journal Of Islamic Law*, Vol 3 No 2, 2021.
- [4] Atik Abidah,” Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Kodifikasia*, Vol 10 No 1, 2016.
- [5] Aulia Ranny Priyatna,” Aspek-Aspek Filosofis Zakat Menurut Alqur’an Dan Sunnah”, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol 6 No 2, 2018.
- [6] Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. ( Medan: Febi UINSU Press, 2019), 162.
- [7] Bariyyatin Dkk “Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 12 No 1, 2021.
- [8] Efri Syamsul Bahri Dkk, “ Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional”, *Journal Of Islamic Economics And Banking*, Vol 1 No 2, 2020.
- [9] Indra Suhendra dkk,” Distribusi Pendapatan: Konteks Provinsi Di Indonesia”, *Jurnal Media Sains Indonesia*, (2021).
- [10] Jannus Tambunan, “ Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat”, *Jurnal Islamic Circle*, Vol 2 No 1, 2021.
- [11] Juwita Irma, Putri,” Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAZ) Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Cendikia Akutansi*, Vol 2 No 1, 2021.
- [12] Mariya Ulpah,” Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta”, *Madani Syariah*, Vol 4 No 2, 2021.
- [13] Mega Novita,” Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan

- Ekonomi Ummat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 12 No 2, 2021.
- [14] Muhammad Ihsan, Ahmad Mulyadi, Sutisna,” Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor”, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 4 No 2, 2021.
- [15] Nur Indah Astuti Pajar,” Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid 19 Pada BAZNAS Di Kab. Luwu Utara,” *Journal Economics Bosowa*, Vol 7 No 4, 2021.
- [16] Riduwan, *Pengantar Statistika Sosial*. (Bandung: ALFABETA, 2018), h.21
- [17] Shafwan Bendadeh,” Progres Fundraising Zakat Pada Baitul Mall Aceh Periode 2016-2020”, *Journal Of Islamic Law*, Vol 3 No 1, 2021.
- [18] Siti Nursalimah, Ifa, Arif,” Analisis Prioritas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Berzakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid 19”, *Journal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1 No 1, 2021.
- [19] Syahri Saporin,” Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat Di Kelurahan Tembilah Barat”, (Skripsi – STAI Auliaurranyidin, Tembilahan Riau, 2021)

HALAMAN INI SENGAJA  
DIKOSONGKON

ANALISIS TITIK IMPAS USAHATANI CABAI MERAH (*Capsicum annum*, L)  
 (STUDI KASUS DI DESA PAYA MEULIGOE KECAMATAN PEURUELAH  
 KABUPATEN ACEHTIMUR)

Oleh

Mukti Ramadhani<sup>1)</sup>, Muhammad Jamil<sup>2)</sup>, Cut Gustiana<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas  
 Samudra

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra  
 Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb. Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa,  
 Aceh 24416

E-mail: <sup>1</sup>[muktiramadhani41@gmail.com](mailto:muktiramadhani41@gmail.com)

**Abstract**

“Analisis Titik Impas Usahatani Cabai Merah (*Capsicum annum*, L) (Studi Kasus Di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)”. Dibawah bimbingan Muhammad Jamil dan Cut Gustiana. Tujuan penelitian untuk menganalisis Titik impas (*break event point*) usahatani cabai merah di Desa Paya Meuligo Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survey* dengan pendekatan studi kasus. Dusun Nurul Akla yang terdapat petani cabai merah dijadikan dusun sampel secara sengaja dan terdapat populasi petani cabai merah sebanyak 18 orang dan secara sensus dijadikan sampel penelitian. Metode analisis data meliputi analisis biaya produksi, produksi, pendapatan kotor, pendapatan bersih, analisis BEP<sub>unit</sub> dan BEP<sub>rupiah</sub>. Hasil penelitian rata-rata pendapatan bersih usahatani cabai merah di Desa Paya Meuligo Kecamatan Peureulak yaitu sebesar Rp.12.048.543,40/UT/MT. Produksi cabai merah yaitu rata-rata sebesar 640,33 Kg per MT lebih besar dari nilai BEP<sub>unit</sub> hasil perhitungan yaitu 158,39 Kg, dengan demikian dari sisi BEP<sub>unit</sub> usahatani cabai merah di Desa Paya Meuligo Kecamatan Peureulak dinyatakan layak untuk diusahakan. Harga cabai merah rata-rata sebesar Rp.25.000/Kg lebih besar daripada BEP<sub>rupiah</sub> hasil perhitungan Rp.6.183,95/Kg, dengan demikian dari sisi BEP<sub>rupiah</sub> usahatani cabai merah di Desa Paya Meuligo Kecamatan Peureulak dinyatakan layak untuk diusahakan.

**Keywords:** Usahatani, Cabai Merah, BEP, Layak.

**PENDAHULUAN**

Sektor pertanian, utamanya sayuran merupakan komoditi pertanian yang memiliki harga cukup tinggi di pasaran. Salah satu komoditi sayur yang sangat dibutuhkan oleh hamper semua orang dari berbagai lapisan masyarakat, adalah cabai merah, sehingga tidak mengherankan bila volume peredaran di pasaran dalam skala besar peningkatan produksi pertanian akan berpengaruh pada petani.

Cabai (*Capsicum annum*, L) merupakan salah satu jenis komoditi sayur-sayuran yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, selain berfungsi sebagai bahan makanan cabai juga

banyak mengandung zat-zat gizi yang sangat diperlukan untuk kesehatan manusia seperti protein, (*Capsaicin*) lemak, (*Flavenoid*) karbohidrat, (*Esensial*). (Rostini, 2012).

Produksi cabai merah di Kabupaten Aceh Timur relatif rendah dan masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam daerah sendiri yang cenderung terus meningkat. Masih rendahnya produksi cabai merah ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, seperti teknologi bercocok tanam yang masih kurang baik, kesiapan dan ketrampilan petani cabai yang masih kurang, penyediaan sarana produksi yang masih belum tepat, kurangnya permodalan petani cabai untuk melaksanakan

proses sampai ke pemasaran hasil, serta keterbatasan kemampuan petani untuk memprediksi harga baik harga saprodi maupun harga hasil produksinya.

Desa Paya Meuligo merupakan salah satu sentra produksi tanaman cabai merah keriting di Kecamatan Peureulak. Namun dilihat dari sisi kemampuan skala usahatani masih dapat dikatakan relative kecil, hal ini karena petani umumnya masih mengelola usahatannya dalam skala semi komersial. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang efisiensi penggunaan saprodi dan biaya produksi agar petani memperoleh keuntungan yang optimal.

Menurut Umar (2003), tujuan menganalisis aspek finansial dari suatu studi kelayakan proyek bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang terus.

Titik impas adalah keadaan dimana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, titik impas terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Analisis Titik impas (*break event point*) dilakukan untuk mengetahui biaya, penerimaan, pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari usaha. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis titik impas usahatani cabai merah di Desa Paya Meuligo Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Paya Meuligo Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Lokasi penelitian ini ditentukan

dengan cara *purposive* yaitu dengan sengaja.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survey*. Metode *survey* merupakan metode pengumpulan informasi dari responden dengan menggunakan kuisioner dan observasi langsung. Menurut Sugiyono (2012),

Populasi petani cabai merah di Dusun Nurul Akla sebanyak 18 orang dan secara sensus dijadikan sampel penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *sampling jenuh* karena jumlah populasi petani cabai merah yang relatif kecil. Jadi populasi petani cabai merah yang berjumlah 18 orang yang terdapat di Dusun Nurul Akla semuanya dijadikan sampel penelitian.

## METODE ANALISIS DATA

### a. Total Biaya (TC)

Biaya total dapat dicari dengan :

$$TC = TFC + TVC \dots\dots\dots$$

(Rahim dan Retno, 2007)

Keterangan :

TC = Total Biaya Produksi (Rp/Ha/MT)

TFV = Biaya Tetap (Rp/Ha/MT)

TVC = Biaya Variabel (Rp/Ha/MT)

### b. Pendapatan Kotor (Penerimaan)

Berikut merupakan rumus dari penerimaan usahatani :

$$TR = P \times Q \dots\dots\dots$$

(Rahim dan Retno, 2007)

Keterangan

TR = Total penerimaan

P = Harga

Q = Jumlah Produksi

### c. Pendapatan

Adapun untuk menghitung pendapatan usahatani dapat menggunakan rumus sebagai berikut :  $Pd = TR - TC \dots\dots\dots$

(Rahim dan Retno, 2007)

Keterangan :

Pd : Pendapatan Usahatani

TR : Total Penerimaan

TC : Total Biaya

### d. Analisis Titik Impas/Break Even Point (BEP)

Analisis *Break Event Point* (BEP) adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk menghitung volume produksi suatu usaha akan mencapai titik dimana penerimaan sama dengan total modal yang digunakan. Oleh karena itu setiap usaha harus berproduksi diatas volume produksi break event poin agar terus beroperasi. BEP dicapai jika total penerimaan sama dengan total biaya (TR = TC). Untuk melakukan analisis BEP dapat dilakukan dengan rumus berikut :

$$BEP = \frac{TC_{tetap}}{P - V_{unit}} \dots \dots \dots (Desmizar, 2000)$$

$$BEP = \frac{TC_{tetap}}{P - V_{unit}} \dots \dots \dots (Desmizar, 2000)$$

Keterangan :

TC = Total biaya produksi (Rp/Ha/MT)

P = Harga jual perunit (Rp/Kg)

Q = Jumlah produksi (Kg/MT)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penggunaan Tenaga Kerja**

**Tabel 3.** Rata-Rata Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usahatani Cabai merah di Desa PayaMeuligoe Kecamatan Peureulak

Tahapan	TKDK (HKP/MT)	TKLK (HKP/MT)	Jumlah Total Tenaga Kerja (HKP/MT)
Penyiangan	1,76	0,66	2,41
Pemupukan	1,32	0,88	2,19
Pengendalian HP	1,54	1,85	3,39
Pengikatan	1,98	0,66	2,63
Panen	8,78	3,29	12,07
<b>Total</b>	<b>15,36</b>	<b>7,34</b>	<b>22,70</b>

**Biaya Produksi Usahatani Cabai merah**

**Tabel 4.** Rata-Rata Biaya Tetap Usahatani Cabai merah di Desa Paya Meuligoe KecamatanPeureulak

No	Biaya	Jumlah
1	Sewa Lahan	285.278
2	Penyusutan	71.984
	<b>Total</b>	<b>357.262</b>

**Tabel 5.** Rata-Rata Biaya Variabel Usahatani Cabai merah di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak

No	Biaya (Rp/MT)	Jumlah (Rp/MT)
1	Tenaga Kerja	1.135.027,78
2	Pembelian Pupuk	382.777,78
3	Pembelian Pesticida	1.316.666,67
4	Pembelian Mulsu	658.333,33
5	Bibit	109.722,22
	<b>Total</b>	<b>3.602.527,78</b>

**Tabel 6.** Rata-Rata Biaya Produksi Usahatani Cabai merah di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak

No	Biaya	Jumlah (Rp/UT/MT)
1	Tetap	357.262
2	Variabel	3.959.790
	<b>Total</b>	<b>4.317.052</b>

**Produksi Usahatani Cabai merah**

**Tabel 7.** Rata-Rata Produksi Pada Usahatani Cabai merah di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak

No	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kg/MT)
1	0,30	880,00
2	0,20	575,00
3	0,10	295,00
4	0,15	460,00
5	0,20	610,00
6	0,40	1.125,00
7	0,30	878,00
8	0,30	900,00
9	0,20	625,00
10	0,30	860,00
11	0,25	720,00
12	0,10	290,00
13	0,20	540,00
14	0,20	590,00
15	0,30	875,00
16	0,10	280,00
17	0,15	455,00
18	0,20	568,00
<b>Jumlah</b>	<b>3,95</b>	<b>11.526,00</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>0,22</b>	<b>640,33</b>

**Pendapatan Kotor Usahatani Cabai merah**

**Tabel 8.** Rata-Rata Pendapatan Kotor Pada Usahatani Cabai merah di Desa Paya MeuligoeKecamatan Peureulak

No	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kg/MT)	Harga Produksi (Rp/Kg)	Nilai Produksi (Rp/MT)
1	0,30	880,00	25.000,00	22.000.000,00
2	0,20	575,00	25.000,00	14.375.000,00
3	0,10	295,00	25.000,00	7.375.000,00
4	0,15	460,00	25.000,00	11.500.000,00
5	0,20	610,00	25.000,00	15.250.000,00
6	0,40	1.125,00	25.000,00	28.125.000,00
7	0,30	878,00	25.000,00	21.950.000,00
8	0,30	900,00	25.000,00	22.500.000,00
9	0,20	625,00	25.000,00	15.625.000,00
10	0,30	860,00	25.000,00	21.500.000,00
11	0,25	720,00	25.000,00	18.000.000,00
12	0,10	290,00	25.000,00	7.250.000,00
13	0,20	540,00	25.000,00	13.500.000,00
14	0,20	590,00	25.000,00	14.750.000,00
15	0,30	875,00	25.000,00	21.875.000,00
16	0,10	280,00	25.000,00	7.000.000,00
17	0,15	455,00	25.000,00	11.375.000,00
18	0,20	568,00	25.000,00	14.200.000,00
Jumlah	3,95	11.526,00	450.000,00	288.150.000,00
Rata-Rata	0,22	640,33	25.000,00	16.008.333,33

### Pendapatan Bersih Usahatani Cabai merah

Tabel 9. Rata-Rata Pendapatan Bersih

Usahatani Cabai Merah Di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak

No	Luas Lahan (Ha)	Nilai Produksi (Rp/MT)	Biaya Produksi (Rp/MT)	Pendapatan (Rp/MT)
1	0,30	22.000.000,00	5.303.406,25	16.696.593,75
2	0,20	14.375.000,00	3.600.718,75	10.774.281,25
3	0,10	7.375.000,00	1.894.125,00	5.480.875,00
4	0,15	11.500.000,00	2.746.250,00	8.753.750,00
5	0,20	15.250.000,00	3.561.781,25	11.688.218,75
6	0,40	28.125.000,00	7.065.437,50	21.059.562,50
7	0,30	21.950.000,00	5.381.281,25	16.568.718,75
8	0,30	22.500.000,00	5.407.062,50	17.092.937,50
9	0,20	15.625.000,00	3.585.843,75	12.039.156,25
10	0,30	21.500.000,00	5.333.562,50	16.166.437,50
11	0,25	18.000.000,00	4.504.250,00	13.495.750,00
12	0,10	7.250.000,00	1.822.968,75	5.427.031,25
13	0,20	13.500.000,00	3.619.531,25	9.880.468,75
14	0,20	14.750.000,00	3.724.781,25	11.025.218,75
15	0,30	21.875.000,00	5.355.093,75	16.519.906,25
16	0,10	7.000.000,00	1.917.625,00	5.082.375,00
17	0,15	11.375.000,00	2.848.500,00	8.526.500,00
18	0,20	14.200.000,00	3.604.000,00	10.596.000,00
Total	3,95	288.150.000,00	71.276.218,75	216.873.781,25
Rataan	0,22	16.008.333,33	3.959.789,93	12.048.543,40

### Analisis BEP

#### BEP Volume Produksi

$$\text{BEP Volume Produksi} = \frac{\text{Total Biaya Produksi}}{\text{Harga di Tingkat Produsen}}$$

$$\text{BEP Volume Produksi} = \frac{\text{Rp 3.959.789,93}}{\text{Rp 25.000}}$$

$$= 158,39 \text{ kg}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya produksi sebesar Rp.3.959.789,93/MT dengan harga jual Rp.25.000/Kg sehingga diperoleh BEP volume produksi hasil perhitungan sebesar 158,39 Kg/UT/MT (Lampiran 7). Rata-rata produksi sebesar 640,33 Kg/UT/MT sehingga

lebih besar dari pada BEP volume produksi hasil perhitungan yaitu 158,39 Kg/UT/MT. BEP volume produksi hasil perhitungan yaitu 158,39 Kg/UT/MT artinya dengan produksi tersebut seluruh biaya produksi dapat dikembalikan. Dengan demikian dari sisi BEP volume produksi usahatani cabai merah di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak dinyatakan layak untuk diusahakan.

#### BEP Harga

$$\text{BEP Harga} = \frac{\text{Total Biaya Produksi}}{\text{Produksi}}$$

$$\text{BEP Harga} = \frac{\text{Rp 3.959.789,93}}{64033}$$

$$= \text{Rp. 6.183,95}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga produksi yaitu sebesar Rp.25.000/Kg dimana harga cabai merah lebih besar dari pada BEP harga hasil perhitungan Rp.6.183,95/Kg. BEP harga hasil perhitungan Rp.6.183,95/Kg artinya dengan harga tersebut seluruh biaya produksi dapat dikembalikan. Dengan demikian dari sisi BEP harga produksi usahatani cabai merah di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak dinyatakan layak untuk diusahakan.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Produksi cabai merah yaitu rata-rata sebesar 640,33 Kg per MT lebih besar daripada BEP volume produksi hasil perhitungan yaitu 158,39 Kg, dengan demikian dari sisi BEP volume produksi usahatani cabai merah di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak dinyatakan layak untuk diusahakan.
2. Rata-rata harga cabai merah sebesar Rp.25.000/Kg lebih besar dari pada BEP harga hasil perhitungan Rp.6.183,95/Kg, dengan demikian dari sisi BEP harga produksi usahatani cabai merah di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak dinyatakan layak untuk diusahakan.

#### Saran

1. Disarankan agar petani cabai merah di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak

melakukan rotasi tanam dengan tanaman kacang-kacangan karena dapat memperbaiki kondisi lahan sawah dan dapat memutus mata rantai hama penyakit tanaman cabai merah agar resiko kegagalan usahatani dapat ditekan sekecil mungkin.

2. Disarankan agar para pemangku kepentingan memahami bahwa petani cabai merah di Desa Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak membutuhkan harga jual cabai merah yang stabil dan layak sehingga dapat memperoleh keuntungan yang layak dan berkesinambungan

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Kholik Hidayah, 2014. *Analisis Finansial Usahatani Cabai Merah Skala Petani di Kota Samarinda* Studi Kasus di Kelurahan Lempake Samarinda. Jurnal Agrifor. Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda.
- [2] Antara, Made dan RakaWija, 2014. *Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Optimasi Aktivitas Produksi Usahatani. Studi kasus di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan*. Majalah Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Udayana No 23 XIV. Februari. Denpasar.
- [3] Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- [4] Daniel, 2002 *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- [5] Desmizar, 2000. *Pengantar Bisnis: Analisis Break Even Point*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [6] Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura, 2019. *Laporan Bulanan Komoditi Pertanian*, Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
- [7] Idham, A., Lestari, T. dan Adriani, D. 2010. *Analisis finansial sistem usaha tani terpadu (integrated farming system) berbasis ternak sapi di kabupaten oganilir*. Jurnal Pembangunan Manusia 6. <http://balitbangdasumsel.net/data/download/20100414125413.pdf>. [3 April 2011].
- [8] Malik Rachmati & Siringoringo Hotniar. 2007. *Analisis Pengaruh Kredit, Aset dan Jumlah Pegawai Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Jurnal vol 7 no 2 Universitas Gunadarma, Jakarta
- [9] Nazirah, 2007. *Aneukglee, Wajah Awal Desa Primata Aceh Besar*, dalam Buletin Pertanian, *Info Teknologi*, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Provinsi NAD.
- [10] Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- [11] Rahma A, 2011. *Kelayakan Usahatani Cabai Merah (Capsicum Annuum L.) (Kasus : Desa Tanjung Ibus, Kec. Secanggang, Kab. Langkat)*, Fakultas Pertanian USU Prodi Agribisnis. Medan (Skripsi tidak diterbitkan)
- [12] Redaksi Agro Media, 2008. *Budidaya dan Bisnis Cabai*. Agromedia Pustaka. Jakarta
- [13] Reigana, Gabriel Laurens. 2017. *Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Cabai Merah (Capsicum Annuum L.)* Studi Kasus Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat (Skripsi) Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
- [14] Rostinineni, 2012. *Strategi Bertanam Cabai*. Agromedia. Jakarta Soekartawi, 2011. *Analisis Usahatani*. UI Press. Jakarta
- [15] Sugiarto, dkk, 2000. *Ekonomi Mikro Sebuah Kaajian Komprehensif*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- [16] Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- [17] Taufik Ridianto, dkk, 2017. *Analisis Usahatani Cabai Merah (Capsicum Annuum L.) Varietas Hot Beauty*. Studi

Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Jurnal mahasiswa : Universitas Padjajaran.

- [18] Umar, 2003. *Studi Kelayan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [19] Umar. Husein, 2001. *Studi Kelayakan Bisnis Edisi 2*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [20] Yulizar, 2015 .Analisis Pendapatan Usahatani Cabai Merah Di Kecamatan Woyla KabupatenAceh Barat. Skripsi :Universitas Teuku Umar, Aceh Barat.

---

**UPAYA APOTEKER KOMUNITAS DALAM PENGENDALIAN INFEKSI COVID-19:  
TINJAUAN LITERATUR****Oleh****Fitria Maesaroh<sup>1)</sup>, Ida Ayu Eka Widiastuti<sup>2)</sup> & Candra Eka Puspitasari<sup>3)</sup>****<sup>1,3</sup>Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Mataram****<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Mataram****E-mail: [1fitriamaesaroh2421@gmail.com](mailto:fitriamaesaroh2421@gmail.com)****Abstract**

Infeksi COVID-19 pertama kali dilaporkan di China pada Desember 2019 yang kemudian dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Virus ini terbukti sangat menular dan mengakibatkan masalah pernapasan yang dapat mengancam jiwa. Pelayanan kefarmasian merupakan andalan penting dalam kesehatan masyarakat dan memiliki potensi yang cukup besar untuk memerangi pandemi COVID-19. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai upaya apoteker komunitas dalam menghambat penyebaran infeksi COVID-19. Pencarian literatur dilakukan melalui database PubMed menggunakan metode PICO (*Population/Problem, Intervention, Compare, Outcome*) dengan P: *infection COVID-19*, I: *Controlling COVID-19*, O: *Community Pharmacists' Efforts*. Diperoleh sebanyak 331 artikel dengan tahun terbit 2019-2021 dan 7 diantaranya memenuhi kriteria penelitian. Dari penelusuran literatur diketahui bahwa upaya apoteker komunitas dalam menanggulangi infeksi COVID-19 diantaranya adalah menyediakan HCPs (*Health Care Provider*) yang dapat diakses, memastikan stok dan akses ke obat-obatan, menjamin ketersediaan obat penyakit kronis, *home care*, edukasi pasien, sanitasi ruangan apotek, skrining pasien COVID-19, vaksinasi, meluruskan kesalahpahaman (mitos), memberikan dukungan psikologis, farmakovigilans di tingkat komunitas, dan mengontrol penggunaan suplemen makanan.

**PENDAHULUAN**

Sindrom pernapasan akut parah yang disebabkan oleh novel coronavirus (SARS-CoV-2) pertama kali dilaporkan di China pada Desember 2019 yang kemudian dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Virus ini terbukti sangat menular dan mengakibatkan masalah pernapasan yang dapat mengancam jiwa (Mallhi *et al.*, 2020)

Identifikasi COVID-19 di Indonesia merupakan tantangan yang sangat besar, mengingat tersedianya pengujian secara masif menggunakan tes cepat (*rapid tests*) tidak mencukupi. Ketidakmampuan untuk menguji secara luas dan cepat telah menghambat kemampuan kita untuk mengkarakterisasi

epidemiologi penyakit, mencegah penyebaran lebih lanjut, dan memastikan penggunaan sumber daya secara optimal (Bukhari, 2020). Melalui langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan oleh WHO, pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menangani merebaknya COVID-19 salah satunya dengan mensosialisasikan gerakan pembatasan jarak (*Social Distancing*) (Sum and Ow, 2020)

Tenaga kesehatan merupakan profesi yang berada di garda depan dan berjuang langsung melawan COVID-19 (Pesulima and Hetharie, 2020). Salah satunya adalah apoteker. Apoteker dapat memainkan peran penting dalam pencegahan, manajemen, dan penahanan penyakit (Kretchy, Asiedu-danso and Kretchy, 2020). Tinjauan literatur ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai

upaya apoteker komunitas dalam menghambat penyebaran COVID-19.

## METODE PENELITIAN

Strategi yang digunakan untuk mencari data acuan dalam artikel ini yaitu menelusuri internet dengan menggunakan browser Google Chrome pada database PubMed menggunakan metode PICO (*Population/Problem, Intervention, Compare, Outcome*) dengan P: *infection COVID-19*, I: *Controlling COVID-19*, O: *Community Pharmacists' Efforts*. Data yang diperoleh diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yaitu upaya apoteker komunitas dalam menghambat penyebaran COVID-19, sedangkan kriteria eksklusi adalah artikel yang menjelaskan upaya apoteker klinis, apoteker pengatur obat, dan apoteker industri, tidak dapat diakses, tidak lengkap, dan tahun publikasi lebih dari 10 tahun yang lalu (di bawah tahun 2011). Artikel selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pencarian

Berdasarkan hasil pencarian diperoleh 331 artikel yang berpotensi relevan. Setelah menghapus duplikat dan meninjau judul dan abstrak, 35 artikel dipilih untuk dibaca secara lengkap. Dari jumlah tersebut, 7 studi memenuhi kriteria inklusi dan dimasukkan untuk ditinjau. Rankuman yang memuat penjelasan terkait upaya apoteker komunitas dalam pengendalian infeksi Covid-19 terdapat pada lampiran.

#### 1. Pharmacists and COVID-19

Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa dalam perang melawan COVID-19, petugas kesehatan garis depan sangat penting untuk mencegah pandemi. Apoteker komunitas telah memainkan berbagai peran dalam mendukung sistem perawatan kesehatan selama COVID-19. Beberapa peran telah dijelaskan dalam tabel di atas. Namun, menurut peneliti dalam artikel ini,

apoteker masih kerap dipandang sebelah mata dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya.

#### 2. Multilevel Engagements of Pharmacists During the COVID-19 Pandemic: The Way Forward

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menonjolkan peran potensial dan kegiatan yang dapat dimulai apoteker di berbagai fasilitas kesehatan untuk membantu meringankan tekanan pada sistem perawatan kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, peneliti juga menonjolkan peran potensial dan kegiatan yang dapat dimulai apoteker di berbagai fasilitas kesehatan untuk membantu meringankan tekanan pada sistem perawatan kesehatan. Hal ini pula yang membuat peran apoteker yang dijabarkan peneliti dalam artikel ini lebih banyak dan rinci jika dibandingkan dengan artikel lainnya.

#### 3. Medication Management and Adherence During the COVID-19 Pandemic: Perspectives and Experiences From Low And Middle-Income Countries

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus kepada kontribusi apoteker komunitas untuk mengelola kondisi kronis dan meningkatkan kepatuhan minum obat selama pandemi COVID-19. Artikel ini menyoroti praktik perawatan kefarmasian apoteker komunitas untuk pasien dengan penyakit kronis selama pandemi. Mulai dari memberikan informasi tentang COVID-19, mendorong kepatuhan minum obat hingga menjamin ketersediaan obat penyakit kronis di masa pandemi COVID-19.

#### 4. Recommendations and guidance for providing pharmaceutical care services during COVID-19 pandemic: A China perspective

Penelitian ini membahas terkait peran apoteker komunitas dan pharmaceutical care (PC) selama pandemi COVID-19 dalam mempromosikan pencegahan dan pengendalian yang efektif dan penggunaan obat yang aman bagi pasien komunitas. Menurut peneliti,

apoteker harus menggunakan berbagai pendekatan untuk memberikan layanan pharmaceutical care (PC) dalam pengeluaran obat.

#### 5. Community Pharmacists' Contributions to Disease Management During the COVID-19 Pandemic

Penelitian ini termasuk dalam satu kesatuan dalam buku penelitan "Preventing Chronic Disease Public Health Research, Practice, And Policy". Artikel ini berfokus pada kontribusi apoteker komunitas dalam menangani penyakit kronis dalam masa pandemi COVID-19. Kontribusi utama yang disebutkan dalam penelitian ini adalah vaksinasi dan pengujian pasien di tempat (rapid test).

#### 6. Peran Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek pada Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini adalah penelitian yang menjelaskan mengenai peran apoteker, sebagai praktisi kesehatan yang memainkan peran penting dalam menghambat penyebaran Covid-19, dan dapat menjadi peserta aktif dalam upaya nasional dan masyarakat untuk memerangi dan mengatasi wabah ini. Dalam penelitian ini dijelaskan SOP pelayanan kefarmasian dalam komunitas, klinis, dan juga industri. Namun, untuk saat ini kami hanya berfokus pada SOP pelayanan kefarmasian dalam komunitas.

#### 7. Myth Busters: Dietary Supplements and COVID-19

Dalam artikel ini dijelaskan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan Covid-19 adalah menjaga imunitas tubuh. Pemenuhan zat gizi yang paling tepat adalah melalui pola makan bergizi seimbang. Namun, jika kecukupan zat gizi tidak dapat dipenuhi dari makanan maka konsumsi suplemen dapat membantu memenuhi kecukupan zat gizi tubuh. Apoteker komunitas berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat terkait suplemen makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

## Pembahasan

Apoteker komunitas memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan perawatan untuk pasien selama masa pandemi (Bluml *et al.*, 2014).

Upaya-upaya apoteker komunitas dalam menanggulangi infeksi Covid-19 diantaranya adalah:

a. Menjadi penyedia layanan kesehatan (HCPs/Health Care Provider) yang dapat diakses.

Apoteker selalu menjadi penyedia layanan kesehatan yang paling mudah diakses, terutama di era COVID-19 (Elbeddini *et al.*, 2020). Untuk memastikan kelangsungan layanan kepada masyarakat, perlu dilakukannya minimalisasi kontak antar pasien/pelanggan dengan mengeluarkan obat-obatan melalui jendela kecil. Pelindung plastik juga dapat diletakkan di depan area pengeluaran, dan apoteker disarankan untuk menggunakan peralatan pelindung individu yang sesuai, jika diperlukan. Dan pasien harus menjaga jarak 1-2 meter di antara mereka saat menunggu dalam antrian. (IPF, 2020).

b. Memastikan stok dan akses ke obat-obatan

Untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19, apotek harus menjamin pasokan obat-obatan, termasuk yang digunakan untuk pencegahan penyakit, diagnosis, dan pengobatan. Apotek harus memiliki seorang apoteker yang bertanggung jawab pada pengadaan, penyimpanan serta distribusi (Dhiringantara, 2021). Analisis permintaan obat untuk mengidentifikasi obat yang diminati juga harus dilakukan secara parallel (Badreldin *et al.*, 2020).

c. Penatalaksanaan penyakit kronis dan menjamin ketersediaan obat penyakit kronis

Apoteker harus aktif memberikan panduan kepada pasien komunitas tentang manajemen penyakit kronis untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien, mendukung pemantauan diri mereka terhadap efektivitas dan keamanan terapi, dan menghindari kunjungan rumah sakit yang tidak perlu selama pandemi (Zheng *et al.*,

2021). Untuk meningkatkan ketersediaan obat penyakit kronis dalam waktu-waktu ini, apoteker juga berkolaborasi dengan sesama sejawat di platform sosial untuk mencari obat bagi pasien (Kretchy, Asiedu-danso and Kretchy, 2020).

d. Layanan Kesehatan jarak jauh (Home Care)

Apoteker dapat melakukan perawatan di rumah untuk pasien dengan dugaan infeksi virus corona baru dengan gejala ringan (Li *et al.*, 2020). Menurut Mallhi (2020), pelayanan ini tidak hanya bermanfaat bagi pasien COVID-19 tetapi juga bagi pasien kronis dan masyarakat umum yang mengalami keterbatasan gerak di tengah lockdown (Mallhi *et al.*, 2020).

e. Edukasi pasien

Apoteker komunitas harus memberikan edukasi pasien atau layanan konsultasi tentang pencegahan penyakit, identifikasi dini COVID-19, dan penggunaan obat yang tepat. Edukasi pasien harus mencakup pada pemilihan dan penggunaan masker yang tepat, kebersihan tangan, kebersihan pernapasan, pemilihan dan penggunaan produk desinfeksi yang aman, strategi perlindungan diri di luar ruangan dan di dalam ruangan. Selain itu, menurut Kretchy (2021), edukasi terkait kepatuhan minum obat dan penggunaan obat secara rasional juga penting untuk ditekankan (Kretchy, Asiedu-danso and Kretchy, 2020).

f. Sanitasi ruangan apotek

Apoteker harus menjaga ruangan apotek tetap bersih dan aman dari virus. Sanitasi ruangan dengan disinfektan dilakukan di setiap sudut yang di ruangan apotek (Dhiringantara, 2021). Apoteker komunitas juga dapat menggunakan keahlian mereka dalam meracik dan memastikan ketersediaan hand sanitizers dan disinfektan setiap saat dengan biaya yang terjangkau (Mallhi *et al.*, 2020).

g. Skrining pasien Covid-19

Deteksi dini dan rujukan kasus yang dicurigai sangat penting untuk mencegah transmisi komunitas skala besar. Oleh karena

itu, apoteker komunitas harus tetap sangat waspada dan dapat menyaring pasien untuk rujukan yang diperlukan. Setiap kasus yang dicurigai harus segera diberitahukan kepada otoritas kesehatan yang ditunjuk untuk menghindari penyebaran penyakit lebih lanjut (Mallhi *et al.*, 2020).

h. Vaksinasi

Apoteker harus bekerja untuk memberikan vaksinasi kepada semua orang, terutama anak-anak dan populasi berisiko yang tertinggal (Santoli, 2020). Selain itu, apoteker komunitas akan menjadi pemain kunci dalam pemberian vaksin skala luas setelah vaksin yang aman untuk virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang baru tersedia (Strand, 2020).

i. Meluruskan kesalahpahaman (mitos)

Apoteker komunitas sebagai profesional terpercaya harus dapat memainkan peran penting dalam menghilangkan mitos-mitos terkait pengobatan dan pencegahan pandemi COVID-19 yang berkembang pesat. Salah satunya dengan membuat pamflet dimitos dan mendistribusikannya ke setiap pelanggan yang hadir tempat (Mallhi *et al.*, 2020).

j. Memberikan dukungan psikologis

Apoteker harus membantu pasien untuk memahami situasi pandemi COVID-19 dengan benar untuk meningkatkan kesehatan mental pasien selama pandemi. Apoteker harus mendorong pasien untuk melihat sesuatu dari perspektif positif. Menjaga jadwal kerja dan istirahat yang teratur dengan olahraga yang cukup juga dapat meningkatkan sistem kekebalan dan meredakan emosi negatif pada saat yang sama (Zheng *et al.*, 2021).

k. Farmakovigilans di tingkat komunitas

Apoteker harus tetap waspada terhadap DRP terkait dengan penggunaan obat dimasa Covid-19. Apoteker harus memastikan penggunaan obat yang aman, terutama di antara pasien kronis. Selain itu, apoteker komunitas harus secara efisien memantau potensi efek samping dari obat-obatan yang digunakan

dalam pencegahan dan pengobatan Covid-19 (Mallhi *et al.*, 2020).

1. Mengontrol penggunaan suplemen makanan  
Apoteker berkewajiban memberikan informasi yang benar tentang suplemen makanan yang diserahkan mencakup cara pemakaian, cara penyimpanan, dan efek samping yang tidak diinginkan yang paling dimungkinkan akan timbul sekaligus tindakan yang disarankan apabila hal itu memang benar benar terjadi. penyedia layanan kesehatan harus dapat memberikan informasi atau merekomendasikan produk suplemen yang aman dan didukung oleh pengujian ilmiah (Adams, Baker and Sobieraj, 2020)

## PENUTUP

### Kesimpulan

Upaya apoteker komunitas dalam menanggulangi infeksi Covid-19 diantaranya dengan Menyediakan HCPs (Health Care Provider) yang dapat diakses, memastikan stok dan akses ke obat-obatan, menjamin ketersediaan obat penyakit kronis, home care, edukasi pasien, sanitasi ruangan apotek, skrining pasien Covid-19, vaksinasi, meluruskan kesalahpahaman (mitos), memberikan dukungan psikologis, farmakovigilans di tingkat komunitas, dan mengontrol penggunaan suplemen makanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adams, K. K., Baker, W. L. and Sobieraj, D. M. (2020) 'Myth Busters: Dietary Supplements and COVID-19'. doi: 10.1177/1060028020928052.
- [2] Badreldin, H. A. *et al.* (2020) 'Pharmacists roles and responsibilities during epidemics and pandemics in Saudi Arabia: An opinion paper from the Saudi Society of clinical pharmacy', *Saudi Pharmaceutical Journal*, 28(8), pp. 1030–1034. doi: 10.1016/j.jsps.2020.07.002.
- [3] Bluml, B. M. *et al.* (2014) 'Improving outcomes for diverse populations disproportionately affected by diabetes: Final results of Project IMPACT: Diabetes', *Journal of the American Pharmaceutical Association: Practical Pharmacy Edition*, 54(5), pp. 477–485. doi: 10.1331/JAPhA.2014.13240.
- [4] Elbeddini, A. *et al.* (2020) 'Pharmacists and COVID-19', 3, pp. 1–4.
- [5] Kretchy, I. A., Asiedu-danso, M. and Kretchy, J. (2020) 'Medication management and adherence during the COVID-19 pandemic: Perspectives and experiences from low-and middle-income countries', *Research in Social and Administrative Pharmacy* 17 (2021) 2023–2026.
- [6] Li, H. *et al.* (2020) 'Research in Social and Administrative Pharmacy Fighting against COVID-19: Innovative strategies for clinical pharmacists', *Research in Social and Administrative Pharmacy*, (April), pp. 1–6. doi: 10.1016/j.sapharm.2020.04.003.
- [7] Mallhi, T. H. *et al.* (2020) 'Multilevel Engagements of Pharmacists During the COVID-19 Pandemic: The Way Forward', 8(December), pp. 1–14. doi: 10.3389/fpubh.2020.561924.
- [8] Pesulima, T. L. and Hetharie, Y. (2020) 'S a s i', 26(28), pp. 280–285.
- [9] Sum, Z. and Ow, C. (2020) 'Community Pharmacy Response to Infection Control during COVID-19. A Cross-Sectional Survey', *Research in Social & Administrative Pharmacy*. doi: 10.1016/j.sapharm.2020.06.014.
- [10] Zheng, S. *et al.* (2021) 'Research in Social and Administrative Pharmacy Recommendations and guidance for providing pharmaceutical care services during COVID-19 pandemic: A China perspective', *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 17(1), pp. 1819–1824. doi: 10.1016/j.sapharm.2020.03.012.

## LAMPIRAN

Artikel	Negara	Upaya apoteker komunitas
Pharmacists and COVID-19 (Elbeddini, 2020)	Canada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi penyedia layanan kesehatan (HCPs/Health Care Provider) yang dapat diakses.</li> <li>- Pembaruan obat kronis</li> <li>- Layanan kesehatan jarak jauh (<i>Home Care</i>)</li> <li>- Memantau dan mengelola kondisi kronis</li> <li>- Konsultasi penyakit ringan</li> <li>- Skrining pasien covid-19</li> <li>- Mengklarifikasi kesalahpahaman</li> </ul>
Multilevel Engagements of Pharmacists During the COVID-19 Pandemic: The Way Forward (Mallhi, 2020)	Pakistan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pendidikan dan konseling penyakit kepada pasien</li> <li>- Memberikan pendidikan tentang kebersihan tangan dan pernapasan</li> <li>- Mendorong untuk menjaga jarak atau <i>social distancing</i></li> <li>- Mengajarkan terkait penggunaan masker wajah</li> <li>- Menghilangkan mitos dan menetralkan cerita yang menyesatkan</li> <li>- Menyediakan layanan telefarmasi</li> <li>- Melakukan pengawasan aktif terhadap kasus-kasus yang mencurigakan</li> <li>- Melakukan pembersih dan disinfektan</li> <li>- Memastikan persediaan obat yang sesuai</li> <li>- Menyediakan pasokan obat yang efektif kepada pelanggan</li> <li>- Pengelolaan obat dan penyakit</li> <li>- Farmakovigilans di tingkat komunitas</li> </ul>
Medication management and adherence during the COVID-19 pandemic: Perspectives and experiences from low-and middle-income countries (Kretchy, 2021)	Ghana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan informasi dan komunikasi tentang covid-19</li> <li>- triage di tingkat komunitas untuk kasus suspek covid-19</li> <li>- Menjamin ketersediaan obat penyakit kronis</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review dan tindak lanjut obat</li> <li>- Mempromosikan kepatuhan minum obat</li> <li>- Mendukung penggunaan obat rasional</li> </ul>
Recommendations and guidance for providing pharmaceutical care services during COVID-19 pandemic: A China perspective (Zheng, 2021)	China	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeluaran obat, skrining pasien dan rujukan</li> <li>- Penatalaksanaan penyakit kronis</li> <li>- Penggunaan infus yang aman</li> <li>- Edukasi pasien</li> <li>- <i>Home Care</i></li> <li>- Memberikan dukungan psikologis</li> </ul>
Community Pharmacists' Contributions to Disease Management During the COVID-19 Pandemic (Strand, 2020)	USA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian di tempat perawatan</li> <li>- Vaksinasi</li> </ul>
Peran Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek pada Masa Pandemi Covid-19 (Dhirgantara, 2021)	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan stok dan akses ke obat-obatan</li> <li>- Sanitasi ruangan apotek</li> <li>- Layanan pasien/pelanggan</li> </ul>
Myth Busters: Dietary Supplements and COVID-19	USA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengontrol penggunaan suplemen makanan</li> <li>- Memberikan informasi yang benar mengenai suplemen makanan</li> </ul>

---

**REVIEW OF THE DEATH PENALTY AGAINST  
PERPETRATORS OF NARCOTICS CRIME BASED ON SOCIOLOGY OF LAW**

Oleh

Itok Dwi Kurniawan<sup>1</sup>, Vincentius Patria Setyawan<sup>2</sup>)

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id)

**Abstract**

This article describes various public opinions regarding the imposition of the death penalty for drug offenders in Indonesia. The study focused on differences of opinion community in responding to the execution of the death penalty for drug offenders and efforts formulate effective criminal penalties for drug crimes. This article examines it from the point of view of the sociology of law, especially the theory of behaviorism and the theory of justice. In from the perspective of the sociology of law, a sentencing device should include two things, namely: first, it must accommodate the aspirations of the people who demand retaliation as a offset on the basis of the extent of the offender's fault. Second, it must include objectives punishment, namely maintaining and maintaining community unity. With Thus, the law must represent the community's sense of justice. Hence attitudes and actions people who choose the death penalty for drug offenders can justified even though in other places the death penalty is abolished.

**Keywords : Death Penalty, Nartotics Act, Sosiology of Law.**

**INTRODUCTION**

Criminal law is part of the overall law that applies in a country in outline will contain 3 (three) points, namely: prohibited acts and their sanctions, when and in what cases violators of the prohibition can be punished, and how to impose criminal sanctions on the violator.<sup>1</sup> According to this definition, criminal law is actually subdivided into material criminal law and formal criminal law. Material criminal law which is often referred to as the law of sanctions is that we can find its scope in the first and second points. Material criminal law includes prohibit acts and their sanctions, and when and in what cases violators of the prohibition can be punished.

The characteristic of criminal law as a sanction law is that it has cruel sanctions compared to other legal domains, such as civil law and state administrative law. Given the

severity of criminal sanctions, when compared to sanctions in other legal domains, the application of criminal law should be used as an *ultimum remidium* or last remedy, when other efforts have been taken but have not succeeded in resolving a legal problem. Apart from acting as an *ultimum remidium* or the last remedy, criminal law is also characterized as a double-edged sword, on the one hand it protects the victim, but on the other hand it will injure the perpetrator, both of whom here are on the same position, namely as citizens.

Criminal sanctions in criminal law are a tool and not a goal of criminal law. Sanctions in the form of a criminal if carried out are nothing but in the form of sorrow or suffering that causes discomfort to someone who is affected, namely the convicted person. While the main purpose of criminal law is to create order, which specifically is in the form of avoiding the

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, p. 1.

public from losses from protected legal interests.<sup>2</sup> Criminal sanctions as a tool and not a goal mean that the main purpose of the presence of criminal law in a country is to maintain order. In addition to maintaining order, the presence of criminal law is also to protect legal interests that are protected in society, namely life, body, property and decency. Meanwhile, the imposition of cruel criminal sanctions can threaten a person's body and life. This is what is called that criminal sanctions are not a goal, but a tool. the purpose of criminal law is not to impose sanctions but to use sanctions as a tool to achieve order, even though it hurts the perpetrators who are also members of the community.

The death penalty is a form of sanction in Indonesian criminal law. The death penalty is one of the cruelest forms of criminal sanctions carried out by eliminating the life of the convict. The regulation of the death penalty as a form of criminal sanction can be found in Article 10 of the Criminal Code (KUHP).<sup>3</sup> The death penalty can be imposed by a judge by first considering wisely based on legal facts at trial and sufficient evidences to arrive at a verdict to impose a death penalty on a person.

Based on the cruel consequences of the death penalty, namely the loss of a person's life, the death penalty must be applied selectively. The death penalty was handed down to a defendant who was proven to have committed a serious and extraordinary crime. The parameter for determining this serious and extraordinary

crime is seen from the consequences or losses caused by the crime. One of the crimes that are classified as serious crimes is the illicit trafficking of narcotics which can damage the younger generation as the nation's next generation and can hinder national development. In addition to the large are around 269 million people in the world who abuse narcotics (a 2018 study). This number increased by 30% from 2009 with the number of narcotic addicts recorded at more than 35 million people (the third booklet of the Word Drug Report, 2020). In addition, UNODC also reports that there will be a global phenomenon that as of December 2019 it has been found that more than 950 types of new substances have been added. Meanwhile in Indonesia, based on data from the National Narcotics Agency Laboratory Center until 2020, as many as 83 NPS have been detected, and 73 NPS of which have been included in the Minister of Health Regulation No. 22 of 2020 concerning Changes to the Classification of Narcotics.<sup>4</sup>

The Head of the Criminal Investigation Agency (Kabareskrim) of the Indonesian National Police, Komjen Agus Andrianto, revealed that narcotics trafficking and narcotics abuse in Indonesia is still quite high. Based on data from the Indonesian National Police (Polri) there were 24,878 people arrested from 19,229 cases in Indonesia from January to June 2021.<sup>5</sup> This shows that the number of illicit narcotics trafficking in Indonesia in 2021 is still likely to be high, although when compared to the

<sup>2</sup> Mustaghfirin dan Irwanto Efendi, Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2 No. 1 2015, hlm. 14

<sup>3</sup> Article 10 of the Criminal Code defined: The crime sanctions consists of: a. principal punishment: 1. Death Penalty; 2. prison; 3. imprisonment; 4. criminal fines; 5. criminal cover. B. additional punishment 1. revocation of certain rights; 2. confiscation of certain goods; 3. announcement of judge's verdict.

<sup>4</sup> BNN, Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba", <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 11:01 WIB

<sup>5</sup> Kompas, 24.878 Orang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba di Indonesia sejak Januari 2021, Kompas.com publish 14 Juni 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 11:12 WIB.

previous year there was a decline. According to data from the National Narcotics Agency, the trend of the number of suspected narcotics cases has tended to decline since 2018. The National Narcotics Agency (BNN) reported that the number of suspects in national narcotics cases was 1,307 people (833 cases) in 2020. This number decreased by 13.16% from the previous year, which is 1,505 people.<sup>6</sup>

Based on these data, the application of the death penalty is one form of effort that shows the seriousness of the government towards handling illicit narcotics trafficking in this country. This includes the imposition of the death penalty that has been carried out on Freddy Budiman. The death penalty imposed on Freddy Budiman and several other defendants in narcotics trafficking cases is a form of deterrence so that traffickers and drug dealers feel deterred from doing so and as a form of warning for narcotics perpetrators who are currently still on the loose. Based on data from the National Narcotics Agency, as of 2020, there were 132 accused who were sentenced to death penalty in narcotics trafficking cases, and most of these verdicts had permanent legal force (*inkracht*).

The imposition of capital punishment for convicts of narcotics illicit trafficking has been regulated in Article 113 paragraph (2) and Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 (hereinafter referred to as the Narcotics Law). The imposition of capital punishment if viewed from the harmonization of positive legal legislation, is contrary to human rights as regulated in Article 4 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (hereinafter referred to as the Human Rights Law). Because human rights are against killing, the Criminal Code and Indonesian laws and regulations

explain that: Article 10 of the Criminal Code determines the types of crimes, one of which in Article 1 letter a number 1 explains that one of the crimes is the death penalty. This shows that the death penalty in Indonesia is still a dilemma because human rights also stipulate that every human being has the right to life and livelihood.

When viewed from the aspect of criminal law, according to the Narcotics Law the death penalty also applies, while according to human rights it fully protects humans.<sup>7</sup> Is the death penalty suitable for drug traffickers, while on the other hand, the state recognizes the right to life as one of the absolute human rights that must be defended and guarded for the sustainability of human life.

There is a lot of debate over the implementation of the death penalty for criminals in Indonesia discussed even though similar debates have occurred repeatedly over the years previously. Several years ago, in August 2016 the death penalty for the perpetrators the illicit trafficking of narcotics has been carried out one year earlier, on January 18, 2015, to be exact. Similar sentences were also handed down to six drug offenders.<sup>8</sup>

Human rights activists complain about the imposition of criminal sanctions that are considered contrary to human rights. Therefore they asked the Indonesian government to stop the imposition of the death penalty in Indonesia. Criticism also does not only come from within the country, but also from neighboring countries whose citizens are subject to the death penalty such as Australia. Australia has even threatened to ban its citizens from going to Indonesia if Indonesia continues to practice the death penalty. Different attitudes towards the implementation of the death penalty have actually existed for a long time and exist in

<sup>6</sup> Databoks, BNN Catat Jumlah Tersangka Narkotika Tanah Air Sebanyak 1.307 Orang pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bn-catat-jumlah-tersangka-narkotika-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 11:14 WIB.

<sup>7</sup> Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana, 2010. Hak Asasi Manusia dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 36.

<sup>8</sup> Agus Purnomo, 2016, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 12.

several countries. In Indonesia, for example, the implementation of the death penalty is still legally recognized and applied, although its intensity fluctuates. Until 2006 there were 11 laws and regulations that still carried the death penalty, such as: the Criminal Code, the Narcotics Law, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Law Number 15 of 2003 concerning the Eradication of Terrorism, and Law No. Law Number 26 of 2002 concerning Human Rights Courts.

The diversity of reactions and opinions towards the death penalty is due to differences point of view of the death penalty. Those who support implementation the death penalty argues that: first, it is a permanent punishment or death penalty can eliminate criminals from the lives of people in need tranquility and serenity; second, the death penalty has a retributive effect that can provide a sense of justice, especially to victims and their families who experience suffering; Third, the death penalty has a preventive impact on other members of the community who wish to commit a crime; Fourth, the death penalty is not a prohibited act by religion although it still has strict requirements.<sup>9</sup>

Meanwhile, those who do not agree with the death penalty have the opposite opinion. Among the arguments put forward are: first, the death penalty has negated the possibility that humans can change, repent and realize their mistakes to do better; second, the death penalty cannot be corrected if there is an error in the its application. Therefore, the death penalty is very possible to be imposed on people who actually not guilty, if it turns out that in the judicial process there are procedures that are lacking appropriate; Third, the death penalty will give strong suffering to the family death row inmates

because psychologically the family will be burdened with feelings of waiting against the execution of the death penalty.<sup>10</sup>

In addition, they also argue that international law, in this case the Universal Declaration of Human Rights prohibits the implementation of the death penalty. Clearly, Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights states that "everyone has the right to life, liberty and security of person". Because everyone is guaranteed the right to live, it means that one cannot take the life of another person. formal, human rights reasons, and justice reasons. From this identification, this article examines the issue of the death penalty in terms of the reasons for each party, especially in terms of the sociological theory of law. In detail, the issue is focused on differences in public opinion in responding to the execution of the death penalty for drug offenders and efforts to formulate effective criminal penalties for drug crimes in Indonesia. In this context, the choice of the sociology of law theory in observing legal issues is also reinforced by the fact that law is not always orderly, logical and rational, but also experiences a shift towards a non-systemic paradigm (disorder of law).<sup>11</sup>

## METHODS

Writing this journal applies the library method or normative legal research methods, namely research with presents a problem that will be discussed later by using legal theories that are in accordance with the legislation.<sup>12</sup> The type of approach used is a statutory approach that refers to regulations, conceptual approaches related with legal principles, and a comparative approach by comparing the law of

<sup>9</sup> Arie Siswanto, 2009, Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Refleksi Hukum, April 2009, p. 11.

<sup>10</sup> *Ibid*, p. 10.

<sup>11</sup> A. Mukthie Fajar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2014), 32.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta, p.13-14.

a country with the law other countries.<sup>13</sup> Collection of legal materials, the author uses a library technique. Analysis on this article uses a description technique on primary legal materials and secondary data that have been collected are then associated with theory and legal literature so that it can assist in writing this article.

## DISCUSSION

### Enforcement of Death Penalty in Indonesia

The death penalty is the toughest sanction of all crimes that are threatened against criminals. The death penalty, hereinafter referred to as the death penalty, is one of the main punishments imposed by judges on convicts who have obtained permanent legal force.<sup>14</sup> The death penalty according to the doctrine states that the death penalty is justified if the perpetrator of a crime (crime) has shown from his actions that he is an individual who is very dangerous to society. Therefore, it must be made powerless again by being expelled from society or from social life.

The death penalty is the most severe punishment imposed on convicted criminals. Various serious crimes can be considered by the judge to be given a severe sentence (death penalty) if it can be proven in court in accordance with sufficient evidence and leads to the defendant. The types of crimes that can be imposed with severe punishment or the death penalty contained in the Criminal Code and outside the Criminal Code are as follows:

#### a. In Indonesian Criminal Law Code (KUHP)

The Indonesian Criminal Code regulates the possibility of imposing the death penalty for some serious crimes. What is meant by serious crimes are:

1. Article 104 (treason against the president and vice president);

2. Article 111 paragraph (2) (persuade foreign countries to be hostile or to fight, if the hostilities are carried out or become war);
3. Article 124 paragraph (3) (helping the enemy during war);
4. Article 140 paragraph (3) (treason against kings or heads of friendly countries that is planned and results in death);
5. Article 340 (premeditated murder);
6. Article 365 paragraph (4) (theft with violence resulting in serious injury or death);
7. Article 368 paragraph (2) (extortion with violence resulting in serious injury or death);
8. Article 444 (piracy at sea, coast and river resulting in death).

#### b. Outside Indonesian Criminal Code (KUHP)

In addition to crimes regulated in the Criminal Code, criminal law laws outside the Criminal Code also regulate the death penalty. These regulations include:

1. The Military Criminal Code (KUHPM); Article 64, Article 65, Article 67, Article 68, Article 73 1, 2, 3, 4, Article 109 1 and 2, Article 114 paragraph (1), Article 133 paragraph (1) and (2), Article 135 paragraph (1) 1 and 2, paragraph (2), Article 137 paragraph (1) and (2), and Article 142 paragraph (2);

2. Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951 regarding firearms, ammunition or any explosive material; Article 1 paragraph (1);

3. Article 2 of Law Number 5 (PNPS) of 1959 concerning the authority of the Attorney General/Army Attorney General and concerning aggravating the threat of punishment for crimes that endanger the implementation of clothing and food equipment;

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, p. 133-166.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

4. Article 2 of Law Number 21 (Prp) 1959 concerning aggravating the threat of punishment for economic crimes;

5. Article 13 of Law Number 11 (PNPS) of 1963 concerning the eradication of subversion activities;

6. Article 23 of Law Number 31 of 1964 concerning the basic provisions of atomic energy;

7. Law Number 4 of 1976 concerning aviation crimes and crimes against aviation facilities/infrastructure. Regarding the death penalty for aviation crimes, crimes against aviation facilities/infrastructure in the Criminal Code are regulated in article 479;

8. Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication;

9. Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Court.

10. Law Number 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism.

11. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The death penalty in Indonesia has been going on for a long time, since the Indonesian nation was colonized by the Dutch, until now it is still enforced even though the Netherlands has abolished the death penalty starting in 1987. The Criminal Code (*Wetboek Van Strafrecht*) was passed on January 1, 1981. According to experts At that time, the death penalty was maintained because special conditions in Indonesia demanded that the biggest criminals could be fought with the death penalty. With such a large area with a heterogeneous population, the State Police's tools cannot guarantee security.

Although the death penalty is still in progress and has not been abolished in Indonesia, the public has different opinions in responding to it as many countries abolish the death penalty. On the one hand, there are

community groups expressing their support that the death penalty is still needed in Indonesia, especially when it is still legally recognized. Meanwhile, on the other hand, there are community groups who want the death penalty to be abolished. They argue that the death penalty provisions that apply in Indonesia are not in accordance with the fundamental principles of this country, namely the 1945 Constitution.

According to the results of the Indo Barometer national survey conducted on 15-25 March 2015, the majority of the public in Indonesia, around 84.1 percent, agreed with the death penalty for drug dealers. "For those who agree, the reason that is widely expressed is that drugs damage the younger generation (60.8%), and can cause a deterrent effect (23.7%). As for the public who did not agree, the reason that was often revealed was because according to them there are other types of punishment that are more humane (36.2%), while the death penalty is actually a violation of human rights (28.4%). Meanwhile, continued Qodari, most or around 84.6% of Indonesians support President Jokowi's steps in implementing the death penalty for drug dealers, while only 10.3 percent do not support it. The majority of the public (86.3%) stated that President Jokowi should continue to carry out the death penalty for drug convicts, even though it implies that other countries will cut off diplomatic relations and stop economic cooperation with the State of Indonesia.<sup>15</sup>

Differences of opinion about the death penalty also occur among members of the National Human Rights Commission (KOMNASHAM). Their attitude towards the death penalty is also divided into two, some are pro and some are con. The death penalty in Indonesia must be maintained or abolished. For those who are pro, the heaviest sentence

<sup>15</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/268928/survei-86-rakyat-dukung-hukuman-mati-pengedar-narkoba>, diakses pada 19 Desember 2021 Pukul 19:00 WIB

imposed by the Panel of Judges on the convict is still needed, especially for violent crimes. For those who contra, the death penalty is considered unconstitutional or contrary to the constitution or the 1945 Constitution, especially the right to life for every citizen.

For those who agree, arguing that whether or not the death penalty is unconstitutional has actually been answered in the decision of the Constitutional Court on the petition for a judicial review of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics against the 1945 Constitution. The judicial review was submitted by 4 (four) death row convicts in this case. narcotics through their legal counsel regarding the unconstitutionality of the death penalty as enshrined in Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics. Based on the decision of the Constitutional Court, it is expressly stated that the death penalty in Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics is not contrary to the Constitution. Thus, it can be concluded that by analogy, the death penalty is not an unconstitutional act.

The death penalty is one of the objectives of sentencing to prevent and create a deterrent effect for perpetrators of criminal acts. According to Muzakir in "Excerpts from the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 2-3/PUU-V/2007 regarding the Review of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics against the 1945 Constitution" the death penalty was imposed as a last resort to protect society, so to provide protection on the principle of community protection. The essence of the death penalty or the death penalty is actually to protect the community, namely to provide a channel for people who want to take revenge. Because if there is no channel through legislation, namely through criminal law, it is feared that the community will take vigilante action.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Umar Anwar, 2016, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar

### Death Penalty For Perpetrators Of Illicit Drug Trafficking In Indonesia

Several countries in the world have different views on implementing the death penalty. Similar to the debate about the procedure for implementing the death penalty, the existence of the death penalty is also experiencing dynamics. There are countries that reject the implementation of the death penalty and therefore the state abolishes the death penalty, while several other countries still apply the implementation of the death penalty because they are deemed necessary.

For the two groups, both those who support and those who oppose, both base their opinions on normative and sociological reasons. In Indonesia, for example, the majority of the public or around 84.1 percent said they agreed with the death penalty given to drug dealers. "For those who agree, the reason that is widely expressed is that drugs damage the younger generation (60.8%), and can cause a deterrent effect (23.7%). While the public did not agree, the reasons that were often revealed were that there are other types of punishment that are more humane (36.2%) and the death penalty is a violation of human rights (28.4%).

In addition to the issue of normative footing on the existence of the diverse death penalty, differences of opinion in society and legal authorities (lawmakers, courts, and prosecutors) are influenced by various factors, such as: understanding of religious teachings, cultural backgrounds, philosophies and ideologies that adopted by society, and the legal authority. Similarly, individual backgrounds such as gender, race, level of religious observance, age group and personal views on certain crimes also influence positions for or against the death penalty. The national interests or needs of each region to maintain the death penalty for certain crimes or crimes are also different.

Narkoba; Freddy Budiman) Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 3, September 2016, hlm. 246.

In the case of Indonesia, when the national interest and needs in the view and belief of the people want the death penalty to be maintained and implemented or abolished and stopped, both must be addressed objectively. When there are voices calling for the abolition of the death penalty from Indonesia's positive law, those who voice it need to convince or even prove empirically that the majority of Indonesians share the same view as them. However, when the majority of the community voices the opposite, that the death penalty still needs to be maintained in Indonesia's positive law for perpetrators of certain crimes that threaten the interests of the wider community, such as perpetrators of terrorism; drug lord and premeditated murderer who took several human lives. Realities like this must be accepted, and at the same time stop noting Indonesia as a country that does not respect human rights because it still maintains the death penalty.<sup>17</sup>

Based on the description above, it can be stated that the different views on the implementation of the death penalty, especially for drug offenders, is caused by multiple interpretations. But what is certain is that the death penalty is still formally recognized enforceability in Indonesia, although from time to time efforts are made to minimize its implementation. In addition, factors outside the law, such as the saturation of society towards drug crimes that do not receive strict punishments, the religious background of the community, and the social conditions of the community are other aspects that greatly affects the community and law enforcement differ in viewing the death penalty for drug offenders in Indonesia.

The results of a survey by the National Narcotics Agency (BNN) show that an average of 50 people die every day from drugs. That is, about 18,000 people per year die from drug abuse. This amount is enough to make Indonesia a drug emergency. Moreover, the age of drug victims is in the productive age range between 15 to 35 years. If the state does not immediately declare war on drugs, the costs of losing potential young people are enormous.<sup>18</sup> Not only harming addicts, the National Narcotics Agency (BNN) also pocketed the prevalence rate of drug abuse in 2015 reaching 2.2 percent or about four million people in Indonesia who are entangled in drug circles. Even the results of a survey conducted by the National Narcotics Agency and the University of Indonesia Health Research Center in 2014 stated that the state suffered a loss of Rp 63.1 trillion due to drug abuse. The number of losses continues to increase from year to year.<sup>19</sup>

Based on the BNN data above, it appears that the negative impact of drug use serious enough now. This phenomenon will have implications for people's attitudes who saw it. By using the perspective of rational choice theory – which is exemplar of behaviorism- the actions of the Indonesian government and people who behave firmly against drug offenders by giving the death penalty can be explained. Facing the effects of drug crimes committed by irresponsible people responsibility, the Indonesian people will choose the right punishment to be given to the perpetrators of drug crimes that have been very detrimental to society.

According to Muladi, the device for the purpose of punishment must include two things, namely: first, it must more or less accommodate

<sup>17</sup>Asrul Sani, Kontroversi Hukuman Mati, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a692f2c80be/kontroversi-hukuman-mati>,

diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 16:10 WIB.

<sup>18</sup> Detikcom, 50 Orang Meninggal Per Hari karena Narkoba, Jangan Jadi Salah Satunya!, [https://health.detik.com/advertorial-news-block/d-](https://health.detik.com/advertorial-news-block/d-5791000/50-orang-meninggal-per-hari-karena-narkoba-jangan-jadi-salah-satunya)

[5791000/50-orang-meninggal-per-hari-karena-narkoba-jangan-jadi-salah-satunya](https://www.detik.com/health/advertorial-news-block/d-5791000/50-orang-meninggal-per-hari-karena-narkoba-jangan-jadi-salah-satunya), diakses pada 19 Desember 2021 Pukul 16:22 WIB.

<sup>19</sup> Indonesiabaik.id, Narkotika, Rugikan Negara, <https://indonesiabaik.id/infografis/narkotika-rugikan-negara-1>, diakses pada 19 Desember 2021 Pukul 16:25 WIB.

the aspirations of the people who demand it retaliation as a countermeasure on the basis of the perpetrator's level of guilt; second, must includes the purpose of punishment in the form of maintaining community solidarity, punishment must be directed to maintain and maintain community unity.<sup>20</sup> Death penalty still represents the sense of justice demanded by society. In addition to the deterrent effect, the effect of preventive, basically the element of retaliation is a strong argument that cannot be neglected which is the incarnation of the element of a sense of justice that lives in society. As a democratic country, applicable laws must be able to reflect and represents a sense of justice that lives in society. Therefore, Indonesia assesses that the death penalty law is still part of Indonesian criminal law because the Indonesian people still want the death penalty.

Based on the description above, it can be said that based on the global trend of implementing the death penalty, including for drug offenders, should be abandoned or at least minimized. However, at the same time establishing a norm law in a country, should consider the will of society as a respect for democracy. By combining these two ways of thinking, then the application of the death penalty for perpetrators of criminal acts in Indonesia is still relevant for carried out by remaining selective and through a mechanism that correct. That matter based on the consideration that the community wants the implementation of the death penalty for the perpetrators drug crime because it is considered disturbing. Taking into account the condition of the community which varies from region to region is important to ensure effectiveness a law as suggested by behaviorists and rational choice.

## CONCLUSION

Based on the description above, it can be said that based on the global trend of

implementing the death penalty, including for drug offenders, should be abandoned or at least minimized. However, at the same time establishing a norm law in a country, should consider the will of society as a respect for democracy. By combining these two ways of thinking, then the application of the death penalty for perpetrators of criminal acts in Indonesia is still relevant for carried out by remaining selective and through a mechanism that correct. That matter based on the consideration that the community wants the implementation of the death penalty for the perpetrators drug crime because it is considered disturbing. Taking into account the condition of the community which varies from region to region is important to ensure effectiveness a law as suggested by behaviorists and rational choice.

## REFERENCE

- [1] A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2014).
- [2] Agus Purnomo, 2016, *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum*, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016.
- [3] Arie Siswanto, 2009, *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional*, *Jurnal Refleksi Hukum*, April 2019.
- [4] Asrul Sani, *Kontroversi Hukuman Mati*, <https://www.hukumonline.com/berita/ba-ca/1t54a692f2c80be/kontroversi-hukuman-mati>,
- [5] BNN, *Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba"*, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 11:01 WIB
- [6] Databoks, *BNN Catat Jumlah Tersangka Narkotika Tanah Air Sebanyak 1.307*

<sup>20</sup> Husein, Syahrudin. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Sumatera Utara: tp,

2003, p. 2.

- Orang pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapubli h/2021/12/14/bnn-catat-jumlah- tersangka-narkotika-tanah-air- sebanyak-1307-orang-pada-2020>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 11:14 WIB.
- [7] Detikcom, 50 Orang Meninggal Per Hari karena Narkoba, Jangan Jadi Salah Satunya!, <https://health.detik.com/advertorial- news-block/d-5791000/50-orang- meninggal-per-hari-karena-narkoba- jangan-jadi-salah-satunya>, diakses pada 19 Desember 2021 Pukul 16:22 WIB.
- [8] <https://www.beritasatu.com/nasional/268928/survei-86-rakyat-dukung-hukuman- mati-pengedar-narkoba>, diakses pada 19 Desember 2021 Pukul 19:00 WIB
- [9] Husein, Syahrudin. Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia. Sumatera Utara: tp, 2003, p. 2.
- [10] Indonesiabaik.id, Narkotika, Rugikan Negara, <https://indonesiabaik.id/infografi s/narkotika-rugikan-negara-1>, diakses pada 19 Desember 2021 Pukul 16:25 WIB.
- [11] Kompas, 24.878 Orang Ditangkap Terkait Kasus Narkoba di Indonesia sejak Januari 2021, Kompas.com publish 14 Juni 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang- ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di- indonesia-sejak-januari>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 11:12 WIB.
- [12] Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana, 2010. Hak Asasi Manusia dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia Indonesia, Bogor.
- [13] Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.
- [14] Mustaghfirin dan Irwanto Efendi, Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2 No. 1 2015.
- [15] Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [16] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- [17] Umar Anwar, 2016, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 3, September 2016.

---

**KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI  
KECAMATAN JAMBI SELATAN KOTA JAMBI TAHUN 2021****Oleh****Sucy Deanty<sup>1)</sup>, Rara Marisdayana<sup>2)</sup>, Eko Mirsiyanto<sup>3)</sup>****<sup>1,2,3</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu  
Jambi, Indonesia****Email: [suci40816@gmail.com](mailto:suci40816@gmail.com)****Abstract**

Traffic accidents in Indonesia increase every year, in 2018 the number of traffic accidents was 109,215 cases and increased to 116,411 cases in 2019. The number of traffic accidents in South Jambi District in 2020 was 52 cases. To prevent traffic accidents, it is necessary to do a prevention, one of which is by implementing safety in driving. The purpose of this research is to find out the factors related to preventing traffic accidents on motorcycle riders. The study used a cross sectional approach. The study was conducted in Jambi Selatan District, Jambi City in August 2021. The sample of the study was motorcycle riders in Jambi Selatan District as many as 97 people. The sampling technique used accidental sampling technique. The research instrument is a questionnaire. The data were analyzed using the chi square test. As many as 43.3% of respondents have poor traffic accident prevention, 47.4% of respondents have poor knowledge, 41.2% of respondents have bad attitudes and 38.1% of respondents have not been careful. There is a relationship between knowledge ( $p=0.000$ ), attitude ( $p=0.002$ ) and age ( $p=0.021$ ) with the prevention of traffic accidents on motorcycle riders in the southern Jambi District, Jambi City in 2021. Based on the results of the study it can be concluded that the prevention of traffic accidents Traffic on motorcyclists is related to knowledge, attitude, and age.

**Keywords: Knowledge, Attitude, Age, Traffic Accident Prevention****PENDAHULUAN**

Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan rata-rata 4,87% per tahun. Kenaikan jumlah kecelakaan juga diikuti oleh kenaikan jumlah korban meninggal dunia dan luka ringan yaitu masing-masing 1,41% dan 6,26%. Namun, nilai kerugian materi akibat kecelakaan mengalami peningkatan rata-rata 4,23% per tahun. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2015 adalah 96,233 kasus, tahun 2016 sebanyak 106.644 kasus, tahun 2017 sebanyak 104.327 kasus, tahun 2018 sebanyak 109.215 kasus dan tahun 2019 sebanyak 116.411 kasus. Jenis kendaraan yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah sepeda motor yaitu 5,73 persen diikuti oleh mobil penumpang dan mobil barang masing-masing 5,14 persen dan 4,68 persen (BPS, 2020)

Data kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi pada tahun 2018 sebanyak 1.221 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 1.208 kasus. Jumlah orang yang meninggal karena kecelakaan tersebut pada tahun 2018 sebanyak 419 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 342 orang. Jumlah orang yang mengalami luka berat pada tahun 2018 sebanyak 206 orang dan tahun 2019 sebanyak 211 orang. Jumlah orang yang mengalami luka ringan pada tahun 2018 sebanyak 1.686 orang dan tahun 2019 sebanyak 1.577 orang (Ditlantas Polda Jambi, 2020).

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan sebesar 3,23%, dan faktor lingkungan sebesar 0,49%. Faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas adalah manusia, dimana manusia sebagai pengendara memiliki faktor-faktor yang

mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis (Kemenkes RI, 2015).

Tindakan preventif yang telah dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas antara lain disusunnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). POLRI juga sering melakukan operasi penindakan terhadap para pelanggar peraturan lalu lintas, serta memberikan penyuluhan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas terutama sepeda motor, disamping program yang telah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat diharapkan berperan serta melakukan upaya tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat, misalnya dalam menggunakan sepeda motor remnya harus betul-betul baik, ban sepeda motor tidak gundul, kaca spion lengkap semua, lampu menyala dengan baik. Tidak kalah penting dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas adalah perlunya berperilaku yang sesuai dengan aturan dan etika berlalu lintas di jalan raya (UU, 2009).

Perilaku dalam pencegahan kecelakaan sepeda motor berhubungan dengan pengetahuan dan sikap (Notosiswoyo, 2014). Sesuai dengan teori Lawrence Green yang menyatakan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh faktor-faktor predisposisi, diantaranya pengetahuan dan sikap (Notoatmodjo, 2012). Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. Arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi di jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur (Rahardjo, 2013).

Sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 203 ayat 2 bahwa program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya yaitu tentang cara berkendara

dengan selamat (*safety riding*), seperti larangan mendengarkan musik saat mengendarai sepeda motor, larangan menerima telepon saat mengendarai sepeda motor, larangan mengubah warna sepeda motor dan harus sesuai dengan warna yang ada di STNK, wajib menyalakan lampu pada siang dan malam hari, dilarang merokok saat mengendarai sepeda motor, menyalakan lampu sign ketika akan berbelok, wajib menggunakan helm standar nasional indonesia (SNI) serta membawa surat kelengkapan seperti SIM dan STNK (UU, 2009).

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi pada tahun 2018 sebanyak 460 kecelakaan, tahun 2019 sebanyak 457 kecelakaan dan tahun 2020 sebanyak 327 kecelakaan (Ditlantas Polda Jambi, 2020). Kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Jambi Selatan mengalami penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020 disebabkan pada tahun 2020 adanya pandemi *corona virus* (covid-19) dimana pemerintah Kota Jambi memberlakukan untuk membatasi masyarakat keluar rumah dan bekerja di dalam rumah sehingga mempengaruhi angka kecelakaan lalu lintas. Jika dilihat dari jumlah kasus kecelakaan lalu lintas, Kecamatan Jambi Selatan menduduki peringkat ke dua setelah Kecamatan Jambi Selatan, padahal kecamatan Jambi Selatan merupakan kawasan tertib lalu lintas, namun angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan *cross sectional* dimana yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan di wilayah

Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi pada bulan Agustus 2021. Sampel penelitian adalah pengendara sepeda motor di Kecamatan Jambi Selatan sebanyak 97 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Instrumen penelitian adalah kuesioner. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji *uji chi square*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 43,3% responden memiliki pencegahan kecelakaan lalu lintas kurang baik, 47,4% responden memiliki pengetahuan kurang baik, 41,2% responden memiliki sikap kurang baik dan 38,1% responden memiliki usia tidak berhati-hati (tabel 1).

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ( $p=0,000$ ), sikap ( $p=0,002$ ) dan usia ( $p=0,021$ ) dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor (Tabel 2).

**Tabel 1.** Gambaran Pengetahuan, Sikap, Usia Dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor

Variabel	Frekuensi	Persentase
Pencegahan Kecelakaan		
Kurang Baik	42	43,3
Baik	55	56,7
Pengetahuan		
Kurang Baik	46	47,4
Baik	51	52,6
Sikap		
Kurang Baik	40	41,2
Baik	57	58,8
Usia		
Tidak Berhati-hati	37	38,1
Berhati-hati	60	61,9

**Tabel 2.** Hubungan Pengetahuan, Sikap, Usia Dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor

Variabel	Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas				Total		p-value
	Kurang Baik		Baik		n	%	
	n	%	n	%	n	%	
Pengetahuan							
Kurang Baik	36	78,2	10	21,7	46	100	0,000
Baik	6	11,8	45	88,2	51	100	
Sikap							
Kurang Baik	25	62,5	15	37,5	40	100	0,003
Baik	17	29,8	40	70,2	57	100	
Usia							
Tidak berhati-hati	22	59,5	15	40,5	37	100	0,021
Berhati-hati	20	33,3	40	66,7	60	100	

Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dengan  $p\text{-value} = 0,000$ .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pramono, et al (2018) pada siswa SMK Semesta Bumiayu menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik keselamatan berkendara sepeda motor pada siswa Semesta Bumiayu ( $p=0,000$ ) (Pramono, Subekti, & Atmoko, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tororeh, et al (2019) pada komunitas motor honda CBR menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan tindakan *safety riding* pada komunitas motor honda CBR ( $p=0,002$ ) (Tororeh, Pinontoan, & Suoth, 2019).

Perilaku pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna jalan termasuk pengendara sepeda motor terkait peraturan lalu lintas. Kejadian kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh ada tidaknya implementasi dari pengetahuan yang dimiliki oleh pengendara sepeda motor mengenai segala hal terkait peraturan lalu lintas dan tata cara berkendara. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dan pemahaman terhadap tata tertib berlalu lintas dapat menimbulkan berbagai masalah lalu lintas seperti pelanggaran rambu lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas (Notosiswoyo, 2014). Menurut Kunwadee Rojpaisarnkit (2012) pengetahuan yang kurang akan menyebabkan persepsi yang salah mengenai keadaan lalu lintas ketika seseorang berkendara. Hal tersebut

mengakibatkan pengendara melakukan tindakan yang dapat mengarah kepada kecelakaan lalu lintas (Rojpaisarnkit, 2012).

Responden yang tidak tahu tentang pencegahan kecelakaan lalu lintas maka akan sangat sulit untuk mempraktikkan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Responden yang tidak tahu tentang APD saat berkendara maka dia tidak akan menggunakan APD tersebut, responden yang tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas maka dia tidak akan mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada responden yang memiliki pengetahuan baik namun pencegahan kecelakaan lalu lintas kurang baik, hal tersebut dikarenakan responden memiliki kesadaran yang kurang baik. Responden berkendara pada jarak yang dekat sehingga tidak menggunakan APD lengkap seperti jaket, sarung tangan, sepatu. Selain itu, kurangnya kesadaran serta pemahaman responden tentang pentingnya berkendara yang aman menyebabkan hanya sekedar tahu tanpa bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dengan  $p\text{-value} = 0,002$ .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pramono, et al (2018) pada siswa SMK Semesta Bumiayu menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan praktik keselamatan berkendara sepeda motor pada siswa Semesta Bumiayu ( $p=0,000$ ) (Pramono et al., 2018). Hasil penelitian Ariwibowo (2013) pada pengendara ojek sepeda motor di Kecamatan Banyumanik menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan praktik *safety riding awareness* pada pengendara ojek sepeda motor ( $p=0,001$ ) (Ariwibowo, 2013). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tororeh, et al (2019) pada komunitas motor honda CBR menunjukkan bahwa ada hubungan

antara sikap dengan tindakan *safety riding* pada komunitas motor honda CBR ( $p=0,004$ ) (Tororeh et al., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara sikap dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di Kecamatan Jambi Selatan, hal tersebut dikarenakan sikap merupakan salah satu komponen yang membentuk kecenderungan tindakan, dengan mengubah sikap maka cenderung lebih memudahkan mengubah perilaku seseorang dalam berlalu lintas. Responden yang beranggapan bahwa *service* sepeda motor hanya dilakukan ketika motor sedang rusak maka responden tidak akan rutin untuk melakukan *service* sepeda motor. Kepatuhan responden dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas juga kurang baik, responden hanya memiliki kepatuhan baik jika ada polisi yang jaga di jalan raya, jika tidak ada polisi yang jaga maka mereka beranggapan aman saat berkendara walaupun saat melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Responden yang memiliki sikap baik namun memiliki upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kurang baik disebabkan responden beranggapan bahwa jarak tempuh yang dekat, penggunaan APD yang ribet, repot, panas, tidak nyaman, tidak ada polisi yang jaga serta malas. Sedangkan responden yang memiliki sikap kurang baik namun memiliki pencegahan kecelakaan lalu lintas dikarenakan keluarga menganjurkan untuk berhati-hati saat berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dengan  $p\text{-value} = 0,021$ .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngogo, et al (2019) pada pengendara sepeda motor di Sumba Barat menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan kecelakaan lalu lintas pengemudi sepeda motor

( $p$ -value=0,004) (Ngogo, Berek, & Talahatu, 2019). Hasil penelitian Ariwibowo (2013) pada pengendara ojek sepeda motor di Kecamatan Banyumanik diketahui bahwa ada hubungan antara umur dengan praktik safety riding ( $p$ -value=0,05) (Ariwibowo, 2013).

Umur merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, hal ini disebabkan karena semakin lanjut usia seseorang tingkat produktifitasnya semakin menurun demikian pula seseorang yang berusia muda belum mempunyai mental dan karakter yang baik dalam menyikapi keadaan di sekitar lingkungannya (Rahardjo, 2013).

Santrock (2007) menyatakan bahwa umur mempunyai pengaruh terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas. Umur 30 tahun akan lebih berhati-hati sedangkan yang berumur muda malah sebaliknya mereka mengendari secara tidak hati-hati dan membahayakan pengendara lain. Status pelanggaran cenderung meningkat di masa remaja. Sebagian remaja di suatu waktu akan berbuat onar atau membuat sesuatu yang bersifat destruktif atau menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri atau orang lain (Santrock, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, hal tersebut dikarenakan responden yang berusia < 30 tahun belum mempunyai mental dan karakter yang baik dalam menyikapi keadaan di sekitar lingkungannya sedangkan responden yang berusia  $\geq$  30 tahun lebih matang dan lebih terampil dalam berperilaku berkendara yang aman. Rata-rata usia responden dalam penelitian adalah 34,61 tahun sehingga responden memiliki rasa berhati-hati dalam berkendara. Rasa hati-hati tersebut mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sesuai hasil peneliti Ariwibowo (2013) menunjukkan bahwa selain dari tingkat pendidikan pada umur tua juga cenderung kurang memperhatikan resiko dan potensi kecelakaan karena merasa lebih berpengalaman

dan sudah terbiasa dalam melakukan pekerjaan tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor berhubungan dengan pengetahuan, sikap dan usia.

Untuk itu diharapkan kepada pihak kepolisian lalu lintas melakukan siaga di setiap pos polisi yang berada di jalan raya, dengan adanya siaga yang dilakukan polisi maka masyarakat akan memiliki rasa takut sehingga masyarakat tersebut berusaha untuk mematuhi tata tertib lalu lintas sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Camat Jambi Selatan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah kerja Kecamatan Jambi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariwibowo, R. (2013). Hubungan Antara Umur, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Terhadap Tindakan Praktik Safety Riding Awareness Pada Pengendara Ojek Sepeda Nmotor Di Kecamatan Banyumanik. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 1–8.
- [2] BPS. (2020). *Statistik Transport Darat*. Jakarta: Subdirektorat Statistik Transportasi.
- [3] Ditlantas Polda Jambi. (2020). *Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Provinsi Jambi*. Jambi: Polda Jambi.
- [4] Kemenkes RI. (2015). *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pengemudi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- [5] Ngogo, O. L. N., Berek, N. C., & Talahatu, A. H. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Pengemudi Sepeda Motor di Sumba Barat. *Timorese Journal of Public Health*, 1(4), 170–176.
- [6] Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [7] Notosiswoyo, M. (2014). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Siswa SLTA dalam Pencegahan Kecelakaan Sepeda Motor di Kota Bekasi. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 13(1), 1–9.
- [8] Pramono, T. D., Subekti, A. T., & Atmoko, D. (2018). Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Praktik Keselamatan Berkendara Sepeda Motor Pada Siswa SMK Semesta Bumiayu. *Jurnal Ilmiah Dan Teknologi Kesehatan*, 9(1), 1–8.
- [9] Rahardjo, R. (2013). *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.
- [10] Rojpaisarnkit, K. (2012). Factors Related to Motorcycle Safe Riding Behavior of Industrial Workers in Eastern Thailand. *Journal of Science, Technology and Humanities*, 10(1), 25–34.
- [11] Santrock, J. W. (2007). *Remaja, Jilid 1 & 2, Edisi Kesebelas (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- [12] Tororeh, Y. V., Pinontoan, O. R., & Suoth, L. F. (2019). Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Safety Riding Pada Komunitas Motor Honda CBR Manado Community (MCM). *Jurnal KESMAS*, 8(437–42).
- [13] UU. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM.

---

**KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN  
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SUKABUMI****Oleh****Gheni Noviar Afghani<sup>1)</sup>, Dine Meigawati<sup>2)</sup>, Yana Fajar Basori<sup>3)</sup>****<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi****Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113****E-mail: [1ainurlatifahh28@gmail.com](mailto:1ainurlatifahh28@gmail.com)****Abstract**

Untuk memberikan perlindungan kesehatan dari bahaya asap rokok dan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, Pemerintah Kota Sukabumi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tetapi, kenyataannya masyarakat masih merokok pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan KTR karena dari perspektif kapasitas kebijakan memungkinkan untuk memahami lebih baik mengapa hasil kebijakan belum optimal. Teori yang digunakan sebagai bahan analisis adalah teori Kapasitas Kebijakan yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh dan Howlett (2015). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan KTR sudah mumpuni.

**Kata Kunci: Kapasitas Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kawasan Tanpa Rokok****PENDAHULUAN**

Merokok adalah hak setiap masyarakat yang menginginkannya, tetapi hal tersebut harus adanya sebuah kewajiban untuk menghormati hak orang lain yang tidak merokok untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih. Tingginya masyarakat dalam mengkonsumsi rokok dipercaya menimbulkan implikasi negatif yang sangat luas, karena tidak adanya batas aman dari asap rokok yang dihasilkan sehingga sangat perlu untuk menerapkan langkah untuk masalah tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengatur hal tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan dilaksanakan dengan berbagai pengaturan, yang salah

satunya yaitu penetapan kawasan tanpa rokok atau biasa disingkat KTR. Lebih tepatnya disebutkan dalam Pasal 49 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok.

Maka dari itu, untuk melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sejak diberlakukan kebijakan KTR di Kota Sukabumi, tepatnya diundangkan pada tanggal 17 Juli 2014 pelaksanaan KTR sudah resmi berjalan. Namun kebijakan KTR di Kota Sukabumi menunjukan belum ada perubahan yang signifikan dan bisa dikatakan masih belum optimal, yang bisa dikatakan sebagai suatu penurunan kapasitas kebijakan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut.

**Gambar 1.** Survey Kepatuhan Terhadap KTR



**Sumber:** (Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2021)

Berdasarkan hasil survey tingkat kepatuhan terhadap KTR yang dilakukan terakhir kali oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, menunjukkan masyarakat masih merokok pada kawasan yang disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Dalam hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih merokok di Tempat Kerja yang merupakan tempat kedua tertinggi setelah di dalam rumah (yang bukan merupakan KTR), dan yang paling rendah yaitu tempat bermain anak. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tempat yang paling sering terjadinya peneguran apabila terdapat masyarakat yang merokok, sedangkan pusat perbelanjaan menjadi yang terendah atau jarang terjadinya peneguran (Survey Perilaku dan Kepatuhan Merokok Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 2016).

Kemudian, dari hasil kegiatan pembinaan kegiatan Operasi Praja Wibawa mengenai pembinaan terhadap KTR yang dilakukan oleh Satpol PP terdapat beberapa aspek yang mesti dilaporkan kepada kepala daerah, salah satunya yaitu mengenai pelanggaran KTR.

**Gambar 2.** Data Pelanggaran KTR



**Sumber:** (Satpol PP Kota Sukabumi 2017/2018)

Berdasarkan data pelanggaran KTR yang terakhir kali dikumpulkan oleh Satpol PP, yaitu pada tahun 2017 sampai 2018 terlihat masih cukup banyak masyarakat yang merokok di KTR. Pada tahun 2017 terdapat 200 kasus pada 3 kawasan yang tercantum dalam perda yaitu kawasan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit (80 kasus), tempat umum seperti toserba/mall (60 kasus), dan angkutan umum (60 kasus). Lalu pada tahun 2018, terlihat adanya peningkatan pelanggaran KTR dan ditemukan dalam kawasan yang juga lebih bervariasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tepatnya terdapat 253 kasus pada 5 kawasan, yaitu kawasan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit (50 kasus), tempat umum seperti toserba/mall (21 kasus), dan angkutan umum (55 kasus), selanjutnya ditemukan pada tempat kerja seperti kantor-kantor dinas (76 kasus), dan yang terakhir pada tempat proses belajar mengajar seperti sekolah menengah (51 kasus).

Dampak asap rokok sangat buruk bagi kehidupan masyarakat, dan hal itu merupakan tanggungjawab bersama pemerintah daerah sebagai institusi publik bersama aktor elite politik untuk menyelesaikan persoalan publik tersebut demi kepentingan masyarakat. Apabila tidak diselesaikan dan/atau dalam pelaksanaannya yang tidak optimal, dampak buruk tersebut masih akan tetap berlanjut. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat

tergantung dengan bagaimana kapasitas para pelaku kebijakan.

Hal tersebut disebabkan karena di dalam kapasitas kebijakan, mengacu pada kompetensi dan kapabilitas yang penting untuk pembuatan kebijakan. Kompetensi dikategorikan ke dalam tiga jenis keterampilan umum yang penting untuk keberhasilan kebijakan, yaitu pertama tingkat analitis yang membantu untuk memastikan bahwa tindakan kebijakan secara teknis masuk akal, selanjutnya tingkat operasional yang memungkinkan sumber daya untuk diselaraskan dengan tindakan kebijakan sehingga dapat diterapkan dalam praktik, dan terakhir tingkat politik yang membantu memperoleh dan mempertahankan dukungan politik untuk tindakan kebijakan (Wu, Ramesh dan Howlett 2018:5). Melalui kapasitas kebijakan tersebut, kemampuan pemerintah daerah Kota Sukabumi dalam menetapkan KTR dapat dianalisis dan dilakukan pengukurannya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengharapkan bahwa kebijakan tersebut memiliki hasil yang optimal dan setiap kawasan tanpa rokok dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya tujuan tersebut masih belum tercapai, terlihat dari survey kepatuhan KTR, yang menunjukkan masih terdapat masyarakat yang merokok di KTR, lalu data pelanggaran KTR yang masih tinggi. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian dalam perspektif yang berbeda dan jarang digunakan, yaitu perspektif kapasitas dari kebijakan tersebut. Karena menurut Wu, Ramesh dan Howlett (2015:168) perspektif multi-dimensi dari kapasitas memungkinkan untuk lebih memahami mengapa kegagalan kebijakan bisa terjadi yang merupakan masih belum optimal.

## LANDASAN TEORI

Menurut Ibrahim (2007:17) administrasi publik seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen

pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Kemudian Henry (1988:49) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Chandler dan Plano (1988:29) juga menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses dimana sumberdaya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Merujuk pada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan suatu bentuk atau upaya kerjasama yang dilakukan sekelompok lembaga pemerintah atau/dan swasta untuk melaksanakan berbagai tugas yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mempunyai peranan penting dalam perumusan dan/ atau pelaksanaan kebijakan publik. Dan sebagaimana yang dikemukakan menurut para ahli tersebut, ilmu administrasi publik sangat erat kaitannya dengan kebijakan publik. Pada kebijakan publik lah masyarakat menaruh harapannya, agar kesejahteraan dapat dicapai melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu keberhasilan suatu kebijakan merupakan keharusan, yang hasilnya unggul. Hal itu dapat dicapai apabila memperhatikan perspektif kapasitas pada saat penetapannya, karena kapasitas berhubungan dengan bagaimana kemampuan pemerintah dalam memobilisasikan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan tujuan kebijakan publik.

Menurut Howlett dan Mukherjee (2014:57) kebijakan publik adalah hasil dari

upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah aspek perilaku, baik perilaku mereka sendiri maupun masyarakat pada umumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut terdiri dari pengaturan tujuan kebijakan dan sarana kebijakan yang dicocokkan melalui beberapa proses pengambilan keputusan. Upaya pembuatan kebijakan ini bisa lebih, atau kurang sistematis dalam upaya mencocokkan tujuan dan sarana dengan cara yang logis atau dapat dihasilkan dari proses yang jauh lebih tidak sistematis. Sedangkan Nugroho (2008:55) merumuskan definisi kebijakan publik secara sederhana, yaitu sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Definisi dari para ahli yang sudah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah publik dan/atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memerintah.

Menurut Wu, Ramesh dan Howlett (2015:165-166) kebanyakan ahli mendefinisikan kapasitas kebijakan dari perspektif pemerintah sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat pilihan cerdas, untuk memindai lingkungan dan menetapkan arah strategis, untuk menimbang dan menilai implikasi dari alternatif kebijakan, dan untuk membuat penggunaan pengetahuan yang tepat dalam pembuatan kebijakan. Kapasitas kebijakan juga didefinisikan sebagai himpunan keterampilan dan sumber daya, atau kompetensi dan kapabilitas, yang diperlukan

untuk menjalankan fungsi kebijakan. Keterampilan atau kompetensi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu analitis, operasional dan politik. Masing-masing dari tiga kompetensi ini melibatkan sumber daya atau kapabilitas pada tiga tingkatan yang berbeda yakni, individu, organisasi, dan sistemik.

Perspektif multidimensi tentang kapasitas kebijakan dan tata kelola ini memungkinkan untuk memahami lebih baik mengapa kegagalan kebijakan tersebar luas dan terus-menerus (Wu, Ramesh dan Howlett 2015:168). Yaitu, kapasitas analisis individu, kapasitas analisis organisasi, kapasitas analisis sistem, kapasitas operasional individu, kapasitas operasional organisasi dan kapasitas operasional sistem.

#### **Kapasitas Analisis Individu**

Analisis tingkat individu yang terlibat dalam tugas kebijakan yaitu seperti mendiagnosis masalah kebijakan dan akar penyebabnya, merancang dan membandingkan solusi untuk masalah, merumuskan rencana yang masuk akal untuk implementasi kebijakan, dan melakukan evaluasi kebijakan yang teliti. Keterampilan profesional kebijakan dalam melakukan tugas-tugas tersebut adalah kunci kapasitas analitis lembaga mereka. (Wu, Ramesh dan Howlett 2018:6)

#### **Kapasitas Analisis Organisasi**

Kapasitas analitis berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh dan memproses informasi dan data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kebijakan (Cohen dan Levinthal 1990:133). Sistem informasi yang efektif memainkan peran penting dalam mendukung penyusunan dan implementasi kebijakan yang efektif. Ini juga menyediakan untuk penggunaan kembali informasi yang ada tanpa duplikasi, misalnya perpustakaan, database dan situs web. (Wu, Ramesh dan Howlett 2018:9)

#### **Kapasitas Analisis Sistem**

Di tingkat sistem, kapasitas analitis dapat diukur dengan jangkauan dan kualitas

pengumpulan data di seluruh sistem, yaitu seperti ketersediaan, kecepatan dan kemudahan akses secara umum di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kebijakan dan tingkat persaingan dan keragaman dalam produksi pengetahuan kebijakan. Selain itu, aksesibilitas data atau informasi oleh organisasi non-pemerintah dan organisasi sektor swasta dapat memainkan peran kunci dalam menentukan kapasitas analitis di tingkat sistem. (Wu, Ramesh dan Howlett 2018:12)

#### **Kapasitas Operasional Individu**

Kompetensi operasional di tingkat individu berkaitan dengan kemampuan individu untuk melakukan fungsi manajerial, sering digambarkan sebagai kepemimpinan. Lebih praktis dan berguna untuk memecah konsep kepemimpinan yang samar-samar ke dalam fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh manajer kebijakan, yaitu seperti perencanaan, kepegawaian, penganggaran, pendelegasian, pengarahan, dan koordinasi. Kapasitas operasional relevan dengan untuk semua tahapan dalam proses kebijakan. (Wu, Ramesh dan Howlett 2018:7-8)

#### **Kapasitas Operasional Organisasi**

Kompetensi operasional di tingkat organisasi berpusat di efektivitas organisasi dalam memobilisasi dan menyebarkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kebijakan. Kapasitas operasional tersebut dapat diukur pertama kali dengan tingkat koordinasi proses internal dan eksternal melalui sistem manajerial organisasi. Secara internal, organisasi harus mengkomunikasikan tujuan, rencana operasional, dan prosedur operasi mereka kepada pegawai mereka. Secara eksternal, mereka harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lembaga lain dan pemangku kepentingan masyarakat. (Wu, Ramesh dan Howlett 2018:10)

#### **Kapasitas Operasional Sistem**

Pada tingkat sistem, kapasitas operasional mengacu pada sistem kontrol atas lembaga sektor publik dan hubungan yang

mereka pertahankan dengan mitra sosial mereka. Pertama, kapasitas operasional ditentukan oleh tingkat koordinasi antar-pemerintah dan antar-lembaga. Kedua, koherensi dan keterlibatan jaringan kebijakan dan masyarakat dalam proses kebijakan juga merupakan kunci bagi kapasitas operasional. Ketiga, kapasitas operasional tingkat tinggi pada tingkat sistem menuntut kejelasan peran dan tanggung jawab berbagai organisasi yang terlibat dalam proses kebijakan. (Wu, Ramesh dan Howlett 2018:12-13)

Penelitian ini menggunakan teori Wu, Ramesh dan Howlett. Adapun alasan peneliti dalam memilih teori tersebut dikarenakan sesuai dengan topik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kapasitas pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan KTR. Teori ini mampu untuk memahami lebih baik mengapa hasil dari suatu kebijakan masih belum optimal.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan pemerintahan daerah Kota Sukabumi, yaitu Pemerintah Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi perusahaan. Pada penelitian ini yang menjadi indikator penelitiannya adalah mengetahui tentang bagaimana kapasitas pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok di Kota Sukabumi.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *non probability sampling*, yaitu *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, yang kemudian menjadi besar. Analisis data yang digunakannya yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas kebijakan didefinisikan sebagai himpunan keterampilan dan sumber daya, atau kompetensi dan kapabilitas, yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kebijakan. Keterampilan atau kompetensi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu analitis, operasional dan politik. Masing-masing dari tiga kompetensi ini melibatkan sumber daya atau kapabilitas pada tiga tingkatan yang berbeda yakni, individu, organisasi, dan sistem. Dari ketiga jenis dan ketiga tingkatan tersebut, Wu, Ramesh dan Howlett (2015) membuat kerangka konseptual kebijakan yang menghasilkan sembilan indikator untuk mengetahui bagaimana kapasitas suatu pemangku kepentingan untuk menetapkan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 indikator untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam proses penetapan kebijakan KTR. Indikator tersebut, yaitu 1.) Kapasitas Analisis Individu, 2.) Kapasitas Analisis Organisasi, 3.) Kapasitas Analisis Sistem, 4.) Kapasitas Operasional Individu, 5.) Kapasitas Operasional Organisasi, dan 6.) Kapasitas Operasional Sistem.

### Kapasitas Analisis Individu

Kapasitas analisis individu merupakan indikator pertama dari teori kapasitas kebijakan. Indikator ini merupakan analisis tingkat individu yang berkaitan dengan tugas kebijakan seperti mendiagnosis masalah kebijakan sampai akar penyebabnya, merancang sampai membandingkan solusi untuk masalah tersebut dan merumuskan rencana yang masuk akal untuk mengatasinya (Wu, Ramesh dan Howlett 2018). Pada temuan di lapangan yang telah peneliti lakukan mengenai kapasitas analisis individu yang dilakukan dalam pelaksanaan perumusan Perda KTR, berikut adalah hasil wawancara peneliti bersama informan 1 yaitu :

*“Pertama-tama saya melakukan survey penelitian dulu, survey kekuatan dan pembaharu awal-awalnya seperti perokok pasif*

*dan aktif kemudian ada koordinasi lintas sektor dan melakukan kajian-kajian untuk mendiagnosis masalah-masalah tersebut mengenai kesehatan lingkungan dan dari data PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) terlihat angka perokok cukup tinggi juga. Perda KTR ini bentuknya turunan dari UU No 36 tahun 2009 dan PP No 109 tahun 2012 dan menjadi dasar dalam pengusulan perda tersebut, maka dari itulah strategi untuk mengatasinya yaitu dengan menetapkan KTR. Tepatnya dalam pasal 52 disitu disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di area nya dengan perda tersebut.” (Afrizal, wawancara, 15 Desember 2021)*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 2, dan menunjukkan hal yang sama yaitu informan 2 sebagai individu/pihak Dinas Kesehatan lain juga menunjukkan kemampuannya dalam kapasitas analisis tingkat individu, yaitu mendiagnosis masalah dan akar penyebabnya melalui survei-survei yang dilakukan dan data PHBS yang menunjukkan data perokoknya cukup besar dan pihak tersebut juga menunjukkan sudah dapat memilih strategi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menetapkan kawasan tanpa rokok. Jadi dapat diinterpretasikan dari hasil wawancara tersebut mengenai kapasitas analisis individu yang ditunjukkan oleh individu/pihak Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam perumusan kebijakan KTR melalui kemampuannya dalam melakukan analisis tingkat individu seperti mendiagnosis masalah dan akar penyebabnya yaitu dilihat survei dan kajian yang dilakukan dan dilihat dari cukup tingginya angka perokok berdasarkan data PHBS dan indeks kesehatan masyarakat yang tidak tinggi. Kemudian memilih strategi atau solusi dan merumuskan rencana yang masuk akal untuk permasalahan kebijakan tersebut yaitu dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, hal ini sesuai

dengan teori yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh dan Howlett (2018).

### **Kapasitas Analisis Organisasi**

Indikator kedua dalam teori kapasitas kebijakan ini adalah kapasitas analisis organisasi. Indikator ini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kebijakan. Kemampuan tersebut merupakan peran penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang efektif, karena menurut Wu, Ramesh dan Howlett (2018) sistem informasi yang efektif tersebut memungkinkan data dan informasi yang dikumpulkan dan diproses dapat lebih cepat daripada yang dilakukan pada tingkat individu. Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 1, yaitu sebagai berikut:

*“Untuk data yang diperlukan dalam perumusan perda KTR ini paling dilakukan sampling saja melakukan survey, survey ditingkat pendidikan, di instansi kesehatan, tempat kerja. Karena meski di ruang lingkup kota untuk akses kemudahan cukup mudah, dan lebih banyak kita memanfaatkan ada program di kementerian kesehatan yang salah satu indikatornya tidak adanya anggota keluarga yang merokok di dalam rumah. Lalu memakai data PHBS yang berasal dari Dinas Kesehatan sendiri.”* (Ima, wawancara, 18 Januari 2022)

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan informan 2, yang hasilnya sama dengan hasil penelitian sebelumnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 1 dan informan 2, dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah daerah menunjukkan kemampuannya dalam memperoleh dan memproses data dan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan peraturan daerah tentang KTR. Yaitu dengan melakukan kajian, survei dan sampling secara mandiri, lalu mengobservasi tempat yang diduga tercemari asap rokok dan memproses data PHBS yang berasal dari lembaganya sendiri. Kiat-kiat tersebut sudah dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah mumpuni dari sisi kapasitas

analisis organisasi sesuai dengan teori kapasitas kebijakan yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh dan Howlett (2018).

### **Kapasitas Analisis Sistem**

Indikator ketiga yaitu kapasitas analisis sistem, yang menurut Wu, Ramesh dan Howlett (2018) dapat diukur melalui jangkauan dan kualitas pengumpulan data diseluruh sistem seperti ketersediaan, kecepatan dan kemudahan akses cara mendapatkan data atau informasinya. Temuan di lapangan, kapasitas analisis sistem pemerintah daerah dalam pelaksanaan perumusan Perda KTR, berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 1:

*“Karena sebagian besar data diperoleh dengan secara mandiri, otomatis cukup depan dan mudah juga kami memperolehnya data dan informasi tersebut. Dan data tersebut didapatkan sudah pasti dari Dinas Kesehatan sendiri, dan kemenkes”* (Afrizal, wawancara, 15 Desember 2021)

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan informan 2 kembali, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 2, menunjukkan kesesuaian dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 1. Hasilnya menyatakan bahwa akses dalam pengumpulan data dan informasi yang menunjang perumusan kebijakan KTR bida dikatakan cukup mudan dan cepat karena Sebagian besar data tersebut berasal dari lembaganya sendiri yaitu Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menginterpretasikan pemerintah daerah menunjukkan bahwa mereka dapat mengumpulkan data dan informasi yang menunjang perumusan peraturan daerah tentang KTR ini dengan mudah dan cepat. Hal tersebut berarti tidak adanya hambatan dalam proses pengumpulannya karena data yang diperoleh hanya berasal dari lembaga sendiri yaitu Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan data-data pendukung lainnya didapatkannya juga dengan mudah yang berasal dari

Kemenkes. Bukti-bukti yang didapatkan dari lapangan tersebut sudah sesuai dengan indikator kapasitas analisis sistem dari teori yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh dan Howlett (2018).

### **Kapasitas Operasional Individu**

Indikator selanjutnya dari teori yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh dan Howlett (2015) yaitu kapasitas operasional individu. Indikator tersebut berkaitan dengan kemampuan individu dalam melakukan fungsi manajerial dan biasanya sering digambarkan sebagai suatu kepemimpinan. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan 1, yaitu sebagai berikut:

*“Saya rasa sudah menjalankan tugas manajerial nya dimulai dari perencanaan, seperti halnya dalam anggaran, pengarahannya seperti memberikan wewenang kepada sektor-sektor terkait dan koordinasi dengan sektor terkait terjaga dengan baik.”* (Tri, wawancara, 24 Januari 2022)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan 2 dan informan 3, yang dimana hasil wawancara tersebut sama dengan hasil wawancara informan 1 sebelumnya, yaitu pemimpin sudah melakukan tugas manajerialnya yang dimulai dengan perencanaan, pengarahannya dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain. Jadi, dapat diinterpretasikan berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai kapasitas operasional individu yang ditunjukkan oleh pemimpin/ koordinator penetapan kebijakan KTR yaitu Kepala Daerah, menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugas manajerialnya dimulai dari perencanaan terlebih dahulu, penganggaran, pendelegasian, pengarahannya dan selalu melakukan koordinasi dengan sektor terkait. Hal tersebut sudah relevan dengan indikator kapasitas operasional individu dari teori yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh dan Howlett (2018) bahwa tugas manajerial yang dilakukan oleh individu yang memimpin mendapatkan akhir keputusan yang masuk akal secara teori dan praktik.

### **Kapasitas Operasional Organisasi**

Indikator selanjutnya yaitu kapasitas operasional organisasi. Menurut Wu, Ramesh dan Howlett (2018) kapasitas operasional organisasi berpusat pada memobilisasi dan menyebarkan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kebijakan. Indikator ini juga dapat diukur dengan tingkat koordinasi proses internal yang dimana organisasi harus mengkomunikasikan tujuan, rencana operasional dan prosedur kepada pegawainya dan eksternal dengan mengkomunikasikan dan berkolaborasi dengan lembaga lain dan pemangku kepentingan masyarakat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 1, adalah sebagai berikut :

*“Pada saat walikota memandatkan Dinas Kesehatan sebagai sector penggerak dalam penyusunannya, Sub Koordinator Promosi Kesehatan langsung ditunjuk oleh ibu kepada sebagai unsur pelaksana perumusan perda KTR tersebut. Hal itu terjadi karena memang sudah sesuai dengan bidang atau konsentrasi kami. Pada saat wewenang sudah didapatkan dinkes. Ibu kepala dinas mengadakan rapat untuk mengkomunikasikan apa yang harus kita lakukan dalam perumusan raperda KTR tersebut. Dan kami pada saat itu juga sudah mengkomunikasikan juga secara eksternal, dan juga tentu saja berkolaborasi dengan lembaga lainnya seperti Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dan yang lainnya yang ikut memberi masukan dan mengutarakan pemikiran terkait perumusan rancangan peraturan daerah tentang KTR tersebut.”* (Afrizal, wawancara, 15 Desember 2021)

Dan setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan informan 2, hasil wawancara tersebut menunjukkan kesamaan dan kesesuaian dengan hasil wawancara sebelumnya, yaitu Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sudah memobilisasi sumberdaya dengan tepat dan berkomunikasi secara internal dan eksternal lalu berkolaborasi dengan sektor terkait untuk memaksimalkan proses perumusan kebijakan KTR tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 3 dari DPRD Kota Sukabumi tersebut yang hasil dari wawancara tersebut sebagai berikut:

*“Kami membentuk Pansus itu dalam rapat paripurna, karena harus ada keputusan DPRD juga. Dan Pansus itu harus ada ketua dan wakil ketuanya yang memimpin proses pelaksanaan pembahasan raperda itu. Fraksi-fraksi DPRD yang jadi anggota Pansusnya, anggota yang terpilih itu sesuai dengan kesepakatan tiap fraksi itu. Tapi kan tidak semua anggota fraksi di bidang hukum atau di bidang kesehatan, maka dari itu kita juga mengundang para ahlinya, seperti biro hukum provinsi dan praktisi kesehatan lingkungan.”* (Akbar, wawancara, 4 Januari 2022)

Setelah wawancara tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 4 yaitu berasal dari lembaga yang sama yaitu DPRD Kota Sukabumi untuk keakuratan data yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian hasil wawancara dengan informan 4 menunjukkan hasil yang sama dengan hasil wawancara dengan informan 3, yang dimana dari hasil wawancara-wawancara tersebut menunjukkan bahwa DPRD Kota Sukabumi membentuk Pansus dalam rapat paripurna, yang dilakukan hanya oleh internal DPRD. Keanggotaan Pansus merupakan perwakilan dari setiap fraksi-fraksi DPRD yang diajukan, yang komposisinya sesuai dengan kesepatan fraksi-fraksi tersebut dan untuk memaksimalkan kinerja Pansus yang anggotanya tidak semua berada pada bidang yang sesuai, maka dari itu Pansus melibatkan Biro Hukum provinsi dan praktisi kesehatan lingkungan.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara-wawancara mengenai kapasitas operasional organisasi diatas, dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah daerah menunjukkan sumberdaya-sumberdaya yang sebarakan untuk melakukan proses penetapan sudah tepat sasaran dan sesuai. Seperti Sub Koordinator Promosi Kesehatan Dinkes ditunjuk sebagai unsur pelaksana perumusan rancangan peraturan

daerah KTR karena sesuai dengan bidangnya. Kemudian dalam penyebaran sumberdaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Sukabumi dalam pembentukan panitia khusus untuk membahas rancangan perda KTR, panitia khusus tersebut beranggotakan perwakilan fraksi-fraksi DPRD akan tetapi perwakilan setiap fraksi tersebut yang tidak semuanya praktisi hukum dan tidak sesuai dengan bidang yang sedang dibahas. Maka dari itu untuk memaksimal dan dan menghilangkan keraguan mengenai kapasitas mereka, kemudian dilibatkannya narasumber yang berkompeten dalam bidang materi raperda yang sedang dibahas yaitu praktisi kesehatan lingkungan dan kemenkumham jawabar atau biro hukum provinsi untuk menyelaraskan raperda dilihat dari penulisan pasal-pasal hukumnya. Hal tersebut menunjukkan kesesuaian dengan indikator kapasitas operasional organisasi dari teori kapasitas kebijakan yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh dan Howlett (2018) yang dalam tingkat organisasi ini berpusat pada efektivitas pemerintah daerah dalam memobilisasi dan menyebarkan sumberdaya yang diperlukan untuk penetapan peraturan daerah KTR.

### **Kapasitas Operasional Sistem**

Indikator selanjutnya yaitu kapasitas operasional sistem, yang mengacu pada sistem kontrol atas lembaga sektor terkait dan hubungan yang dipertahakannya dengan mitra atau lembaga lainnya. Indikator ini juga ditentukan oleh tingkat koordinasi antarlembaga, lalu koherensi dan keterlibatan jaringan kebijakan dan masyarakat kemudian kejelasan peran dan tanggungjawab berbagai organisasi yang terlibat dalam proses kebijakan. Peneliti melakukan wawancara dengan informan 1, yaitu dari Dinas Kesehatan yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

*“Yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan KTR ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, DPRD Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi selaku pemangku kepentingan utama, lalu SKPD yang lain yang ikut*

membantu agar proses penetapan ini berjalan dengan lancar seperti Satpol PP. Lalu koordinasi yang terjadi antarlembaga terkait cukup lancar, seperti halnya kami berkomunikasi dengan bagian hukum dan skpd lainnya secara bertahap, agar perumusan raperda KTR tersebut bisa terselesaikan secara maksimal. Dan dalam perumusan perda KTR ini tokoh masyarakat dilibatkan sebagai peninjau, dan tidak dibentuknya jejaring kebijakan. Selanjutnya peran dan tanggungjawab sektor terkait dalam proses ini sudah jelas sesuai dengan kewenangan yang diberikan” (Ima, wawancara, 18 Januari 2022)

Wawancara dengan informan 2, juga dilakukan oleh peneliti yang hasil wawancaranya menunjukan kesesuaian dan sama dengan hasil wawancara sebelumnya yaitu informan 1. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 3 yang berasal dari Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, hasilnya yaitu : “Unsur yang terlibat dalam penetapan kebijakan KTR ini adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi, DPRD Kota Sukabumi, sebagai pemangku kepentingan utama, dan SKPD yang lain yang ikut membantu seperti Satpol PP dan yang lainnya. Untuk koordinasi tentunya setiap sektor terkait selalu terjaga dan jelas agar tidak terjadinya suatu miskomunikasi, seperti halnya pada saat dinas kesehatan merumuskan raperda secara internal mereka, tetapi hal itu tidak langsung diajukan kepada dprd tapi harus melalui bagian hukum. Dalam keterlibatan masyarakat tidak dibentuknya jejaring kebijakan, tetapi masyarakat dilibatkan pada saat pembahasan di DPRD Kota Sukabumi melalui hearing dan yang lainnya. Terakhir peran dan tanggung jawab sektor terkait dalam proses penetapan kebijakan KTR ini sudah jelas dengan dilengkapi adanya surat keputusan” (Tri, wawancara, 24 Januari 2022)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 4 dari DPRD Kota

Sukabumi, yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk keterlibatan masyarakat, saya rasa tidak dilibatkan secara langsung dalam proses penetapan raperda tersebut. Paling hanya di komunikasikan saja misalkan kalau kita sedang membahas raperda tersebut” (Emil, wawancara, 3 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan KTR masih belum jelas dan hanya dijadikan sasaran saja yang diberi informasi mengenai perumusan/penetapan kebijakn KTR tersebut. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan informan 5 yang juga berasal dari DPRD Kota Sukabumi yang hasilnya menunjukan persamaan dan kesesuaian dengan hasil wawancara informan 4. Jadi dapat diinterpretasikan dari hasil wawancara-wawancara tersebut mengenai kapasitas operasional sistem, pemerintah daerah menunjukan kapasitas operasional pada tingkat sistem yang mengacu pada hubungan yang pemerintah daerah pertahankan dengan pemangku kepentingan lainnya. Kapasitas operasional sistem yang miliki pemerintah daerah ditunjukan pada koordinasi yang terjadi antarlembaga terkait sangat terjaga dan lancar melalui dengan komunikasi dilakukan agar tujuan nya tercapai.

Lalu keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan ini yaitu dalam proses penyusunan Dinas Kesehatan mengundang tokoh masyarakat untuk ikut meninjau, dan tidak membentuk jejaring kebijakan. Kemudian melalui kewenangan yang diberikan sebelumnya dan surat keputusan yang dikeluarkan membuat peran dan tanggungjawab setiap sektor terkait sudah jelas. Hal tersebut bisa dikatakan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh dan Howlett (2018) namun belum sepenuhnya sesuai, karena keterlibatan masyarakat masih belum jelas dalam proses perumusan/penetapan kebijakan tersebut. Kemudian tidak

dibentuknya suatu jejaring kebijakan dimana hal tersebut sangat berguna bagi kejelasan peran masyarakat dan swasta dalam proses penetapan suatu kebijakan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya sudah peneliti deskripsikan mengenai Kapasitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sukabumi berdasarkan pertimbangan analisis dari sembilan indikator teori kapasitas kebijakam menurut Wu, Ramesh dan Howlett (2015) simpulan hasil dari penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Kapasitas Analisis Individu**

Kebijakan KTR sudah ditetapkan sesuai dengan indikator kapasitas analisis individu. Pemerintah daerah menunjukkan kemampuannya dalam melakukan analisis tingkat individu seperti mendiagnosis masalah dan akar penyebabnya yaitu dilihat tinggi angka perokok berdasarkan data PHBS dan indeks kesehatan masyarakat yang tidak terlalu tinggi. Dan pemerintah daerah merancang solusi dan merumuskan rencana yang masuk akal untuk permasalahan kebijakan tersebut yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### **2. Kapasitas Analisis Organisasi**

Pemerintah daerah menunjukkan kemampuan memperoleh dan memproses data dan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan peraturan daerah tentang KTR dengan melakukan kajian, survey dan sampling secara mandiri, lalu mengobservasi tempat yang diduga tercemari asap rokok dan memproses data PHBS yang berasal dari lembaganya sendiri. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mumpuni dari sisi kapasitas analisis organisasi.

### **3. Kapasitas Analisis Sistem.**

Pemerintah daerah menunjukkan kesesuaian dengan indikator ini, yaitu mereka dapat mengumpulkan data dan informasi yang menunjang perumusan peraturan daerah

tentang KTR ini dengan mudah dan cepat. Tidak adanya hambatan dalam proses pengumpulannya karena data yang diperoleh hanya berasal dari lembaga sendiri yaitu Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan data-data pendukung lainnya didapatkannya juga dengan mudah yang berasal dari Kemenkes.

### **4. Kapasitas Operasional Individu**

Dalam indikator tersebut, pemerintah daerah menunjukkan kemampuan individunya dalam melakukan fungsi manajerial yang digambarkan sebagai kepemimpinan. Kepada daerah sebagai koordinator penetapan kebijakan KTR ini menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugas nya dimulai dari perencanaan terlebih dahulu, pengarahan, memberikan wewenang dan selalu melakukan koordinasi dengan sektor terkait.

### **5. Kapasitas Operasional Organisasi**

Pemerintah daerah memobilisasi dan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya nya untuk melakukan proses penetapan kebijakan KTR dengan tepat sasaran dan sesuai. Seperti Sub Koordinator Promosi Kesehatan Dinkes ditunjuk sebagai unsur pelaksana perumusan rancangan peraturan daerah KTR karena sesuai dengan bidangnya. Kemudian DPRD Kota Sukabumi dalam pembentukan panitia khusus untuk membahas rancangan perda KTR, panitia khusus tersebut beranggotakan perwakilan fraksi-fraksi DPRD akan tetapi perwakilan setiap fraksi tersebut dan memaksimal kapasitas mereka, dengan melibatkannya narasumber yaitu praktisi kesehatan lingkungan dan kemenkumham jawabar atau biro hukum provinsi.

### **6. Kapasitas Operasional Sistem**

Pemerintah daerah dapat mempertahankan hubungan dengan kepentingan lainnya. Ditunjukkan pada koordinasi yang terjadi antarlembaga terkait sangat terjaga dan lancar melalui dengan komunikasi dilakukan agar tujuannya tercapai. Lalu keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan ini yaitu dalam proses penyusunan Dinas Kesehatan mengundang tokoh

masyarakat untuk ikut meninjau, dan tidak membentuk jejaring kebijakan. Kemudian melalui surat keputusan yang dikeluarkan membuat peran dan tanggungjawab setiap sektor terkait sudah jelas.

Saran untuk penelitian berikutnya adalah melakukan analisa dan pengukuran pada indikator politiknya juga, dan melakukan penelitian lebih dalam mengenai implementasi dari kebijakan KTR tersebut. Sehingga dapat memunculkan faktor mengapa hasilnya masih belum optimal sampai sekarang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anderson, James A. (1975). *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- [2] Creswell, W. John. (2016). *Research Design Edisi 4*. Terjemahan Ahmad Fawaid dan Rianayati K.P. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [3] Chandler, Ralph C dan Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. Canada: John Wiley Sons Inc.
- [4] Fellegi, Ivan P. (1996). *Strengthening our Policy Capacity. Report of the Task Force on Strengthening the Policy Capacity of the Federal Government*. Ottawa: Deputy Minister Task Forces
- [5] Henry, Nicholas. (1988). *Administrasi Negara: Dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali Press.
- [6] Howlett, Michael dan Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto : Oxford University Press.
- [7] Ibrahim, Amin. (2007). *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- [8] Nugroho, Riant. (2020). *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- [9] Painter, Martin dan Pierre, Jon. (2005). *Challenges to State Policy Capacity : Global Trends and Comparative Perspectives*. London : Palgrave Macmillan.
- [10] Wu, Xun. Howlett, Michael. dan Ramesh, M. (2018). *Policy Capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan
- [11] Cohen, Wesley M & Levinthal, Daniel A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly*, Vol 35, No. 1, 128-152
- [12] Howlett, Michael & Mukherjee, Ishani. (2014). Policy Design and Non-Design: Towards a Spectrum of Policy Formulation Types. *Politics and Governance*, Volume 2, Issue 2, 57-71
- [13] Maulidya, Riva Y. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 27, No. 2, 170-178
- [14] Wu, Xun. Ramesh, M, Howlett, Michael. (2015). Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and Capabilities. *Policy and Society*, Volume 34, 165-171
- [15] Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140)
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278)
- [17] Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

---

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi  
Tahun 2014 Nomor 3)

HALAMAN INI SENGAJA DIKSONGKAN

---

**FACTORS ASSOCIATED WITH UNSAFE BEHAVIOR ON WORKERS IN THE PRODUCTION DIVISION OF PALM OIL PROCESSING PT. X****Oleh****Meisye Herlen Selfia<sup>1)</sup>, T Samsul Hilal, Entianopa<sup>2)</sup>****<sup>1,2</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu  
Jambi, Indonesia****E-mail: <sup>1</sup>[meisyeherlinslfia@gmail.com](mailto:meisyeherlinslfia@gmail.com)****Abstract**

Unsafe behavior takes many forms from a simple failure to wear or use personal protective equipment to an intentional act, such as moving a guard machine or tampering with a security mechanism into a security system. There are many reasons why people behave unsafely, perhaps they were taught certain unsafe work methods early in the job and see it now as standard work practice, they may lack the skills or knowledge to perform tasks safely, as in certain manual handling, they may failed to secure the load due to timely demands. Factors causing accidents and poor health. The main causes of accidents in the workplace are caused by unsafe behavior and employers need to be aware that reducing accidents can only be achieved by identifying, examining and focusing these behaviors. This research was conducted using a quantitative method with a cross-sectional approach. The population in the study were all workers in the production division of PT.X, totaling 65 people. The sample in this study used total sampling, namely all workers in the production division of PT. X as many as 65 people. Data collection in this study was carried out using questionnaires and interviews. Data were analyzed by univariate and bivariate with chi-square. The results showed that there was a significant relationship between attitudes (p-value = 0.035), knowledge (p-value = 0.041), training (p-value = 0.043) on unsafe behavior in workers in the production division of palm oil processing PT. X in 2021. It is recommended for companies as input and consideration for companies in their work in order to prevent work accidents

**Keywords: Unsafe Behavior, Knowledge, Attitude, Training****PENDAHULUAN**

Prinsip dasar ilmu K3 adalah semua kecelakaan dapat dicegah, karena kecelakaan itu pasti ada sebabnya. Jika sebab kecelakaan dapat dihilangkan maka kemungkinan kecelakaan dapat di hindari. Prinsip tersebut mendasari berkembangnya ilmu dalam bidang K3 seperti pengetahuan mengenai berbagai jenis bahaya, perilaku manusia, kondisi tidak, tindakan tidak aman, penyakit akibat kerja, sehatan kerja dan hygiene industry. Jadi prinsipnya adalah semua kecelakaan dapat dicegah dan sangat penting untuk memberi dorongan dalam melakukan upaya pencegahan (Ramli, 2010). Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan penentu perundangan dan

memiliki landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh semua pihak baik itu pekerja, pengusaha ataupun pihak lainnya.

Bertahun-tahun lalu banyak orang memegang pandangan bahwa, jika organisasi mematuhi hukum tidak akan ada kecelakaan. Masalahnya adalah bahwa hal itu tidak memperhitungkan secara umum, pertanyaan tentang perilaku manusia dan dalam beberapa kasus perilaku yang tidak aman. Sejauh ini keamanan perilaku upaya untuk memeriksa unsur-unsur perilaku manusia yang merupakan faktor penyebab kecelakaan dan kesehatan yang buruk. Penyebab utama kecelakaan di tempat kerja yang disebabkan oleh perilaku dan majikan yang tidak aman perlu disadarkan

bahwa mengurangi kecelakaan hanya dapat dicapai dengan mengidentifikasi, memeriksa dan memfokuskan perilaku tersebut (Strank, 2007).

Hasil penelitian Jesica Sangaji (2018), tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman pekerja bagian lambung galangan kapal PT X, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur, masa kerja dan tingkat pendidikan dengan perilaku tidak aman, sedangkan variabel pengetahuan, sikap, pengawasan, pelatihan K3 dan ketersediaan fasilitas K3 ada hubungan dengan perilaku tidak aman (Sangaji, Jayanti, & Lestantyo, 2018).

Penelitian Untari.L.D (2021), tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman pada karyawan bagian produksi di PT X Jakarta menunjukkan bahwa ada hubungan yang kentara anatar variabel pelatihan dan pengawasan terhadap perilaku tidak aman pada karyawan bagian produksi PT X Jakarta, sedangkan variabel umur dan pengetahuan tidak berhubungan terhadap perilaku tidak aman pada karyawan bagian produksi di PT X Jakarta (Untari, Kusumaningtiar, Handayan, & Yusvita, 2021).

Perilaku tidak aman mengambil banyak bentuk dari kegagalan sederhana untuk memakai atau menggunakan peralatan pelindung pribadi untuk tindakan yang disengaja, seperti memindahkan mesin penjaga atau merusak mekanisme keamanan kesistem keamanan. Ada banyak alasan mengapa orang berperilaku tidak aman, mungkin mereka diajari metode pekerja yang tidak aman tertentu di awal pekerjaan dan melihatnya sekarang sebagai praktik kerja standar, mereka mungkin kurang keterampilan atau pengetahuan untuk melakukan tugas dengan aman, seperti dalam penanganan manual tertentu, mereka mungkin gagal mengamankan beban karena tuntutan tepat waktu (Geller, 2001).

Dari hasil survey awal tanggal 14 April 2021, pekerja bagian produksi berjumlah 65

pekerja, mereka bekerja terbagi menjadi dua shif yaitu shif pagi dan shif malam. Pekerja di bagian produksi paling beresiko terjadinya kecelakaan kerja, dikarenakan pekerja dibagian produksi berhubungan dengan benda-benda keras dan alat-alat yang digunakan sangat beresiko. Menurut informasi yang didapat kecelakaan terjadi di akibatkan oleh manusia itu sendiri yaitu seperti tidak menggunakan APD saat bekerja tidak berhati-hati saat melakukan pekerjaan dan melanggar peraturan. Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja bagian produksi yaitu seperti terjepit, tergores, terjatuh, tersandung, gangguan pendegaran dan terkena duri buah sawit.

PT. X yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di kec batin xxiv dan kec. Muara tembesi kab. Batanghari – jambi dan pabrik kelapa sawit yang terletak di kec. Mersam kab. Batanghari - jambi. Saat ini PT. X memiliki luas lahan 1.417,51 ha dengan total ijin lokasi seluas 8.750 ha dan 1 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/jam. Pekerja dibagian produksi terbagi menjadi 2 shif yaitu shif pagi dan shif malam, shif pagi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore dan shif malam mulai dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi. Sebagai perusahaan nasional dan untuk merealisasikan salah satu maksud dan tujuan perusahaan maka perusahaan ini akan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti dan pola kemitraan yang bersifat saling menguntungkan, berkelanjutan dan bersinergi. Berdirinya perseroan ini bermaksud bergerak dalam bidang usaha yaitu di antaranya menjalankan usaha di bidang pertanian, perdagangan, pembangunan, perindustrian dan kawasan perindustrian.

Proses produksi di PT. X meliputi, proses timbangan, proses sortasi (penyeleksian buah sawit), proses rebusan buah sawi (sterelisasi), stasiun treser (pelepasan/memisahkan antara tbs dan jajangan), stasiun press (memisahkan antara serabut kelapa dan inti luar), stasiun

klarifikasi (memisahkan antara minyak dan kotoran), stasiun kernel (memisahkan antara cangkang dan inti kelapa), proses penyaringan minyak, ampas tandan di hancurkan. PT. X memiliki 85 pekerja 65 pekerja di bagian produksi dan dibagian lainnya sebanyak 20 orang. Proses produksi sawit di PT. X meliputi minyak CPO yang telah dikirim menggunakan mobil. Kecelakaan kerja yang terjadi di bagian produksi yaitu seperti terjepit, tergores, terjatuh, tersandung, gangguan pendegaran, terkena duri buah sawit dan tertimpa buah sawit.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan pekerja telah melakukan perilaku tidak aman yang memungkinkan mereka mengalami kecelakaan, kecacatan bahkan kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman *Unsafe behavior* pada pekerja bagian produksi kelapa sawit PT. X

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan *crosssectional*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman (*unsafe behaviour*) pada pekerja bagian produksi pengolahan kelapa sawit di PT. X tahun 2021. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pekerja bagian produksi PT. X yang berjumlah 65 orang. Sampel dalam penelitian menggunakan *total sampling*, yaitu seluruh pekerja bagian produksi PT. X sebanyak 65 orang. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara. Data di analisis dengan cara univariat dan bivariat dengan *chi-square*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 76,9% responden memiliki sikap tidak baik, 58,5% responden memiliki pengetahuan tidak baik, 67,7% responden tidak mendapatkan pelatihan dan 53,8%

**Tabel 1.** Gambaran sikap, pengetahuan, pelatihan dan perilaku tidak aman

Variabel	Frekuensi	Persentase
<b>Sikap</b>		
Tidak baik	50	76,9
baik	15	23,1
<b>Pengetahuan</b>		
Tidak baik	38	58,5
baik	27	41,5
<b>Pelatihan</b>		
Tidak baik	44	67,7
baik	21	32,3
<b>Perilaku tidak aman</b>		
Tidak Aman	35	53,8
Aman	30	46,2

**Tabel 2.** Hubungan sikap, pengetahuan, pelatihan dan perilaku tidak aman

No	Variabel	Perilaku Tidak Aman				Total		p-value
		Perilaku Tidak Aman		Perilaku Aman		n	%	
		n	%	n	%			
<b>Sikap</b>								
1	Tidak Baik	31	47,7	19	29,2	50	79,6	0,035
2	Baik	4	6,2	11	16,9	15	23,1	
<b>Pengetahuan</b>								
1	Tidak Baik	25	38,5	13	20,0	38	58,5	0,041
2	Baik	10	15,4	17	26,2	27	41,5	
<b>Pelatihan</b>								
1	Tidak Baik	28	43,1	16	24,6	44	67,7	0,043
2	baik	7	10,8	14	21,5	21	32,3	

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap terhadap perilaku tidak aman pada pekerja bagian produksi pengolahan kelapa sawit PT. X tahun 2021 *p-value* 0,035. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jumardi, (2021) adanya hubungan antara responden memiliki perilaku tidak aman (tabel 1).

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan sikap ( $p=0,035$ ), pengetahuan ( $p=0,041$ ) dan pelatihan ( $p=0,043$ ) dengan perilaku tidak aman (Tabel 2).

sikap dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja konstruksi Proyek Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kendari dengan *p-value* 0,001.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian Mitsalia Asriani dkk, (2013) adanya hubungan yang signifikan antara sikap terhadap bahaya dengan perilaku tidak aman dengan *p value* = 0,002. Menurut Notoatmodjo, (2012) sikap merupakan suatu kecenderungan untuk

mengadakan suatu tindakan terhadap suatu objek, dengan suatu cara yang menyatakan adanya tanda untuk menyenangkan atau tidak menyenangkan objek tersebut.

Menurut Shiddiq et al., (2014) sikap yang ada pada diri seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan psikologis, serta faktor eksternal. Faktor eksternal dapat berwujud situasi yang dihadapi oleh individu, norma-norma dan hambatan-hambatan yang ada dalam masyarakat, semuanya ini akan berpengaruh pada sikap yang ada pada diri seseorang. Sikap yang negatif bagi setiap karyawan sangat berpengaruh. Sikap buruk/negatif yang ditunjukkan oleh responden dapat membuat pribadi seorang karyawan berperilaku tidak aman

Penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan kuat antara sikap dengan perilaku tidak aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap tidak baik disebabkan kurangnya pengawasan pekerja saat bekerja oleh supervisor K3, kurangnya pekerja mengikuti instruksi SOP yang telah ditetapkan dan kurangnya kesadaran dalam memperhatikan posisi tubuh dalam bekerja (ergonomi).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja bagian produksi pengolahan kelapa sawit PT. X tahun 2021 *p-value* 0,041.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mitsalia Asriani, Hamzah Hasyim, (2013) ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan terhadap bahaya dengan perilaku tidak aman (unsafe act) dengan *p-value* =0,015. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian Shiddiq et al., (2014) adanya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku tidak aman karyawan di bagian produksi unit IV PT. X dengan *p-value* = 0,026. Menurut Notoatmodjo, (2012) pengetahuan merupakan hasil dari tahu, terjadi setelah orang melakukan proses penginderaan

terhadap objek yang diamatinya, melalui penginderaan, pengetahuan diperoleh dengan cara membaca, melihat, dan mendengar. Dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dapat memberikan landasan yang mendasar sehingga memerlukan partisipatif secara efektif dalam menentukan sendiri masalah di tempat kerja.

Pengetahuan K3 adalah kondisi kognitif yang harus di wujudkan ditempat kerja dengan segala upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran mendalam guna melindungi tenaga kerja, manusia serta karya dan budaya melalui penerapan teknologi pencegahan kecelakaan yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang berlaku (Tarwaka, 2014).

Penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan kuat antara pengetahuan dengan perilaku tidak aman. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan akan sesuai dengan pengetahuan apabila individu menerima isyarat yang cukup kuat untuk memotivasi dia bertindak sesuai dengan pengetahuannya.

Pengetahuan yang kurang akan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilingkungan kerja menyebabkan seseorang sulit untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di sekitarnya, sehingga sulit untuk menentukan tindakan dalam mengendalikan potensi bahaya. Oleh sebab itu seseorang akan menjadi kurang waspada terhadap resiko yang dapat timbul dari perilakunya selama bekerja

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa ada hubungan yang signifikan antara pelatihan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja bagian produksi pengolahan kelapa sawit PT. X tahun 2021 *p-value* 0,043.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian(Mitsalia Asriani, Hamzah Hasyim, 2013) Ada hubungan yang signifikan antara pelatihan K3 dengan perilaku tidak aman (*p value* = 0,029). Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian (Jesica Sangaji, Siswi Jayanti, 2018) ada hubungan antara pelatihan K3 dengan Perilaku tidak aman

denagn p-value =0,030. Pelatihan merupakan proses yang kontinu yang berlaku bagi semua pekerja dilapangan baik bagi seorang supervisor, pekerja baru, pekerja mutasi atau pekerja kontrak. Semua pelatihan yang diperlukan sudah diidentifikasi dan tersedia bagi para pekerja dan dituangkan dalam matriks kompetensi pekerja. Tujuan pelatihan adalah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan bekerja aman, memotivasi pekerja agar bekerja secara aman. Training K3 adalah suatu proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek daripada teori yang dilakukan seseorang yang bekerja atau suatu kelompok unit kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang K3 (Tarwaka, 2014).

Hasil penelitian didapatkan bahwa ada sebagian pekerja yang mungkin tidak mendapatkan pelatihan secara keseluruhan. Program pelatihan K3 kepada pekerja harus lebih ditingkatkan agar pekerja tidak hanya semakin berperilaku aman dalam bekerja namun juga dapat meningkatkan keterampilan pekerja yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas. Disarankan kepada perusahaan untuk memberikan pelatihan kecil untuk pekerja di perusahaan tersebut

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: ada hubungan yang signifikan antara sikap terhadap perilaku tidak aman pada pekerja bagian produksi pengolahan kelapa sawit PT. X tahun 2021 *p-value* 0,035. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja bagian produksi pengolahan kelapa sawit PT. X tahun 2021 *p-value* 0,041. Ada hubungan yang signifikan antara pelatihan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja bagian produksi pengolahan kelapa sawit PT. X tahun 2021 *p-value* 0,043.

## Saran

Diharapkan pekerja menggunakan dan menjaga perlengkapan keselamatan kerja, bekerja sesuai tanggung jawab serta sebaiknya pekerja turut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pelatihan

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Geller, E. S. (2001). *The Psychology of Safety Handbook*. Lewis Publischer. Boca Raton London. New York Washington, D.C: Lewis.
- [2] Jesica Sangaji, Siswi Jayanti, D. L. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman Pekerja Bagian Lambung Galangan Kapal Pt X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(5).
- [3] Jumardi, A. D. P. N. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman Pada Pekerja Konstruksi Proyek Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpwbi) Kendari Tahun 2019, 2(1).
- [4] Mitsalia Asriani , Hamzah Hasyim, I. P. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman (Unsafe Act) Di Bagian Pabrik Urea PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- [5] Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [6] Ramli, S. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Resiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: Dian Rakyat.
- [7] Sangaji, J., Jayanti, S., & Lestantyo, D. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman pekerja bagian lambung galang kapal pt x. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6, 563–571.
- [8] Shiddiq, S., Wahyu, A., & Muis, M. (2014). The Relationship between Employee ' s Perception of Occupational Safety and Health and Unsafe Work

- Behavior in the Production Unit IV of PT . Semen Tonas. *Jurnal MKMI*, 110–116.
- [9] Strank, J. (2007). *Human Factor and Behavioural Safety*.
- [10] Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- [11] Untari, L. D., Kusumaningtiar, D. A., Handayan, P., & Yusvita, F. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Tidak Aman pada Karyawan Departemen Produksi di PT X Jakarta The Factors Associated With Unsafe Behavior in The Production Department Employees at PT X Jakarta. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 13.
- [12] Geller, E. S. (2001). *The Psychology of Safety Handbook*. Lewis Publissher. Boca Raton London. New York Washington, D.C: Lewis.
- [13] Jesica Sangaji, Siswi Jayanti, D. L. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman Pekerja Bagian Lambung Galangan Kapal Pt X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(5).
- [14] Jumardi, A. D. P. N. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman Pada Pekerja Konstruksi Proyek Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpwbi) Kendari Tahun 2019, 2(1).
- [15] Mitsalia Asriani , Hamzah Hasyim, I. P. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Tidak Aman (Unsafe Act) Di Bagian Pabrik Urea PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- [16] Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [17] Ramli, S. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Resiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: Dian Rakyat.
- [18] Sangaji, J., Jayanti, S., & Lestantyo, D. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman pekerja bagian lambung galang kapal pt x. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6, 563–571.
- [19] Shiddiq, S., Wahyu, A., & Muis, M. (2014). The Relationship between Employee ' s Perception of Occupational Safety and Health and Unsafe Work Behavior in the Production Unit IV of PT . Semen Tonas. *Jurnal MKMI*, 110–116.
- [20] Strank, J. (2007). *Human Factor and Behavioural Safety*.
- [21] Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- [22] Untari, L. D., Kusumaningtiar, D. A., Handayan, P., & Yusvita, F. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Tidak Aman pada Karyawan Departemen Produksi di PT X Jakarta The Factors Associated With Unsafe Behavior in The Production Department Employees at PT X Jakarta. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 13.

---

**PERALIHAN MATA PENCAHARIAN WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN  
BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT**

Oleh  
**Bintang Virgo**  
Fakultas Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [bintangvirgo2109@gmail.com](mailto:bintangvirgo2109@gmail.com)

**Abstract**

Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport yang berlokasi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo mengakibatkan 5 desa terdampak, diantaranya yaitu Desa Glagah, Desa Sindutan, Desa Jangkar, Desa Palihan dan Desa Kebonrejo. Adanya pembangunan tersebut mampu menimbulkan dampak negatif ataupun positif bagi masyarakat. Dampak negatif diantaranya terjadinya konflik di masyarakat, terjadinya pro dan kontra, perbedaan pola pikir. Akan tetapi itu semua dapat terselesaikan melalui rekonsiliasi konflik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak positif dari adanya pembangunan bandara Yogyakarta International Airport. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi, wawancara dan studi media massa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pembangunan bandara adalah terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian di masyarakat.

**Keywords: Pembangunan, Dampak, Positif**

**PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Proses pembangunan sendiri pasti akan mengandung dilema yaitu mengandung sisi positif dan sisi negatif.<sup>1</sup> Sehingga berbagai dampak pasti akan dirasakan oleh masyarakat karena adanya proses pembangunan tersebut.

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan

infrastruktur diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia.<sup>2</sup> Selain itu, pembangunan infrastruktur ini merupakan prioritas Indonesia pada saat ini guna meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar serta meningkatkan produktivitas dan daya asing.<sup>3</sup>

Salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini sedang banyak melaksanakan pembangunan infrastruktur besar-besaran adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan infrastruktur di Yogyakarta salah satunya yaitu pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

---

<sup>1</sup> Wayan Windia et al., "Analisis Dampak Budaya Pembangunan Bandara Internasional Terhadap Masyarakat Sekitarnya," *Jurnal Dwijen Agro* Vol. 02 No. 02.

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Menkeu Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur," *Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia* 2021.

Diakses pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 22.34 WIB.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tekanan-pentingnya-pembangunan-infrastruktur/>

<sup>3</sup> Ibid. Diakses pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 22.35 WIB.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tekanan-pentingnya-pembangunan-infrastruktur/>

Pembangunan bandara tersebut berlokasi di Kapanewon atau Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di ujung barat yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di bagian baratnya, bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Bantul, bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang dan bagian selatan berbatasan langsung dengan laut selatan. Ibukota Kabupaten Kulon Progo sendiri yaitu Kota Wates yang memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km<sup>2</sup>) terdiri atas 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan dan 918 du Kapanewon atau Kecamatan Temon sebelah utara berbatasan langsung dengan Kapanewon Kokap, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kapanewon Wates dan Kapanewon Pengasih. Selain itu, Kapanewon Temon memiliki luas wilayah 3.629,09 Hektar atau hanya 6,9% dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo.<sup>4</sup> Kapanewon Temon terdiri atas 95 pedukuhan, 166 RW dan 401 RT.<sup>5</sup>

Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport sendiri mengakibatkan 5 desa terdampak diantaranya adalah Desa Glagah, Desa Jangkaran, Desa Palihan, Desa Kebonrejo dan Desa Sindutan. Luas tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara seluas 645,63 Ha yang terdiri atas tanah milik

masyarakat seluas 466,73 Ha dan tanah milik pakualaman ground seluas 178,90 Ha.<sup>6</sup>kuh.<sup>7</sup>

Setiap pembangunan pasti menimbulkan dampak positif ataupun dampak negatif baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Kapanewon Temon merupakan salah satu kapanewon yang sebelum ada pembangunan bandara hanya Pantai Glagah saja yang menjadi icon wisata, akan tetapi semenjak pembangunan bandara tidak hanya Pantai Glagah yang bisa dijadikan tempat wisata. Pembangunan bandar aini menjadi daya Tarik tersendiri sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan serta dapat memajukan perekonomian.

Akan tetapi dibalik pembangunan bandara tersebut terdapat juga dampak negatif terutama yang dirasakan oleh warga diantaranya adalah banyak rumah warga yang temboknya menjadi retak akibat pemadatan lokasi *runaway*,<sup>8</sup> tempat tinggal tergusur dan bahkan kehilangan mata pencaharian.<sup>9</sup> Adanya pembangunan tersebut merubah berbagai kehidupan masyarakat salah satunya dalam hal mata pencaharian.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini merupakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk meneliti hal-hal yang bersifat alami. Selain itu, metode kualitatif ini bertujuan guna mengetahui suatu pola yang terjalin dalam hubungan interaktif,

<sup>4</sup> BPS Kabupaten Kulon Progo, "Kapanewon Temon Dalam Angka Temon *Subdistrict in Figures 2020*," ed. BPS Kabupaten Kulon Progo (Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2020).

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Bintang Virgo, "Rekonsiliasi Konflik Pada Masyarakat Terdampak Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport" (UIN Sunan Kalijaga, 2020).

<sup>7</sup> BPS Kabupaten Kulon Progo, "Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka Kulon Progo *Regency in Figures 2021*," ed. BPS Kabupaten Kulon Progo (Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2021).

<sup>8</sup> Kuntadi, "Warga Temon Mulai Keluhkan Dampak Pembangunan Bandara Baru Yogya," *Inewsyoga.id* 2018. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 14.00 WIB.

<https://yogya.inews.id/berita/warga-temon-mulai-keluhkan-dampak-pembangunan-bandara-baru-yogya>

<sup>9</sup> Reni Mardika, "Warga Terdampak Bandara Yogyakarta Keluhkan Kehilangan Mata Pencaharian," *Kompas TV* 2021. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 14.05 WIB.

<https://www.kompas.tv/article/228736/warga-terdampak-bandara-yogyakarta-keluhkan-kehilangan-mata-pencaharian>

penggambaran suatu keadaan yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks.

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis sendiri merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk memahami lebih mendalam serta menyeluruh yang berorientasi pada pemecahan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya *pertama yaitu observasi*, yang dilaksanakan agar peneliti dapat membuka wawasan mengenai apa yang terjadi di lapangan, terbuka dan tidak mudah terpengaruh hal-hal lain. *Kedua, wawancara*. Wawancara sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk menggali informasi dan mengetahui tanggapan dari pihak yang diwawancarai. *Ketiga, studi media massa*. Studi media masa ini dilakukan oleh peneliti agar memperkuat kronologi mengenai pembangunan bandara yang telah dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini merupakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk meneliti hal-hal yang bersifat alami. Selain itu, metode kualitatif ini bertujuan guna mengetahui suatu pola yang terjalin dalam hubungan interaktif, penggambaran suatu keadaan yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks.

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis sendiri merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk memahami lebih mendalam serta menyeluruh yang berorientasi pada pemecahan suatu

masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya *pertama yaitu observasi*, yang dilaksanakan agar peneliti dapat membuka wawasan mengenai apa yang terjadi di lapangan, terbuka dan tidak mudah terpengaruh hal-hal lain. *Kedua, wawancara*. Wawancara sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk menggali informasi dan mengetahui tanggapan dari pihak yang diwawancarai. *Ketiga, studi media massa*. Studi media masa ini dilakukan oleh peneliti agar memperkuat kronologi mengenai pembangunan bandara yang telah dilaksanakan.

## Perubahan Kehidupan Masyarakat

Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport yang berlokasi di Kapanewon Temon menimbulkan dampak yang cukup besar diantaranya dampak penggunaan lahan, sosial dan ekonomi bagi warga terdampak pembangunan tersebut. Adanya pembangunan tersebut menjadikan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan adanya perubahan yang terjadi. Selain itu adanya pembangunan tersebut mengakibatkan masyarakat tergusur dan mau tidak mau harus pindah dan membangun rumah yang baru.<sup>10</sup>

Warga terdampak pembangunan bandara adalah mereka yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, nelayan dan pelaku wisata. Petani adalah mata pencaharian warga terdampak yang sejak dahulu kala sudah mereka jalani, karena lahan pertanian yang berada di Desa Glagah subur sehingga mampu menghasilkan produk yang memuaskan. Sehingga hasil pertanian tersebut dapat menhidupi keluarga dan dapat mencukupi kebutuhan pangan warga Kulon Progo bahkan

<sup>10</sup> Yasmin Fida Az-Zahra, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport Terhadap Kehidupan Masyarakat

Di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

bisa juga dijual hingga keluar Pulau Jawa.<sup>11</sup> Selain itu, sebelum adanya pembangunan bandara ini, Desa Glagah merupakan sentra produksi cabai.

Semenjak pembangunan bandara, kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan, salah satunya yaitu dalam bidang perekonomian. Pada awalnya warga berrmatapencarian sebagai petani setelah pembangunan bandara mau tidak mau lahan yang mereka miliki menjadi bandara. Sehingga menjadikan petani kehilangan lahannya dan mengakibatkan mereka beralih profesi.

#### **Perubahan Kehidupan Masyarakat**

Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport yang berlokasi di Kapanewon Temon menimbulkan dampak yang cukup besar diantaranya dampak penggunaan lahan, sosial dan ekonomi bagi warga terdampak pembangunan tersebut. Adanya pembangunan tersebut menjadikan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan adanya perubahan yang terjadi. Selain itu adanya pembangunan tersebut mengakibatkan masyarakat tergusur dan mau tidak mau harus pindah dan membangun rumah yang baru.<sup>12</sup>

Warga terdampak pembangunan bandara adalah mereka yang mayoritas berrmatapencarian sebagai petani, nelayan dan pelaku wisata. Petani adalah mata pencarian warga terdampak yang sejak dahulu kala sudah mereka jalani, karena lahan pertanian yang berada di Desa Glagah subur sehingga mampu menghasilkan produk yang memuaskan. Sehingga hasil pertanian tersebut dapat menhidupi keluarga dan dapat mencukupi kebutuhan pangan warga Kulon Progo bahkan

bisa juga dijual hingga keluar Pulau Jawa.<sup>13</sup> Selain itu, sebelum adanya pembangunan bandara ini, Desa Glagah merupakan sentra produksi cabai.

Semenjak pembangunan bandara, kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan, salah satunya yaitu dalam bidang perekonomian. Pada awalnya warga berrmatapencarian sebagai petani setelah pembangunan bandara mau tidak mau lahan yang mereka miliki menjadi bandara. Sehingga menjadikan petani kehilangan lahannya dan mengakibatkan mereka beralih profesi.

#### **A. Meningkatnya Perekonimian**

Pada awalnya kehadiran pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport menuai pro dan kontra dari masyarakat yang mengakibatkan konflik. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya konflik diantaranya adalah adanya perubahan sosial di masyarakat, perbedaan pola pikir dan pilihan, hilangnya lahan dan mata pencarian penduduk, rasa kekhawatiran akan kehidupan di masa yang akan datang serta harga tanah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Akan tetapi seiringnya berjalannya waktu dan adanya rekonsiliasi konflik yang dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, proses negoisasi, mediasi antara pemerintah, masyarakat dan PT. Angkasa Pura, jalur kekeluargaan maka konflik tersebut dapat mereda dan masyarakat mulai menerima adanya perubahan yang terjadi.

Selain berdampak pada perubahan yang terjadi di masyarakat, kehadiran bandara baru

<sup>11</sup> Furqon Ulya Himawan, "Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Dituduh Ganggu Lingkungan," *Bbc News*2018. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 14.39 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-44020249>

<sup>12</sup> Yasmin Fida Az-Zahra, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah

Istimewa Yogyakarta" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

<sup>13</sup> Furqon Ulya Himawan, "Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Dituduh Ganggu Lingkungan," *Bbc News*2018. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 14.39 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-44020249>

<sup>14</sup> Virgo. Hlm. 77.

ini mampu memberikan dampak pada perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2018, Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan perekonomian sebesar 10,84% dan pada tahun 2019, Kabupaten Kulon Progo juga mengalami peningkatan perekonomian sebesar 11,5%.<sup>15</sup> Selain itu, dengan adanya pembangunan bandara ini banyak warga yang beralih profesi yang pada awalnya bekerja sebagai petani, karena lahannya sudah tergusur maka beralih menjadi pedagang kecil, UMKM bahkan menjadi pebisnis yang mampu membuka lowongan pekerjaan.

Profesi baru yang dimiliki oleh masyarakat tersebut menjadikan masyarakat mau tidak mau harus memiliki kreativitas yang dapat dikembangkan. Dikarenakan melalui kreativitas itulah menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Apabila masyarakat tidak memiliki kreativitas yang mampu membedakan dengan yang lain, maka tidak ada hal yang menarik dan seakan tidak ada yang istimewa daripada lainnya.

Selain membuka usaha, juga ada masyarakat sekitar Bandara Yogyakarta International Airport yang mengembangkan obyek wisata. Obyek wisata terdekat dengan Bandara Yogyakarta International Airport adalah Pantai Congot dan Pantai Glagah. Pada saat masyarakat berkunjung ke bandara tersebut, masyarakat juga dapat langsung berkunjung ke kedua pantai tersebut. Sehingga dengan adanya bandara, menjadikan rasa ingin tahu masyarakat mengenai pantai tersebut semakin tinggi. Oleh karena itu, adanya rasa penasaran menjadikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan obyek wisata berupa fasilitas, kebersihan bahkan ciri khas dari pantai tersebut.

<sup>15</sup> Erik Purnama Putra, "Pada 2019, Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo 11,5 Persen," *Republika.co.id*2020. Diakses pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 22.54 WIB.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan artikel ini dapat disimpulkan bahwa dari adanya proses pembangunan bandara memberikan dampak positif ataupun dampak negatif untuk kehidupan masyarakat. Saat awal mula pembangunan, terjadilah dampak negatif yaitu konflik yang terjadi di masyarakat yaitu masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah, perbedaan pola pikir, serta menimbulkan keributan saat terjadinya pro dan kontra pembangunan bandara. Akan tetapi seiring berjalannya waktu konflik tersebut dapat berangsur membaik dikarenakan adanya rekonsiliasi konflik atau penyelesaian konflik melalui negosiasi, mediasi dan kekeluargaan.

Selain itu, pembangunan bandar aini mampu mengubah kehidupan masyarakat yang pada awalnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, serta kreativitas hanya dalam ruang lingkup pertanian. Akan tetapi, semenjak kehadiran pembangunan bandar aini, masyarakat dituntut untuk melakukan perubahan. Salah satu perubahan yaitu dalam hal mata pencaharian. Mau tidak mau masyarakat dituntut untuk memiliki kreativitas guna meningkatkan perekonomiannya.

Perekonomian masyarakat perlahan mengalami peningkatan melalui kreativitas, usaha yang dijalani contohnya yaitu banyaknya usaha-usaha baru yang dibangun oleh masyarakat, UMKM yang mulai bermunculan serta pengelolaan tempat wisata sekitar bandara yang semakin menarik. Karena ketika kreativitas yang dimiliki masyarakat berkembang maka mampu menarik masyarakat lain untuk berkunjung sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta daerahnya dapat dikenal secara mudah oleh publik.

<https://republika.co.id/berita/q7tr53484/pada-2019-pertumbuhan-ekonomi-kulon-progo-115-persen>

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Az-Zahra, Yasmin Fida. "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- [2] Himawan, Furqon Ulya. "Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Dituduh Ganggu Lingkungan." *Bbc News*2018.
- [3] Indonesia, Kementrian Keuangan Republik. "Menkeu Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur." *Website Kementrian Keuangan Republik Indonesia*2021.
- [4] Kuntadi. "Warga Temon Mulai Keluhkan Dampak Pembangunan Bandara Baru Yogya." *Inesyoga.id*2018.
- [5] Mardika, Reni. "Warga Terdampak Bandara Yogyakarta Keluhkan Kehilangan Mata Pencaharian." *Kompas TV*2021.
- [6] Progo, BPS Kabupaten Kulon. "Kapanewon Temon Dalam Angka Temon Subdistrict in Figures 2020." edited by BPS Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2020.
- [7] Progo, BPS Kabupaten Kulon. "Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka Kulon Progo Regency in Figures 2021." edited by BPS Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2021.
- [8] Putra, Erik Purnama. "Pada 2019, Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo 11,5 Persen." *Republika.co.id*2020.
- [9] Virgo, Bintang. "Rekonsiliasi Konflik Pada Masyarakat Terdampak Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport." UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- [10] Windia, Wayan, Ketut Suamba, Wayan Sudarta and Made Adikampana. "Analisis Dampak Budaya Pembangunan Bandara Internasional Terhadap Masyarakat Sekitarntya." *Jurnal Dwijen Agro* Vol. 02 No. 02.

PENGARUH PEMBERIAN PUPUK BOKASHI SLUDGE BIOGAS PADA LEVEL BERBEDA ( 0; 7,5; 15 DAN 22,5 TON/HA) TERHADAP PERTUMBUHAN KEMBALI RUMPUT ODOT (*Pennisetum purpureum cv. Mott*)

Oleh

Yizrael Kamara Praing<sup>1)</sup>, I Made Adi Sudarma<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Peternakan, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

E-mail: <sup>2</sup>[made@unkriswina.ac.id](mailto:made@unkriswina.ac.id)

**Abstract**

This study aims to determine the effect of giving bokashi sludge biogas fertilizer at different levels 0; 7.5; 15; and 22.5 tons/ha on the regrowth of Odot grass. The research method used in this study was Completely Randomized Design (CRD) which consisted of 4 treatments and each treatment had 4 replications, where in each replication the Odot grass consisted of 9 cuttings/saplings for a total of 144 experimental units. The treatments used were P0: Odot grass without using fertilizer, P1: Odot grass using bokashi sludge biogas fertilizer at a level of 7.5 tons/ha, P2: Odot grass using bokashi sludge biogas fertilizer at a level of 15 tons/ha, P3 : Odot grass using bokashi sludge biogas fertilizer at the level of 22.5ton/ha. The results showed that the application of bokashi sludge biogas fertilizer at different levels did not have a significant effect on plant height and leaf length. The application of bokashi sludge biogas fertilizer at a level of 22.5 tons/ha had a significant effect on the production of fresh weight of the regrowth of Odot grass. It was concluded that the used of Bokashi fertilizer up to 22.5 tons/ha was able to give the best results.

**Keywords: Odot Grass, Biogas Sludge, Bokashi Fertilizer**

**PENDAHULUAN**

Pakan ternak merupakan salah satu faktor penunjang dan penentu sukses dan tidak suksesnya usaha tersebut, baik itu ternak ruminansia maupun ternak non ruminansia. Salah satu pakan ternak yang umumnya diberikan pada ternak yaitu pakan yang berupa hijauan. Hijauan Makan Ternak (HMT) saat ini semakin terbatas. Oleh karena itu, persiapan akan pakan hijauan harus diperhatikan baik dalam segi kualitas, kuantitas maupun di masa yang akan terjadinya kekurangan akan hijauan (musim kemarau). Pada umumnya sumber pakan hijauan yang utama adalah rerumputan dan leguminosa. Dalam hal ini salah satu jenis rumput yang sering dijadikan pakan ternak ruminansia adalah rumput Odot.

Rumput Odot (*Pennisetum purpureum Cv. Mott*) merupakan salah satu rumput dengan tingkat kesukaan ternak yang cukup tinggi dan mengandung nutrisi yang baik bagi ternak [1]. Rumput Odot memiliki tekstur batang yang

lunak, ruas dan helai daun yang banyak dan juga karakteristik daunnya yang mudah dimakan oleh hewan ternak. Tanaman rumput Odot bisa tumbuh setinggi lebih dari satu meter dan rumput ini dapat bertumbuh dengan baik di berbagai iklim dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan, baik itu lingkungan yang terdapat naungan maupun yang tidak. Menurut [2] bahwa keadaan lingkungan, tanah dan iklim akan sangat mempengaruhi pertumbuhan hijauan pakan. Oleh karena itu pemupukan sangatlah penting dalam mendukung upaya pengoptimalan pembudidayaan rumput Odot.

Untuk menunjang pertumbuhan rumput Odot, sangat penting untuk memberikan pupuk tambahan pada lahan yang akan digunakan untuk budidaya rumput Odot. Pemahaman tentang kebutuhan tanaman terhadap pupuk yang akan digunakan merupakan salah satu kunci keberhasilan budidaya. Menurut [3] menyatakan bahwa cara pemberian dosis dan pemilihan jenis pupuk yang tepat akan

memberikan hasil yang maksimal terhadap pembudidayaan rumput Odot. Berbagai jenis pupuk yang pada umumnya diberikan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini salah satu jenis pupuk yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk bokashi sludge biogas.

Sludge biogas atau ampas biogas yang merupakan sisa produksi dari hasil pembuatan biogas yang berasal dari feses ternak. Bokashi merupakan hasil peruraian sisa tumbuhan atau kotoran hewan. Menurut [4] pemberian pupuk organik dan pupuk kimia dimungkinkan untuk diberikan secara bersama untuk saling melengkapi kebutuhan tanaman. Dalam hal ini Pemakaian pupuk bokashi sludge biogas akan membantu dalam kesuburan tanah dan perkembangbiakan organisme dalam tanah serta mampu memperbaiki struktur tanah.

## METODE PENELITIAN

Dalam kegiatan ini, yang diamati adalah pengaruh pemberian pupuk bokashi sludge biogas dengan level 0; 7,5; 15; dan 22,5 ton/ha terhadap pertumbuhan kembali rumput Odot (*Pennisetum purpureum cv. Mott*). Penelitian ini dilakukan selama delapan Minggu berawal dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2021, yang bertempat di Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan empat ulangan, dimana dalam setiap ulangan rumput Odot terdiri dari 9 stek/anakan sehingga total terdapat 144 unit percobaan. Adapun rancangan percobaan sebagai berikut:

P0: Rumput Odot tanpa menggunakan pupuk  
 P1: Rumput Odot dengan menggunakan pupuk bokashi sludge biogas pada level 7,5 ton/ha  
 P2: Rumput Odot dengan menggunakan pupuk bokashi sludge biogas pada level 15 ton/ha  
 P3: Rumput Odot dengan menggunakan pupuk bokashi sludge biogas pada level 22,5ton/ha.

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah plat drom, terpal, parang, sabit, gunting, tali rafia, rol meter/meteran, timbangan, kamera, rumput Odot, EM4, gula air, sekam padi, dedak dan sludge biogas. Adapun beberapa parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, panjang daun dan produksi bahan segar yang dilakukan dengan pengukuran setiap 7 hari sekali. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Perbedaan yang nyata akibat perlakuan selanjutnya dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan menggunakan program SPSS IBM 21 for windows.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinggi tanaman

Pertumbuhan kembali tinggi tanaman rumput odot yang menggunakan pupuk bokashi sludge biogas dengan jangka waktu potong 60 hari setelah tanam pada masing – masing level yakni P0 (109,50), P1 (109,58), P2 (113,83), P3 (114,00). Dari hasil tersebut tinggi tanaman ini jauh lebih tinggi dari hasil penelitian [5] yakni 63, 26 – 75, 36 cm, yang menggunakan pupuk organik cair (POC) yang berasal dari urin ternak dengan campuran mikro organisme lokal (MOL). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pupuk yang digunakan dan juga jangka waktu pemotongannya lebih singkat yaitu 30 hari setelah tanam (HST).

**Tabel 1.** Rata-rata tinggi tanaman rumput Odot pada pertumbuhan kedua.

Perlakuan	Rata-Rata Tinggi Tanaman (cm)
P0 (0 ton/ha)	109,50 ± 5,45
P1 (7,5 ton/ha)	109,58 ± 7,81
P2 (15 ton/ha)	113,83 ± 2,62
P3 (22,5 ton/ha)	114,00 ± 5,53
<b>Rata- rata</b>	<b>111,73 ± 5,35</b>

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tinggi tanaman yang menggunakan pupuk bokashi sludge biogas dan yang tidak menggunakan pupuk menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata. Perlakuan P0

memiliki tinggi tanaman 109,50 cm merupakan tinggi tanaman terendah dan perlakuan P3 yang memiliki tinggi tanaman 114,00 cm merupakan tinggi tanaman tertinggi. Hasil penelitian ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian yang menggunakan pupuk bokashi kotoran ayam yang dilakukan oleh [6] mencapai 70,06 cm - 77,38 cm pada umur 8 mst. Selain dari pemberian pupuk yang berbeda struktur tanah yang di gunakan juga berbeda dimana tanah yang di gunakan oleh [6] adalah tanah berpasir.

**Gambar 1.** Grafik Tinggi Tanaman Rumput Odot



Berdasarkan grafik diatas dapat di simpulkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman yang menggunakan pupuk bokashi sludge biogas setiap minggunya meningkat dimana rata- rata pertumbuhan pada masing- masing level mencapai 100 cm lebih setelah umur pematangan 60 hari. Hal ini menunjukkan bahwa bidang tanah yang diberikan pupuk sebelum penanaman bibit rumput, dapat memberikan respon yang sangat baik akan pertumbuhan tinggi tanaman.

**Panjang daun**

Rataan panjang daun pada tabel 2 dibawah menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan panjang daun yang menggunakan pupuk sludge biogas dan yang tidak menggunakan pupuk menunjukkan tidak berbeda nyata. Hal tersebut dapat di simpulkan bahwa pemberian dosis bokashi sludge biogas pada level yang berbeda memberikan efek yang sama terhadap pertumbuhan kembali panjang daun rumput Odot. Akan tetapi dapat diketahui pada perlakuan P1 (7,5 ton/ha) merupakan salah satu level yang paling

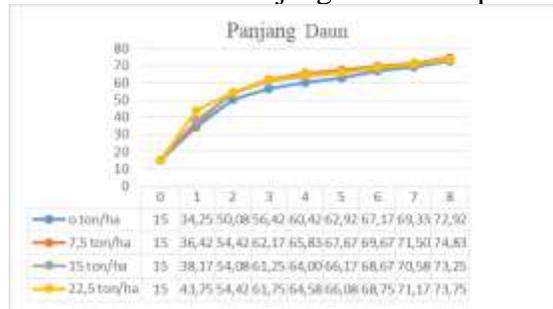
tertinggi dari perlakuan lainnya yakni 74,83 cm. Jika dilihat dari hasil penelitian [7] yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan produksi hijauan rumput Odot yang diberikan jenis pupuk berbeda. Menurut [7] bahwa hal ini terjadi karena jumlah nitrogen dalam penelitian disetarakan untuk penggunaan jenis pupuk yang berbeda pada tanaman rumput Odot. Hal tersebut selaras dengan pernyataan [8] jika pemberian pupuk anorganik secara terus menerus akan dapat membahayakan tanaman maupun sifat tanah.

**Tabel 2.** Rata-rata panjang daun rumput Odot pada pertumbuhan kedua.

Perlakuan	Panjang Daun (cm)
P0 0 ton/ha	72,92 ± 2,23
P1 7,5 ton/ha	74,83 ± 3,97
P2 15 ton/ha	73,25 ± 3,44
P3 22,5 ton/ha	73,75 ± 3,19
<b>Rata – rata</b>	<b>73,69 ± 3,21</b>

Pertumbuhan panjang daun rumput Odot yang menggunakan pupuk bokashi sludge biogas pada pertumbuhan kembali rumput Odot pada gambar 2 dibawah menunjukkan bahwa pada minggu ke- 2 hingga paska panen pada level 22,5ton/ha, telah memperlihatkan bahwa tingkat pertumbuhan yang paling tertinggi mencapai 73,75 cm. Penggunaan pupuk bokashi sludge biogas terhadap panjang daun tanaman Odot pada penelitian ini terlihat lebih panjang jika dibandingkan dengan penelitian yang di lakukan oleh [9] yang menggunakan pupuk jenis amelioran dan dosis pupuk serbaguna (agrodyke) mencapai 58,15 - 59,52 cm dengan pengukuran yang di lakukan yakni 6 MST.

**Gambar 2.** Grafik Panjang Daun Rumput Odot



Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang daun yang menggunakan pupuk bokashi sludge biogas pada level yang berbeda tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan ( $P > 0,05$ ) terhadap panjang daun pada semua perlakuan. Hal tersebut di pengaruhi oleh unsur hara yang ada pada bidang tanah tidak memberikan respon yang baik dalam proses pertumbuhan panjang daun baik yang menggunakan pupuk maupun tidak. Selaras dengan pernyataan [10] kandungan unsur N, P, K dalam tanah kurang mencukupi kebutuhan tanaman untuk bertumbuh dan berkembang biak. Rataan panjang daun yang menggunakan pupuk bokashi sludge biogas lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan oleh [11] yakni 61,4 cm pada umur potong 42 hari yang menggunakan pupuk organik hasil fermentasi EM4. Selain itu, kemungkinan hal ini juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan dimana [11] membudidayakan rumput di lahan rumah kaca. Menurut [12] lingkungan dan perlakuan manusia akan sangat mempengaruhi produksi hijauan.

### Bahan segar

Berat segar merupakan salah satu parameter dalam penelitian yang dilakukan pada saat akhir pemanenan. Rata-rata hasil penimbangan berat segar rumput Odot yang menggunakan pupuk bokashi sludge biogas pada masing-masing level terdapat perbedaan dengan perlakuan yang tidak menggunakan pupuk dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Rata – rata produksi bahan segar rumput Odot pada pertumbuhan kedua

Perlakuan	Berat segar (gram/rumpun)
P0 (0 ton/ha)	1042,50 ± 528,22 <sup>a</sup>
P1 (7,5 ton/ha)	2413,75 ± 951,71 <sup>b</sup>
P2 (15 ton/ha)	2863,00 ± 975,78 <sup>b</sup>
P3 (22,5 ton/ha)	3767,50 ± 1393,07 <sup>c</sup>
<b>Rata – rata</b>	<b>2521,69 ± 962,20</b>

*Keterangan: superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata antar perlakuan ( $P < 0,05$ )*

Produksi bobot segar rumput Odot dari beberapa level pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa P3 terlihat lebih tinggi dari semua perlakuan dan memiliki bobot segar berkisar hingga 3.767,50 gram/rumpun (setara 10,46 kg/m<sup>2</sup>). Ini menunjukkan bahwa unsur hara yang terkandung dalam tanah memberikan respon yang baik terhadap penambahan bobot segar pada setiap perlakuan yang menggunakan pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya level pupuk yang diterima oleh tanaman dapat mempengaruhi berat dari produksi tanaman rumput Odot pada pertumbuhan ke dua.

Produksi berat segar pada penelitian ini jauh lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan oleh [10] yang menggunakan pupuk POC berbahan keong mas setiap 5 hari sekali yakni 57,71 ton/ha atau 57.710 kg/ha (setara . Selain dari perbedaan pupuk yang digunakan hal ini juga di sebabkan oleh perbedaan jenis tanah yang digunakan dimana [10] membudidayakan rumput Odot di tanah vertisol sedangkan penelitian ini dilaksanakan di tanah entisol.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk bokashi sludge biogas pada level yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi bobot segar rumput odot.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Sirait, 2017, “Rumput Gajah Mini (*Pennisetum purpureum* cv. *Mott*) sebagai Hijauan Pakan untuk Ruminansia,” *Wartazoa*, vol. 27, no. 4, pp. 167–176.
- [2] Sumarsono, S. Anwar, Dan S. Budiyanto, 2005, “Peranan Pupuk Organik Ternak Pada Tanah Salin Untuk Pengembangan Tanaman Pakan Rumput Poliploid.” pp. 1–31.
- [3] M. E. Kusuma, 2014, “Respon Rumput Gajah (*Pennisetum purpureum*) Terhadap Pemberian Pupuk Majemuk

- Respons of Elephant Grass (*Pennisetum purpureum*) with The Application of Compound Fertilizer,” *J. Ilmu Hewani Trop.*, vol. 3, no. 1, pp. 6–11.
- [4] E. Hendarto, A. F. Qohar, N. Hidayat, Nur Hidayat, Bahrin Dan Harwanto, 2020, “Produksi Dan Daya Tampung Rumput Odot (*Pennisetum purpureum cv. Mott*) Pada Berbagai Komposisi Pupuk Kandang Dan NPK,” *Pros. Semin. Teknol. dan Agribisnis Peternak. VII–Webinar Prospek Peternak. di Era Norm. Baru Pasca Pandemi COVID-19*, vol. 7, no. 7, pp. 751–758.
- [5] F. Akhsan, Sukriandi, A. F. K. Amris, Dan M. Irmansyah, 2020, “Pengaruh Pupuk Organik Cair dengan Konsentrasi Urin Dan MOL Berbeda terhadap Produksi Rumput Gajah Mini (*Pennisetum purpureum cv. Mott*),” *J. Sains dan Teknol. Peternak.*, vol. 2, no. 1, pp. 13–18.
- [6] M. E. Kusuma, 2019, “Respon Rumput Odot (*Pennisetum purpureum Cv. Mott*) Terhadap Pemberian Bokashi Kotoran Ayam pada Tanah Berpasir,” *J. Ilmu Hewani Trop.*, vol. 8, no. 2, pp. 71–76.
- [7] D. P. Rukaman Dewi, 2017, “Produktivitas Rumput (*Pennisetum purpureum cv. mott*) Defoliasi 1 Pertama Dengan Jenis Pupuk Yang Berbeda,” *AVES J. Ilmu Peternak.*, vol. 11 (2), no. 2, pp. 1–10.
- [8] W. A. Sulaiman, Dwatmadji, Dan T. Suteky, 2018, “Pengaruh Pemberian Pupuk Feses Sapi dengan Dosis yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Rumput Odot (*Pennisetum purpureum Cv. Mott*) di Kabupaten Kepahiang The,” *JSPI*, vol. 13, no. 4, pp. 365–376.
- [9] Y. M. Yusrizal Dan I. Refkikan, 2020, “Pengaruh Jenis Amelioran Dan Dosis Pupuk Serbaguna (Agrodyke) Pada Pertumbuhan Rumput Gajah Odot (*Pennisetum Purpureum CV. Mott*) Dilahan Gambut,” *J. Agrotek Lestari*, vol. 6, no. 1, pp. 8–15.
- [10] S. M. Sada, Bernadete Barek Koten, Bernadus Ndoen, Agustinis Paga, Paskalis Toe, Redemta Wea, Dan Ariyanto, 2018, “Pengaruh Interval Waktu Pemberian Pupuk Organik Cair Berbahan Baku Keong Mas Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Hijauan (*Pennisetum purpureum cv. Mott*),” *J. Ilm. Inov.*, vol. 18, no. 1, pp. 42–47.
- [11] R. D. Lasamadi, S. S. Malalantang, R., Dan S. D. Anis, 2013, “Pertumbuhan Dan Perkembangan Rumput Gajah Dwarf (*Pennisetum purpureum cv. Mott*) Yang Diberi Pupuk Organik Hasil Fermentasi EM4,” *ZOOTEC*, vol. 32, no. 5.
- [12] M. P. K. Amah, I. M. A. Sudarma, Dan M. Hambakodu, 2021, “Pengaruh Pemberian Pupuk Bokashi Feses Ayam Dengan Level Yang Berbeda Terhadap Produktivitas Rumput Odot (*Pennisetum purpureum cv. Mott*),” *pastura*, vol. 11, no. 1, pp. 45–75.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PERTUMBUHAN KEMBALI RUMPUT ODOT YANG DI BERIKAN PUPUK BOKASI  
SLUDGE BIOGAS DENGAN LEVEL 0, 10 DAN 20 TON/HEKTAR DI KABUPATEN  
SUMBA TIMUR

Oleh

Ningsihyani Kuku Yowa<sup>1</sup>, I Made Adi Sudarma<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Peternakan, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

E-mail: <sup>2</sup>[made@unkriswina.ac.id](mailto:made@unkriswina.ac.id)

**Abstract**

This study aims to see the effect of applying biogas sludge with levels of 0, 10 and 20 tons/ha on the growth of Odot grass. This research was conducted in Kawangu Village, Pandawai District, East Sumba Regency. This research uses tools and materials in the form of biogas sludge, soil bed measuring 160 x 160 cm, EM4, sugar, husks, bran, water, machetes, crowbars, sickles, tarpaulins, measuring tapes, scales, shovels, sacks, buckets, stationery, thermometer and drum plate. This research used Completely Randomized Design (CRD) with 3 designs and 4 replications where each replication (bed) consisted of 9 tillers/cuttings of Odot grass so that there were a total of 108 clumps of Odot grass plants. The treatment used P0 (control/without fertilizer), P1 (biogas fertilizer at a dose of 10 tons/ha) and P2 (biogas fertilizer at a dose of 20 tons/ha). Data analysis used ANOVA with 95% confidence level. Measurement of the level of significance between treatments was carried out by Duncan's multiple distance test using the SPSS 18.0 for windows. The results showed that there was a significant effect ( $P < 0.05$ ) on the variable weight production and leaf length of Odot grass but there was no significant difference in the variables of height of Odot grass. It was concluded that the use of bokashi sludge biogas fertilizer on Odot grass at a level of 20 tons/ha was able to give the best results.

**Keywords:** dot grass, growth, defoliation, animal feed

**PENDAHULUAN**

Menurut [1] menyatakan bahwa hijauan ialah bahan pakan yang berkualitas yang dapat menunjang keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas pengembangan ternak ruminansia. Untuk meningkatkan produksi tanaman hijauan pakan ternak dibutuhkan pemberian pupuk organik yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Salah satu jenis pupuk organik yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki kerusakan dalam tanah adalah sludge biogas [2].

Salah satu jenis pakan unggul adalah tanaman rumput Gajah mini atau yang biasa dikenal dengan nama rumput Odot (*Pennisetum purpureum* cv. *Mott*). Untuk meningkatkan produksi tanaman pakan dibutuhkan pemberian pupuk. Unsur hara yang dibutuhkan oleh rumput Odot dapat diperoleh dari olahan

limbah peternakan seperti pupuk organik. Pupuk organik dapat digunakan sebagai salah satu unsur hara untuk mendukung pertumbuhan dan produksi rumput [3]. Menurut [4] menyatakan bahwa pupuk sludge dari kotoran ternak (sapi) juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos untuk meningkatkan produksi tanaman.

Hasil penelitian pada tanaman rumput Odot sudah cukup banyak dikemukakan. Menurut [5] memperlihatkan bahwa pemberian pupuk kandang feses sapi pada tanaman rumput Odot mampu meningkat secara signifikan pada variabel jumlah anakan, produksi berat segar dan produksi berat kering rumput Odot. Selain itu, hasil penelitian [6] menunjukkan bahwa pemberian pupuk dasar SP, pupuk organik, pupuk urea dan pupuk NPK memberikan hasil yang baik bagi pertumbuhan tanaman rumput

Odot. Namun, penggunaan pupuk bokashi sludge biogas (padat) hingga saat ini belum banyak diteliti terutama pada tanaman pakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur selama 3 bulan dari bulan Agustus – Oktober pada tahun 2021. Bahan yang digunakan berupa bibit rumput Odot, bedengan tanah, sludge biogas, EM4, dedak padi, sekam padi, gula dan air. Peralatan yang digunakan untuk produksi rumput Odot yaitu plat drum, parang, sabit, linggis, timbangan, pita ukur, sekop, karung, terpal, ember, ATK, tabel pengamatan, kamera dan thermometer ruangan.

Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 3 perlakuan dan 4 ulangan dimana setiap ulangan terdiri dari 9 rumpun rumput Odot sehingga total terdapat 118 unit percobaan. Adapun rancangan percobaan adalah sebagai berikut: P0: Rumput Odot yang ditanam tanpa pupuk sludge biogas; P1: Rumput Odot yang diberikan pupuk sludge biogas 10 ton/ha; dan P2: Rumput Odot yang diberikan pupuk sludge biogas 20 ton/ha.

Penelitian ini di lakukan setelah pemotongan pertama selesai baru di lanjutkan dengan proses penyiraman setelah rumput odot berumur 1 minggu maka akan dilakukan pengukuran pertama kali. Pengukuran data dilakukan setiap minggu sampai umur panen untuk defoliiasi kedua yaitu pada umur 8 minggu. Data yang diambil dianalisis menggunakan analisis of varians dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk mengukur tingkat signifikansi antar perlakuan dilakukan uji jarak berganda Duncan menggunakan program SPSS 18.0 for windows.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinggi tanaman

Hasil penelitian dari pemberian pupuk Rata-rata tinggi tanaman defolasi kedua menunjukkan bahwa dengan perlakuan dosis

pupuk bokashi sludge biogas dengan level yang berbeda tidak terdapat pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman rumput odot dari (P0) 109,50 cm, (P1) 112,66 cm dan (P2) 113,00 cm. Hasil penelitian rata-rata tinggi tanaman pada pemotongan kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Rata-rata produksi tinggi tanaman rumput Odot pada pertumbuhan kedua.**

Perlakuan	Rata-rata tinggi tanaman
0 ton/hektar	109,50
10 ton/hektar	112,66
20 ton/hektar	113,00

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan pupuk bokashi sludge biogas tidak berpengaruh nyata ( $P>0,05$ ) pada tinggi tanaman rumput Odot. Di ketahui rata-rata tinggi tanaman rumput Odot pada setiap perlakuan memiliki rata-rata yang berbeda, dimana perlakuan P0/kontrol memiliki rata-rata yang paling rendah namun secara statistic tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P2 yang mendapatkan perlakuan pemberian pupuk. Pada defoliasi kedua ini, pertumbuhan rumput Odot belum begitu signifikan menunjukkan perbedaannya pada variabel tinggi tanaman. Hal ini sedikit berbeda dengan pernyataan [7] yang menyatakan bahwa semakin banyak pupuk bokashi sludge biogas yang di berikan akan semakin tinggi tanaman rumput odot.

Rata-rata tinggi tanaman pada pemotongan kedua rumput Odot dari tabel di atas tidak jauh berbeda dari hasil penelitian yang dilaporkan oleh [8] dimana rata-rata tinggi tanaman rumput Odot yang diberikan pupuk bokashi kotoran ayam dengan dosis 30 ton/ hektar adalah sebesar 117,2 cm dibandingkan tanpa penggunaan pupuk yaitu 108,2 cm. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan pupuk bokashi sludge biogas memberikan hasil yang baik pada pertumbuhan tanaman rumput Odot karena tidak lebih rendah dibandingkan hasil penelitian dengan penggunaan pupuk bokashi jenis lainnya.

**Gambar 1.** Grafik tinggi tanaman

Dari grafik tinggi tanaman rumput Odot yang diberikan pupuk bokashi sludge biogas dari minggu pertama setelah tanam sampai minggu kedelapan pada setiap perlakuan dengan penggunaan pupuk bokashi sludge biogas mengalami peningkatan setiap minggunya. Pada grafik ini terlihat bahwa unsur hara yang terdapat pada perlakuan P0 masih cukup tersedia sesuai kebutuhan dari tanaman rumput Odot sehingga tinggi tanaman rumput Odot tidak jauh berbeda dengan yang diberikan pupuk bokashi.

### Panjang daun

Daun merupakan bagian dari tanaman hijauan makanan ternak yang umumnya dikonsumsi oleh ternak. Rata – rata panjang daun tanaman rumput Odot yang diberikan pupuk sludge biogas yakni P0 (72,92 cm), P1 (75,09 cm) dan P2 (75,67 cm). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata panjang daun terpanjang terdapat pada perlakuan P2 diikuti P1 dan P0.

**Tabel.2 Rata-rata Panjang daun tanaman rumput odot pada pertumbuhan kedua**

Perlakuan	Rata-rata Panjang daun
0 ton/hektar	72,92 <sup>a</sup>
10 ton/hektar	75,09 <sup>b</sup>
20 ton/hektar	75,67 <sup>b</sup>

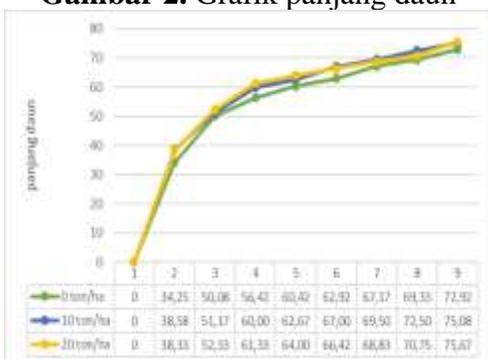
<sup>a-b</sup>Superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ( $P < 0,05$ ).

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan pupuk sludge biogas berpengaruh nyata ( $P < 0,05$ ) antara perlakuan P0 dengan P1 dan P2, sedangkan perlakuan P1 dan P2 tidak terdapat

pengaruh yang nyata ( $P > 0,05$ ). Hal ini dapat dilihat bahwa pada penggunaan pupuk bokashi sludge biogas dengan level 10 ton/hektar dan 20 ton/hektar terhadap pertumbuhan panjang daun belum memberikan pengaruh yang nyata. Hal ini diduga penggunaan pupuk bokashi sludge biogas dengan level 10 ton/hektar sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan unsur hara terhadap pertumbuhan Panjang daun rumput Odot. Penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian [5] yang memperlihatkan pemberian pupuk feses sapi dengan level 30 ton/ha memberikan hasil panjang daun rumput Odot umur 8 minggu hanya 51,25 cm dibandingkan tanpa pemberian pupuk yaitu 49,17 cm.

Rata-rata panjang daun hasil penelitian ini masih lebih rendah dari hasil penelitian yang dilaporkan [9] dimana pemberian pupuk bokashi dengan level 20 ton/ha mampu memberikan hasil Panjang daun sebesar 102 cm pada pertumbuhan pertama rumput Odot. Hasil penelitian ini cukup menarik mengingat pada penelitian [9] merupakan penelitian pada pertumbuhan pertama rumput Odot sedangkan pada penelitian ini merupakan pertumbuhan kedua setelah pemotongan (defoliasi kedua). Hal ini dimungkinkan karena pada pertumbuhan pertama, rumput Odot lebih fokus pada pertumbuhan Panjang daun dibandingkan pada pertumbuhan kedua yang mulai memunculkan tunas baru. Dengan adanya rangsangan pertumbuhan tunas baru ini, memungkinkan untuk tanaman rumput Odot menggunakan sumber nutrisi yang ada pada jumlah tunas yang lebih banyak sehingga Panjang daun sedikit berkurang. Namun, walaupun Panjang daun menurun pada pertumbuhan kedua, produksi berat segar tetap meningkat karena jumlah tunas yang semakin banyak.

Gambar 2. Grafik panjang daun



Berdasarkan grafik di atas diperlihatkan bahwa panjang daun rumput Odot dari umur 1 minggu setelah tanam sampai 8 minggu setelah tanam menunjukkan adanya pertambahan Panjang daun. Pertumbuhan tercepat terjadi dari minggu pertama hingga minggu ke empat dan secara perlahan bertambah dari minggu ke empat hingga minggu ke delapan.

**Produksi berat segar**

Rata-rata produksi berat segar pada penelitian ini yaitu P0: 1042,50 gram/ rumpun; P1: 2118,75 gram/ rumpun; dan P2: 2845,83 gram/ rumpun. Hasil penelitian rata-rata produksi bahan segar tertinggi dengan pemberian pupuk sludge biogas adalah pada level 20 ton/hektar. Menurut [10] menyatakan bahwa berat segar merupakan akumulasi dari keseluruhan variabel yang akan di hitung pada saat di panen.

Tabel.3 Rata-rata produksi berat segar tanaman rumput Odot

Perlakuan	Produksi berat segar
0 ton/hektar	1042,50 <sup>a</sup>
10 ton/hektar	2118,75 <sup>b</sup>
20 ton/hektar	2845,83 <sup>c</sup>

<sup>a-b-c</sup>Superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).

Berdasarkan hasil analisis dari tabel diatas diketahui bahwa perlakuan pupuk bokashi sludge biogas berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap produksi berat segar tanaman rumput odot. Perlakuan P2 merupakan perlakuan tertinggi yang mencapai 2845,8

gram/ rumpun dari hasil rata-rata setiap ulangan dimana terdiri dari empat ulangan. Hal ini dapat di ketahui bahwa penggunaan pupuk bokashi sludge biogas dengan dosis yang banyak dapat meningkatkan produksi berat segar tanaman rumput Odot. Pemberian pupuk yang mencukupi akan berdampak bagi pertumbuhan tanaman yang baik dalam meningkatkan pembelaan sel tanaman, sehingga berat segar tanaman tinggi.

Berat segar ialah berat tanaman yang menghasilkan pertumbuhan perkembangan suatu tanaman. Hasil penelitian ini lebih rendah dari hasil penelitian [11] dengan penggunaan pupuk urea dengan dosis 200 kg/ha menghasilkan produksi berat segar tertinggi hanya 6,12 kg/rumpun. Namun, produksi berat segar pada penelitian ini masih lebih tinggi di bandingkan dengan penelitian [12] dengan produksi rumput odot berkisar hanya 86,11-219,44 gram dengan potongan selama 30 hari. Hal ini terjadi karena perbedaan jenis pupuk yang diberikan. Hasil penelitian ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian [13] yang memperlihatkan produksi berat segar rumput Odot yang diberikan pupuk bokashi dengan level 20ton/ha hanya sebesar 995,75 gram/ rumpun pada pertumbuhan pertama. Hal ini tentu disebabkan pada pertumbuhan pertama, rumput Odot masih membutuhkan waktu untuk menumbuhkan akar dan penyesuaian pertumbuhan lainnya sedangkan pada pertumbuhan kedua rumput Odot sudah siap memanfaatkan semua nutrisi yang tersedia untuk pertumbuhan dan produksi secara optimal.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian pupuk bokashi sludge biogas dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi rumput Odot. Penggunaan pupuk bokashi sludge biogas hingga level 20 ton/hektar direkomendasikan karena memberikan hasil yang baik pada produksi

berat segar rumput Odot yaitu 2845,83 gram/rumpun.

#### Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh pemberian level pupuk bokashi terhadap kandungan nutrisi dari tanaman rumput Odot serta tingkat kesukaannya pada ternak ruminansia.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada DRPM Ditjen Dikti dalam pendanaan penelitian ini dalam skema PDP yang diperoleh dosen prodi Peternakan Unkriswina Sumba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Akhsan, Sukriandi, A. F. K. Amris, and M. Irmansyah, 2020 “Pengaruh Pupuk Organik Cair dengan Konsentrasi Urin dan MOL Berbeda terhadap Produksi Rumput Gajah Mini (*Pennisetum purpureum cv. Mott*),” *JSTP*, vol. 2, no. 1, pp. 13–18, doi: 10.31605/jstp.v2i1.815.
- [2] M. Hambakodu, 2021 “Produksi , komposisi botani dan kapasitas tampung padang penggembalaan alam Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur,” in *The 2nd Conference of Applied Animal Science* , pp. 112–117.
- [3] S. M. Sada, B.B. Koten, B. Ndoen, A. Paga, P. Toe, R. Wea dan Ariyanto, 2018 “Pengaruh Interval Waktu Pemberian Pupuk Organik Cair Berbahan Baku Keong Mas Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Hijauan *Pennisetum purpureum cv. Mott*,” *J. Ilm. Inov.*, vol. 18, no. 1, pp. 42–47, doi: 10.25047/jii.v18i1.846.
- [4] D. Yanti, Santosa, E. G. Ekaputra, Mislaini, O. C. Chatib, and F. Irsyad, , 2019. “Pemanfaatan Sludge Hasil Ikutan Biogas Dari Kotoran Sapi Untuk Pembuatan Kompos,” *J. Hilirisasi IPTEKS*, vol. 2, no. 2, pp. 106–112,
- [5] T. Sulaiman, W. A. Dwatmadji. Suteky, 2018 “Pengaruh Pemberian Pupuk Feses Sapi dengan Dosis yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Rumput Odot (*Pennisetum purpureum Cv. Mott*) di Kabupaten Kepahiang,” *JSPI*, vol. 13, no. 4, pp. 365–376, doi: <https://doi.org/10.31186/jspi.id.13.4.365-376>.
- [6] D. P. Rukaman Dewi, 2017 “Produksi Rumput (*Pennisetum purpureum cv. Mott*) Defoliasi I Pertama Dengan Jenis Pupuk Yang Berbeda,” *AVES J. Ilmu Peternak.*, vol. 11, no. 2, p. 7, doi: 10.35457/aves.v11i2.280.
- [7] Y. M. Yusrizal and I. Refkikan, 2020, “Pengaruh Jenis Amelioaran Dan Dosis Pupuk Serbaguna (AGRODYKE) pada Pertumbuhan Rumput Gajah Odot (*Pennisetum Purpureum CV. Mott*) Dilahan Gambut.,” *J. Agrotek Lestari*, vol. 6, no. 1, pp. 8–15,.
- [8] R. D. Lasamadi, S. S. Malalantang, . R. ., and S. D. Anis, 2013 “Pertumbuhan Dan Perkembangan Rumput Gajah Dwart (*Pennisetum purpureum cv. Mott*) Yang Diberi Pupuk Organik Hasil Fermentasi EM4,” *ZOOTEC*, vol. 32, no. 5, doi: 10.35792/zot.32.5.2013.984.
- [9] A.Y.B. Sawula, I.M.A. Sudarma, dan D.U. Pati, 2021 “Pengaruh Pemberian Pupuk Sludge Biogas Dengan Level 0, 20 dan 40 ton/hektar Terhadap Pertumbuhan Rumput Odot di Kabupaten Sumba Timur,” *Prosiding Seminar Nasional HPPM*, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang, 23 November 2021, halaman 152-165.
- [10] S. D. Anis and C. L. Kaunang, 2017 “Pengaruh Tinggi Dan Jarak Waktu Pemotongan Rumput Gajah Dwart (*pennisetum purpureum cv. Mott*) Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Dan Produksi Bahan Kering,” vol. 37, no. 1, pp. 116–122,
- [11] J. Daryatmo, W. W. Mubarokah, dan Budiyanto, 2019, “Pengaruh Pupuk Urea Terhadap Produksi dan Pertumbuhan Rumput Odot (*Pennisetum purpureum*

- cv. mott*),” *JIPVT*, vol. 9, no. 2, p. 62-66.
- [12] D. Kusdiana, I. Hadist, and E. Herawati, , 2017 “Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Tinggi Tanaman Dan Berat Segar Perrumpun Rumput Gajah Odot (*Pennisetum purpureum cv. mott*),” *JANHUS J. Ilmu Peternak. J. Anim. Husb. Sci.*, vol. 1, no. 2, p. 32, doi: 10.52434/janhus.v1i2.245.
- [13] K.L. Paraing, I.M.A. Sudarma, dan D.U. Pati, 2021 “Produktivitas Rumput Odot Yang diberikan Pupuk Bokashi o, 10, dan 20 ton/hektar di Kelurahan Kawangu,” *Prosiding Seminar Nasional HPPM*, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang, 23 November 2021, halaman 140-151.

---

**DILEMA ETIS PEKERJA SOSIAL DALAM MENERAPKAN NILAI DAN ETIKA PEKERJAAN SOSIAL TERHADAP PENANGANAN PERKAWINAN ANAK USIA DINI**

Oleh  
Evi Melda<sup>1)</sup>, Kurniati<sup>2)</sup>  
Program Study Interdisipliner Islamic Studies  
Fakultas Pasca Sarjana  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [1evimelda11@gmail.com](mailto:1evimelda11@gmail.com), [2kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:2kurniati@uin-alauddin.ac.id)

**Abstract**

Social work is a profession that is oriented to help and has the main task in overcoming social problems, one of which is to overcome children's problems. The method used in this study is a qualitative method by describing the implementation of the principles of value and ethics of social workers in dealing with child problems and the ethical dilemmas contained in them. The purpose of this research is expected to provide an overview of practice in the field as an effort to improve the quality of social work stuttering increasingly has adequate competence, both in terms of values and ethics in doing the profession.

**Keywords: Values and Ethics, Dilemma, Social Work and Child Marriage**

**PENDAHULUAN**

Anak-anak Indonesia merupakan aset bangsa yang paling berharga dan merekalah penentu masa depan. Pilihan kebijakan dan investasi untuk anak yang diambil pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan Indonesia. Dengan melalui berbagai keputusan yang tepat, Indonesia akan terus berjalan menuju masyarakat adil dan makmur, dengan kategori tingkat kesejahteraan yang merata. Saat ini, Indonesia telah mencapai pertumbuhan sosial dan ekonomi yang pesat dan mengesankan.

Kemiskinan yang dialami hampir separuh populasi pada empat dasawarsa lalu, kini berada di bawah sepuluh persen. Dulu, Indonesia merupakan salah satu negara termiskin di dunia dan sekarang Indonesia berstatus berpendapatan menengah. Angka kematian ibu dan anak turun drastis, angka

partisipasi pendidikan dasar mendekati 100 persen, dan pelayanan kesehatan dasar tersedia di semua wilayah—termasuk daerah terpencil.

Untuk memahami situasi terkini yang dihadapi anak-anak Indonesia, UNICEF telah mengkaji berbagai jenis permasalahan penting yang berdampak terhadap kehidupan anak dan pemuda, seperti: kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kekerasan, lingkungan, dan lain-lain.<sup>1</sup> Pada tahun 2019 sekitar 31,56 persen (84 juta) penduduk Indonesia adalah anak-anak yang berusia 0-17 tahun (BPS 2019). Pada bulan maret tahun 2020 Indonesia menempati urutan ke-19 di dunia untuk kasus COVID-19 dan merupakan salah satu negara terburuk di kawasan Asia Tenggara (WHO 2020).<sup>2</sup>

Pada umumnya permasalahan anak dikategorikan ke dalam tiga konsep, yaitu PSTA (perlakuan salah terhadap anak) (*child*

---

<sup>1</sup> United Nations Children's Fund (Unicef), Situasi Anak Di Indonesia: Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak—hak Anak (Jakarta: Unicef Indonesia, 2020).

<sup>2</sup> Santi Kusumaningrum, Clara Siagian, and Harriot Beazley, "Children during the COVID-19 Pandemic: Children and Young People's Vulnerability and Wellbeing in Indonesia," *Children's Geographies* (March 23, 2021): 1–11.

*abuse or child maltreatment*), penelantaran anak (*child neglect*), dan eksploitasi anak (*child exploitation*) yang mengakibatkan anak tidak terpenuhi haknya dan bahkan kehilangan kemerdekaannya.

PSTA secara fisik (*physical abuse*) yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, seperti menggunakan benda tertentu yang menimbulkan luka fisik bahkan kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet ataupun memar yang diakibatkan oleh sentuhan yang keras dari benda tumpul, seperti ikat pinggang atau rotan. Bahkan dapat pula berupa luka bakar akibat sundutan rokok atau setrika.

PSTA secara psikis (*mental abuse*) yaitu meliputi penyampaian kata-kata kasar, kotor, memperlihatkan gambar atau buku pornografi pada anak. Jika perlakuan seperti ini terus terjadi, maka akan dapat membawa dampak negatif pada pola pikir anak.

PSTA secara seksual (*sexual abuse*) yaitu berupa perlakuan atau pra-kontrak seksual antara anak dan orang tua yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, dan gambar visual), atau perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dan orang dewasa.

PSTA secara sosial (*social abuse*) yaitu meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak yaitu sikap ataupun perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap tumbuh kembang anak.<sup>3</sup>

Perlakuan salah terhadap anak tidak hanya ditemukan di perkotaan, akan tetapi juga ditemukan di pedesaan. Sebagaimana telah ditemukan beberapa kasus anak yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Gowa, seperti kekerasan seksual, pernikahan anak usia dini, eksploitasi anak, maupun yang lainnya. Itu semua diakibatkan karena kurangnya

pemahaman orang tua tentang hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi.

Berdasarkan kasus di atas, maka pemerintah bersama pekerja sosial, UNICEF dan Yayasan BaKTI bekerja sama untuk melindungi anak dari berbagai perlakuan salah, baik yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, atau masyarakat. Akan tetapi, memahami nilai dan etika merupakan persoalan penting dalam praktik pekerjaan sosial. Karena, Nilai-nilai merupakan landasan sentral pemahaman bagi pekerja sosial dalam suatu praktik.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Implementasi

Implementasi yaitu memahami apa kenyataan yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup usaha-usaha baik untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Nurdin dan Usman, (2004: 70) mengemukakan bahwa "implementasi yakni perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Welmer dan Vining dalam Subarsono, (2006: 103) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: logika kebijakan; lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, baik dari lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis; Kemampuan implementor kebijakan.<sup>4</sup>

### Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial

Nilai (*value*) berasal dari bahas latin *valere* artinya "menjadi kuat" atau "menjadi

<sup>3</sup> Edi Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

<sup>4</sup> Abdul Syaban and La Iru, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan NonFormal Pada Anak Jalanan di Kota Kendari," 12 (2019).

terhormat.” Nilai dikaitkan dengan sesuatu yang baik (*good*) ataupun buruk (*bad*). Menurut Soetarso berpendapat bahwa nilai adalah kepercayaan, pilihan, atau asumsi yang baik untuk manusia. Selain itu, Sarah Banks berpendapat bahwa nilai berarti agama, politik atau prinsip-prinsip ideologi dan keyakinan atau sikap.<sup>5</sup>

Seorang pekerja sosial merupakan figur pemegang nilai dan budaya. Pekerja sosial berperan sebagai “*change-agent*” yang memiliki fungsi ganda yakni: mendorong penerima inovasi/pembaharuan dalam konteks penyesuaian diri, orang tua atau masyarakat terhadap perkembangan zaman; dan mencegah inovasi atau prakti-praktik tertentu yang melanggar bahkan merusak tata nilai budaya dan agama.

Sebagai seorang pekerja sosial maka harus memiliki standar nilai, seperti: 1) agama dijadikan sebagai sumber nilai mutlak yang kemudian diturunkan ke dalam produk-produk budaya yaitu nilai sosial, norma dan institusi; 2) dalam praktik kehidupan dapat terjadi kebudayaan nilai dan norma relatif yang lebih dikuti daripada nilai dan norma mutlak (agama); 3) tujuan hidup adalah mati (kehidupan akhirat yang baik), jadi siapa yang ingin belajar hidup maka harus belajar mati; 4) beberapa nilai yang melandasi pandangan dan perlakuan kepada sesama manusia yang dilandasi oleh hubungan tunggal manusia dengan sang pencipta, yakni kesetaraan (lebih-kurang) dan keinginan untuk membantu; 6) dalam interaksi antara pembere dan penerima bantuan haruslah terarah kepada pembentukan perilaku yang lebih baik bagi keduanya.<sup>6</sup>

Jika nilai dihubungkan dengan pekerjaan sosial, maka yang dimaksud yaitu seperangkat prinsip moral yang fundamental dimana seorang pekerja sosial harus

berkomitmen. Nilai berfungsi sebagai panduan perilaku seseorang, karena nilai menyangkut sesuatu yang abstrak dan implisit. Nilai membentuk kepercayaan dan sikap seseorang, kemudian kepercayaan dan sikap tersebut yang membentuk nilai. Jika nilai berbicara tentang sesuatu yang baik dan buruk, maka etika (*ethics*) terkait dengan benar (*right*) atau salah (*wrong*). Oleh karena itu, etika bersifat eksplisit dan konkret.

Etika secara Bahasa memiliki arti yang sama dengan moralitas. Menurut Keraf moralitas berasal dari kata latin yaitu *mos* jamaknya adalah *mores* yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan, etika berasal dari kata Yunani *ethos* jamaknya *ta etha* yang artinya juga adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Magnis berpendapat bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Dikatakan sebagai sebuah ilmu karena etika mempunyai bidang kajian yang luas dibandingkan dengan moralitas. Dimana etika dapat dipahami sebagai filsafat moral atau suatu ilmu yang membahas atau mengkaji nilai dan norma. Etika atau moralitas dalam hal ini mengacu kepada aturan yang bersifat konkret terhadap perilaku manusia.<sup>7</sup>

Berdasarkan nilai dasar yang dimiliki oleh profesi pekerja sosial, maka dalam praktiknya pekerja sosial tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip praktik profesi pekerjaan sosial. Prinsip-prinsip praktik pekerja sosial dan etika praktik adalah landasan bagi seorang pekerja sosial dalam melakukan hubungan pertolongan dengan klien. Adapun sikap yang harus dikembangkan oleh pekerja sosial saat melakukan hubungan dengan klien yaitu: 1) *Acceptance* merupakan prinsip pekerja sosial yang fundamental, yakni menunjukkan sikap toleran terhadap keseluruhan dimensi klien.; 2) *Nonjudgemental* yaitu pekerja sosial menerima

<sup>5</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

<sup>6</sup> Budhi Wibhawa, *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial: Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2010).

<sup>7</sup> Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*.

klien dengan apa adanya tanpa disertai dengan prasangka atau penilaian. 3) *Individualisasi* memandang dan mengapresiasi sifat unik dari klien; 4) *Self-determination* adalah memberikan kebebasan kepada klien dalam mengambil keputusan. 5) *Genuine/Congruence* yaitu pekerja sosial bekerja sebagai seorang manusia yang berperan apa adanya, alami, menunjukkan pribadi yang asli dengan segala kekurangan dan kelebihan; 6) Mengetahui keterlibatan emosional yaitu pekerja sosial harus mampu bersikap objektif dan netral. Dimana seorang pekerja sosial harus dapat membedakan untuk dirinya dan tanggung jawab terhadap klien dalam melakukan pemecahan masalah; 7) *Confidentiality* (kerahasiaan) yaitu pekerja sosial menjaga kerahasiaan informasi terkait identitas, isi pembicaraan dengan klien, pendampar profesional lain atau catatan kasus mengenai diri klien.<sup>8</sup>

Menjadi seorang pekerja sosial bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Sebagai seorang pekerja sosial memiliki sebuah kode etik yang diatur untuk melindungi dan menjaga diri sebagai pekerja sosial. Namun, dalam aplikasinya dengan klien terkadang kita memiliki sebuah dilema yang tidak mudah untuk kita pecahkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh WJS Poerwadarminta: 1976 terkait dilema adalah situasi yang mengharuskan seseorang melakukan pilihan antara dua kemungkinan yang kedua-duanya tidak menyenangkan yakni Situasi yang sulit dan membingungkan. Sementara dilema etik memiliki pengertian yaitu suatu keadaan dimana seseorang dihadapkan pada situasi yang memerlukan pilihan antara nilai yang penting secara seimbang.<sup>9</sup>

Dilema etik seringkali terjadi ketika pekerja sosial memandang dirinya dihadapkan kepada pilihan antara dua hal yang sama-sama merupakan dalam melakukan penanganan kasus, baik dalam *setting* praktik langsung/*direct practice* (mikro dan meso) ataupun praktik tidak langsung/*indirect practice* (makro), seorang pekerja sosial selalu dituntut untuk membuat keputusan yang tepat. Namun, keputusan etik yang tepat tidak semudah yang dibayangkan. Karena, pada kenyataannya pekerja sosial dihadapkan kepada dilema etik yang sulit untuk diputuskan. Berikut masing-masing dilema etik dalam praktek pekerjaan sosial. Dalam praktek langsung yaitu: 1) kerahasiaan dan privasi; 2) self-determination dan paternalism; 3) membagi loyalitas; 4) batas profesionalisme dan konflik kepentingan; 5) antara nilai profesionalisme dan nilai personal.<sup>10</sup>

### **Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial merupakan profesi kemanusiaan yang telah lahir cukup lama. Kelahirannya sejak tahun 1800-an dan profesi pekerjaan sosial terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan dan aspirasi masyarakat.<sup>11</sup> Robert L. Barker dalam Sheafor dkk mendefinisikan profesi pekerjaan sosial sebagai aktivitas bantuan untuk individu, keluarga, kelompok atau masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial mereka dan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan sesuai dengan tujuannya. Pada hakikatnya pekerjaan sosial merupakan layanan profesional dengan tujuan: 1) mengentaskan atau menyediakan kapasitas keberfungsian sosial orang sebagai individu dan kolektivitas; 2) menciptakan

<sup>8</sup> Wibhawa, *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*.

<sup>9</sup> Pebri Yanasari, "Dilema Etik Pekerja Sosial Dalam Menerapkan Self-Determination Dalam Penanganan Korban Kekerasan Di Rifka Annisa Yogyakarta" Vol. 1 No. 1 (2021).

<sup>10</sup> Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*.

<sup>11</sup> Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat*.

situasi kehidupan sejahtera dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

Pekerjaan sosial dapat diartikan sebagai disiplin ilmu ataupun profesi kemanusiaan. Pekerjaan sosial sebagai disiplin ilmu memiliki fokus perhatian terhadap relasi-environment yang didasarkan pada pendekatan holistic. Pendekatan tersebut dibangun secara eklektik dari ilmu-ilmu perilaku manusia dan sistem sosial, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik.<sup>13</sup>

Profesi pekerjaan sosial berbeda halnya dengan profesi lain, seperti psikolog, dokter atau psikiater. Dimana pada saat mengobati pasien hanya memfokuskan perhatiannya pada penyakit pasien saja. Sedangkan, profesi pekerjaan sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, akan tetapi mempertimbangkan lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada, termasuk orang-orang yang mempengaruhi kehidupan klien. Pekerjaan sosial didasari oleh tiga komponen dasar secara integratif membentuk pendekatan pekerjaan sosial, yaitu: kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*), dan kerangka nilai (*body of values*). Ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan secara eklektik dari beberapa ilmu sosial, diantaranya sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi. International Federation of Social Workers (IFWS) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai profesi yang bertujuan mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta

perbaikan masyarakat. Dengan menggunakan teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, sehingga pekerjaan sosial dapat melakukan intervensi pada titik (situasi) dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu prinsip yang sangat penting dalam praktek pekerjaan sosial adalah hak asasi manusia dan keadilan sosial.<sup>14</sup>

### Perkawinan Anak

Dengan adanya undang-undang ini bukan menjadi jaminan untuk mengurangi tingkat kasus anak yang terjadi.

Perkawinan adalah sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Salah satu definisinya yaitu menyebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan formal antara laki-laki dan perempuan dan secara hukum diakui sebagai suami dan istri.<sup>15</sup>

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Sebagaimana dalam Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 mengemukakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun) dan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai.<sup>16</sup>

Namun, merujuk pada perubahan norma Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjangkau batas usia untuk

<sup>12</sup> Cepri Yusrun Alamsyah, *Praktik pekerjaan sosial generalis: suatu tuntutan intervensi*, 2015.

<sup>13</sup> Khoniq Nur Afia, "Penerapan Nilai dan Etika dalam Intervensi: Dilema Etis Pekerja Sosial Dalam Program Pemberdayaan Kelompok Pemulung Mardiko Piyungan Bantul," *Welfar: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Volume 9 (2020).

<sup>14</sup> Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat*.

<sup>15</sup> Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1 (Mei 2014).

<sup>16</sup> Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesian On The Country Perspective and Religion As Well As The Problem)," 2015.

melakukan perkawinan, perbalkan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi Wanita disamakan dengan batas umur perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksudkan telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup; 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan; 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>17</sup>

Pada prinsipnya Negara membuat batasan umur untuk kawin bagi warga Negara Indonesia yaitu bertujuan agar orang yang akan menikah sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup dan memadai. Kemudian yang terpenting adalah dapat tercapai aspek kebahagiaan. Oleh karena itu, perkawinan dibawah umur sebenarnya belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan, pada hakekatnya usia 16 tahun masih termasuk katagori anak-anak belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) pada usia ini masih dikategorikan anak-anak yang belum mampu membangun rumah tangga yang tangguh.<sup>18</sup>

Pada dasarnya Negara telah menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang termasuk dalam kandungan.<sup>19</sup> Kemudian, Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konveksi Hak-hak Anak. Secara keseluruhan materi pokok yang diatur Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konveksi Hak-hak Anak. Secara keseluruhan materi pokok yang diatur.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy, "Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

<sup>18</sup> "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesian On The Country Perspective and Religion As Well As The Problem)."

<sup>19</sup>Peraturan Presiden RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, h.3-4.

<sup>20</sup> Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum & Pemenuhan Hak Anak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Cet. I. (Makassar: Alauddin University Press, 2011).

Menurut Effendi orang tua memiliki peranan utama dalam mengasuh anak, disegala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan budayanya dapat diteruskan dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Sumber daya berkualitas dapat dilihat dari keluarganya, bukan hanya keluarga mampu dari segi materi yang dapat meningkatkan kualitas individunya melalui tambahan-tambahan materi pembelajaran di luar bangku sekolah. Tetapi, keluarga sederhana di desa pun dapat menjamin kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya dan keluhuran budi pekerti merupakan hasil tempaan orang tua.

Pendidikan moral dalam keluarga perlu ditanamkan sejak dini oleh orang tua kepada setiap individu. Karena, meskipun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, namun rendah dalam hal moralitas, individu tersebut tidak akan berarti dimata siapapun.<sup>21</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>22</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena

buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, karakteristik, perubahan, aktivitas, kesamaan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitian diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak ada hipotesis tetapi pertanyaan penelitian.<sup>23</sup>

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam tulisan ini untuk menggali fakta lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan mengenai kondisi di lapangan yang berhubungan langsung dengan lokasi penelitian terkait perkawinan anak usia dini.

Metode penelitian kualitatif digunakan karena permasalahan belum jelas, kompleks, dinamis, holistik dan penuh makna sehingga tidak mungkin pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti, test, dan pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.<sup>24</sup>

Pendekatan penelitian yang dimaksud yaitu untuk mengungkap pola pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang sesuai dengan teori dan metode penelitiannya.<sup>25</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi.

<sup>21</sup> Wenny Hulukati, "Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak" (2015).

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. XIV. (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>23</sup> Syamsuddin, *Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, Cet. 1. (Makassar: Shofia, 2016).

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

<sup>25</sup> Muljono Damopoli, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Cet. 1. (Makassar: Alauddin Press, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dilema Etis Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Perkawinan Anak Usia Dini

Nilai yang biasanya diterapkan di desa yang ada di Kabupaten Gowa adalah budaya organisasi yang berorientasi kepada pengguna layanan, di antaranya yaitu integritas, orientasi kepada pengguna layanan, responsive, komunikasi dan menghargai. Sedangkan untuk bidang keprofesionalan sebagai pekerja sosial yang harus diterapkan yaitu kerjasama, tanggungjawab, pembelajaran secara terus menerus dan disiplin.

Telah banyak ditemui kasus perkawinan anak usia dini yang diakibatkan karena korban kurang tahu mengenai informasi dan kurangnya kesadaran terhadap haknya. Sebagian perkawinan anak usia dini terjadi karena faktor perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua di pedesaan berdalih bahwa jika ada seseorang yang melamar anaknya maka tidak boleh ditolak, dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina. Padahal ada beberapa hak anaknya yang telah dilanggar, diantaranya: keselamatan anak, hak anak atas pendidikan, dan hak anak untuk berpartisipasi. Meskipun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditetapkan bahwa seorang anak tidak boleh menikah dengan umur dibawah 19 tahun dan akta nikah tidak dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Namun, itu bukan jadi penghalang bagi orang tua untuk menikahkan anaknya.

Akan tetapi karena kurangnya pemahaman anak tentang haknya maka korban merasa biasa saja. Salah satu contoh di Kabupaten Gowa telah terjadi perkawinan anak usia dini, dimana klien ini merupakan salah satu korban perkawinan anak usia dini dengan cara dijodohkan oleh orang tuanya. Namun, saat ini klien bersama suaminya berpisah karena dalam rumah tangga mereka selalu terjadi KDRT. Kemudian, si korban kurang menyadari bahwa

hal tersebut bisa di jerat hukum, maka si korban hanya memilih untuk berpisah.

Hal inilah yang menjadi dilema pekerja sosial. Sebagaimana ungkapan dari AS sebagai pekerja sosial di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari AS sebagai pekerja sosial yaitu”

“Akar permasalahan yang dialami oleh para pekerja sosial ketika menangani korban perkawinan anak usia dini adalah situasi klien yang berubah-ubah. Meskipun keputusan berada di tangan klien, namun hal itu berdampak pada nilai *self-determination* yang membuat pekerja sosial mengalami dilema dalam menangani suatu kasus.”<sup>26</sup>

Salah contoh yang dialami oleh pekerja sosial dalam menangani kasus ini adalah ketika melakukan assesmen, korban atau klien membuat pengakuan bahwa pernikahan tersebut dilakukan atas persetujuannya sendiri. Akan tetapi sebagai seorang pekerja sosial dalam menjalankan peran dan fungsinya harus tetap bersifat individualisasi. Pekerja sosial selalu menjadikan klien menjadi dirinya sendiri dan menunjukkan bagaimana keadaannya dengan berbagai cara.

Kasus ini tetap ditangani dengan masalah yang berbeda yaitu kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, ketika kasusnya sudah ditangani dan dibawa ke jalur hukum, perempuan yang menjadi korban kekerasan secara tiba-tiba meminta untuk kasus yang sudah dilaporkan di tutup saja. Hal tersebut menurut penuturan korban dikarenakan sudah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Klien bersikap seperti itu dengan alasan bahwa pelaku masih ada ikatan hubungan dengan keluarganya dan pelaku telah meminta maaf atas kesalahannya. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berawal dari perjodohan dalam hal ini bentuk perkawinan anak usia dini. Ketika wawancara dengan AS sebagai Pekerja Sosial di Kabupaten

<sup>26</sup> AS Pekerja Sosial Kabupaten Gowa

Gowa, klien mengadukan permasalahannya dan meminta pihak pekerja sosial menyelesaikan permasalahannya maka pekerja sosial melakukan hal yang seharusnya dilakukan terhadap klien yaitu melakukan asesmen, intervensi dan pengumpulan data terkait kasus yang dilaporkan oleh klien. Namun dalam pelaksanaannya, klien/korban berusaha dipengaruhi oleh pelaku dengan alasan menjaga hubungan baik keluarga. Dari hasil wawancara tersebut juga dapat kita lihat bahwa korban tidak memiliki keberanian melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian karena berkenaan dengan ketidakinginan korban dalam mengeluarkan uang atas laporannya. Hal ini tentunya membuat pihak pekerja sosial harus menerapkan prinsip nilai *self-determination* yang mana harus menyerahkan setiap keputusan ke tangan klien sebagai korban. Kasus di atas merupakan salah satu kasus yang pernah ditangani oleh pekerja sosial melalui kerja sama dengan pemerintah setempat dimana korban berdomisili. Terdapat dilema terhadap pelayanan yang diberikan kepada klien. Di satu sisi pekerja sosial bersedia membantu hingga jalur hukum jika dilanjutkan karena sudah merupakan ranah pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap korban/klien ketika klien atau korban melaporkan permasalahannya.

Namun dilema yang dirasakan ketika klien/korban tersebut tidak melanjutkan proses penyelesaian masalah karena lebih memilih jalan musyawarah. Tentunya ini membuat pekerja sosial tidak dapat memaksa jika korban sudah menentukan pilihan penyelesaian masalah sehingga dianggap kasus selesai dan ditutup. Meskipun pada dasarnya pekerja sosial memiliki peran dan fungsi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat, khususnya dalam penanganan perkawinan anak usia dini dan kekerasan terhadap perempuan. Namun, pekerja sosial harus tetap berada pada landasan nilai dan etika seorang pekerja sosial dalam menjalankan peran dan fungsinya. Salah satunya adalah *Self-determination* yaitu

memberikan kebebasan kepada klien dalam mengambil keputusan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Anak merupakan bunga harapan bangsa dan menjadi penentu masa depan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah memahami hak-hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Nilai dan etika pekerja sosial sudah memenuhi standar kode etik keprofesionalan yang digunakan secara umum. Pekerja sosial melakukan pendampingan sebagai salah satu upaya memberikan hak individu kepada klien untuk memilih keputusan yang diikuti oleh klien/korban.

Dalam kasus ini pekerja sosial memberikan kebebasan kepada klien/korban perkawinan anak usia dini dan tindak kekerasan tersebut berusaha bersifat objektif dengan melakukan asesmen kepada klien sehingga terjalin hubungan saling percaya. Rangkaian pendampingan yang didapatkan oleh klien berakhir ketika klien/korban sudah melakukan *Self-Determination* (menentukan pilihan sendiri). Adapun beberapa dilema etis yang terjadi di lapangan yaitu *self-determination*. Dimana keputusan akhir ditentukan oleh klien/korban itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Syaban, and La Iru. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan NonFormal Pada Anak Jalanan di Kota Kendari". 12 (2019).
- [2] Alamsyah, Cepri Yusrun. *Praktik pekerjaan sosial generalis: suatu tuntutan intervensi*, 2015.
- [3] Damopoli, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cet. 1. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- [4] Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda Vol. 3, No. 1* (2014).

- [5] Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy. “Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” 2015.
- [6] Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- [7] Hulukati, Wenny. “Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak” 7 (2015).
- [8] Khoniq Nur Afia. “Penerapan Nilai dan Etika dalam Intervensi: Dilema Etis Pekerja Sosial Dalam Program Pemberdayaan Kelompok Pemulung Mardiko Piyungan Bantul.” *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Volume 9 (2020).
- [9] Kusumaningrum, Santi, Clara Siagian, and Harriot Beazley. “Children during the COVID-19 Pandemic: Children and Young People’s Vulnerability and Wellbeing in Indonesia.” *Children’s Geographies* (March 23, 2021): 1–11.
- [10] Pebri Yanasari. “Dilema Etis Pekerja Sosial Dalam Menerapkan Self-Determination Dalam Penanganan Korban Kekerasan Di Rifka Annisa Yogyakarta” Vol. 1 No. 1 (2021).
- [11] Peraturan Presiden RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- [12] Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum & Pemenuhan Hak Anak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- [13] Reni Kartikawati, Djamilah. “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1 (Mei 2014).
- [14] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet. XIV. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [15] Suharto, Edi. *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- [16] Surmiati Ali, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesian On The Country Perspective and Religion As Well As The Problem),” 2015.
- [17] Syamsuddin. *Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Cet. 1. Makassar: Shofia, 2016.
- [18] United Nations Children’s Fund (Unicef), *Situasi Anak Di Indonesia: Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak—hak Anak* (Jakarta: Unicef Indonesia, 2020).
- [19] Wibhawa, Budhi. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial: Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2010.

## KONVERGENSI MEDIA DAN MEMORI KOLEKTIF MASYARAKAT INDONESIA

Oleh

Deby Puspitaningrum

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Kramat Raya No.98, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10450, Telp (021) 23231170

E-mail: [debby.dby@bsi.ac.id](mailto:debby.dby@bsi.ac.id)

## Abstract

Penemuan internet menyebabkan perubahan besar pada media yang ditandai dengan terjadinya konvergensi media. Dari sisi teknologi, konvergensi media dapat dilihat dari maraknya penggunaan ponsel pintar untuk menikmati berbagai jenis media hanya dengan satu genggam. Dari aspek budaya, konvergensi media dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menjadi “prosumer” atau pembuat konten. Menggunakan tinjauan pustaka dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, *website*, dan artikel di *media online*, tulisan ini membahas konvergensi media yang terjadi di Indonesia. Konvergensi media dapat dijadikan sebagai memori kolektif masyarakat Indonesia, karena konten-konten yang pernah muncul di media-media di Indonesia pada masa lalu, dapat dinikmati hingga saat ini bahkan di masa depan dengan adanya konvergensi media. Pelestarian konten atau kurasi digital diperlukan agar konten tidak hilang, terutama konten legendaris dan populer pada masanya. Individu, komunitas, organisasi, perusahaan media, atau industri media dapat terus membuat konten yang berkualitas dan terus mengunggahnya ke *platform* digital agar konten berkualitas tidak hilang dari masa ke masa.

**Keywords: Media, Konvergensi, Masyarakat, Konten, Memori**

## PENDAHULUAN

Sejak internet ditemukan, perubahan banyak sekali terjadi pada dunia ini. Penggunaan internet saat ini bermula dari temuan ahli sains Inggris, Tim Berners-Lee, berupa HTML (Hypertext Markup Language) pada tahun 1990-an. Temuan tersebut memungkinkan adanya jaringan sederhana pada komputer yang dikenal saat ini sebagai World Wide Web [1].

Perubahan besar dari temuan internet menyebabkan beberapa hal terjadi pada media. Pertama, konten media dapat berubah menjadi format digital. Bentuk media, baik dari sisi teks, *image*, audio, dan video menjadi berkonvergensi. Kedua, produksi media juga berubah. Penulis buku kini banyak menggunakan *word processor*, sementara musisi dapat memanipulasi hasil rekaman audionya dengan program di *software*, atau pembuat film yang dapat mengedit hasil rekaman gambarnya secara digital. Ketiga,

konten media menjadi semakin mudah didistribusi dan dikonsumsi masyarakat karena mudah di-*share* dengan akses internet. Keempat, memungkinkan adanya interaksi antara pengguna media dan konten media. Para pengguna media dapat saling berdiskusi dan memberikan *feedback*, bahkan juga sekaligus menjadi produsen selain konsumen [2]. Konvergensi media terjadi sejak internet ditemukan.

Tulisan pada jurnal ini mengangkat konvergensi media yang terjadi di Indonesia, yang dapat menjadi memori kolektif bagi masyarakat Indonesia karena pelestarian konten dapat dilakukan melalui konvergensi media.

## LANDASAN TEORI

## Konvergensi Media

Konvergensi media merupakan sebuah proses yang kini terjadi dan merupakan persimpangan antara teknologi media, industri,

konten, dan khalayak. Dengan adanya konvergensi media maka terjadi keterkaitan antara komputasi dan komunikasi. Media menjadi ada di mana-mana dan sangat mudah ditemui. Terdapat lima (5) aspek yang berkaitan dengan konvergensi media, yaitu: konvergensi teknologi, konvergensi ekonomi, konvergensi sosial atau organik, konvergensi budaya atau kultural, dan konvergensi global [3].

Konvergensi teknologi adalah terjadinya digitalisasi terhadap semua konten di media. Contohnya berupa kata-kata, gambar, atau suara yang diubah menjadi informasi digital. Konvergensi ekonomi adalah terjadinya integrasi horizontal dalam industri hiburan. Konvergensi sosial atau organik adalah strategi *multitasking* konsumen untuk menavigasi lingkungan informasi baru. Konvergensi budaya adalah bentuk kreativitas baru atas persimpangan berbagai teknologi media, industri, dan konsumen. Dalam hal ini, ditumbuhkan budaya masyarakat partisipatif yang memberikan kesempatan agar mereka dapat mengarsipkan, membubuhi keterangan, konten yang sesuai, dan resirkulasi. Budaya tersebut dapat digunakan perusahaan media untuk membuat konten yang murah serta pengembangan konten melintasi banyak saluran. Konvergensi global adalah munculnya budaya hibridisasi yang dihasilkan dalam peredaran konten media internasional. Bentuk-bentuk baru ini mencerminkan pengalaman menjadi warga yang disebut McLuhann sebagai yang berada dalam “*Global Village*” atau “Desa Global” [3].

Konvergensi media didefinisikan oleh Klaus Bruhn Jensen sebagai praktek komunikasi yang bermigrasi secara terbuka melintasi teknologi material yang berbeda dan institusi sosial. Terdapat tiga (3) tingkat mode interaksi komunikasi yang terpengaruh akan hal ini yang dikenal sebagai “*Three Degrees*”. Tingkat pertama adalah yang melibatkan perangkat komunikasi interpersonal, termasuk komunikasi tatap muka dan tulisan. Tingkat kedua adalah teknologi, sebuah label bentuk

media. Tingkat ketiga adalah “meta-teknologi” atau media digital yang dapat memulihkan dan menggabungkan kembali tingkat lainnya [4]. Menurut Tim Dwyer, konvergensi media merupakan teknologi baru yang diakomodasi oleh media yang ada, oleh industri komunikasi serta budaya. Media digital muncul sebagai fenomena superstruktur di atas industri media. Sementara itu, Bolter dan Grusin mengemukakan bahwa konvergensi media adalah perbaikan, yang merepresentasikan medium lainnya dan terjadi paling tidak pada 3 perangkat penting dalam teknologi yaitu telepon, televisi, dan komputer [4].

Konvergensi media menjadi bagian dari mediamorfosis, yaitu sebuah transformasi media komunikasi yang timbul sebagai implikasi dari hubungan timbal balik antara berbagai kebutuhan yang dirasakan, serta berbagai inovasi teknologi dan sosial. Konvergensi media dapat merujuk pada *platform* yang biasa dikenal masyarakat umum sebagai multimedia, yaitu penyatuan dua medium komunikasi atau lebih [5].

Disebutkan dalam Jenkins (2008) bahwa konvergensi media harus dipahami sebagai proses hubungan antara dua hal, yaitu antara perusahaan media atau selaku produsen yang mendorong dari atas ke bawah, serta konsumen yang mendorong dari bawah ke atas. Aliran konten media di seluruh saluran dapat digunakan oleh produsen untuk memperluas peluang pendapatan, memperluas loyalitas, sekaligus komitmen konsumen. Hubungan keduanya dapat saling menguatkan dan mendekatkan sehingga produsen dan konsumen merasakan manfaatnya. Namun, terkadang dapat menimbulkan konflik sehingga diperlukan negosiasi untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, konvergensi media berimplikasi pada perubahan hubungan antara produsen (perusahaan media), dengan konsumen. Jika hubungan keduanya semula berjarak, melalui konvergensi media maka hubungannya menjadi dekat. Konsumen dapat menjadi UGC (*User Generated Content*).

UGC dapat membentuk cara baru bagi orang dalam menonton tayangan video dan televisi. UGC menciptakan pola tampilan baru dan interaksi sosial, memberdayakan pengguna untuk lebih kreatif dan mengembangkan peluang bisnis baru [7]. Dalam UGC, pengguna umumnya merupakan kontributor internet aktif yang memasukkan sejumlah upaya kreatif di luar pekerja profesional yang melakukan rutinitas dalam memproduksi media. Pengguna dapat menjadi “*prosumer*” yaitu berada pada posisi bipolar antara produsen versus konsumen atau dapat juga profesional versus konsumen [8].

### **Konvergensi Media dan Perubahan Masyarakat**

Media, yang dapat diartikan sebagai medium atau saluran untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain, atau juga dapat merujuk pada industri komunikasi, yang mana pada abad ke-19 ditandai oleh kemunculan industri surat kabar, majalah, dan film; dapat membawa pengaruh besar [9]. Pemikiran dari McLuhan menyebutkan, pengaruh besar dari media berkaitan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan. Media dapat membentuk pola saling ketergantungan sosial dan mengubah setiap aspek kehidupan masyarakat. Bahkan, pembentukan itu dapat dilakukan secara dramatis [10]. Gaya hidup masyarakat dapat berubah ketika terjadinya konvergensi media, terutama pada masyarakat yang masuk pada kategori dewasa muda, mereka mengalami perubahan. Mereka tidak mudah lagi dijangkau oleh media konvensional karena sudah sibuk dengan ponsel pintar, *video game*, atau perangkat digital pemutar musik dan lagu. Mereka adalah masyarakat informasi atau *Information Society*, yang memiliki ketergantungan pada produksi dan konsumsi informasi [11]. Sebelum terdapat masyarakat yang bergaya hidup seperti itu, ada tipe masyarakat lainnya, yaitu masyarakat preagrrikultural (*Preagrrikultural Society*), masyarakat agrrikultural (*Agrrikultural Society*),

serta masyarakat industrial (*Industrial Society*). Masyarakat preagrrikultural kebanyakan hidup dalam kelompok kecil. Mereka merupakan pemburu binatang dan pengumpul tanaman. Pada masyarakat tipe ini, yang kerap menyebarkan berita atau informasi adalah dukun dan pendongeng. Informasi yang disebarkan berbentuk bahasa lisan. Masyarakat agrrikultural sebagian besar hidupnya melakukan pekerjaan di sektor pertanian dan melakukan ekstraksi sumber daya, seperti memancing, menebang, dan menambang. Literasi mulai dikenal pada masyarakat ini dan sudah ada informasi yang berbentuk bahasa tertulis, seperti berupa buku yang ditulis tangan. Masyarakat industrial sudah mengenal adanya percetakan dan media massa, sehingga informasi berbentuk buku dan media lainnya yang dicetak menjadi hal yang umum [11]. Konvergensi media yang terjadi saat ini memiliki pengaruh besar pada masyarakat informasi atau *Information Society*.

### **Konvergensi Media dan Industri Komunikasi**

Konvergensi media dapat terjadi pada berbagai industri komunikasi, dari sektor baca, audio, hingga audio visual. Berbagai sektor tersebut dapat saling bersimpangan. Sektor baca melibatkan industri buku, surat kabar, dan majalah. Sektor audio melibatkan industri radio, musik dan rekaman. Sedangkan sektor audio visual melibatkan industri film, televisi, dan *video game*. Dalam Greenhood & Gentry (1996) disebutkan bahwa industri buku dimulai dari penciptaan buku modern pada tahun 1455 oleh Johannes Gutenberg, yang saat itu mencetak FortyTwo Line Bible [12]. Awalnya pencetakan buku berkaitan dengan teks-teks agama dan hukum. Pada tahun 1660, buku telah menjadi kekuatan untuk perubahan dan pengaruh [12]. Industri surat kabar modern merupakan produk dari kehidupan kota. Surat kabar tidak hanya merupakan alat propaganda dan opini, tapi juga menjadi bentuk sastra populer. Industri surat kabar membutuhkan biaya yang tinggi karena ada investasi untuk

mesin cetak, tinta, kertas, juga tenaga kerja. Oleh karena itu, banyak industri surat kabar yang merupakan bagian dari perusahaan besar yang menghasilkan media berbeda [13]. Industri majalah adalah industri yang mengadopsi teknologi produksi, distribusi pencetakan, dan produksi kertas. Industri majalah pada abad ke-20 mencerminkan gaya hidup baru berisi konten editorial untuk demografi yang terdefinisi secara baik serta psikografi yang mencerminkan selera umum, mode, dan selera hiburan [14].

Industri radio merupakan industri yang harus menyediakan tingkat kualitas suara dan keandalan penerimaan yang sangat unggul. Terdapat konten program musik, informasi kondisi lalu lintas, dan prakiraan cuaca [15]. Industri musik dan rekaman mengandalkan kekreatifan individu-individu yang terlibat di dalamnya, seperti produser, artis, pencipta musik atau lagu, dan *programmer*. Industri film adalah industri yang memulainya dari ide atau skrip, baik berupa fiksi atau non-fiksi dan dapat berasal dari buku, komik, program televisi, permainan, atau *remake* film lainnya [16]. Industri televisi melibatkan banyak sekali orang, seperti produser, sutradara, penulis, aktor dan aktris, pekerja kreatif, serta melibatkan studio dan berbagai hal di belakang layar [17]. Sementara itu, industri *video game* adalah industri yang terus tumbuh secara dramatis selama dekade terakhir, memotong media *mainstream* dan menjadi bagian dari budaya media *mainstream*. Industri ini melibatkan konsol dan perangkat berbasis PC [18].

### Memori Kolektif

Konsep memori kolektif atau *collective memory* dikembangkan oleh Maurice Halbwachs, filsuf dan sosiolog yang merupakan murid dari Emile Durkheim. Konsep kolektif memori sangat berkaitan dengan media, seperti konten berupa *news* dan film yang dimuat di media. Melalui konten-konten yang ada dalam media, memori atau ingatan masyarakat akan terus terbentuk.

Memori berhubungan dengan proses dialektis antara diri manusia dengan kejadian yang dialaminya. Memori juga berhubungan dengan materi serta pikiran. Sedangkan kolektif menurut Emile Durkheim dimaknai sebagai fakta sosial atau kolektivitas. Fakta sosial atau kolektivitas tersebut dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga tidak akan hilang karena struktur kolektif tertentu telah terbentuk. Halbwachs mengemukakan, memori manusia pada dasarnya tidak bersifat individual. Terdapat proses sosial atau proses kolektif yang telah dilaluinya. Terdapat fungsi khusus pada memori kolektif yaitu mencipta ulang kejadian pada masa lalu untuk kejadian pada masa kini sebagai pengharapan atas masa mendatang yang lebih baik [19].

Memori kolektif juga berhubungan dengan memori kultural, karena antara memori dan konteks sosio-kultural terdapat keterhubungan. Kultural atau budaya memiliki tiga dimensi, yaitu sosial (seperti orang, hubungan sosial, institusi), material (seperti artefak dan media), dan aspek mental (seperti cara berpikir dan sikap mental). Dalam hal ini, proses mengingat juga merupakan bagian dari budaya. Memori dapat terbentuk dari seringnya berinteraksi dengan orang-orang di sekitar dan berinteraksi dengan berbagai media yang digunakan. Interaksi tersebut dapat memunculkan *recall* atau memanggil kembali memori lama dan memasukkan memori baru dalam diri individu. Memori dapat muncul tiba-tiba dalam diri individu karena berbagai faktor eksternal. Misalnya, dari hasil perbincangan dengan orang-orang, dan dari media yang dibaca, didengar, atau ditonton [20].

Anderson mengatakan, televisi dianggap secara luas sebagai fasilitator ideal dari memori budaya dengan ritualnya. Status televisi adalah sebagai agen komunikasi sosial dan memori budaya. Maurice Halbwachs dan Jan Assman menyebutnya dengan istilah “memori kolektif” di mana memori itu hidup melalui komunikasi [21].

## METODE PENELITIAN

*Literature review* atau kajian literatur digunakan pada jurnal ini. Kajian literatur merupakan ringkasan, analisis, dan evaluasi pada literatur yang dapat digunakan untuk menjelaskan area yang dikaji. *Literature review* dapat menyoroti area yang berkaitan dengan topik yang ada. Setelah topik dipilih atau ditemukan, selanjutnya dicari tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan topik tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi [22]. Menurut Machi & McEvoy (2012), kajian literatur merupakan dokumen tertulis yang menyajikan suatu topik yang diargumentasikan secara logis berdasarkan pemahaman tentang keadaan pengetahuan saat ini [23]. *Literature review* dapat menjadi metode yang relevan agar tidak sulit mengikuti kondisi yang mutakhir dan dapat menciptakan dasar yang kuat untuk memajukan pengetahuan [24]. Adapun pengetahuan yang digali dalam jurnal ini adalah tentang konvergensi media di Indonesia dalam kaitannya dengan memori kolektif masyarakat Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvergensi media yang marak terjadi di Indonesia, utamanya berkaitan dengan konvergensi teknologi dan budaya. Dari konvergensi teknologi, terlihat bahwa perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang menjadi penyedia konten di industri baca, audio, maupun audio visual, telah menyatu dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komputer dan jaringan telekomunikasi. Perusahaan media seperti Kompas, dari awalnya berupa media cetak koran atau surat kabar, kini ditambah menjadi portal berita *online* yaitu Kompas.com, ePaper Kompas, serta kanal YouTube KompasTV [25].

Dampak dari konvergensi media adalah hanya dengan perangkat ponsel pintar, tablet, komputer, atau laptop berakses internet, berbagai konten yang semula hanya dapat dinikmati di satu media saja kini dapat dengan

mudahnya dinikmati semua. Contohnya, membaca konten surat kabar, majalah, dan buku kini dapat dilakukan semuanya sekaligus di ponsel pintar atau komputer tablet. Begitu juga dengan mendengarkan lagu atau musik, menonton film, dan bermain *game*. Menyimak siaran radio dan tayangan di televisi bahkan juga dapat dilakukan di ponsel pintar atau komputer tablet.

Berbagai *game* klasik seperti Teka-teki Silang (TTS), Tebak Gambar, dan *Block Puzzle* dapat ditemui dengan mudah di ponsel pintar melalui aplikasi yang tersedia. Berbagai film *box office* yang pernah ditayangkan di bioskop Tanah Air juga dapat dinikmati. Selain itu, buku dari berbagai *genre* yang semula hanya bisa didapatkan di toko buku atau perpustakaan, kini dengan mudah bisa didapatkan dan dibaca di ponsel pintar atau komputer tablet. Contohnya buku ber-*genre* biografi, bisnis dan investasi, *genre* kesehatan, pendidikan, serta fiksi.

Buku dengan format digital atau *e-book* kini banyak diproduksi beberapa penerbit besar di Indonesia. Toko buku digital juga bermunculan di Tanah Air, seperti Gramedia.com, Mizanstore.com, Booksandbeyond.co.id, Periplus.com, Grobmart.com, Bookdepository.com, Kinokuniya.co.id, serta Bukabuku.com [26]. Siberkreasi, sebagai gerakan nasional literasi digital yang kerap kali bekerjasama dengan kementerian di Indonesia, juga memiliki situs literasidigital.id, yang isinya berupa sejumlah buku berkonten literasi digital bagi masyarakat Indonesia. Konten buku dalam situs tersebut adalah hasil kerjasama Kominfo, Center for Digital Society (CfDS), ICTwatch, Puskakom UI, dan EcpatIndonesia. Layanan VOD (*Video on Demand*) atau video yang ditayangkan sesuai permintaan juga marak bermunculan. Selain berbagai video yang ada di kanal-kanal YouTube, juga ada di Netflix, Maxstream, Iflix, Vidio, VIU, Disney+, WeTV, HBO GO [27].

Dari konvergensi budaya di Indonesia yang merupakan bagian dari konvergensi

media, terlihat pada semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi “prosumer” atau kreator konten. Para kreator konten di Indonesia tersebut umumnya berasal dari generasi milenial dan generasi *post millennial* atau generasi Z atau generasi internet. Disebutkan dalam McAlister (2009) bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1982-2002. Mereka adalah pengguna ponsel karena ponsel sudah tersedia dan berfungsi lebih dari sekedar alat komunikasi verbal. Perangkat pemutar MP3 juga sudah tersedia pada generasi mereka [28]. Beberapa karakteristik dari generasi milenial adalah sepanjang waktunya sering dihabiskan di depan layar komputer, percaya diri, berorientasi pada prestasi, *multitasker* (karena TV, komputer, MP3, dan ponsel adalah bagian integral dalam kehidupan mereka), serta *TechnoSavvy* yang terus menyerap teknologi terbaru. Generasi internet adalah generasi yang lebih banyak berhubungan atau berinteraksi secara virtual atau *online*. Mereka yang masuk dalam generasi Z, sejak lahir sudah akrab dengan teknologi dan internet, juga *smartphone* atau telepon seluler yang canggih. Generasi Z disebut juga generasi “*born with a chip*” sehingga generasi ini akrab dengan teknologi komunikasi digital seperti perangkat *mobile phone* dan WIFI [29].

Mereka juga *Digital Native* yang sangat melek terhadap teknologi. Prensky menyebutkan bahwa *Digital Native* adalah generasi anak muda yang kerap kali menggunakan teknologi baru seperti internet, *video game*, ponsel pintar, dan “semua mainan dan alat lain di era digital” sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari [30]. Terdapat juga *Digital Childhood* atau anak-anak yang mengalami banyak paparan media baru. Mereka tumbuh dalam lingkungan dengan beragam media dan teknologi [31]. Dengan demikian, konvergensi budaya di Indonesia yang merupakan bagian dari konvergensi media banyak dilakukan oleh generasi milenial yang merupakan *Digital Native* atau *Digital*

*Childhood*. Para kreator konten dan para *subscriber* juga banyak yang berasal dari generasi tersebut.

Konten menjadi hal yang sangat penting diperhatikan dalam konvergensi media. Sebagaimana diketahui, konsumen, khalayak, publik atau *subscriber* membutuhkan media karena mereka ingin mengetahui atau menikmati kontennya. Menurut Jones (2016), konten adalah “*buzzword*.” Konsumen, khalayak, publik atau *subscriber* tidak memperlakukan siapa yang memproduksi atau menghasilkan konten, mereka juga tidak peduli tentang asal-usul konten, tidak peduli pula apakah itu editorial atau iklan dan di mana diproduksinya, yang mereka pedulikan hanyalah kualitas dari konten tersebut atau seperti apa kebermanfaatannya bagi mereka [32]. Menurut Kortum (2004), konten berperan penting dalam penilaian peringkat oleh khalayak. Konten yang diinginkan lebih tinggi oleh khalayak maka peringkat kualitasnya juga lebih tinggi [33].

McLuhan pernah mengatakan, “*Medium is the message*” atau media adalah pesannya. Tanpa adanya konten maka medium atau media tidak akan ada [34]. Lebih jauh McLuhan mengatakan, media tidak akan pernah mati oleh adanya kemunculan dari media lain. Media lama akan bertahan dan akan menjadi bagian atau isi dari media baru. Dengan kata lain, selama konten dalam suatu media lama tetap ada maka konten itu tidak akan hilang. Konten tersebut tetap dapat menjadi bagian dari media baru. Konvergensi media yang memungkinkan pengalihwujudan konten dari media lama ke media baru dapat menjadi solusi dalam pelestarian konten. Konten berkualitas yang sudah ada sejak dahulu kala dan dimuat dalam media lama, tetap akan lestari dan dapat dinikmati oleh khalayak, konsumen, publik, atau *subscriber* dalam media baru.

Di Indonesia, konvergensi media yang dilakukan untuk pelestarian konten banyak dilakukan pada VOD (*Video on Demand*),

seperti di YouTube. Dalam alexa.com disebutkan, YouTube adalah situs web kedua yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. YouTube adalah media komunikasi massa yang paling relevan dalam dekade terakhir. YouTube juga menyimpan catatan terperinci dari semua interaksi dan dapat berbagi kepada pengguna akan beberapa data yang diproduksi secara publik [35].

YouTube dapat dimanfaatkan dengan mudahnya untuk pelestarian konten-konten yang pernah diproduksi pada masa lampau. Misalnya saja film *docudrama* propaganda Indonesia yang fenomenal berjudul *Penumpasan Penghianatan G30S/PKI*. Film yang diproduksi tahun 1984 tersebut tetap dapat disaksikan hingga kini. Generasi yang merupakan *Digital Native* atau *Digital Childhood* di Indonesia, yang belum lahir saat film itu diproduksi dan ditayangkan, kini dapat menyaksikannya dengan mudahnya. Padahal ketika konvergensi media belum terjadi, film tersebut hanya dapat disaksikan setahun sekali di layar televisi setiap tanggal 30 September. Dengan adanya YouTube, film tersebut dapat disaksikan kapan saja dan dimana saja oleh khalayak atau publik tanpa terikat waktu dan tempat.

**Gambar 1.** Film *Penumpasan Penghianatan G30S/PKI* di YouTube



**Sumber:** YouTube

Adapun yang dimaksud dengan *docudrama* adalah sebuah usaha penggabungan model tayangan dokumenter dengan narasi film, yang dapat membentuk kembali bahkan menggantikan dokumenter televisi berisi

sejarah klasik. VOD (*Video on Demand*) seperti YouTube juga memungkinkan para *Digital Native* atau *Digital Childhood* dapat mengetahui berbagai *video game* legendaris. Konten berupa *video game* legendaris anak tahun 1990-an yang dimuat di YouTube contohnya, membuat mereka yang semula tidak mengetahui seperti apa *video game* tersebut dan bagaimana cara memainkannya menjadi tahu. Konten *video game* tidak akan hilang oleh perubahan zaman selama ada media yang dapat memuat atau menampilkannya.

**Gambar 2.** *Video Game* Legendaris Anak di Tahun 1990-an di YouTube



**Sumber:** YouTube

Konten berupa *videoclip* lagu atau musik juga akan terus ada dan dapat dinikmati khalayak atau publik berkat adanya konvergensi media. *Videoclip* berisi lagu-lagu atau musik era lawas yang pernah menjadi *hits* pada masanya dan pernah ditayangkan di stasiun televisi, seperti *videoclip* tahun 1970-an, 1980-an, dan 1990-an masih dapat dinikmati pada masa saat ini. Tanpa adanya VOD (*Video on Demand*) seperti YouTube, konten-konten legendaris tersebut menjadi hilang dan tidak ada lagi yang dapat menikmatinya. Begitu juga dengan konten lainnya seperti tayangan edukasi, *news*, *talkshow*, dan *sports* yang pernah ditayangkan di stasiun televisi.

**Gambar 3.** Serial *Si Unyil* yang Ditayangkan Tiap Hari Minggu, Tahun 1981-1993



**Sumber:** YouTube

Pihak yang mengunggah konten-konten legendaris atau konten *hits* yang pernah tayang di stasiun televisi atau media konvensional lain ke YouTube dapat pihak perseorangan, komunitas, sampai organisasi atau perusahaan. Dengan UGC (*User Generated Content*), konten-konten pada masa saat ini tidak hanya dapat diproduksi atau direproduksi oleh organisasi atau perusahaan media atau oleh pihak-pihak profesional, tapi juga oleh pihak perseorangan seperti individu yang belum profesional.

Namun, karena melakukan pengunggahan atau reproduksi konten-konten ke VOD (*Video on Demand*) seperti YouTube dapat dilakukan dengan mudahnya, kurasi terhadap konten dan regulasi yang jelas diperlukan, sehingga konten yang diunggah atau direproduksi tersebut memang sungguh konten yang berkualitas dan perlu dilestarikan hingga masa mendatang. Selain itu, tidak melanggar hak cipta atau hak karya dari pihak pertama yang membuat konten.

Disebutkan Giaretta (2005), bahwa dalam perkembangan saat ini, dikenal adanya kurasi digital, yaitu sebuah tindakan untuk melestarikan konten atau bahan digital dari masa ke masa untuk generasi sekarang maupun akan datang [36]. Dengan adanya kurasi digital, konten-konten yang pernah dibuat atau diproduksi sebelumnya terselamatkan eksistensinya. Konten-konten tersebut dapat terus diperbincangkan dan diingat, sehingga

terus dicari dan ingin banyak dinikmati masyarakat.

Para *scholar* yang mengkaji memori menekankan pentingnya media dalam membentuk memori kolektif. Pada tingkat individu, paparan media dapat meningkatkan memori individu. Kejadian-kejadian atau hal-hal penting dapat masuk ke dalam ingatan individu melalui paparan media. Demikian juga pada tingkatan yang lebih luas, yaitu tingkatan publik [37]. Implikasi dari hal tersebut adalah berbagai konten yang ada di media, baik yang ada di buku, surat kabar, majalah, terlebih lagi televisi, dapat membentuk memori kolektif. Ketika dilakukan konvergensi pada konten-konten tersebut ke VOD (*Video on Demand*) seperti YouTube, akan memunculkan memori kolektif pula.

Berbagai konten di YouTube yang merupakan hasil konvergensi dari media-media konvensional, dapat menjadi memori kolektif jika terus diperbincangkan dan dinikmati. Bahkan, media baru seperti YouTube dapat menjadi museum atau “rumah” bagi konten-konten lama yang pernah dimuat di media konvensional. Disebutkan dalam Proctor (2010), *platform* digital merupakan “museum” pada masa sekarang. *Platform* adalah media di mana informasi atau konten dimunculkan atau dipertukarkan. Membuka atau memasuki *platform* digital, seperti halnya mengunjungi pameran atau eksepsi. Dalam hal ini ada kurator digital sebagai moderator dan fasilitator tentang obyek, topik, atau konten digital yang akan dimasukkan ke “museum” [38].

Konten berupa lagu atau musik juga dapat disimpan di “museum” seperti Spotify. Di “museum” tersebut masyarakat dapat mengatur sendiri tentang lagu atau musik mana saja yang akan mereka miliki dan dengarkan. Dalam Spivack et al. (2019) disebutkan bahwa lagu-lagu yang diingat adalah kebanyakan telah disimpan di Spotify. Dengan *platform* tersebut, membuat banyak pendengar yang sebagian besar adalah generasi milenial dan generasi *post millennial* dapat mengingatnya. Termasuk dapat

mengingat lagu-lagu lawas yang populer pada masa tahun 1940-an atau 1950-an [39]. Dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia, jika konten-konten media konvensional banyak yang dimasukkan ke *platform* digital seperti YouTube maka akan membuat konten-konten tersebut menjadi memori kolektif. Hal ini dapat dicontohkan dalam film *3 Dara*, sebuah film yang tayangan perdananya diadakan pada 1957 di Capitol Theatre, Jakarta. Berdasarkan informasi dari Cinemapoetica, film ini meraih banyak prestasi, di antaranya pernah diputar di Festival Film Venesia pada tahun 1959 serta memperoleh penghargaan Tata Musik Terbaik pada FFI (Festival Film Indonesia) tahun 1960.

Film karya Usmar Ismail tersebut mendapat kesempatan direstorasi, lalu ditayangkan di bioskop Tanah Air dan kemudian dapat ditemui *trailer*-nya di YouTube sehingga dapat dinikmati pada masa kini. Film lawas tersebut menjadi memori kolektif masyarakat Indonesia. Mereka yang pernah menonton film tersebut pada masa lampau dapat bernostalgia pada masa sekarang dengan menonton film itu kembali. Sementara mereka yang belum pernah menontonnya, karena belum lahir pada masa itu, tertarik untuk menonton karena film tersebut menjadi perbincangan di masyarakat.

Demikian juga halnya dengan lagu-lagu atau musik yang menjadi tembang kenangan di Tanah Air. Generasi milenial dan *post millennial* yang semula tidak mengetahui nama-nama besar penyanyi atau musisi pada masa dulu, misalnya Chrisye dan Fariz RM, menjadi tahu ketika karya-karya mereka dimasukkan dalam konten di YouTube atau Spotify. Hal tersebut akan menimbulkan memori kolektif bagi generasi milenial dan *post millennial*, juga memori kolektif bagi generasi-generasi sebelumnya yang pernah mendengarkan lagu-lagu atau musik tersebut.

Tayangan *news*, pertandingan olahraga, atau *talkshow* di stasiun-stasiun televisi juga dapat di-*recall* untuk disaksikan masyarakat Indonesia berkat *platform* VOD (Video on

Demand) seperti YouTube. Beberapa stasiun televisi, seperti TVRI Nasional, RCTI, tvOne, NET, dan MetroTV juga memiliki konten di YouTube. Dengan konten berupa *news*, pertandingan olahraga, atau *talkshow* tersebut, khalayak atau publik yang belum sempat menonton, atau kembali ingin menonton, dapat menontonnya di YouTube bahkan dapat hingga berkali-kali di mana saja dan kapan saja, berkat konvergensi media. Apa yang ditonton, jika sering diperbincangkan ataupun dipaparkan, dapat menjadi memori kolektif bagi masyarakat Indonesia.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Media berperan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Media dapat membentuk individu, juga dapat membentuk masyarakat. Terjadinya konvergensi media, yang berarti terjadinya pengintegrasian berbagai media, berimplikasi besar pada gaya hidup masyarakat. Konten-konten yang ada dapat menjadi memori kolektif jika banyak dipaparkan oleh media dan sering diperbincangkan di masyarakat. Media baru seperti VOD (*Video on Demand*) memungkinkan hal itu terjadi karena konten di *platform* tersebut dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan waktu dan ruang.

Diperlukan pelestarian konten atau kurasi digital agar konten-konten tersebut tidak hilang. Terlebih, konten-konten yang legendaris dan *hits* pada masanya. Berbagai pihak, seperti individu atau perseorangan, komunitas, organisasi, perusahaan atau industri media dapat membuat konten tetap lestari dengan terus mengunggah konten-konten tersebut ke *platform* digital. Namun, dibutuhkan regulasi dan kurasi konten agar konten-konten yang diunggah ke *platform* digital adalah memang yang berkualitas sehingga perlu dilestarikan atau dijaga keeksistensiannya.

Generasi milenial dan *post millennial* sebagai *Digital Native* atau *Digital Childhood* dapat ikut aktif berperan dalam usaha tersebut. Sebab, para kreator konten atau prosumer adalah mayoritas berasal dari generasi ini. Konten-konten yang dibuat atau diproduksi atau direproduksi hendaknya tidak hanya mementingkan kepopuleran semata. Namun, juga mementingkan kualitas, sehingga konten-konten tersebut dapat menjadi memori kolektif yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Konten-konten yang khas Indonesia atau menampilkan budaya lokal, dapat terus dibuat atau diproduksi. Contohnya, konten yang menampilkan cerita rakyat, pertunjukan wayang, pertunjukan gamelan, atau permainan tradisional Indonesia. Konten-konten tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan ke-Indonesian pada masyarakat sekaligus melestarikan budaya bangsa. Jika masyarakat Indonesia banyak terpapar media dengan konten-konten seperti itu, memori kolektif masyarakat Indonesia akan didominasi hal-hal yang khas Indonesia. Memori tersebut dapat menambah kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Tanah Air. Bukan sebaliknya, lebih cinta terhadap budaya asing karena dewasa ini seringkali terpapar konten-konten seperti itu yang merupakan dampak dari globalisasi atau konvergensi global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bryan, Stephen, *The Story of the Internet*, 2001. UK: Pearson Education.
- [2] Croteau, David, & Hoynes, William. *Media/Society*, 2014 UK: SAGE Publications, Inc.
- [3] Jenkins, Henry. "Convergence? I Diverge," 2001. *Digit. Renaiss. Technol. Rev.*, p. 93.
- [4] Meikle, Graham Sherman Young. *Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life*, 2012. UK, US: PALGRAVE MACMILLAN.
- [5] Fiddler, Roger. *Mediamorfosis*, 2003. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- [6] Jenkins, Henry, Deuze, Mark. "Convergence Culture," 2008. *Converg. Int. J. Res. into New Media Technol.*
- [7] Cha, Meeyoung, Kwak, Hawoon, Rodriquez, Pablo, Ahn, Yong-Yeol, & Moon, Sue. "I Tube, You TUBE, Every Day Tubes: Analyzing The World's Largest User Generated Content Video System," 2007. *IMC'07 Proceedings of the 7th ACM SIGCOMM Conference on Internet Measurement*, pp. 1-14.
- [8] Dijck, Jose Van. "Users Like You? Theorizing Agency in User-Generated Content," 2009. *Media, Cult. Soc.*, vol. 31 (1), pp. 41-58.
- [9] Long, Paul, & Wall, Tim. *Media Studies: Texts, Production, Context*, 2012. Second Edi. New York, USA: Pearson Education Limited.
- [10] Tremblay, Gaetan. "From Marshall McLuhan to Harold Innis, or From the Global Village to the World Empire," 2012. *Can. J. Communication*, vol. 37 (4), pp. 561-575.
- [11] Straubhaar, Joseph, Larose, Robert Larose, & Davenport, Lucinda. *Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology*, 2012. Boston, USA: Wadsworth Cengage Learning.
- [12] Keh, Hean Tat. "Evolution of the Book Publishing Industry: Structural Changes and Strategic Implications," 1998. *J. Manag. Hist.*, vol. Vol 4 No.2, pp. 104-123.
- [13] Leurdijk, Andra, Slot, Mijke, Nieuwenhuis, Otlie. *The Newspaper Publishing Industry*, 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- [14] Das, Simon, "Magazine Publishing Innovation: Two Case Studies on Managing Creativity," 2016, *MDPI Publ.*, vol. Vol 4 No.1, pp. 1-12.
- [15] Neill, Brian O, "Digital Radio Policy in Canada: From Analog Replacement to Multimedia Convergence," 2008. *J.*

- Radio Audio Media*, vol. Vol 15 (1), pp. 26–40.
- [16] Hull, Geoffrey P., Hutchison, Thomas William, & Strasser, Richard. *The Music Business and Recording Industry: Delivering Music, 2010. The 21st Century*, Third Edit. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group.
- [17] Basin, Ken. *The Business of Television*, 2019. New York: Routledge-A Focal Press Book.
- [18] Williams, Dmitri. “Structure and Competition in the US Home Video Game Industry,” 2009. *Int. J. Media Manag.*, no. 28 May, pp. 41–54.
- [19] Wattimena, Reza A.A. “Teori Ingatan Kolektif,” 2012. Unika Widya Mandala Surabaya.
- [20] Erll, Astrid, & Nunning, Ansgar, Ed., *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*, 2008. Berlin, Germany: Deutsche Nationbibliothek.
- [21] Ebbrecht, Tobias, “HISTORY , PUBLIC MEMORY AND MEDIA EVENT HISTORY , PUBLIC MEMORY AND MEDIA EVENT, 2007. Codes and conventions of historical event-television in Germany,” vol. 8804.
- [22] Wolverhampton University. “Guide To Writing a Literature Review,” *Ski Learn.*, 2018. March, pp. 1–2.
- [23] Frederiksen, Linda, Phelps, Sue F., & Kimmons, Royce. “Introduction to Literature Reviews,” 2018. EdTech Books.
- [24] Snyder, Hannah. “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines,” 2019. *J. Bus. Res.*, vol. 104, pp. 333–339.
- [25] “Konvergensi Media: Pengertian dan Dampaknya.” 2021, Kompas.com.
- [26] “8 Situs Belanja Toko Buku Online Terpercaya di Indonesia.” 2021.
- [27] Aksara, Dika. “10 Aplikasi Video Streaming Terbaik 2021: Fitur dan Biaya.” 2021.
- [28] McAlister, Andrea, “Teaching the Millennial Generation,” 2009. *Am. Music Teach.*, vol. Vol 59, no. Iss 1, pp. 13–15.
- [29] Berk, Ronald A. “Teaching Strategies for the Net Generation,” 2009. *Teach. Learn. J.*, vol. Vol 3, no. Issue 2.
- [30] Selwyn, Neil. “The Digital Native-Myth and Reality,” 2009. *Aslib Proceedings Vol.61 Issue 4.*, pp. 364–379.
- [31] Vandewater, E, et al. “Digital Childhood,” 2007. *Pediatrics*, vol. Vol 119 No, pp. 1006–15.
- [32] Jones, Dylan. “Why Content Must be King,” 2016. *Br. Journal. Rev.*, vol. Vol 27, no. Issue 4, pp. 47–52.
- [33] Kortum, Philip, & Sullivan, Marc. “Content is King: The Effect of Content on the Perception of Video Quality,” 2004. *Proceedings of The Human Factors and Ergonomics Society 48th Annual Meeting*, pp. 1910–1914.
- [34] Levinson, Paul. *Digital McLuhan: A Guide to the Information Millennium*. 1999. London and New York: Routledge.
- [35] Bartl, Mathias. “YouTube channels , uploads and views : A statistical analysis of the past 10 years,” 2018. Vol. 24, no. 1, pp. 16–32.
- [36] Bakry, Anjas Alifah. “Kurasi Digital untuk Pengarsipan Digital,” 2016. *J. Ilmu Perpust. Informasi, Progr. Stud. Ilmu Perpustakaan, Fak. Ilmu Sos. Univ. Islam Negeri Sumatera Utara*, vol. Vol 1 No.1, pp. 1–9.
- [37] Kligler, Neta, Tsfati, Yarif, & Oren Meyers, “Setting The Collective Memory Agenda: Examining Mainstream Media Influence on Individual’s Perceptions of the Past,” 2014. *Mem. Stud. Assoc.*, vol. Vol 7, no. 4, pp. 484–499.
- [38] Proctor, Nancy. “Digital: Museum as Platform, Curator as Champion, in the

- 
- Age of Social Media,” 2010. *Curator*, vol. Volume 53/, January.
- [39] Spivack, Stephen, et al. “Who Remebers the Beatles? The Collective Memory for Popular Music,” 2019. *PLoS One*, no. 6 February.

---

**ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI SEDOTAN BAMBUSUKASARI KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT**

Oleh  
**Amelia R Alamanda**  
Universitas Padjadjaran, Indonesia  
E-mail: [rizky.alamanda@unpad.ac.id](mailto:rizky.alamanda@unpad.ac.id)

**Abstrak**

Salah satu produk plastik yang sering digunakan masyarakat adalah sedotan plastik. Harganya yang murah dan penggunaannya yang sekali pakai tentu memudahkan industri, terutama yang bergerak dalam bidang kuliner. Namun, Divers Clean Indonesia, sebuah pemerhati lingkungan menyatakan penggunaan sedotan plastik di Indonesia mencapai 93.244.847 batang setiap harinya. Jumlah tersebut jika dijabarkan garis lurus setara dengan jarak antara Indonesia – Mexico. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pembuatan sedotan bambu di Desa Sukasari masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Seperti digambarkan dalam tabel 2 bahwa komponen biaya terbesar dari masing-masing jenis produksi didominasi oleh Biaya Bahan Baku sebesar 49.4% dan 65.1% kemudian biaya tenaga kerja sebesar 49.9% dan 34.3% lalu terakhir biaya overhead sebesar 0.7% dan 0.6%.  
**Kata Kunci: Harga Pokok, Produksi, Sedotan Bambu, Desa Sukasari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat**

**PENDAHULUAN**

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tanpa plastik di Jawa Barat, masyarakat Desa Sukasari mengembangkan sedotan bambu sebagai pengganti sedotan plastik yang sulit terurai. Pengembangan produk sedotan bambu ini juga merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukasari yang sebelumnya hanya memproduksi anyaman-anyaman saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harga pokok produksi sedotan bambu. Data primer dikumpulkan dari satu rumah tangga produsen sedotan bambu dan dilengkapi dengan data sekunder lainnya. Penelitian ini juga menyajikan gambaran-gambaran analisis harga pokok produksi yang memiliki *competitive advantage* dibandingkan dengan produk-produk sedotan bambu lainnya.

**Masalah**

Produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 175.000 ton setiap harinya. Dalam jumlah tersebut, dalam satu tahun Indonesia dapat menghasilkan sampah plastik hingga 63,9

juta ton. Indonesia bahkan menduduki urutan ke-2 sebagai penyumbang sampah plastik di dunia setelah Tiongkok yang mencapai 187,2 ton. Berbeda dengan sampah organik, sampah plastik merupakan sampah yang sulit didaur ulang. Pasalnya, di Indonesia, pengelolaan sampah plastik sangat minim. Masyarakat memiliki kesadaran yang rendah untuk tidak menggunakan plastik dalam menunjang keperluan sehari-hari. Menurut data Sustainable Waste Indonesia, kurang dari 10% sampah plastik didaur ulang dan 50% berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). SWI juga menambahkan bahwa terdapat 380 TPA di Indonesia yang memiliki 8.200 hektar dan akan penuh oleh sampah. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2019, dalam lima tahun ke depan konsumsi plastik akan naik dari 17 – 23 ton menjadi 25 – 49 kilogram per kapita per tahun.

Salah satu produk plastik yang sering digunakan masyarakat adalah sedotan plastik. Harganya yang murah dan penggunaannya yang sekali pakai tentu memudahkan industri,

terutama yang bergerak dalam bidang kuliner. Namun, Divers Clean Indonesia, sebuah pemerhati lingkungan menyatakan penggunaan sedotan plastik di Indonesia mencapai 93.244.847 batang setiap harinya. Jumlah tersebut jika dijabarkan garis lurus setara dengan jarak antara Indonesia – Mexico.

Plastik diangkut dari daerah berpenduduk ke lingkungan laut melalui sungai, angin, pasang surut, air hujan, saluran pembuangan, pembuangan limbah, dan bahkan peristiwa banjir. Ia juga dapat mencapai laut dari kapal (mis. Alat tangkap) dan instalasi lepas pantai. Begitu berada di lautan, mereka akan mengapung di permukaan laut, atau tenggelam ke dasar laut jika terbuat dari polimer yang lebih padat daripada air laut. Plastik yang mengapung dapat dibuang ke darat oleh arus atau angin di darat, atau dapat memasuki lautan terbuka, di mana mereka cenderung terakumulasi di zona konvergensi seperti yang terbentuk oleh lima pilin berskala besar (Pasifik Selatan dan Utara, Pasifik Selatan dan Selatan). Atlantik Utara, dan India. Plastik laut diketahui mengalami fragmentasi menjadi potongan-potongan yang semakin kecil oleh proses fotokimia, mekanik dan biologis. Plastik juga secara langsung diproduksi dalam ukuran kecil (<5mm), yang dapat menemukan jalan mereka ke lautan. Ini termasuk pelet plastik perawan (pelletwatch.org), serat sintetis dari pakaian, manik-manik mikro dari kosmetik, dan media sintetis 'sandblasting'. Ada peningkatan kesadaran bahwa partikel-partikel plastik kecil ini (sering disebut mikroplastik ketika lebih kecil dari 5 mm mewakili proporsi signifikan dari puing-puing buatan manusia yang ada di lautan. Namun, dinamika spasial dan temporal di laut mereka masih dinilai buruk, sebagian besar karena kurangnya data tentang karakteristik mereka dan kejadian di laut. Dampak plastik pada vertebrata laut, seperti kura-kura, mamalia dan burung, telah dikenal dengan baik sejak tahun 80-an. Namun, baru-baru ini saja muncul kekhawatiran tentang efek

partikel plastik kecil pada jaring makanan dan ekosistem laut. Lebih dari setengah plastik modern mengandung setidaknya satu bahan berbahaya dan bahan-bahan yang berakumulasi dalam sistem akuatik dapat menjadi semakin beracun dengan menyerap polutan organik yang persisten di permukaannya. Racun-racun terkonsentrasi ini kemudian dapat dikirim ke hewan melalui konsumsi plastik dan / atau endositosis dan dipindahkan ke jaring makanan mereka. Proses bio-perbesaran ini lebih mungkin terjadi ketika plastik cukup kecil untuk dicerna oleh organisme yang dekat dengan dasar jaring makanan laut, seperti ikan planktivorous dan zooplankton.

Untuk menggantikan sedotan berbahan plastik terdapat beberapa penelitian yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti bahan baku sagu dan ubi (Kamsiati, 2017), bonggol pisang kapok dan cangkang bekicot (Nafiyanto, 2019). Di negara lain pun pembuatan sedotan berbahan alami sudah mulai digencarkan seperti bahan baku daun kelapa (Filipina), jerami (Australia), batang papaya (Yogyakarta), batang kangkong (Bali), serta rumput liar *Lepironia Articulata* (Vietnam). Ada juga pemanfaatan sedotan plastik menjadi produk kreatif seperti patung binatang dan *lifestyle board* yang dibuat oleh Arico dan Sri Jayanthi tahun 2017. Terdapat juga produk aksesoris wanita seperti yang dilakukan oleh Inayati T (2017) dan Wibowo dan Dewi (2019) pada aksesoris fesyen. Inayati, T. (2017). Penilaian produk aksesoris kalung wanita dari daur ulang sedotan plastik bekas.

Salah satu bahan alami dan ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk membuat sedotan adalah bahan bambu. Sebagai penghasil bambu terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki kesempatan yang tinggi untuk mengurangi jumlah sampah sedotan plastik dengan memproduksi sedotan bambu. Bambu termasuk tumbuhan yang mudah ditemukan di daerah manapun. Selama ini pemanfaatan bahan bambu biasanya berupa

produk-produk kreatif seperti lampu, kursi hingga meja.

Masyarakat Desa Sukasari yang berprofesi sebagai petani selama ini memanfaatkan bahan baku bambu hanya sebatas untuk membuat *boboko* yang memiliki nilai jual yang rendah. Potensi bambu yang ada di Desa Sukasari dapat dimanfaatkan untuk memproduksi sedotan bambu yang memiliki *competitive advantage* yang lebih mumpuni dibandingkan hanya memproduksi *boboko*. Pembuatan sedotan bambu ini masih tahap inisiasi yang diproduksi oleh 1 rumah tangga dan baru saja dimulai ketika pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat serta menggunakan peralatan yang sederhana.

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis harga pokok produksi sedotan bambu dan memberikan gambaran harga jual mengenai pengembangan produk sedotan bambu di Desa Sukasari. Hasil penelitian ini dapat membantu industri rumah tangga di Desa Sukasari dalam memproduksi sedotan bambu tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi atau peristiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun gambaran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta berbagai hubungan berbagai fenomena yang diteliti (Nazir, 2000). Jadi peneliti akan melakukan observasi lalu mendeskripsikan hasil observasi tersebut. Penelitian yang menggunakan metode ini bermaksud untuk mengukur dengan cermat suatu fenomena sosial tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Produksi sedotan ini dilakukan oleh salah satu anggota BUMDes Sukasari yang berjumlah 1 rumah tangga. Penelitian dilakukan selama dua bulan yaitu Januari – Februari 2020. Penelitian

ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden dan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini ada dua hal yang akan dihitung oleh peneliti yaitu (1) Harga Pokok Produksi dan (2) Harga Jual.

### (1) Harga Pokok Produksi

Ada beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam menghitung Harga Pokok Produksi antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Harga Pokok Produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi siap pakai dengan menggabungkan seluruh elemen biaya produksi baik tetap maupun variabel. Dalam penelitian ini HPP dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, untuk membayar tenaga kerja dan biaya overhead yang terkait produksi, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{HPP} = \text{Biaya Bahan Baku} + \text{Biaya Tenaga Kerja} + \text{Biaya Overhead}$$

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku meliputi pembelian untuk bahan baku utama maupun bahan baku penolong. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar penggunaan tenaga kerja dalam rangka mengolah bahan baku. Sementara biaya overhead merupakan biaya pendukung atas penggunaan aset tetap dalam proses produksi.

### (2) Harga Jual

Harga jual merupakan dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan suatu produk atau suatu jasa tersebut (Kotler dan Keller, 2009). Harga jual merupakan harga pokok produksi ditambahkan dengan *profit*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### (1) Harga Pokok Produksi

Berdasarkan hasil observasi di tempat produksi sedotan bambu, diketahui bahwa sedotan bambu dapat dijual satuan dan dijual per 50 pcs. Harga Pokok Produksi untuk setiap satu buah sedotan bambu adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Harga Pokok Produksi Sedotan Bambu Desa Sukasari**

No	Nama Bahan	Biaya Per Buah	Biaya Per Buah (Kemasan 50 Buah)
<b>BIAYA BAHAN BAKU</b>			
1.	Batang Bambu	50	50
2.	Disinfektan	50	50
3.	Amplas	18	18
4.	Cutter	50	50
5.	Gas dan Air	50	50
6.	Kemasan		200
<b>TOTAL BIAYA BAHAN BAKU</b>		<b>218</b>	<b>418</b>
<b>BIAYA TENAGA KERJA</b>			
1.	Upah Pemotongan	60	60
2.	Upah Pengamplasan dan Perebusan	100	100
3.	Upah Pengemasan	60	60
<b>TOTAL BIAYA TENAGA KERJA</b>		<b>220</b>	<b>220</b>
<b>BIAYA OVERHEAD</b>			
1.	Panci	1.2	1.2
2.	Kompor	0.5	0.5
3.	Alat Pemotongan Bambu	1.5	1.5
<b>TOTAL BIAYA OVERHEAD</b>		<b>3.2</b>	<b>3.2</b>
<b>BIAYA PER BUAH</b>		<b>441.2</b>	<b>641.2</b>

**Sumber :** Data Primer

Berdasarkan Tabel 1 terdapat perbedaan harga sebesar Rp 200 dikarenakan sedotan yang dijual per 50 pcs harus menggunakan kemasan. Presentase biaya dari setiap komponen dijabarkan sebagai berikut : **Tabel 2. Presentase Komponen Biaya Sedotan Bambu Desa Sukasari**

No	Komponen Biaya	Presentase	
		Biaya Per Buah (Satuan)	Biaya Per Buah (Kemasan 50 Buah)
1.	Biaya Bahan Baku	49.4%	65.1%
2.	Biaya Tenaga Kerja	49.9%	34.3%
3.	Biaya Overhead	0.7%	0.6%

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pembuatan sedotan bambu di Desa Sukasari masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Seperti digambarkan dalam tabel 2 bahwa komponen biaya terbesar dari masing-masing jenis produksi didominasi oleh Biaya Bahan Baku sebesar 49.4% dan 65.1% kemudian biaya tenaga kerja sebesar 49.9% dan 34.3% lalu terakhir biaya overhead sebesar 0.7% dan 0.6%.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pembuatan sedotan bambu di Desa Sukasari masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Seperti digambarkan dalam tabel 2 bahwa komponen biaya terbesar dari masing-masing jenis produksi didominasi oleh Biaya Bahan Baku sebesar 49.4% dan 65.1% kemudian biaya tenaga kerja sebesar 49.9% dan 34.3% lalu terakhir biaya overhead sebesar 0.7% dan 0.6%.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi, M., & Wibowo, M. (2019). Eksplorasi Produk Interior Dari Material Plastik Daur Ulang dan Sisa Serbuk Kayu. *Intra*, 7(2), 522-530.
- [2] Reisser, J., Shaw, J., Wilcox, C., Hardesty, B. D., Proietti, M., Thums, M., & Pattiaratchi, C. (2013). Marine plastic pollution in waters around Australia: characteristics, concentrations, and pathways. *PloS one*, 8(11)

PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA PARTISIPATIF BERBASIS  
MASYARAKAT DI DESA WISATA LALANG, KECAMATAN MANGGAR  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Oleh

Wahyuni Pratiwi Ningsih<sup>1)</sup>, Edwin Rizal<sup>2)</sup>, Ute Lies Siti Khadijah<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Pariwisata Berkelanjutan, Sekolah Pascasarjana Universitas  
Padjajaran

<sup>2,3</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Padjajaran,  
Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung Jawa Barat 40133

E-mail: <sup>1</sup>[wahyuni20001@mail.unpad.ac.id](mailto:wahyuni20001@mail.unpad.ac.id), <sup>2</sup>[edwin.rizal@unpad.ac.id](mailto:edwin.rizal@unpad.ac.id),  
<sup>3</sup>[ute.lies@unpad.ac.id](mailto:ute.lies@unpad.ac.id)

**Abstract**

A village is said to be advanced, which is inseparable from the characteristics of its local wisdom, people who help each other and support each other in completing a job or in other words, mutual cooperation. Community involvement in the process of tourism development as a process of change is interrelated and cannot be separated, this is of course the main capital in carrying out development in villages to compete in tourism. In the process of tourism development, local communities must participate in all stages starting from the planning stage implementation to the supervision stage. The purpose of this study was to see the extent to which local communities are involved and participate in the process of developing tourism potential in Lalang Tourism Village, Manggar District, East Belitung Regency. This research uses qualitative descriptive methods, data collection through interviews, field observation using several stages, namely; (a) identification of problems in the development of Lalang Tourism Village, (b) mapping of the potential of Lalang Tourism village, and (c) identification of institutional potential in Lalang Tourism Village.

**Keywords: Tourism Development; Community Participation; Tourism Village; Lalang Village**

**PENDAHULUAN**

Secara administratif Desa Lalang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Manggar, kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan status tingkat perkembangan desa wisatanya adalah berkembang. Wilayah Desa Lalang memiliki batas-batas dengan wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Desa Kurnia Jaya, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekar Jaya. Secara demografi masyarakat Desa Lalang merupakan desa yang mempunyai akulturasi yang berbeda dengan desa lain di Kecamatan Manggar yaitu merupakan desa yang

berbatasan langsung dengan ibukota kabupaten, namun masyarakat setempat tetap mempertahankan kearifan lokal yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu dapat dibuktikan dari semangat gotong-royong masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Lalang. Luas wilayah Desa Lalang adalah 18.780,22 Ha, yang terdiri dari 8 dusun yaitu Dusun Sekip, Dusun Terang Bulan, Dusun Samak, Dusun Kartini, Dusun Durian, Dusun Ban Motor dan Dusun Taruna Mulya.

Keterlibatan *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengembangan desa wisata melibatkan masyarakat sebagai pelaksana utama dalam pengelolaannya, Pemerintah dan pihak swasta hanya sebagai pendukung dalam

mensupport fasilitas sarana dan prasarana (Raharjana, 2012). Konsep *Community Based Tourism* (CBT) merupakan gagasan utama dalam konstruksi pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan masyarakat lokal (Sugi Rahayu et al., 2015). Desa Lalang merupakan salah satu destinasi desa wisata berkembang yang juga dikelola oleh masyarakat lokal secara mandiri melalui Pokdarwis (Kelompok sadar wisata). Adanya Pokdarwis di Desa Lalang yang mereka namai “Pokdarwis Kelekak Nyiur” menunjukkan bahwa Desa wisata tersebut menerapkan konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengelolaan pariwisatanya. Dalam pengembangannya Desa wisata dikatakan berhasil dilihat dari keterlibatan dan antusias masyarakat lokal (Wearing, S.L. and Donald, 2001) Desa Lalang memiliki banyak sekali potensi wisata yang cukup unik selain wisata pantainya yang sangat cantik, salah satunya adalah Bukit Samak, Bukit Samak yang berada di Desa Lalang merupakan saksi peninggalan sejarah kejayaan PT. TIMAH dimana dulunya terdapat mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terbesar se-Asia Tenggara dan menjadi kawasan elit perumahan para pejabat-pejabat PT.TIMAH pada zamannya dengan arsitektur bangunan rumah khas negara Belanda. Posisi Bukit Samak yang berhadapan langsung dengan pantai-pantai yang indah menjadikan Bukit Samak memiliki daya tarik yang unik bagi wisatawan, hal inilah yang menjadikan alasan kuat Pokdarwis Kelekak Nyiur melakukan pendekatan kepada Pihak swasta dalam hal ini PT.TIMAH, Tbk untuk menjadikan Bukit Samak sebagai tempat wisata sejarah dan edukasi karena status lahan masih merupakan milik perusahaan PT.TIMAH,Tbk. Status lahan merupakan salah satu hal yang cukup menghambat perkembangan wisata di hampir seluruh kawasan wisata yang berpotensi di Kabupaten Belitong Timur. Gedung-gedung berarsitektur khas negara Belanda yang banyak terdapat di Bukit Samak Desa Lalang berpotensi sebagai *heritage tourism* dan

*eduhistorical tourism* karena memiliki peninggalan-peninggalan sejarah kejayaan Timah di Pulau Belitong. Dengan potensi tersebut masyarakat yang terbentuk dalam Pokdarwis yaitu Pokdarwis Kelekak Nyiur telah merintis pembuatan Galeri Sejarah Kejayaan Timah Belitong yang berlokasi di Pantai Nyiur Melambai dengan menampilkan bukti-bukti sejarah yaitu berupa foto-foto kejayaan Timah di Pulau Belitong. Pengunjung yang masuk akan dipandu langsung oleh Pokdarwis Kelekak Nyiur. Respon wisatawan yang berkunjung cukup bagus sehingga Pokdarwis Kelekak Nyiur berupaya mengembangkan galeri tersebut menjadi *eduhistorical tourism*. Keterlibatan masyarakat secara langsung dan aktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam segi pemberdayaan, peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat lokal, karena semakin aktif masyarakat terlibat dalam pengembangan pariwisata didaerahnya maka akan meningkat pula pendapatan masyarakatnya (Lutpi, 2016). Selain *eduhistorical tourism* sebagian warga Desa Lalang mulai berpikir bagaimana berinovasi untuk mengembangkan pariwisata di desanya khususnya pada bidang jasa, seperti menyiapkan kamar atau hunian untuk disewakan kepada wisatawan sebagai rumah inap sementara atau yang lebih dikenal penyebutannya dengan istilah *homestay* dimana dalam pengelolaannya dibantu dan dibina oleh Pokdarwis Kelekak Nyiur. Pengembangan kawasan wisata banyak sekali memberikan manfaat tidak hanya bagi pelestarian objek wisata, pelestarian alam tapi juga perubahan ekonomi menuju ekonomi berbasis jasa.

Munculnya perkembangan pariwisata alternatif yang dipandang lebih menghargai lingkungan dan juga kebudayaan lokal diartikan juga sebagai pariwisata yang memperhatikan kemanfaatan sumberdaya alam yang ada saat ini untuk dapat juga dimanfaatkan oleh generasi mendatang, seperti pariwisata berkelanjutan, wisata hijau yang lebih ramah

terhadap lingkungan dan lain-lain. Tujuannya untuk memberikan peningkatan dalam pelayanan serta mengimplementasikan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pengembangan pariwisata di desanya. Pada dasarnya tujuan pemerintah dalam mendukung pengembangan pariwisata adalah untuk kesejahteraan rakyat, namun pemerintah hanya sebagai fasilitator, hakikatnya desa wisata seharusnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal itu sendiri (Dewi, 2013). Proses tumbuh kembangnya desa wisata itu tergantung kepada masyarakatnya (Blackstock, 2005). Contoh bentuk keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam pengembangan desa wisata salah satunya adalah dilihat dari bagaimana penyediaan akomodasi berupa rumah inap sementara (*homestay*) yang disediakan oleh penduduk setempat, sarana dan prasarana pendukung, rumah makan atau warung-warung untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, transportasi yang layak dan mudah didapat, pemandu wisata, pertunjukan kesenian khas daerah, budaya lokal dan lain-lain. Kerjasama dalam Pengembangan desa wisata yang berkaitan langsung dengan jasa pelayanan membutuhkan sinergitas yang baik dari penyelenggara pariwisata yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Daerah pedesaan yang memiliki daya tarik alam yang masih alami dengan kearifan lokal penduduk yang khas akan menawarkan pengalaman wisata yang unik bagi wisatawan. Keunikan yang ditawarkan tersebut mendukung berkembangnya pariwisata minat khusus yang lebih dikenal dengan pariwisata pedesaan atau *Rular Tourism*.

## PEMBAHASAN

Keterlibatan masyarakat, peran serta pemerintah dan dukungan dari pihak swasta merupakan kolaborasi yang paling seimbang dalam pengembangan desa wisata serta berfungsi sebagai kontrol dan pengawasan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah agar terjadi sinergitas antara

masyarakat lokal, pemerintah dan dukungan pihak swasta sebagai investor (Raharjana, 2012). Pengembangan desa wisata juga harus memiliki perencanaan yang matang dan terstruktur sehingga menghasilkan objek wisata yang memiliki daya tarik yang unik dan memberikan kepuasan berwisata. Segenap program yang dijalani oleh masyarakat Desa Lalang sudah melalui tahapan perencanaan yang matang melalui metode partisipatif yang dilaksanakan masyarakat secara penuh dari proses perencanaan dimulai dari mengenal potensi wisata yang ada di desa terlebih dahulu sampai mencari solusi dari segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Partisipasi bisa dimaknai sebagai keterlibatan dalam suatu kegiatan baik itu dalam bentuk ide-ide pernyataan maupun langsung terlibat dalam kegiatannya (Meray et al., 2016). Metode ini diharapkan bersifat berkelanjutan secara terus menerus karena dengan melibatkan masyarakat dan kelembagaan pariwisata dalam perencanaannya diharapkan masyarakat ikut merasa memiliki dengan bertanggungjawab terhadap keberlangsungan wisata di desanya sehingga memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan dan gagasan dalam perencanaan merupakan makna dalam perencanaan partisipatif.

Melalui riset aksi ini masyarakat Desa Lalang dilibatkan dalam perencanaan yang partisipatif dimana ada tahapan-tahapannya yaitu; (a) pemetaan partisipatif (*participatory mapping*) dan (b) hubungan kelembagaan. Pada tahapan pertama untuk memperoleh hasil maaping yang meliputi: (i) identifikasi masalah, (ii) identifikasi potensi pengembangan sumberdaya, serta (iii) identifikasi potensi pariwisata (Raharjana, 2012). Tahapan-tahapan tersebut diterapkan dengan metode *focus group discussion* (FGD) yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yaitu pelaku wisata, Pokdarwis, Kepala Desa,

dan Tokoh Adat atau Tokoh Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara informal dengan tujuan menumbuhkan kesadaran bersama, rasa memiliki dan tanggungjawab untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Lalang. Dari diskusi tersebut didapat informasi melalui pokdarwis bahwa masyarakat mulai bergerak dengan membuat sarana penunjang akomodasi pariwisata di Desa lalang dengan adanya rumah inap atau *Homestay* yang dalam pengelolaannya dibantu oleh Pokdarwis Kelekak Nyiur. *Homestay* adalah sarana pendukung pariwisata yang dikelola secara langsung oleh masyarakat lokal, artinya masyarakat sebagai pemilik menyediakan sendiri kamar atau rumah mereka untuk disewakan kepada wisatawan (Raharjana, 2012). *Homestay* memberikan keunikan tersendiri karena lebih menekankan interaksi sosial antara tamu dan tuan rumah dari sekedar hubungan bisnis. Bisnis ini membantu masyarakat menambah pendapatan mereka disamping pekerjaan masyarakat desa lalang yang sebagian besar sebagai nelayan pancing dan pekerja tambang liar, dengan kata lain pengembangan pariwisata memberikan nilai tambah dalam hal peningkatan ekonomi bagi masyarakat (Pantiyasa, 2018). Selain *Homestay*, terdapat pula warung-warung yang menjual makanan khas belitung serta toko-toko kelontong sehingga memudahkan wisatawan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan mereka selama berwisata.

Diskusi bersama masyarakat Desa Lalang juga bertujuan untuk mengelola potensi wisata yang ada di Desanya. *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yaitu pelaku wisata, Pokdarwis, Kepala Desa, dan Tokoh adat atau Tokoh Masyarakat bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan hasil diskusi tersebut secara bersama-sama dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

### Identifikasi Permasalahan: Perspektif Lokal

Langkah awal yang telah dilakukan oleh masyarakat desa lalang adalah dengan mengenali potensi-potensi apa saja yang ada di Desa Lalang sebagai Desa Wisata melalui Pokdarwis Kelekak Nyiur. Dengan adanya kesadaran akan potensi wisata di daerahnya akan menjadi bekal keseriusan dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Sebagai langkah baru dalam pengembangan pariwisata dalam bentuk ekonomi jasa tentunya perlu dipersiapkan secara matang dimana ekonomi jasa khususnya pelayanan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena selain keuntungan kita harus memperhatikan faktor lain yang tidak kalah penting yaitu kepuasan konsumen. Karena dengan kepuasan konsumen sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha ekonomi jasa tersebut. Rumusan hasil diskusi diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel.1**  
Identifikasi masalah

Faktor	Permasalahan
<b>Faktor Internal</b>	
Masyarakat sebagai Sumberdaya pendukung wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memasyarakatnya sadar wisata atau <i>septa pesona</i></li> <li>• Masyarakatnya masih menggunakan pola pikir buruh dan cenderung kolektif</li> </ul>
Kelembagaan wisata lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran berorganisasi bagi seluruh anggota Pokdarwis</li> <li>• Kelembagaan belum terkoordinir dengan baik</li> </ul>
<b>Faktor Eksternal</b>	
Sarana Penunjang Wisata	Stroma Lahan yang masih tumpang tindih antara pihak swasta, pemerintah dan pribadi masyarakat
Lingkungan	Penambangan liar yang menyebabkan kerusakan ekosistem alam

**Sumber:** Data Pokdarwis Kelekak Nyiur, 2021  
Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam proses pengembangan wisata khususnya di Desa Lalang terdapat faktor kendala dari internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata di Desa Lalang sehingga dibutuhkan solusi segera untuk mendorong pengembangan pariwisatanya. Tingkat pendidikan sebagian masyarakat yang rendah dan pola pikir buruh

yang cenderung konsumtif menyebabkan masyarakat sulit untuk berpikiran diluar dari kebiasaan. Mereka lebih tertarik dengan pekerjaan mereka sebagai nelayan yang sudah bertahun-tahun mereka geluti walaupun dengan penghasilan yang tidak pasti. Sebagian masyarakat memilih pekerjaan dengan pendapatan yang besar seperti penambangan liar walaupun tidak ada jaminan sampai kapan pekerjaan itu akan menjadi satu-satunya penghasilan mereka. Penambangan liar yang mengakibatkan kerusakan ekosistem alam juga menjadi perhatian bersama, karena membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perbaikan ekosistem alam akibat penambangan liar ini, salah satu contoh adalah banyaknya aliran sungai yang tercemar yang tidak hanya mengotori sumber air tetapi menyebabkan habitat didalamnya menjadi terganggu dan mati. Diharapkan pemerintah sebagai fasilitator dapat segera membantu memberikan solusi lebih lanjut. Salah satunya masalah status lahan yang sebagian besar adalah milik swasta. Dari tabel di atas juga didapat fakta bahwa keberhasilan upaya pembangunan atau pengembangan desa wisata tidak hanya karena keterlibatan masyarakat, tetapi juga dukungan penuh dari pemerintah dalam bentuk regulasi, perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur juga dukungan dari pihak swasta. Apabila sinergitas dan kerjasama dalam berkoordinasi terlaksana maka akan membantu pengembangan pariwisata di Desa Lalang dan sekitarnya.

### Mapping Potensi pengembangan wisata dan sumberdayanya

Potensi sumberdaya wisata di Desa Lalang diklasifikasikan mencakup komponen kondisi alam, sosial dan seni budaya serta *living heritage* yang selanjutnya akan di klasifikasikan pada tabel berikut ini;

**Tabel.2**  
Klasifikasi Potensi Desa Lalang

Klasifikasi	Potensi	Peluang
Kondisi Alam	Perbukitan	Napak Tilas Sejarah Kejayaan Timah, <u>permandi wisata</u>
	Danau buatan	Sewa Perahu, Wisata pancing dan sewa <u>peralatan pancing</u> , kuliner pinggir danau
	Sungai	Wisata minat khusus, Wisata Mukat Wisata Ngeremut Wisata Nyungkor Wisata Nimong Wisata Mancung Ngarong
Sosial Budaya	Pantai	Wisata Alam Arena bermain anak Penyewaan peralatan renang
	Seni Budaya	Melestarikan budaya khas belitung, Maras taun Berebut lawang (Semi Bepantun) Antu Bubu Beripat Berengong <u>Sanggar tari</u> Hadrah
Living Heritage	Bangunan Heritage Bukit Sanaak Galeri Sejarah Kejayaan Timah Belitong Rumah Adat (Rumah Panagona)	Wisata heritage Wisata eduhistorical

**Sumber:** Pokdarwis Kelekek Nyiur, 2021

Banyak sekali potensi di Desa Lalang yang dapat dikembangkan jika dilihat dari tabel di atas, tidak hanya membuka Galeri Sejarah Kejayaan Timah di Belitung dan *homestay* saja. Atas dasar ide dan gagasan-gagasan khas tersebut akhirnya memudahkan untuk mengajak masyarakat merencanakan model desa wisata yang sesuai dengan prinsip lokalitas. Peluang-peluang yang dapat dikembangkan dari potensi-potensi wisata tersebut sekaligus mendorong peranserta dan kesiapan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha jasa, bukan hanya sebagai nelayan atau penambang liar, tetapi justru memberikan alternatif-alternatif tambahan pemasukan bagi rumah tangga dari sektor jasa ini. Bagi wisatawan sendiri dengan menginap di *homestay* dan berinteraksi langsung dengan warga setempat akan memberikan pengalaman dan wawasan baru tentang alam dan kebiasaan masyarakat lokal Desa Lalang.

*Homestay* yang dalam pengelolaannya dibantu dan dibina oleh Pokdarwis terus berevaluasi dalam memberikan pelayanan, fasilitas rumah inap diharapkan sesuai dengan standar. Pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha jasa wisata khususnya *homestay*

diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang bagaimana menerapkan rumah inap atau Homestay yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan standar homestay yaitu dilihat dari kebersihan, kenyamanan, sirkulasi udara, sinar matahari yang cukup, sanitasi yang memadai. Perlu digarisbawahi bahwa masyarakat bukan merupakan objek yang pasif dalam pengembangan wisata tetapi merupakan subjek yang aktif yang terlibat secara langsung. Atraksi dan akomodasi merupakan cakupan dalam kegiatan wisata. Kegiatan yang dapat dijadikan kegiatan atraksi di Desa Lalang antara lain; kegiatan upacara tradisional seperti maras taun, beselamat kampung dan buang jong. Kegiatan kesenian desa seperti kesenian hadra, tarian-tarian adat khas belitung, berebut lawan, antu bubu, beripat, beregong dan lain-lain. Untuk akomodasi, beberapa tempat tinggal di Desa Lalang yang bangunannya memiliki ciri khas adat melayu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ‘Rumah Panggong’ yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sarana akomodasi yang unik dan menawarkan fasilitas yang sesuai dengan standar rumah inap (*Homestay*).



**Gambar 1.**

### Mapping Hubungan Kelembagaan

Kerja sama yang seimbang antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta merupakan unsur penting dalam pengembangan desa wisata. Meskipun dalam perencanaan dan pelaksanaan serta

pengawasannya melibatkan masyarakat namun tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya suport dari pemerintah dan pihak swasta. Pengembangan wisata bukanlah tanggung jawab dari masyarakat lokal semata tetapi sinergitas dan dukungan dari berbagai unsur pemerintahan dan swasta sebagai investor akan mendorong percepatan pengembangan wisata. Desa lalang sudah membentuk lembaga kepengurusan desa wisata Lalang dan Pokdarwis yang diberi nama “Kelekek Nyiur”. Kepengurusan Desa wisata Lalang dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) demikian lembaga ini berfungsi sebagai penghubung dalam pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pariwisata di Desa Lalang. Struktur organisasi kerja yang tergabung dalam kepengurusan desa wisata lalang adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.**

Struktur Kepengurusan Pokdarwis Kelekek Nyiur

## PENUTUPAN

### Kesimpulan

Masyarakat bukan merupakan objek yang pasif dalam pengembangan wisata tetapi merupakan subjek yang aktif yang terlibat secara langsung dalam proses tahapan pengembangan wisata seperti dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta diberikan hak mutlak dalam menentukan bagaimana dan seperti apa pengembangan wisata yang akan menjadi masa depan bagi pariwisata di desanya. Penerapan pendekatan

partisipatif (*participatory approach*) di desa wisata Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini bertujuan untuk menghindari pembangunan-pembangunan yang cenderung tidak partisipatif dimana sistem kerja yang melibatkan masyarakat secara langsung atau partisipatif pada akhirnya dapat memperbaiki tahapan dalam proses pengembangan kepariwisataan dimulai dari perencanaan yang matang, sinergitas dan kerjasama yang baik antara masyarakat lokal, unsur pemerintah dan swasta sebagai investor.

Tahapan penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa eksistensi Desa Lalang sebagai Desa Wisata yang memiliki status berkembang masih mampu menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung dengan pengembangan pariwisatanya yang melibatkan masyarakat secara langsung. Meskipun model wisata konvensional dalam bentuk *massif tourism* masih mendominasi, masyarakat tetap optimis mencari solusi bagaimana menangkap para wisatawan khususnya untuk wisata minat khusus yang tertarik belajar lebih dekat kehidupan masyarakat desa secara langsung. Pengembangan wisata ini juga mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dimana mereka antusias untuk ikut terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Desa Lalang sebagai tambahan pencaharian selain sebagai nelayan dan penambang liar. Terbentuknya pengelola pariwisata berbasis desa juga turut mendukung percepatan pengembangan pariwisata di Desa Lalang. Penelitian ini telah menghasilkan model perencanaan partisipatif dimana masyarakat dapat mengenali potensi wisata di desanya dan mencari solusi untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam tahapan pengembangan pariwisata di Desa Lalang serta dapat diketahui hubungan peran dan fungsi antar lembaga yang dipandang memberikan kontribusi bagi pariwisata di Desa Lalang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Blackstock, K. (2005). A critical look at community based tourism. *Community Development Journal*, 40(1), 39–49.
- [2] Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
- [3] Lutpi, H. (2016). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Di Kecamatan Jerowaru. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(3), 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/8695/5661>
- [4] Meray, J. G., Takumansang, E. D., Universitas, K., Ratulangi, S., Pengajar, S., Arsitektur, J., Sam, U., Manado, R., Berkelanjutan, P., Kakas, K., Minahasa, K., & Pesona, Y. (2016). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. *Spasial*, 3(3), 47–55.
- [5] Pantiyasa, I. W. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 1(2), 1–64.
- [6] Raharjana, D. T. (2012). Membangun pariwisata bersama rakyat: Kajian partisipasi lokal dalam membangun Desa wisata di dieng plateau. *Jurnal Kawistara*, 2(3).
- [7] Sugi Rahayu, M. P., Si, M., Utami, D., Nur, K., & Fitriana, M. P. A. (2015). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing Universitas Negeri Yogyakarta*, APRIL.
- [8] Wearing, S.L. and Donald, M. (2001). “The Development of Community Based

---

Tourism: Re-Thinking The Relationship between Tour Operators and Development Agents as intermediaries in rural and isolated area Communities.”  
*Journal of Sustainable Tourism.*

---

**ANALISIS STRATEGI PROMOSI JASA MAKE-UP ARTIST  
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS MUA RIAS ATHIF)****Oleh****Wilna Julia<sup>1)</sup>, Muhammad Rahmat<sup>2)</sup>, Sari Wulandari<sup>3)</sup>****<sup>1,2</sup>Pendidikan Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan****E-mail: <sup>1</sup>[athifunwilna@gmail.com](mailto:athifunwilna@gmail.com), <sup>2</sup>[muhammadrahmat@umnaw.ac.id](mailto:muhammadrahmat@umnaw.ac.id),****<sup>3</sup>[sariwulandari@umnaw.ac.id](mailto:sariwulandari@umnaw.ac.id)****Abstract**

MUA Rias Athif's make-up service is one of the service businesses engaged in facial make-up. MUA Rias Athif's make-up services serve wedding, graduation, and other make-up services. Where the clients are women, of course, starting from schoolchildren to adults, with various make-up needs they want. In the era of growing, there are more and more other make-up services, which have promoted their services through social media, so from this to find out MUA Rias Athif's make-up services, how is the promotion strategy in social media. This study describes the form of promotion strategy in social media used by MUA Rias Athif. The research design used is a qualitative descriptive type of research. The method of data collection in this study is documentation because it is the owner of his own business. The instruments used are photos of activities and make up fortopolio and testimonials in the form of videos. The data analysis techniques, data presentation, and drawing conclusions. This research refers to the theory of the promotion mix which contains promotions through several social media such as WhatsApp, Public Relations which affect the increase in new clients, Personal Selling (Personal Selling) direct communication between business owners and prospective clients, Direct Marketing (Direct Marketing) social media as a place to promote makeup results and video testimonials from clients to attract the attention of potential clients.

**Keywords: Promotion Strategy, Makeup Artist, Social Media.****PENDAHULUAN**

Dalam menyongsong era digital 4.0 menuju era 5.0 diharapkan para generasi muda dapat memiliki kesadaran dalam berbahasa Inggris yang baik. Dengan demikian mereka tidak akan tertinggal dengan teknologi baru yang serba menggunakan digital dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman akan tertinggal dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan layak. Segala aktifitas saat ini telah banyak menggunakan digital, diantaranya penggunaan angkutan yang berbasis online. Segala yang menggunakan aplikasi dalam penerapannya menggunakan bahasa inggris dalam instruksinya, oleh karena itu pentingnya pemahaman berbahasa inggris. Mahasiswa

dapat mudah memahami penggunaannya apabila mereka terbiasa menggunakan bahasa inggris. Pembelajaran bahasa Inggris yang masih menggunakan metode konvensional dirasa sulit dipahami dan akan membuat mahasiswa merasa jenuh dan bosan. Oleh karena itu, para pendidik diharapkan dapat mengetahui latar belakang yang menjadikan mereka terkendala dalam pemahaman kosakata sehingga mahasiswa sulit untuk berbicara bahasa inggris. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar hubungan antara ketertarikan mahasiswa dalam lagu-lagu dengan kemampuan berbicara. Apakah ada kaitan ketertarikan mahasiswa dengan lagu-lagu dengan kemampuan berbicara itu sendiri. Apakah mahasiswa yang tertarik dengan lagu-lagu memiliki kemampuan berbicara yang lebih

tinggi dibanding dengan mahasiswa yang tidak tertarik dengan lagu-lagu. Menarik merupakan suatu keinginan manusia untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. Ketertarikan adalah suatu perasaan ingin mengetahui dengan mempelajari sesuatu yang lebih. Menurut Slameto (2003:57) menyatakan menarik adalah memberikan perhatian yang lebih serta ingin mengingatnya. Menurut Slameto (2003) dalam Muhibbin (1995:136) mendefinisikan menarik adalah sesuatu kesenangan yang sangat terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan. According to Slameto (2003) mahasiswa yang tertarik dalam pembelajaran memiliki karakteristik diantaranya :

- a. memiliki kecenderungan untuk mengingat serta memberikan perhatian yang lebih dalam mempelajari sesuatu dengan berkelanjutan
- b. memiliki perasaan sayang dan senang terhadap sesuatu yang menarik
- c. memperoleh kesenangan serta kepuasan terhadap sesuatu yang menarik diantaranya rasa kebersamaan melakukan sesuatu yang menarik tersebut
- d. diwujudkan dalam partisipasi suatu kegiatan dan aktivitas

Dapat disimpulkan menjadi beberapa indikator sebagai berikut :

- a. kesenangan  
suatu aspek yang secara langsung manusia merasa puas dan membuatnya untuk melakukan kembali
- b. pengharapan  
suatu aspek dimana ingin menghasilkan, memperhatikan serta berkecimpung dengan suatu hal tanpa adanya paksaan
- c. kesadaran  
suatu aspek dimana seseorang ingin melakukan sesuatu serta peduli dan menyadari terhadap aktifitas yang sedang dikerjakannya
- d. perhatian  
aspek dimana menunjukkan seseorang terhadap ketertarikan suatu hal

Menurut Ifadah (2012:363) lagu merupakan sebuah teks yang dinyanyikan. Lagu berasal dari sebuah karya tertulis yang diperdengarkan dengan iringan musik. Harmer (2007: 133) menyatakan peserta didik yang mendengar dan memahami bahasa Inggris yang dibicarakan berarti mereka dapat memahami intonasi. Penekanan dan suara yang diucapkan baik oleh pembicara maupun yang mendengarkan. Keuntungan menggunakan lagu Murphey (1992:3) Lagu dapat mengingatkan seseorang akan suatu hal, hal ini dapat dipengaruhi baik dari bait lirik ataupun musik yang dimainkan. Selain itu dapat merelaksasikan pikiran yang tegang. Lagu dapat memotivasi anak-anak, remaja dan dewasa dengan syair yang menggembirakan. Brewster, Ellis, & Girard (1992) menyatakan bahwa lagu merupakan suatu strategi yang tepat dalam pembelajaran bahasa. Karena di dalam lagu terdapat pengulangan kosakata, struktur bahasa serta irama yang dapat menimbulkan ketertarikan bagi pembelajar bahasa. Susunan kosakata yang terstruktur dalam sebuah teks lirik memiliki sebuah makna yang mengandung arti, apabila di dengarkan maka dapat menjadi motivasi dan penyemangat tersendiri. Menurut Griffe (1988) lagu memiliki banyak manfaat yang dapat membantu dalam pembelajaran. Lagu dan musik dapat meminimalisir kecemasan, jika pembelajar diperkenalkan dengan lagu dan musik sejak awal pembelajaran bahasa maka mereka dapat menurunkan tingkat kecemasan. Lagu bermanfaat dalam pembelajaran kosakata. Selain itu lagu juga sebagai sarana atau bahan dalam pembelajaran listening. Lagu dapat digunakan sebagai tambahan di akhir pembelajaran kosakata. Serta dapat mendukung pembelajaran grammar dan dapat membawa suasana yang berbeda dalam suasana kelas. Lagu yang memiliki lirik bahasa asing seperti bahasa Inggris tanpa disadari bagi pendengar, akan belajar memahami isi atau makna yang terdapat di dalam lagu tersebut. Lagu merupakan ungkapan isi hati dan pikiran dari

penulis lagu akan suatu hal yang ingin disampaikan kepada pendengar melalui lantunan nada-nada, melodi dan irama musik. Dengan mendengarkan lagu, dapat menjadi penyemangat tersendiri terutama mahasiswa yang ingin mempelajari bahasa Inggris. Mahasiswa yang tertarik dengan lagu maka akan menumbuhkan keinginan untuk menghafalkan kosakata bahasa Inggris serta menjadikan mereka aktif untuk meniru pengucapan bahasa Inggris atau yang disebut dengan *pronunciation*. Berbicara merupakan salah satu kemampuan dasar dalam bahasa Inggris. Selain itu terdapat kemampuan yang lain seperti mendengarkan, menulis, dan membaca. Kemampuan berbicara perlu dipelajari secara serius agar mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Bjorklund (2005) dalam perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan berbicara. Apabila seorang anak memiliki perkembangan berbicara yang baik maka perkembangan bahasanya pun baik begitu pula sebaliknya. Menurut Megawati (2019: 118) *Speaking is the performance skills in English. When students learn English, they have to practice and also produce words, sentence by speech*. Berbicara merupakan suatu keahlian yang dapat dilihat, ketika mahasiswa mempelajari bahasa Inggris, maka mereka dapat mempraktekannya serta mengasikkan kata, kalimat dengan ucapan. Berbicara merupakan suatu kemampuan yang terlihat, maksudnya adalah kemampuan yang dapat dilihat oleh orang lain ketika berbicara. Menurut Megawati (2018:17) *By speaking students can communicate and interaction with other people. The students can utterance their feeling, idea, and giving opinion*. Mahasiswa yang memiliki kemampuan berbicara maka mereka akan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain, selain itu dapat melakukan ujaran yang artinya mahasiswa dapat menuangkan perasaan, ide pemikiran serta memberikan pendapat atau opini atas hal yang mereka pahami. Untuk mendapatkan kemampuan berbicara yang baik, mahasiswa

memerlukan kosakata-kosakata yang kemudian drangkai menjadi frase atau kalimat. Selain itu pemahaman dalam penggunaan grammar juga diperlukan dalam berbahasa Inggris. Agar pendengar atau orang yang diajak bicara dapat memahami kapan kejadian terjadinya, apakah baru selesai terjadi ataukah masih berlangsung. Dalam berbicara bahasa Inggris dibutuhkan beberapa kriteria sehingga mudah dipahami orang lain. Kriteria atau elemen tersebut yang menjadikan pembicara memiliki kemampuan berbicara yang baik. Menurut Brown (2004:172) elemen atau unsur berbicara dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut :

1. *Grammar* yang berarti kemampuan mahasiswa dalam memahami native speaker atau pembicara asal yang menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara
2. *Vocabulary* yang berarti pemahaman kosakata atau istilah-istilah dalam berbicara
3. *Comprehension* yang artinya memahami sebuah pertanyaan singkat, pernyataan, penyampaian sebuah ucapan, pengulangan serta mengerti dengan paraphrase
4. *Fluency* yang artinya kecakapan dalam berbicara seperti pembicara asli
5. *Pronunciation* yang artinya aksen atau dialek yang diucapkan

Apabila kelima elemen unsur dalam kemampuan berbicara tersebut terpenuhi maka mahasiswa telah memiliki kemampuan berbicara yang baik. Untuk dapat memenuhi unsur berbicara maka mahasiswa menyenangi mendengar lagu-lagu dengan berbahasa Inggris.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kuantitatif, dengan menggunakan sampel mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sebanyak 20 mahasiswa di STKIP Kusuma Negara Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua variabel, *variable dependen* dan *variable independen*. Variabel independen adalah ketertarikan mahasiswa terhadap lagu dan variabel dependen adalah kemampuan

berbicara. Instrument yang digunakan adalah kuesioner ketertarikan mahasiswa terhadap lagu serta test berupa speaking skill. Kuesioner yang diberikan sebanyak 20 pertanyaan yang setiap pertanyaan memiliki jawaban A, B, C dan D, dimana jawaban A yang berarti selalu, B yang berarti sering, C yang berarti kadang-kadang dan D yang berarti tidak pernah dengan skor tertinggi 100 dan skor terendah 25.

Variabel	Indikator
Hubungan antara ketertarikan mahasiswa dengan lagu terhadap kemampuan berbicara	- Frekuensi mendengarkan lagu berbahasa Inggris - Kesenangan atau ketertarikan - Kemauan untuk tertarik - Kesadaran dengan ketertarikan - Perhatian dengan ketertarikan - Tipe-tipe lagu

**Teknik Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner dan tes berbicara maka Dosen melakukan analisa. Adapun tahapan analisa tersebut adalah sebagai berikut :

Dosen melakukan manajemen data yang berarti data yang telah didapatkan kemudian dicek kelengkapannya serta dilakukan penyusunan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Setelah itu dosen melakukan pengklasifikasian, berdasarkan kesenangan yaitu selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Misalnya apakah sering mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Kemudian Dosen melakukan pendeskripsian, yang artinya menggolongkan hasil kuesioner mahasiswa yang senang dan kurang menyenangkan lagu-lagu, lalu melakukan penginterpretasian yang artinya menafsirkan data agar dapat menentukan pemberian skoring atau nilai. Koefisien korelasi diklasifikasikan dalam tabel dibawah ini menurut Burns (2000:235)

Koefisien Korelasi

0.90-1.00	Sangat tinggi
0.70-0.90	Tinggi
0.40-0.70	Sedang
0.20-0.40	Rendah
Kurang dari 0.20	Sangat rendah

Koefisien korelasi menunjukkan hubungan antara kedua variable apakah memiliki hubungan yang positif atau negative. Hubungan kedua variable yang kuat dapat digambarkan dengan (+) atau (-). Apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan maka koefisien korelasi adalah (0).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam test berbicara, mahasiswa diberikan waktu lima menit untuk menjelaskan tempat objek wisata secara lisan. Kemudian diberikan kuesioner yang berkaitan dengan ketertarikan mahasiswa dengan lagu-lagu berbahasa Inggris. Dari tabel dibawah terdapat nilai atau skor minimum mahasiswa 65 untuk tes berbicara dan skor maksimum adalah 86. Sedangkan untuk ketertarikan terhadap lagu berbahasa inggris skor minimum adalah 30 dan skor maksimum adalah 47. Rata-rata kemampuan berbicara adalah 77.95 sedangkan untuk ketertarikan terhadap lagu berbahasa inggris adalah 37.20.

**Statistics**

	Ketertarikan mahasiswa terhadap lagu	Kemampuan Berbicara
N Valid	20	20
Missing	0	0
Mean	37.20	77.95
Median	36.00	78.50
Std. Deviation	4.641	6.168
Variance	21.537	38.050
Minimum	30	65
Maximum	47	86

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kemampuan berbicara adalah 77.95, mahasiswa dengan nilai tertinggi

86 dan nilai terendah 65 dengan standar deviasi adalah 6.168 dan rata-rata ketertarikan mahasiswa terhadap lagu berbahasa Inggris adalah 37.20 dengan standar deviasi adalah 4.641. N adalah jumlah sampel sebanyak 20 mahasiswa. Diketahui hubungan antara ketertarikan mahasiswa terhadap kemampuan berbicara dengan nilai Sig. (2-tailed) >0.05 ; yang berarti hypothesis awal diterima. Maksudnya adalah bahwa data berdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Ketertarikan mahasiswa terhadap lagu	Kemampuan Berbicara
N		20	20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	37.20	77.95
	Std. Deviation	4.641	6.168
Most Extreme Differences	Absolute	.182	.144
	Positive	.182	.096
	Negative	-.094	-.144
Kolmogorov-Smirnov Z		.815	.642
Asymp. Sig. (2-tailed)		.520	.805

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Setelah melakukan uji normalitas, peneliti melanjutkan dengan mencari hubungan antara ketertarikan mahasiswa dengan lagu berbahasa Inggris dengan kemampuan berbicara.

Correlations

		Ketertarikan mahasiswa terhadap lagu	Kemampuan Berbicara
Ketertarikan mahasiswa terhadap lagu	Pearson Correlation	1	.539
	Sig. (2-tailed)		.014
	N	20	20
Kemampuan Berbicara	Pearson Correlation	.539	1
	Sig. (2-tailed)	.014	
	N	20	20

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasar tabel di atas, dapat terlihat bahwa koefisien korelasi untuk ketertarikan mahasiswa terhadap lagu berbahasa Inggris adalah 0.539, ini yang berarti *Pearson Product Moment* koefisien korelasi adalah (+) positive korelasi antara ketertarikan mahasiswa terhadap lagu dengan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Kemudian pada tabel terlihat skor signifikan adalah 0.014 dengan kata lain ( $H_a$ ) diterima dan ( $H_0$ ) ditolak. Jika Sig. (2-tailed) adalah  $0.014 < 0.05$ , yang berarti terdapat hubungan antara ketertarikan

mahasiswa terhadap lagu dengan kemampuan berbicara bahasa Inggris.

Tujuan dalam penelitian ini adalah menentukan apakah ada hubungan antara ketertarikan mahasiswa dengan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Terdapat hubungan yang positif antara ketertarikan mahasiswa dengan kemampuan berbicara dengan koefisien korelasi  $0.014 < 0.05$ . Tanda positive (+) menunjukkan bahwa semakin tinggi ketertarikan mahasiswa terhadap lagu maka semakin besar nilai kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Lagu memiliki daya tarik tersendiri bagi mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. Kesulitan mahasiswa untuk menghafal kosakata baru akan menghambat mereka dalam memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris. Mahasiswa yang tertarik dengan lagu berbahasa Inggris cenderung memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris yang baik. Mereka akan banyak mengetahui dan memahami berbagai kosakata serta dapat melafalkan kata-kata sesuai dengan native speaker. Apabila mahasiswa lebih menyukai lagu berbahasa Inggris dengan aksen *british* maka mereka lebih menguasai dialek *british* begitupun dengan aksen Amerika. Dalam penelitian tersebut di dapatkan hasil ada hubungan yang positif koefisien korelasi antara ketertarikan mahasiswa dengan lagu terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris. Mahasiswa yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap lagu berbahasa Inggris maka mereka akan memiliki kemampuan berbicara yang tinggi pula. Agar mahasiswa memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang baik, maka diperlukan kesenangan dalam mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Sehingga mereka dapat menambah kosakata-kosakata baru sehingga terbiasa dan lancar dalam berbicara bahasa Inggris.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Burns, R.B. (2000). *Introduction To Research Methods: 4<sup>th</sup> Edition*. New South Wales: Longman
- [2] Bjorklund, David F. (2005). *Children's Thinking: Cognitive Development and Individual Differences*. Australia:Wadsworth.
- [3] Brewster, J., Ellis, G., &Girard, D. (1992). *The Primary English Teacher's Guide*. Penguin English.
- [4] Griffe, D.T. (1990). *Hey Baby ! Teaching Short and Slow Songs in the ESL Classroom*. TESLRepoter 23 (4): 64-72
- [5] Harmer, J. (2007). *How to Teach English*. Harlow: Longman.
- [6] Ifadah, uthimatul dan Siti Aimah. (2012). *Kefektifan lagu sebagai media belajar dalam Pengajaran Pronunciation/Pengucapan*. Seminar Hasil-Hasil Penelitian-LPPM UNIMUS 2012. ISBN : 978-60218809-0-6. <http://jurnal.unimus.ac.id>
- [7] Megawati. (2019). *The Correlation Between Students'Anxiety and Speaking Skill at STKIP Kusuma Negara Jakarta (A survey Research First Semester Academic Year 2018/2019)*. Scope: Journal of English Language Teaching Volume 03, Issue 02, March 2019.
- [8] Megawati, M. (2018). Improving The Students's Speaking Skill Through Storytelling Technique Toward Eleventh Grade Students At SMK Swasta Cimanggis. *BRIGHT: A Journal of English Language Teaching, Linguistics and Literature*, 2(1).
- [9] Dzanic, Nihada Delibegovic and Alisa Pejjic. (2016). *The Effect of Using Songs on Young Learners and Their Motivation For Learning English*. NETSOL An interdisciplinary Journal Volume 1, issue 2, October 2016, pp 40-54 <https://www.researchgate.net/publication/312054146>

---

**KONSELING KELOMPOK MENGURANGI KECEMASAN RESIDEN  
REHABILITASI DENGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA****Oleh****Anisa Puzana****Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau****Email: [anisapuzana.15@gmail.com](mailto:anisapuzana.15@gmail.com)****Abstract**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan konseling kelompok untuk mengurangi kecemasan menghadapi lingkungan sosial pada residen yang menjalani rehabilitasi dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara dan observasi. Subjek penelitian ada 5 orang residen yang sedang menjalani masa rehabilitasi. Hasil dari penelitian ini adalah 4 dari 5 orang residen yang mengikuti kegiatan konseling kelompok mengatakan bahwa kecemasannya berkurang dan penerimaan dirinya meningkat karena residen merasa ada dukungan dari orang disekitar dan tidak sendiri menghadapi ketakutan-ketakutan yang akan terjadi setelah selesai menjalani rehabilitasi.

**Keywords: Konseling Kelompok, Kecemasan, Residen Rehabilitasi****PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Riau tahun 2019 jumlah pengguna narkoba di Riau mencapai 1,6 % dari jumlah total penduduk Riau. Daerah Riau memiliki tingkat peredaran narkoba nomor urut 5 dibawah Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Riau yang mengalami peningkatan kasus narkoba yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 ada 133 kasus narkoba jenis ganja, shabu, dan ekstasi, pada tahun 2018 naik menjadi 223 kasus.

Tidaklah mudah bagi para penyalahgunaan narkoba untuk dapat mencapai kondisi pulih atau tidak lagi menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang harus melalui proses pengobatan dan pemulihan yang panjang sampai belasan tahun sehingga penting untuk didampingi oleh konselor adiksi, psikiater maupun psikolog klinis. Untuk itu program rehabilitasi merupakan intervensi

yang sesuai untuk individu yang mengalami penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong individu dengan penyalahgunaan narkoba, diharapkan dapat kembali menjalani fungsisosialnya dengan baik yang sebelumnya terganggu, sehingga dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat, bekerja dan belajar dengan baik. Dalam proses pemulihan disamping faktor-faktor dari luar diri individu adanya faktor dari dalam diri yaitu keinginan individu untuk berhenti menggunakan narkoba serta memiliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa dirinya mampu melepaskan diri dari pengaruh narkoba tersebut perlu ditumbuhkan.

Program rehabilitasi sosial narkoba termasuk kedalam perawatan jangka panjang yang biasanya berlangsung antara 3-12 bulan dan dilakukan program lanjutan setelah selesai menjalani rehabilitasi untuk mencegah kekambuhan. Di dalam program rehabilitasi sudah diatur sedemikian kegiatan dimulai saat klien masuk hingga selesai menjalani rehabilitasi. Didalam proses rehabilitasi juga diadakannya konseling individu dan konseling

kelompok untuk melihat perkembangan klien.

Berkaitan dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh residen yang menjalani masa rehabilitasi yang sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang yaitu memiliki rasa percaya diri yang rendah, tidak bisa menerima keadaan dirinya yang sedang menjalani masa rehab dan kecemasan akan ditolak oleh masyarakat dilingkungannya ketika selesai menjalani rehabilitasi. Kecemasan jika dibiarkan akan menghambat aktualisasi dalam kehidupannya, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dan juga akan menimbulkan masalah lain yang lebih kompleks (Daroji, 2015).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan adabeberapa indikator residen yang mengalami kecemasan diantaranya:takut mencoba hal baru, kurang berani bertanya dan menyatakan pendapat saat diadakan seminar pengetahuan, timbul rasa malu yang berlebihan,berfikir jika dia melakukan sesuatu yang negatif maka akan langsung diberi label negatif oleh semua orang, perasaan takut akan ditolak oleh keluarga dan berkeriang dingin saatdiminta untuk tampil didepan umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian tentang mengurangi kecemasan pada residen dengan melakukan konselingkelompok.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi. Subjek penelitian ini berjumlah 5 orang residen yang ditentukan melalui Teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut : residen yang sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok.

Penelitian ini dilakkukan di Al-Anshari Foundation Pusat Terapi Dan Rehabilitasi Napza Tb Satu Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kecemasan

Kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidakjelas asal maupun wujudnya (Sutardjo Wiramihardja, 2005). Nevid, Rathus &Greene, (2003) menjelaskan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri-ciri seperti keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan *aprehensif* atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi.

Hurlock (1980) juga mendefinisikan kecemasakan sebagai bentuk perasaan khawatir, gelisah, dan perasaan-perasaan lain yang kurang menyenangkan. Biasanya perasaan ini disertai oleh rasa kurang percaya diri, merasa rendah diri, dan tidak mampu menghadapi suatu masalah. Kecemasan adalah ungkapan perasaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi ketika seseorang mengalami tekanan perasaan (*frustasi*) dan pertentangan batin (*konflik*)

Davies (2009) mengatakan kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang tidak menyenangkanyang ditandai dengan rasa ketakutanserta gejala fisik yang menegangkan yang tidak diinginkan. Kecemasan bersifat subyektif, artinya setiap orang memiliki tingkat kecemasan yang berbeda-beda, namun kecemasan memberikan pengaruh pada pola pikir seseorang. Pola pikir yang negatif pada masa pensiun ini, menjadikan individu bersikap pesimis menjalaninya (Lesmana, 2014).

Berdasarkan dari berbagai pengertian kecemasan yang telah dipaparkan kecemasan pada residen yang sedang menjalani masa rehabilitasi dapat disimpulkan bahwaresiden

merasakan suatu perasaan tertekan dan tidak menyenangkan yang dicirikan dengan kegelisahan, ketidaknyamanan, kekhawatiran ditolak oleh masyarakat dan ketakutan yang tidak jelas dan tidak pasti kebenarannya yang muncul tiba-tiba, sehingga berdampak negatif pada fisik maupun psikologis individu yang mengalaminya

### B. Konseling Kelompok

Konseling kelompok yaitu suatu proses pemberian layanan yang terprogram dan merupakan bagian dari bimbingan dan konseling. Biasanya terdiri dari seorang konselor dan 7 orang konseli. Konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis yang berpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti sifat permisif, berorientasi padakenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling memperlakukan dengan mesra, saling pengertian, saling menerima dan saling mendukung (Gazda et al dalam Wibowo, 2005).

Tujuan konseling kelompok adalah pengembangan diri, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, sehingga terhindar dari masalah dan masalah diselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota yang lain (Zulfan, 2014).

Kesuksesan konseling kelompok sangat dipengaruhi oleh sejauhmana keberhasilan tujuan yang akan dicapai dalam konseling kelompok yang diselenggarakan. Adapun tujuankonseling kelompok :

1. Mampu berbicara di depan orang banyak
2. Mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan dan lain sebagainya kepada orang banyak
3. Belajar menghargai pendapat orang lain,
4. Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya
5. Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi (gejolak kejiwaan yang bersifat negatif)
6. Dapat bertenggang rasa

7. Menjadi akrab satu sama lainnya
8. Membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa residen yang telah mengikuti kegiatan konseling kelompok mengalami penurunan kecemasan, dikarenakan klien merasa tidak sendiri, dan merasa bisa diterima dilingkungan tempat tinggalnya nanti meskipun sudah memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba karena telah mendapat dukungan dari anggotakelompok yang sama-sama memiliki permasalahan yang sama. Selain itu residen mulai percaya diri saat menyampaikan pendapat didalam forum yang sebelumnya menjadi anggota pasif menjadi anggota aktif dalam segala kegiatan yang dijalani selama rehabilitasi.

Ketika individu mendapatkan dukungan dari anggota kelompok yang sama-sama menjalani konseling kelompok, maka akan berdampak padapenerimaan diri residen. Sejalan dengan Santrock (2012) yang mengatakan bahwa individu yang menerima diri secara positif dapat dilihat dari pengakuan seseorang terhadap kemampuan sekaligus menerima kekurangan dirinya tanpa menyalahkan orang lain serta mempunyai keinginan yang terus-menerus ingin mengembangkan diri.

Selanjutnya hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Machan & Nurul (2012) yang menyebutkan bahwa, rendahnya penerimaan diri akan menciptakan perubahan yang drastis pada kehidupan seseorang, sehingga terjadi sebuah konflik. konflik yang dihadapi oleh seseorang yang sedang menjalani masa rehabilitasi adalah kecemasan. Artinya, ketika seorang individu tidak mampu menerima bahwa dirinya, maka hal ini akan menyebabkan individu merasakan kecemasan yang tinggi.

Residen yang mengikuti konseling kelompok

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Davies, T. (2009). ABC Kesehatan Mental, Alih bahasa Alifa Dimanti. MC Graw Hill Companies.
- [2] Daroji, (2015). Konseling Kelompok untuk Mengurangi Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja. *Jurnal Varidika*. Vol 27, No 2
- [3] Hurlock, E. B, (1980). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta, Erlangga
- [4] Lesmana, D. (2014). Kecerasan Spritual Dengan Kecemasan Menghadapi Pensiun. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. Vol 02, No. 01
- [5] Machdan, D. M. & Nurul. H. (2012). Hubungan Antara Penerimaan Diri Dengan Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja Pada Tunadaksa Di Upt Rehabilitas Sosial Cacat Tubuh Pasuruan. *Jurnal Psikologi* . Vol.1, No 2
- [6] Santrock, J. W. (2012). *Life-span development; perkembangan masa hidup*. Jakarta. Erlangga
- [7] Wibowo, Eddy. (2005). *Konseling Kelompok Perkembangan*. Jakarta: Unres Pres
- [8] Zulfan, ( 2014). *Psikologi Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [9] Jakarta: Raja Grafindo Persada

PENGARUH ASPEK PRILAKU TERHADAP PENDAPATAN PETERNAK SAPI ACEH  
(BOS-BIBOS) DI KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA

Oleh

M.Khairul Fadli<sup>1)</sup>, Cut Gustiana<sup>2)</sup>, Faoeza Hafiz Saragih<sup>3)</sup>,  
Kiagus M. Zain Basriwijaya<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra, Indonesia

Jl, Prof. Dr. Syarief Thayeb, meurandeh, Langsa Lama, Langsa City, Aceh 24416

Email: <sup>1</sup>[Muhammadkhairulfadli975@gmail.com](mailto:Muhammadkhairulfadli975@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to analyze the effect of behavioral aspects on the income of Aceh cattle breeders (Bos-Bibos) in East Langsa District, Langsa City. This research was conducted in East Langsa District, Langsa City. The sampling technique used disproportionate stratified random sampling technique with a total sample of 41 people. To determine the effect of behavioral aspects on the income of Aceh cattle breeders (Bos-Bibos) in East Langsa District, Langsa City, statistical analysis using multiple linear regression method was used. Data processing was performed using SPSS computer software. The results of this study indicate that the skill variable has a significant effect on the income of Aceh cattle breeders (Bos-Bibos) in East Langsa District, Langsa City. and the variable farmer knowledge and attitude does not have a significant effect on the income of Aceh cattle breeders (Bos-Bibos) in East Langsa District, Langsa City.

**Keywords: Behavior, Breeder And Income**

**PENDAHULUAN**

Konsumsi daging sapi di Indonesia meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta bertambahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi daging, selain itu sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga kerja, energy dan pupuk Pangestika *et al.*, (2017). Mempertahankan sumber daya ternak sapi lokal sangat penting untuk mencapai keamanan pangan yang berkelanjutan bagi jutaan umat manusia. Awalnya pemeliharaan hewan ternak oleh masyarakat hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, namun saat ini kegiatan peternakan telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang mengarah pada bentuk usaha sebagai sumber pendapatan masyarakat Nurjannah (2017). Sapi termasuk hewan ternak ruminansia yang merupakan salah satu penghasil sumber protein yang banyak diperlukan tubuh, seperti daging, susu, dan kebutuhan lainnya. Sapi mampu menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging

dunia, 95% kebutuhan susu dan 85% kebutuhan kulit (Prasetya, 2012).

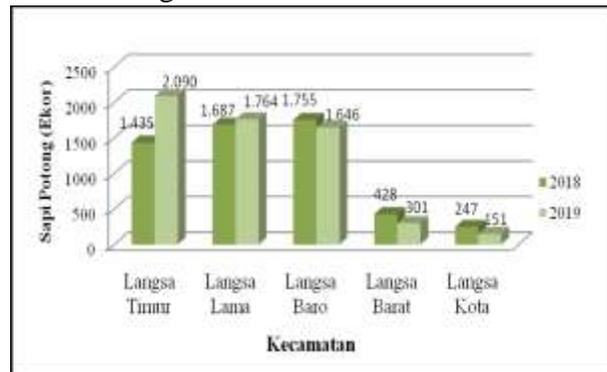
Pulau Sumatera khususnya Provinsi Aceh mempunyai peluang besar untuk mengembangkan ternak sapi. Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung untuk pengembangan peternakan. Aceh memiliki prospek dalam menjadi pengekspor ternak baik itu ke provinsi lain di Indonesia maupun ke luar negeri. Peternakan merupakan sektor riil yang paling dekat dengan masyarakat Aceh Jamilah (2017). Melalui sektor agribisnis peternakan ini, Aceh memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomiannya di masa akan datang. Namun sektor agribisnis ini, belum dikelola secara serius, sehingga tampak sia-sia dan belum berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab usaha peternakan ini masih bersifat sampingan sehingga dampak ekonomi yang didapat juga masih kecil. Jika dilihat dari prospek pemasaran, hasil peternakan Aceh sangat tinggi

kerena banyaknya permintaan daging sapi terutama pada hari *Meugang* dan menjelang hari besar umat Islam Mersyah dalam Jamilah (2017). Namun dibalik permintaan daging sapi Aceh yang semakin hari semakin meningkat, juga terdapat harga pakan yang semakin meningkat pula. Menurut Syakir dan Shabri dalam Jamilah (2017), untuk harga pakan ternak di Aceh relatif tinggi, namun kenaikan harga jual ternak bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan harga pakan ternak, yang artinya para peternak masih dapat meraih keuntungan yang signifikan. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan jumlah populasi sapi potong dengan cara meningkatkan efisiensi reproduksi dan mengatasi kasus reproduksi dari sapi potong tersebut (Febriantoro *et al.*, 2015).

Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Aceh yang memperlihatkan adanya pembangunan dalam pengelolaan peternakan sapi potong. Umumnya peternak di Kota Langsa memelihara ternak secara tradisional dengan pola pengembalaan ekstensif menyebabkan ternak yang cenderung mengalami perkawinan alam dan tidak memproduksi secara maksimal sehingga kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sosial ekonomi peternak terkait pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh peternak. Selain itu faktor lain seperti umur peternak, pendidikan peternak, pengalaman beternak, status kepemilikan ternak dan jumlah ternak dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh peternak (Indrayani *et al.*, 2018).

Pengelolaan usaha peternakan di Kota Langsa saat ini sudah menunjukkan peningkatan dengan adanya pemelihara ternak secara tradisional melalui pola pengembalaan ekstensif dan semi-ekstensif juga dengan melakukan inseminasi buatan (IB) terhadap indukan sapi potong. Hal ini mempengaruhi bertambahnya jumlah populasi sapi potong di

Kota Langsa. Berikut data populasi sapi potong di Kota Langsa.



**Sumber :** Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa, 2020

**Gambar 1.2** Jumlah Populasi Sapi Potong di Kota Langsa

Langsa Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Langsa, dimana kecamatan ini merupakan salah satu penghasil populasi ternak sapi terbanyak di Kota Langsa (BPS, 2019).

**Tabel 1.** Jumlah Peternak Sapi Di Kecamatan Langsa Timur, 2020

No	Desa	Jumlah Peternak (Orang)
1	Alue Merbau	94
2	Alue Pineung	80
3	Buket Meutuah	93
4	Buket Pulo	32
5	Buket Rata	42
6	Buket Meudang Ara	37
7	Cinta Raja	54
8	Kapa	0
9	Matang Panyang	48
10	Matang Seutui	46
11	Matang Ceungai	87
12	Simpang Wie	19
13	Sukarejo	119
14	Sungai Lueng	45
15	Seuneubok Antara	45
16	Telaga Tujuh	1
Total		842

**Sumber :** Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa, (2020).

Langsa Timur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Langsa, dimana Kecamatan ini terdiri dari 16 desa yang

sebagian besar penghasil ternak sapi Aceh, jumlah peternak sapi Aceh pada Kecamatan Langsa Timur terdapat 842 orang yang terdiri dari 15 desa, desa yang paling banyak jumlah peternaknya adalah desa Sukarejo yaitu sejumlah 119 orang dan desa yang paling sedikit jumlah peternaknya adalah desa Telaga Tujuh yaitu sebanyak 1 orang (Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Pertanian Kota Langsa, 2020).

Pendapatan usaha ternak sangat dipengaruhi oleh jumlah ternak yang dijual oleh peternak itu sendiri, sehingga semakin banyak ternak maka semakin tinggi pula pendapatan bersihnya Soekartawi dalam Siti Nurjanah T (2017). Analisis pendapatan digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya kegiatan usaha, untuk mengetahui komponen utama pendapatan dan apakah komponen tersebut masih dapat ditingkatkan. Jika pendapatan dari kegiatan usaha memenuhi persyaratan seluruh populasi produksi, maka kegiatan usaha tersebut dianggap berhasil. Perkembangan sektor agribisnis peternakan ini merupakan hal positif dan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya peternak sapi dengan meningkatnya pendapatan yang diterima. Hal ini tentunya disertai dengan adanya sebuah manajemen pengelolaan usaha peternakan yang tepat, baik disisi teknis maupun dalam manajemen pemasarannya Hoddi *at al.*, (2011). Selain itu dalam upaya pengembangan sapi potong di Provinsi Aceh khususnya Kecamatan Langsa Timur tidak luput dari pengaruh aspek perilaku.

## METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal, penelitian kausal digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel. Namun penelitian kausal biasanya menggunakan metode (*Survei*), metode survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sample yang relatif lebih kecil,

penelitian kausal juga dapat mengendalikan *independent variable* yang akan mempengaruhi *dependent variable* pada situasi yang telah direncanakan (Mochammad Maulana T, 2017).

Menurut Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah para peternak sapi Aceh di Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, yang terdiri dari 16 desa dengan jumlah peternak sebanyak 842 orang, kemudian dari 16 desa tersebut diambil 7 desa dengan populasi peternak terbanyak dengan metode *Purposive Sampling* yaitu (secara sengaja), kemudian Peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Langsa Timur dengan 7 desa yang dipilih yaitu : Desa Sukarejo, Desa Alue Merbau, Desa Buket Meutuah, Desa Matang Ceungai, Desa Alue Pineung, Desa Cinta Raja dan Desa Matang Panyang, dikarenakan 7 desa tersebut adalah desa dengan jumlah peternak terbanyak yang dapat diamati sebagai responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari instansi terkait yaitu, Badan Pusat Statistik Kota Langsa, Dinas Peternakan, Kantor Kecamatan Langsa Timur, Buku, serta internet yang menyediakan data mengenai objek penelitian serta jurnal online yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur seberapa baik item pernyataan dalam kuesioner digunakan, item pernyataan dikatakan valid jika mempunyai nilai validitas yang tinggi dan dikatakan tidak valid jika item pernyataan mempunyai nilai validitas rendah. Item

pernyataan dalam kuesioner dikatakan valid jika nilai signifikansi  $< 0,05$  (Ghozali, 2011).

### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur yang cukup terpercaya untuk mengukur suatu item pernyataan dalam kuesioner. Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan koefisien alfa (*Cronbach's alpha*). Jika koefisien alfa  $> 0,6$  maka item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel (Ghozali, 2011).

### c. Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu, sebelum dibuat analisis korelasi dan regresi, hal tersebut untuk menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada, untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* ( $e$ ) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam SPSS. Menurut Santoso (2012), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu :

1. Jika nilai sig.  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.
2. Jika nilai sig.  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi dengan normal.

#### 2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka

dinamakan terdapat problem multikolinieritas (Santoso, 2012).

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Facktor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Menurut Gujarati (2012), untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji *rank-Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai absolut residual, selanjutnya meregresikan nilai absolut residual diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari *residual* signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari *residual* tidak homogeny).

### d. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen Arif Rahman *et al.*, (2015). Persamaan Regresi Linear Berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y = Pendapatan peternak sapi Aceh  
(Rp/tahun)

a = Konstanta regresi variable independen

b = Koefisien

$X_1$  = Pengetahuan  
(Skor)

- X<sub>2</sub> = Sikap Peternak (Skor)
- X<sub>3</sub> = Keterampilan (Skor)
- e = Standar Error

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Uji Validitas**

No	Kode	R hitung (X <sub>1</sub> )	R hitung (X <sub>2</sub> )	R hitung (X <sub>3</sub> )	r tabel	Ket
1	S1	0,542			0,308	Valid
2	S2	0,547			0,308	Valid
3	S3	0,526			0,308	Valid
4	S4	0,401			0,308	Valid
5	S5	0,504			0,308	Valid
6	S7	0,538			0,308	Valid
7	S9		0,594		0,308	Valid
8	S11		0,717		0,308	Valid
9	S12		0,478		0,308	Valid
10	S13		0,550		0,308	Valid
11	S14		0,387		0,308	Valid
12	S15		0,572		0,308	Valid
13	S17			0,348	0,308	Valid
14	S19			0,330	0,308	Valid
15	S20			0,320	0,308	Valid
16	S21			0,477	0,308	Valid
17	S22			0,496	0,308	Valid

Ket :  
 S = Sampel  
 S1 – S7 = Pengetahuan (X<sub>1</sub>)  
 S9 – S15 = Sikap Peternak (X<sub>2</sub>)  
 S17 – S22 = Keterampilan (X<sub>3</sub>)

**Sumber :** Data Primer diolah menggunakan SPSS 20 (2021).

**b. Uji Reliabilita**

Uji Reliabilitas diukur menggunakan koefisien *Cronbach's alpha*. Apabila koefisien *Cronbach's alpha* > 0,6 maka instrument yang mengukur item pernyataan data kuesioner dinyatakan reliabel (Ghozali, 2011).

**Tabel 6.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil Uji
Pengetahuan (X <sub>1</sub> )	0,734	Reliabel
Sikap Peternak (X <sub>2</sub> )	0,725	Reliabel
Keterampilan (X <sub>3</sub> )	0,754	Reliabel

**Sumber :** Data Primer diolah menggunakan SPSS 20 (2021).

Tabel 3. Menunjukkan hasil uji reliabilitas dari setiap variabel penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien *Cronbach's alpha* dari variabel pengetahuan = 0,734, sikap peternak = 0,725 dan keterampilan = 0,754 > dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel penelitian ini reliabel dan dapat

digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

**c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data terbebas dari gejala multikolinieritas (Ghozali, 2018).

Model	Collineqrity Statistics	
	Tolerance	VIF
Constant		
Pengetahuan (X <sub>1</sub> )	0,532	1,880
Sikap Peternak (X <sub>2</sub> )	0,521	1,918
Keterampilan (X <sub>3</sub> )	0,586	1,707

**Sumber :** Data Primer diolah menggunakan SPSS 20 (2021).

Gejala multikolinearitas tidak terjadi jika nilai VIF < 10,00 dan nilai *tolerance* > 0,10. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* masing-masing vaariabel adalah Pengetahuan = 0,532, Sikap Peternak = 0,521 dan Keterampilan = 0,586 > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas didalam penelitian ini. Untuk melihat hasil pengujian dengan uji multikolinearitas

**d. Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	T-Hitung	Signifika nsi
Y = Pendapatan	50.179.933,37	-1,972	0,056
X1 = Pengetahuan	585.107,306	-,562	0,577
X2 = Sikap Peternak	286.541,400	0,197	0,845
X3 = Keterampilan	310.319,382	2,657	0,012
R	=		
0,470			
R Square	=		
0,221			
Adjusted R Square	=		
0,158			

F- Hitung	=
3,493	
F- Tabel	=
2,85	
Sig F	=
0,05	
T- Tabel	=
2,026	
Sig T	=
0,05	

**Sumber :** Data Primer diolah menggunakan SPSS 20 (2021).

Berdasarkan tabel diatas, nilai-nilai yang tertera digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -50179933,37 + 585107,306 X_1 + 286541,400 X_2 + 310319,382 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan (Rp)/Tahun

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien Regresi Variabel Pengetahuan (X<sub>1</sub>)

b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi Variabel Sikap Peternak (X<sub>2</sub>)

b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi Variabel Keterampilan (X<sub>3</sub>)

X<sub>1</sub> = Pengetahuan (skor)

X<sub>2</sub> = Sikap Peternak (skor)

X<sub>3</sub> = Keterampilan (Skor)

e = Standar Error

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat diinterpretasi nilai koefisien regresi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (Y) sebesar Rp - 50.179.933,37 maka dapat diartikan bahwa apabila semua variabel bebas yaitu pengetahuan, sikap peternak dan keterampilan sama dengan 0 maka pendapatan peternak sapi Aceh (*Bos-Bibos*) di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa sebesar Rp -50.179.933,37 dalam satu tahun terakhir.
2. Besarnya koefisien regresi pengetahuan (X<sub>1</sub>) adalah Rp -585.107,306 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pengetahuan maka akan meningkatkan pendapatan peternak sapi Aceh (*Bos-Bibos*) di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa sebesar Rp -585.107,306.

3. Besarnya koefisien regresi sikap peternak (X<sub>2</sub>) adalah Rp 286.541,400 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya sikap peternak maka akan meningkatkan pendapatan peternak sapi Aceh (*Bos-Bibos*) di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa sebesar Rp 286.541,400.

4. Besarnya koefisien regresi keterampilan (X<sub>3</sub>) adalah Rp 310.319,382 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya keterampilan beternak maka akan meningkatkan pendapatan peternak sapi Aceh (*Bos-Bibos*) di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa sebesar Rp 310.319,382

### 1. Uji Koefisien Determinasi Adjusted R Square

Untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat pada regresi linier berganda sebaiknya menggunakan *R square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan. Berdasarkan pada hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dalam *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,158 yang berarti Pengetahuan (X<sub>1</sub>), Sikap Peternak (X<sub>2</sub>) dan Keterampilan (X<sub>3</sub>) secara serempak dapat mempengaruhi variable Pendapatan (Y) adalah sebesar 15,8% sedangkan sisanya yaitu 84,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam model seperti tingkat pendidikan, umur peternak, jumlah tanggungan keluarga dan variabel lainnya (Lampiran 14).

### 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji koefisien serentak atau Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk melakukan uji regresi secara bersama-sama. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% . Pengambilan keputusan menggunakan uji F adalah : (1) jika nilai F<sub>hitung</sub> < F<sub>tabel</sub>, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen: (2) jika

nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Robert Kurniawan *et al.*, 2016).

Berdasarkan hasil uji *F-test* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,025 yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan ( $X_1$ ), sikap peternak ( $X_2$ ) dan keterampilan ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan ( $Y$ ) karena nilai sig. yang diperoleh  $0,025 < 0,05$ . Sedangkan berdasarkan uji *F* diperoleh nilai  $F_{hitung} 3,493 > F_{tabel} 2,85$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ( $X_1$ ), sikap peternak ( $X_2$ ) dan keterampilan ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak sapi Aceh (*Bos-Bibos*) di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. (Lampiran 13)

### 3. Uji Parsial (Uji *t*)

Uji *t* di gunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel bebas secara individual terhadap variabel-variabel terikat Kuncoro, (2013). Uji Parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Oleh karena itu uji yang dapat digunakan adalah uji *t* atau *t-test*. Kriteria pengambilan keputusannya adalah : (a) jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen; (b) jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Atau dapat dengan melihat nilai (a) sig  $> 0,05$  maka hipotesis tidak teruji; (b) sig  $< 0,05$  maka hipotesis teruji. Pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel yaitu pengetahuan ( $X_1$ ), sikap peternak ( $X_2$ ) dan keterampilan ( $X_3$ ) terhadap pendapatan ( $Y$ ) peternak sapi Aceh (*Bos-Bibos*) di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh Pengetahuan ( $X_1$ ) Terhadap Pendapatan Peternak Sapi Aceh

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *SPSS 20* melalui uji *t-test* yang diperoleh nilai thitung untuk variabel

pengetahuan terhadap pendapatan peternak menunjukkan nilai thitung  $-,562 < t_{tabel} 2,026$  yang memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,577 > 0,05$  maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Dari analisis yang dilakukan koefisien regresi yang diperoleh yaitu  $-585.107,306$ . Sehingga menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan tidak ada pengaruh signifikan terhadap pendapatan peternak sapi Aceh (*Bos-Bibos*) di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

#### 2. Pengaruh Sikap Peternak ( $X_2$ ) Terhadap Pendapatan Peternak sapi Aceh

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *SPSS 20* melalui uji *t-test* yang diperoleh nilai thitung untuk variabel Sikap Peternak terhadap pendapatan peternak menunjukkan nilai thitung  $0,197 < t_{tabel} 2,026$  yang memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,792 > 0,05$  maka  $H_2$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Dari analisis yang dilakukan koefisien regresi yang diperoleh yaitu  $286.541,400$ . Artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Sikap Peternak terhadap pendapatan peternak sapi Aceh (*Bos-Bibos*) di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

#### 3. Pengaruh Keterampilan ( $X_3$ ) Terhadap Pendapatan Peternak sapi Aceh

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *SPSS 20* melalui uji *t-test* menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Keterampilan beternak terhadap pendapatan peternak sapi Aceh, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung  $2,657 > t_{tabel} 2,026$  yang memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$  maka  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dari analisis yang dilakukan koefisien regresi yang diperoleh yaitu  $310.319,382$ . Menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara Keterampilan beternak terhadap Pendapatan peternak sapi Aceh (*Bos-Bibos*) di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh aspek perilaku terhadap pendapatan

peternak sapi Aceh (*B0s-Bibos*) di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa uji signifikansi (Uji t) dan (Uji F) maka variabel Pengetahuan ( $X_1$ ) dan variabel Sikap Peternak ( $X_2$ ) tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan peternak sapi Aceh. Namun dari 3 variabel yang diambil hanya 1 variabel yang berpengaruh nyata yaitu Ketrampilan ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap pendapatan peternak sapi Aceh hal tersebut terlihat keterampilan peternak bernilai positif terhadap pendapatan dimana keterampilan meningkat 1 skor maka pendapatan naik sebesar 310.319,382 Rp/Tahun

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.H. Hoddi, M.B.Rombe, F. (2011). Analisis Pendapatan Peternakan Sapi Potong di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Universitas Hasanuddin. Makassar. Jurnal Agribisnis, Vol 10. No 3 : Hal 98- 100.
- [2] Adam M. (2015). Jumlah Eritrosit dan Nilai Hematokorit Sapi Aceh dan Sapi Bali Di Kecamatan Seulawah Kabupaten Aceh Besar, Jurnal medika Veterinaria, Vol 9. No 2 : Hal 115-118.
- [3] Afrisawati. (2020). Analisis Perbandingan Menggunakan Metode Moora Dan Waspas Pemilihan Bibit Sapi Potong Terbaik . Jurteksi (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi), Vol. Vi No 3.
- [4] Amam, et al. (2021). Aksesibilitas Sumber Daya pada Usaha Peternakan Sapi Potong Rakyat. Jurnal Peternakan, Vol 18. No 1 : Hal 31-40.
- [5] Arum, p, w, dkk. (2013). Efek Pemberian Ekstrak Hipofisa Sapi Terhadap Respons , Jurnal Medika Veterinaria, Vol 7. No 2.
- [6] Badan Pusat Statistik Kota Langsa 2020, Kecamatan Langsa Timur, 2020.
- [7] Basriwijaya, et al. (2020). *nfluence of physical and social factors of livestock on duck farmers' income and regional development: A case of rokan hulu regency, riau indonesia.* IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 672(1).
- [8] Basriwijaya, et al. (2021). *Bussines Analysis of Cattle Aceh at Langsa District. Advances in Social Science, Education and humanities Research, Vol 576.*
- [9] Boy, A. F. (2020). Implementasi Data Mining Dalam Memprediksi Harga Crude Palm Oil (CPO)Pasar Domestik Menggunakan Algoritma Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Journal of Science and Social Research August 2020.
- [10] Dasipah, E. (2020). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Kompetensi Manajerial Peternak Sapi Perah Terhadap Pendapatan. Jurnal Ilmiah Pertanian, Vol 9. No 1 : Hal 94-103.
- [11] Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- [12] Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- [13] Gujarati.2012. Dasar-dasar Ekometrika. Jakarta : Salemba Empat.
- [14] Hermawan, A., Amanah, S., & Fatchiya, A. (2017). Partisipasi Pembudidaya Ikan dalam Kelompok Usaha Akuakultur di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Penyuluhan, Vol. 13 No. 1 : Hal 2-12.
- [15] Jamilah. (2017). Analisis Pendapatan Peternak Sapi Aceh. Jurnal Agrifo, Vol 2. No 2 : Hal 50-55.
- [16] Kiswanto., A. Prabowo dan Widyantoro. 2004. Transformasi Struktur Usaha Pengemukan Sapi Potong di Lampung Tengah. Sistem dan Kelembagaan Usaha Tani Tanaman Ternak. Prosiding Seminar. Balai Penelitian dan

- Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- [18] Krisna, Rizal, H. (2014). Hubungan Tingkat Kepemilikan dan Biaya Usaha dengan Pendapatan Peternak Sapi Potong di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat (Studi Korelasi). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol 12. No 2 : Hal 295-305.
- [19] Kurniawan, R., Yuniarto, B., (2016) Analisa Regresi Dasar dan Penerapan dengan R. Jakarta: Kencana.
- [20] Mukhtar. (2015). Karangan Fenotif Sapi Aceh Batina Pada BPTU-HPT Indra Puri. *Jurnal Ilmiah Peternakan*, Vol 3. No 2 : Hal 34-38.
- [21] Notoatmodjo, S. (2010). Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- [22] Nurjanah, S, T. (2017). Analisis Pendapatan Peternak Sapi Potong Yang Mengikuti Program Showroom Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Repositori Universitas Hasanuddin*, Makasar 2017.
- [23] Nurkhadijah. (2019). Analisis Agribisnis Sapi Potong Di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Agribisnis*, Vol 21. No 1 : Hal 21-35.
- [24] Otampi, R. S., Elly, F. H., Manese, M. A., & Lenzun, G. D. (2017). Pengaruh Harga Pakan dan Upah Tenaga Kerja terhadap Usaha Ternak Sapi Potong Petani Peternak di Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Zootek*, Vol 37. No 2 : Hal 483-495.
- [25] Pangestika, R. (2017). Kualitas fisik pada potongan primal karkas sapi krui betina di kabupaten pesisir barat lampung, *Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan*, Vol 2. No 1: Hal 38-43.
- [26] Putra, Y. E. (2017). Struktur Dan Dinamika Populasi Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Paya Kubuh Timur Kota Paya Kubuh, *Jurnal e-Skripsi Universitas Andalas*, Hal 01-60.
- [27] Qinayah, M. (2017). Analisis Pendapatan Peternak Sapi Potong Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Core Universitas hasanudin*, Hal 1-82.
- [28] Qinayah, M., Hastang, & Sirajuddin, S. N. (2017). Tingkat Pendapatan Peternak Sapi Potong pada Skala Usaha yang Berbeda di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Seminar Nasional Peternakan, Universita Hasanudin Makasar*, Hal 257-261.
- [29] Rahmah, F. F. (2020). Peranan Teknologi Inseminasi Buatan (Ib) Dan Pakan Dalam Mendukung Percepatan Produksi Dan Swasembada Daging Sapi Di Kabupaten Aceh Besar . *Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman*.
- [30] Rasyid, A. (2017). Karakteristik Fenotip Dan Pengembangan Sapi Aceh Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2 *Maduranch Vol 2. No1*.
- [31] Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [32] Sasmi, M. (2018). Hubungan Kinerja Penyuluh Peternakan Terhadap Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Agribisnis*, Vol 1. No 2 : Hal 90-105.
- [33] Subagyo, D. (2020). Kajian Prevalensi Repeat Breeding Pada Sapi Aceh Di Kabupaten Pidie Sebagai Upaya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan. *Jar, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020, Jurnal Agroristek*.
- [34] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [35] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif, R&D*. Bandung : IKAPI.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

MEKANISME PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA DI  
PT. RIMBA MUJUR MAHKOTA

Oleh

Ayu Sundari<sup>1)</sup>, Tri Reni Novita<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

E-mail: [ayu603496@gmail.com](mailto:ayu603496@gmail.com), [trireninovita@gmail.com](mailto:trireninovita@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to determine the implementation of BPJS employment in legal protection, constraints, and efforts in providing social security for workers at PT. Rimba Mujur Mahkota. This research was conducted at PT.Rimba Mujur Mahkota in Natal area, Mandailing Natal Regency, North Sumatra. Data collection techniques are in the form of interviews and documentation. The data that has been obtained from the results of the research will then be collected and analyzed descriptively, namely an analysis that describes the content and will be discussed in the form of an elaboration by giving meaning according to the applicable legislation so as to arrive at conclusions based on this research. From the results of the study it was found that: PT.Rimba Mujur Mahkota 1) There is no violation of the fulfillment of Article 14 of Law Number 24 of 2011, because all workers at PT.Rimba Mujur Mahkota participates in BPJS Employment. 2) Has given social security rights to all workers at PT.Rimba Mujur Mahkota. Efforts made by BPJS Employment so that workers at PT.Rimba Mujur Mahkota provides social security benefits, namely, Carrying out program functions provided by BPJS Employment, namely Work Accident Protection, Old Age Protection, Pension Protection, and Death Protection. Legal protection for workers of PT.Rimba Mujur Mahkota who is experiencing social welfare problems, such as health, and old age is to provide social security organized by BPJS Employment. As stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS).

**Keywords: BPJS Employment, PT.Rimba Mujur Mahkota, Social Welfare**

**PENDAHULUAN**

Dunia saat ini tengah menghadapi pandemi virus corona (Covid-19). Covid-19 bermula dan terdeteksi di negara Wuhan, China pada Desember 2019 dan mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada Maret 2020. Jumlah kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga membuat pemerintah Indonesia menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus corona semakin menyebar. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat,

pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19.

Akibat dari penerapan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 melalui PSBB, maka yang paling terkena dampaknya adalah dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan dapat mengikuti kebijakan pemerintah. Bagi perusahaan atau pabrik yang bergerak di bidang produksi barang, maka dibutuhkan pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Dengan adanya kebijakan ini maka menimbulkan permasalahan yang akan

berakibat kepada jutaan pekerja menjadi rentan kehilangan pekerjaan.<sup>1</sup>

Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tercatat mengalami penurunan sepanjang 2020 karena tertekannya dunia usaha akibat pandemi Covid-19. Tekanan ekonomi semasa pandemi membuat banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya sehingga kepesertaan di jaminan sosial turut terpengaruhi. Selain itu, pekerja mandiri pun kerap kesulitan membayar iuran ditengah pengurangan pendapatan.<sup>2</sup> Di tahun 2021 ini BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan bantuan secara bertahap bagi mereka yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, sehingga program ini sedikitnya membantu bagi tenaga kerja yang terkena PHK oleh perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) yang mulai 1 Juni 2015. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara. Indonesia mengembangkan program jaminan sosial

berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.<sup>3</sup> Sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (3) bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.<sup>4</sup>

Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk mendapat jaminan-jaminan tersebut, tenaga kerja wajib mendaftarkan diri untuk didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran yang persentasenya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dunia industri tidak lepas dari peran tenaga kerja dalam hal kelangsungan produksi dalam suatu industri. Disadari atau tidak, tenaga kerja merupakan penggerak roda industri, termasuk direksi yang menjadi kunci dalam arah pelaksanaan kebijakan suatu perusahaan. Semakin banyaknya industri yang muncul dan berkembang pasca terjadinya Revolusi Industri di Inggris pada abad ke-19 merupakan titik awal penggunaan tenaga kerja manusia sebagai penggerak roda perekonomian industri.

<sup>1</sup>Kartikasari Erny, 2021, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dan Pengusaha.*”

<sup>2</sup><https://m.bisnis.com/finansial/read/20210118/215/1344507/jumlah-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-digerogoti-corona-susut-27-juta>, di akses pada 28 Maret 2021 pukul 22.27

<sup>3</sup><https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html> diakses pada 28 Maret 2021 pukul 22.38.

<sup>4</sup><http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/210> diakses pada 28 Maret 2021 pukul 22.40.

<sup>5</sup>Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2019, *Pokok Pokok Hukum Asuransi*, cet.2, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 73-76.

Masalah-masalah pun timbul, mulai dari upah yang tidak layak, jam kerja yang tidak manusiawi, hingga tenaga kerja anak.

Produktivitas tenaga kerja yang tinggi, iklim investasi yang aman, serta upah buruh yang murah sering kali menjadi promosi untuk menarik investor asing masuk. Akan tetapi dengan terjadinya ketimpangan-ketimpangan seperti upah yang tidak layak serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang buruk, jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar bagi pengusaha sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kerja, serta pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pegawai dan regulator.

Dengan terbitnya Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU BPJS) memberi babak baru dalam pengaturan terkait hak-hak warga Negara. Utamanya tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sebagai kompensasi atas resiko pekerjaan. Dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Indonesia mulai menerapkan fungsi negara sebagai *welfare state*. Sebenarnya pembentukan BPJS bukan merupakan hal baru dalam dunia ketenagakerjaan. Hal ini karena sebelumnya jaminan sosial bagi tenaga kerja sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja alias Jamsostek yang dilembagakan kepada PT. Jamsostek dalam pelaksanaan dilampirkan.

Jaminan sosial dalam kaitannya adalah bagi kesejahteraan untuk seluruh warga negara termasuk dalam hal ini tenaga kerja yang bekerja terhadap pengusaha. Seperti dalam ketentuan X/MPR/200 dinyatakan bahwa presiden dalam kapasitasnya diberikan tugas untuk membentuk suatu sistem jaminan sosial. Jaminan sosial dalam hal ini berkaitan juga dengan jaminan bagi tenaga kerja dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional, seluruh rakyat Indonesia nantinya akan memiliki sistem Jaminan Sosial tersebut akan dilembagakan dalam suatu badan yang berbentuk hukum publik, dalam hal kelembagaan jaminan sosial Indonesia.<sup>6</sup>

Berikut jenis-jenis program BPJS Ketenagakerjaan.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pensiun

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja di PT. Rimba Mujur Mahkota?
2. Bagaimana Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh BPJS Dalam Memberikan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Permasalahan Kesehatan Ketenagakerjaan?

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Rimba Mujur Mahkota.
2. Untuk mengetahui Fungsi BPJS dalam memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Rimba Mujur Mahkota.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode yang mempelajari

<sup>6</sup>*Ibid*, halaman 73-76.

fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Adapun untuk memperoleh data nyata dalam lapangan, maka peneliti terjun langsung ke PT. Rimba Mujur Mahkota guna memperoleh data yang akurat dan jelas.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sikarakara Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara Indonesia. PT. Rimba Mujur Mahkota telah membangunkan Kebun Plasma seluas 600 Ha sejak tahun 2000 dan kini luas keseluruhan telah mencapai 5556.00 Ha, dan terdiri dari delapan divisi dan rata-rata tenaga kerjanya berprofesi sebagai pemanen kelapa sawit. Alasan memilih lokasi tersebut karena tenaga kerjanya masih banyak yang belum paham tentang kegunaan BPJS Ketenagakerjaan. PT. Rimba Mujur Mahkota Kecamatan Natal termasuk dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Ronald Dworkin disebut juga penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku, maupun proses pengadilan yang diputus oleh hakim di pengadilan.

Selain penelitian hukum normatif penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>8</sup> Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, hukum atau badan pemerintah. Spesifikasi penelitian ini dikatakan

tergolong *yuridis normatif* dan bersifat *deskriptif analisis* dengan memperhatikan perundang – undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja bagi pekerja. Sehingga berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>9</sup>

Dalam mengumpulkan dan mencatat data dalam penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis data secara mendalam dan kemudian dilakukan penafsiran. Data dalam penelitian ini dikumpulkan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Metode analisis kualitatif empiris didasarkan pada kedalaman data yang terhimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Melalui metode ini peneliti berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru tentang bagaimana seharusnya penanggulangan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah diperoleh peneliti, Jumlah tenaga kerja di PT. Rimba Mujur Mahkota sebanyak 149 orang. Peneliti mewawancarai salah satu anggota tenaga kerja di perusahaan tersebut sebagai perwakilan dari keseluruhan tenaga kerja di PT. Rimba Mujur Mahkota.

Peneliti berkunjung untuk melakukan wawancara kepada pihak PT. Rimba Mujur Mahkota perihal pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Rimba Mujur

<sup>7</sup>Deddy Mulyana, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Metode Ilmu Sosial lainnya)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 160.

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 43.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm 10.

Mahkota. Peneliti bertemu dengan bapak PU (Pekerjaan Umum) selaku wakil pengurus di perusahaan tersebut dan menanyakan perihal pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dalam hal kepesertaan tenaga kerjanya yang sudah ikut program BPJS Ketenagakerjaan dan apakah pemberian Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di PT. Rimba Mujur Mahkota sudah sesuai dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.

Beliau menjelaskan bahwa “di PT. Rimba Mujur Mahkota tenaga kerja sebanyak 149 orang sudah ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Apabila yang bersangkutan sudah bersedia. Program yang didaftarkan ada 4 yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Dan seluruh tenaga kerja di PT. Rimba Mujur Mahkota dilindungi secara hukum”.

Peneliti juga menanyakan perihal sistem pencairan dana serta kinerja BPJS Ketenagakerjaan kepada bapak wakil pengurus PT. Rimba Mujur Mahkota. Beliau menjawab, “sejauh ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja dengan baik terhadap pesertanya. Walaupun pernah ada tenaga kerjanya yang sudah mengalami kecelakaan kerja akibat kerja dan belum pernah ada yang meninggal dunia akibat kerja. Sehingga pencairan program BPJS Ketenagakerjaan terlihat secara nyata bagi tenaga kerjanya yang sudah mengalami kecelakaan kerja akibat kerja”.

Berdasarkan hasil survey dengan pihak PT. Rimba Mujur Mahkota, dapat diperoleh bahwa tidak adanya pelanggaran atas terpenuhinya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”. Oleh sebab itu, Peranan BPJS Ketenagakerjaan sudah maksimal, karena sudah seluruhnya tenaga kerja di PT. Rimba Mujur Mahkota ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Upaya-upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan pada prinsipnya adalah upaya penjaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, pekerja/buruh harus melakukan pendaftaran dan membayar iuran sebagai peserta BPJS. Upaya-upaya dilakukan dengan mewujudkan Program dan BPJS Ketenagakerjaan wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan. Ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Rimba Mujur Mahkota secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial” dan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaannya sudah maksimal, karena sudah seluruhnya tenaga kerja di PT. Rimba Mujur Mahkota ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Kendala – kendala yang dihadapi dalam BPJS Ketenagakerjaan dari Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu kbelum

sempurnanya kualitas sumber daya manusia dalam tingkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan kapasitas seseorang dalam mengurus segala pekerjaan, keterampilan kerja dan kemampuan intelektual. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana berupa perlengkapan dalam terselenggaranya aktifitas guna memperlancar atau mempermudah pergerakan yang dilakukan program BPJS Ketenagakerjaan. Belum sempurnanya komunikasi dalam menyampaikan informasi keputusan dari orang yang membuat keputusan terhadap pelaksana kebijakan.

3. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam penjaminan kesehatan tenaga kerja yaitu dengan menerapkan Ruang Lingkup BPJS yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdapat dalam Pasal 6 : BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun dan Jaminan kematian. Sehingga dalam hal ini terbentuknya BPJS ketenagakerjaan dimaksudkan bahwa hak-hak setiap tenaga kerja dijamin oleh hukum dan perundang-undangan baik terkait dengan kewajiban pemerintah maupun kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Hukum Asuransi*, Cet.2, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- [2] Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [3] Deddy Mulyana, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Metode Ilmu Sosial lainnya)*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [4] <https://m.bisnis.com/finansial/read/20210118/215/1344507/jumlah-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-digerogoti-corona-susut-27-juta>, di akses pada 28 Maret 2021 pukul 22.27
- [5] <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sjjarah.html> diakses pada 28 Maret 2021 pukul 22.38.
- [6] <sup>1</sup><http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/210> diakses pada 28 Maret 2021 pukul 22.40.
- [7] *Ibid*, halaman 73-76.
- [8] Kartikasari Erny, 2021, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dan Pengusaha Terhadap Masalah Ketenagakerjaan Di Masa Pandemi Covid-19*”, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.
- [9] Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2019, *Pokok-Pokok*

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DIMASA PANDEMI COVID 19  
TERHADAP NASABAH (STUDY KASUS) PT BANK SUMUT KCP.  
MANDALA BY PASS, MEDAN DENAI KOTA MEDAN**

Oleh

Siti Dea Nur Halizah Hsb<sup>1)</sup>, Adawiyah Nasution<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

E-mail: [1deahalizah1234@gmail.com](mailto:deahalizah1234@gmail.com), [2nastyawie70@gmail.com](mailto:nastyawie70@gmail.com)

**Abstract**

Banking has a very important role in the economic activities of the community. However, where the COVID-19 pandemic affects the community's economy, most of them are very difficult to carry out their obligations as customers to the Bank. So it is very difficult for customers to repay the loan. This study aims to find out how the level of customer ability in credit payments during the covid 19 pandemic and the implementation of credit restructuring carried out according to regulations from PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Medan City Medan. The type of research used by the author is descriptive research with a qualitative approach to the nature of empirical/sociological research. Data collection techniques are based on documents and interviews. The results of the analysis carried out indicate that the implementation of the credit restructuring policy at PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass is running in accordance with the regulations and credit restructuring policies, namely by saving through lowering interest rates, extending the term, reducing credit arrears, reducing principal arrears.

**Keywords: Credit Restructuring, Banking.**

**PENDAHULUAN**

Dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian dimana peran Bank yang sangat besar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. Salah satu kegiatan perbankan yang sangat membantu masyarakat adalah dengan memberikan fasilitas kredit. Fasilitas kredit terbukti membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat serta negara.

Pemberian kredit yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat tentunya memiliki beberapa syarat. Salah satunya adalah jaminan bagi pihak kreditur untuk pertanggung jawaban debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Debitur dapat mengajukan aset ataupun harta bendanya yang dapat dijadikan jaminan untuk utangnya.

Menurut Badriyah Harun, pengertian jaminan dalam bukunya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*" merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikurikan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit telah diberikannya.<sup>1</sup>

Kemunculan pandemi virus Corona atau sering disebut dengan Covid 19 di Indonesia, memberikan dampak kepada seluruh sendi-sendi kehidupan. Bukan hanya dari segi kesehatan tetapi juga banyak aspek yang

<sup>1</sup>Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2010, hal.67.

terkena dampaknya. Sektor industri menjadi salah satu aspek yang paling merugi dan mengalami penurunan yang drastis akibat pembatasan kegiatan demi menekan angka penyebaran virus.

Terganggunya sistem perekonomian dunia termasuk di Indonesia akibat pandemi virus corona memaksa pemerintah untuk membuat aturan bekerja dari rumah, sehingga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang melakukan distribusi barang dan jasa ataupun jenis UMKM lainnya, pendapatannya menurun drastis. Hal ini tentu menjadi kendala bagi pelaku usaha yang memiliki pinjaman di Bank. Tentunya para pelaku usaha tersebut akan kesulitan untuk membayar utangnya pada kreditur.

Setiap pelaksanaan pinjam-meminjam antara debitur dengan kreditur, tidak terlepas dari resiko ataupun hambatan yang akan mengganggu kinerja pihak kreditur maupun peluang debitur dalam melunasi kredit. Faktor lain yang paling mendasar pada masa ini ialah munculnya pandemi *Covid 19* yang mempengaruhi perekonomian dunia yang menurun drastis. Tidak sedikit pula debitur yang lalai akan perjanjian yang telah dibuat seperti mereka tidak dapat membayar ataupun melanjutkan pembayaran tersebut. Kelalaian ataupun kealpaan, cidera janji, dalam suatu perjanjian yang dilakukan debitur disebut wanprestasi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, yang artinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”<sup>2</sup> Sehingga dari penyebab seperti ini dapat menimbulkan akibat hukum bagi debitur atas jaminannya. Bagaimana kebijakan yang akan

diambil oleh pihak kreditur kepada debitur yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai nasabah.

Dalam hal ini pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan untuk menekan penyebaran virus corona dengan melakukan restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan bagi nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya pada bank. Upaya restrukturisasi atau keringanan cicilan ini juga bertujuan untuk menjadi stabilitas sektor jasa keuangan dan memberikan ruang gerak bagi sektor usaha dan masyarakat untuk tetap bertahan dimasa pandemi sehingga mempercepat pemulihan perekonomian nasional. Pihak Bank membantu masyarakat dalam menyikapi penurunan daya perekonomian masyarakat melalui program restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan atau penataan kembali yang dilakukan. Dalam hal ini ialah kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi dalam arti luas (menurut pedoman akuntansi perbankan Indonesia atau PAPI, revisi 2001) mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, system dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Restrukturisasi Kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga dan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh pemerintah pada awal pandemi corona virus muncul di Indonesia adalah sebagai langkah meringankan beban

<sup>2</sup>Wirjodo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2010. hal.17.

ekonomi para nasabah bank ataupun pembiayaan ditengah pandemi covid 19. Maka dapat disimpulkan restrukturisasi adalah usaha untuk memperbaiki ataupun menata kembali dalam konteks kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya.<sup>3</sup>

Dalam perencanaan ataupun pelaksanaan restrukturisasi utang, pada dasarnya tergantung pada kesepakatan antara debitur (nasabah) dan kreditur (Bank) dalam menyusun kembali perjanjian pembayaran utangnya. Tidak ada satu pun ketentuan undang-undang yang mengatur secara rinci metode yang harus dilaksanakan oleh debitur dan kreditur dalam pelaksanaan restrukturisasi utang. Hal itu telah banyak praktek yang telah berkembang dalam beragam jenis metode pelaksanaan restrukturisasi utang yang banyak dilakukan masyarakat.<sup>4</sup>

PT. Bank Sumut KCP. Mandala By Pass yang menjadi fokus peneliti juga menerapkan program restrukturisasi kepada nasabah terdampak pandemi virus *Covid 19*. Kebijakan restrukturisasi ini tentunya diharapkan dapat meringankan nasabah dalam menjalankan kewajibannya dengan memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pembayaran hutangnya atau lebih ringan untuk menghindari kebangkrutan nasabah dan dapat memperbaiki posisi keuangan nasabah selaku debitur. Nasabah atau debitur terdampak virus Covid 19, baik itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat menjalankan usahanya kembali.

Adapun permasalahan dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesanggupan nasabah dalam pembayaran kredit dimasa Pandemi Covid 19 pada PT

Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Kota Medan?

2. Bagaimana implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dimasa Pandemi Covid 19 sesuai peraturan yang berlaku Di PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Kota Medan?

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesanggupan nasabah dalam pembayaran kredit dimasa Pandemi Covid 19 pada PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Kota Medan.
2. Untuk memperoleh data bagaimana dampak dari implementasi program restrukturisasi kredit dimasa Pandemi Covid 19sesuai peraturan yang berlaku Di PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Kota Medan.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang peneliti pilih terletak di Jalan. Mandala By Pass No.106 B, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yaitu di Kantor PT. Bank Sumut KCP Mandala By Pass.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif yang hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>5</sup>

Sifat penelitian yang akan diteliti berdasarkan permasalahan di atas yaitu penelitian secara empiris/sosiologis. Hal yang sama dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang

<sup>3</sup>Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 242.

<sup>4</sup>Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 117.

<sup>5</sup>Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT. Tarsito, Bandung, 2012, hal. 5.

memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>6</sup>

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan sumber data empiris bebas yaitu menggunakan jenis data primer dan sekunder juga jenis data tersier. Akan tetapi peneliti akan sangat membutuhkan data sekunder yang mana data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data – data yang bersumber dari buku – buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini ataupun sumber lain yang ada dilapangan yang dapat menunjang efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah dengan memeriksa terlebih dahulu data yang diperoleh untuk menjamin apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Dengan menganalisis sumber data yaitu melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian data juga didapat melalui wawancara yang merupakan alat utama untuk mendapatkan informasi sebanyak dan seakurat mungkin. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu Pegawai Dari PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass Kota Medan. Sehingga penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan demikian hasil penelitian bersifat evaluatif analistis dengan *problem solution*.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk mendapatkan data yang mendalam, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif dimulai dengan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan dan

doktrin serta sumber data lainnya kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti.

Semua data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan dengan cara dideskripsikan. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di masa Pandemi Covid 19 Terhadap Nasabah Di PT. Bank Sumut KCP Mandala By Pass Kota Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal kegiatan penyaluran kredit oleh bank kepada nasabah (Debitur) hakikatnya memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat. Tetapi dalam keadaan Indonesia yang sangat kurang baik akibat Pandemi Covid 19 sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat terkhususnya pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit kepada bank sehingga terjadi tingkat kesanggupan bayar dari nasabah begitu sangat terhambat.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti bahwa keluhan yang diterima Bank bahwa banyak sebagian dari para nasabah yang mengeluh sulit melakukan pembayaran kewajiban yang harus dilunasinya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Mahnizar selaku Pimpinan PT Bank Sumut KCP Mandal By Pass pada tanggal 1 september 2021 mengatakan. Adapun kebijakan program restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan dan penurunan pendapatan yang menurun namun operasional bisnis masih berjalan (usaha masih berjalan), kemudian dalam memberikan program restrukturisasi

<sup>6</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. *Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme penelitian hukum (normative dan Empiris)*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2010. Hal 205

harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang diambil oleh peneliti, berikut beberapa contoh kebijakan restrukturisasi pada PT. Bank Sumut KCP Mandala By Pass Medan yaitu, Tuan M Jamil yang beralamat di Dusun III Lantasan lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Beliau seorang Wiraswasta dan memiliki usaha gas. Dengan ini PT. Bank Sumut telah memberikan fasilitas kredit kepada Tuan M Jamil (debitur) dengan jumlah Rp.50.000.000,- dengan jaminan kredit yang diberikan oleh debitur berupa sebidang tanah seluas 123 m<sup>2</sup> dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya. Pada tanggal 18 Maret 2019 sesuai dengan akta notaris yang telah di sepakati. Pada tanggal 25 Juni 2020 Tuan M Jamil (debitur) mengajukan permohonan restrukturisasi kredit karena mengalami kesulitan pembayaran cicilan pinjaman sehingga dengan itu ia menyetujui syarat-syarat yang ditanda tangani di atas materai.

Implementasi kebijakan restrukturisasi kredit Tuan M Jamil:

#### 1. Penurunan suku bunga

Dengan data yang didapat oleh penulis bahwa permohonan Tuan M Jamil disetujui oleh PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass sebesar 7% pertahun dengan cara perhitungan bunga Annuitas bulanan secara floating rate dengan penyesuaian ditetapkan sekali dalam 6 bulan selama periode bulan januari sampai dengan juni dan periode bulan juli sampai dengan desember dalam tahun berjalan atas jumlah uang yang telah diambil oleh debitur diperhitungkan menurut peraturan-peraturan Bank yang berlaku atau yang akan berlaku dan harus dilunasi sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disetujui bersama.

#### 2. Perpanjangan Jangka Waktu

Sesuai dengan kesepakatan dalam permohonan restrukturisasi kredit PT. Bank Sumut KCP Mandala By Pass Medan (kreditur) memberikan perpanjangan waktu 33 (Tiga puluh tiga) Bulan, Debitur membayar dengan cara angsuran setiap bulannya dan lunasnya pada tanggal maret 2023, yang sebelumnya disepakati lunas pada tanggal 18 maret 2022.

3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit  
 Pengurangan tunggakan bunga kredit yang disetujui oleh kreditur kepada pihak debitur sebesar 7% per tahun.

4. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit  
 Kreditur memberikan keringanan Tunggakan Pokok Kredit kepada pihak Tuan M Jamil sebesar Rp. 33.139.446 (Tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan pengurangan biaya administrasi sebesar 100%, biaya propisi sebesar 100% dan biaya-biaya lain yang timbul karena adanya perjanjian ini.

Apabila restrukturisasi kredit yang dilaksanakan namun dalam perkembangannya tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan sebagai akibat tidak adanya itikad baik debitur (*willingness to pay*), maka kewajiban debitur dikembalikan pada posisi semula dengan memperhitungkan pembayaran-pembayaran lain yang menjadi kewajiban tambahan.

## PENUTUPAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa restrukturisasi dilakukan yang diberikan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang telah dilakukan terdapat indikasi bahwa debitur masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank.

<sup>8</sup>Wawancara dengan bapak Mahnizar Agusssyah Fitra, Pimpinan di PT Bank Sumut KCP Mandala By

Pass Kota Medan Pada tanggal 1 September 2021. Pukul 13.00.

Dalam keadaan Indonesia yang sangat kurang baik akibat Pandemi Covid 19 sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat terkhususnya pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit kepada bank sehingga terjadi tingkat kesanggupan bayar dari nasabah begitu sangat terhambat. Nasabah menguluh akibatnya ekonomi sulit dan melemah sehingga mereka sulit melakukan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo akibat terdampak oleh kondisi kesulitan keuangan dan ekonomi atau kondisi lain yang disebabkan diluar kuasa Nasabah.

Dengan ini berdasarkan peraturan POJK No.11 tahun 2021 yang mengatur mengenai ketentuan restrukturisasi kredit sebagai dampak pandemi covid 19 dengan tujuan menjaga stabilitas system keuangan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2010. Hal 205.
- [8] Wawancara dengan bapak Mahnizar Agusssyah Fitra, Pimpinan di PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass Kota Medan Pada tanggal 1 September 2021.Pukul 13.00.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badryiah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal.67.
- [2] Wirjodo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2010. hal.17.
- [3] Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 242.
- [4] Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 117.
- [5] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT. Tarsito, Bandung, 2012, hal. 5.
- [6] Ronny Hanitijo Soemitro. *Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme penelitian hukum (normative dan Empiris)*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.

---

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
MELALUI UPAYA ARBITRASE****Oleh****Suci Indah Lestari<sup>1)</sup>, Tri Reni Novita<sup>2)</sup>****<sup>1,2</sup>Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan****E-mail: <sup>1</sup>[lestariindahsuci7@gmail.com](mailto:lestariindahsuci7@gmail.com), <sup>2</sup>[trireninovita@gmail.com](mailto:trireninovita@gmail.com)****Abstract**

The COVID-19 pandemic has had a huge impact all over the world. Almost all government and private sectors have been affected by the outbreak. One of the impacts is that the settlement process between the company's dispute relationship and the workers becomes uncontrollable which causes the economy to worsen. As for the entrepreneur who makes a denial of the worker that has been stipulated by the legislation, it will result in a dispute between the entrepreneur and his/her workers. Legal efforts to obtain their rights so that workers get justice by means of workers resolving disputes through arbitration efforts so that both parties get the same justice. This type of research is normative research using primary and secondary materials. The technique of collecting data is based on literature study and document study. The results of the analysis carried out indicate that the settlement of industrial relations disputes through arbitration efforts, namely by the provisions of Law No. 2 of 2004 concerning industrial relations disputes must be based on the agreement of the disputing parties in written form in an arbitration agreement, the contents of which must contain the submission of the agreement. settlement of industrial relations disputes through arbitration.

**Keywords: Settlement of Industrial Relations Disputes Through Arbitration****PENDAHULUAN**

Dunia saat ini tengah menghadapi Pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pengaruhnya sangat besar hampir di semua sektor pemerintahan maupun swasta. Hal ini juga mengakibatkan proses penyelesaian antara hubungan perselisihan pihak perusahaan dan para pekerja menjadi tidak terkendali akibat merambaknya wabah tersebut. Penyebaran covid-19 juga mengakibatkan perekonomian semakin memburuk dan terjadinya perselisihan antara pihak pengusaha dan pekerja. Pengusaha yang melakukan suatu pengingkaran terhadap pekerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan perseelisihan antara pengusaha dan pekerja. Bila mana hal itu terjadi, pekerja akan melakukan suatu upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya sehingga pekerja mendapatkan keadilan. Penyelesaian peselisihan antara pengusaha dan pekerja melalui upaya arbitase

sehingga kedua belah pihak mendapatkan keadilan yang sama.

Sebagai suatu Negara Hukum, Indonesia menghendaki agar segala kekuasaan dan wewenang harus selalu dilaksanakan berdasarkan hukum dengan tidak pandang bulu, tidak membedakan golongan, suku, keturunan, agama, dan status sosial. Hukum harus ditegakkan dan selalu dihormati serta ditaati, tanpa pengecualian apakah warga masyarakat ataupun penguasa negara, dimana segala perbuatan atau tindakannya harus didasarkan pada hukum. Telah disadari bahwa tanpa tersedianya perangkat aturan hukum, kehidupan masyarakat menjadi kacau balau, tidak ada ketentraman dan sulit untuk dikendalikan. Tidak jarang dalam suatu kehidupan masyarakat atau negara timbul pertentangan atau benturan-benturan kepentingan. Oleh karena itu, kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat atau bernegara

adalah merupakan faktor yang menentukan selain faktor-faktor yang lainnya. Karena dengan adanya seperangkat aturan hukum, maka timbul batasan-batasan dalam kehidupan masyarakat yang akan menjadikan suasana lebih terarah, stabil, tenteram, dan dapat dikendalikan.<sup>1</sup> Demikian pula di dunia usaha atau perusahaan, suatu peraturan dibutuhkan untuk mengatur hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh agar rencana kerja dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Undang-undang No 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah (kutipan) perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan hubungan kerja maupun perjanjian kerja seperti yang dimaksudkan di atas, sering kali pengusaha mengabaikan hak-hak pekerja/buruh terutama upah. Untuk melindungi hak-hak dari pekerja/buruh tersebut, pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai macam peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pekerja/buruh, yang salah satu diantaranya adalah Hukum Perburuhan. Yang dimaksud dengan Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan kejadian di mana seseorang berkerja pada orang lain dengan menerima upah.<sup>3</sup>

Apabila terjadi suatu perselisihan hubungan industrial, pengusaha, pekerja/buruh, lebih banyak memilih tempat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Padahal ada penyelesaian

perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan hubungan industrial yang putusannya memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan dari pengadilan hubungan industrial. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Arbitrase, yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan, diluar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter.

Arbitrase berasal dari kata *arbitare*, *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (inggris), *schirdspruch* (jerman) dan *arbitrage* (prancis) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh *arbiter* atau wasit.<sup>4</sup> R. Subekti mengartikan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.<sup>5</sup>

Batasan arbitrase yang lebih terperinci lagi diberikan oleh Abdul Kadir Muhammad, yang menyatakan bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak yang bersengketa. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan

<sup>1</sup>Jelita, <http://jelita249.blogspot.com> Minggu 22 Agustus 2021.

<sup>2</sup>Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan perundang-undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hlm 17.

<sup>3</sup>Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 4.

<sup>4</sup>R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Bina Cipta, 1992, hlm 1.

<sup>5</sup>Ibid hlm 2

berkontrak dalam hukum perdata.<sup>6</sup> Dari pengertian yang diberikan ini, tampak bagi kita bahwa Arbitrase tidak lain merupakan salah satu badan peradilan yang putusannya memiliki sifat final dan mengikat para pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan mereka dilakukan lewat pranata arbitrase.

Berdasarkan literature, istilah hubungan industrial pancasila (HIP) merupakan terjemahan *labour relation* atau hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dengan melihat perkembangan dan kenyataan yang ada bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ternyata juga menyangkut aspek-aspek lain yang luas. Dengan demikian, hubungan perburuhan tidaklah terbatas hanya hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha saja, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan hubungan industrial adalah mengembangkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi dan

meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia.

Demikian pula mengenai perselisihan hubungan industrial (dahulu disebut perselisihan perburuhan) terkadang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat dalam perselisihan harus bersifat dan bersikap lapang dada serta berjiwa besar untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Secara historis pengertian perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh sehubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan/atau keadaan perburuhan (Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957). Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.15A/Men/1994, istilah perburuhan diganti menjadi perselisihan hubungan industrial.

menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara PT B dengan PT Cipta

<sup>6</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditiya, 1992 hlm 276

Televisi Pendidikan Indonesia Melalui Arbitrase?

2. Bagaimana kekuatan hukum Putusan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagi Para Pihak?

Tujuan peneliti dalam membuat tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara lengkap tentang mekanisme dan/atau tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Arbitrase.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Jalan. Sekip Baru, Petisah Tengah, Kec. Medan Sumatera Utara 20112 tepatnya di Kantor Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara (KADIN-SU). Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan akses yang mudah didapat dan mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan masalah melalui informan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para praktisi hukum, arbiter, maupun lembaga arbitrase yang memiliki pengalaman tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law*

*research*) karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder.<sup>8</sup>

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase serta mengkaji sejauh mana kekuatan hukum putusan arbitrase terhadap perkara mengenai perselisihan hubungan industrial.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pengumpulan data melalui kegiatan studi pustaka dan studi dokumen. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Kualitatif. Artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya pencantuman klausul arbitrase, apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, mereka telah sepakat untuk memilih arbitrase yang telah ditentukan untuk menyelesaikan perselisihan mereka dan dengan demikian perkara tersebut secara absolut berada pada kewenangan arbitrase bukan pada lembaga peradilan biasa. Dengan adanya klausul arbitrase, para pihak tunduk kepada aturan yang berlaku pada lembaga arbitrase yang dipilih. Misalnya para pihak telah memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa mereka, maka para pihak harus tunduk pada aturan (*law of procedure*) dari BANI.

Sesuai dengan asas *pakta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang, maka dengan adanya klausul arbitrase, para pihak terikat untuk menyelesaikan sengketa pada lembaga arbitrase yang telah disepakati. BANI melalui Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 juga

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 101-102

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 83

menyatakan berwenang untuk mengadili perkara dengan alasan bahwa di dalam *investment agreement* (surat perjanjian), para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase (BANI).

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dapat diserahkan kepada arbitrase ad-hoc dan arbitrase instutisional. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase harus terlebih dahulu membuat suatu klausula arbitrase dalam bentuk tertulis baik sebelum terjadinya perselisihan (*pactum de compromittendo*) maupun setelah terjadinya perselisihan/sengketa (*acta compromise*). Setelah itu, barulah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut dapat diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase dan/atau lembaga arbitrase.

Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi dua jenis, yakni perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004).

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase ini adalah kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja di wilayah para pihak berkedudukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase diatur sebagai berikut:<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 September 2021 dengan sekretaris BANI Medan, Bapak **Azwir Agus, SH., M.Hum.**, mengatakan bahwa putusan arbitrase dalam penyelesaian suatu perselisihan adalah bersifat final dan mengikat. Final maksudnya adalah bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak yang berselisih tidak dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, karena putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang langsung memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan

mengikat maksudnya adalah segala sesuatu yang tercantum dalam isi putusan arbitrase wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi (penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela) melalui Pengadilan Negeri dimana putusan arbitrase tersebut diputuskan oleh arbiter/majelis arbitrase.

Selanjutnya menurut Bapak **Azwir Agus, S.H. M.Hum.**, kekuatan hukum putusan arbitrase adalah sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini disebabkan karena pada setiap kepala putusan arbitrase harus memuat irah-irah seperti pada putusan peradilan umum, yakni yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Makna dari irah-irah tersebut adalah bahwa arbiter atau majelis arbitrase dalam menjatuhkan putusannya harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta objektif yang terbukti di persidangan, sehingga putusannya tersebut bernuansa keadilan yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada pihak-pihak yang bersengketa/berselisih dan masyarakat umum tetapi merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, menurut Bapak **Azwir Agus, S.H. M.Hum.**, kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan perwujudan dari kata sumpah yang bermakna bahwa apa yang diucapkan untuk dikerjakan itu mempunyai nilai penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan nilai-nilai yang bersifat kolusi dan nepotisme, serta bukan pula keadilan yang berdasarkan kehendak arbiter atau majelis arbitrase itu sendiri.

<sup>9</sup>Abdul Khakim, *Loc. cit*

**PENUTUP****Kesimpulan**

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase ad hoc (menurut ketentuan Undang-undang nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial) harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih dalam bentuk tertulis pada suatu perjanjian arbitrase, yang isinya harus memuat tentang penyerahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase. Demikian juga dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga arbitrase, sebelum menentukan penyelesaian perselisihan melalui lembaga arbitrase para pihak harus terlebih dahulu membuat klausula arbitrase secara tertulis yang bunyinya sebagai berikut : “*Semua perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh abiter-abiter yang ditunjuk oleh atau menurut peraturan BANI tersebut*”. Oleh karena itu, setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik melalui arbitrase Ad hoc maupun lembaga Arbitrase, para pihak harus terlebih dahulu membuat surat perjanjian (Klasula Arbitrase) dalam bentuk tertulis yang berisi tentang penyerahan penyelesaian hubungan industrial melalui arbitrase/lembaga arbitrase.

Kekuatan hukum suatu putusan arbitrase adalah bersifat mengikat, yang berarti bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam isi putusan arbitrase wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Demikian juga dengan kekuatan hukum putusan pengadilan hubungan industrial adalah bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Oleh karena itu, setiap putusan yang diputuskan oleh arbiter/majelis arbitrase dan/atau hakim majelis arbitrase dan/atau mejelis hakim memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 4.
- [2] Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditiya, 1992 hlm 276.
- [3] Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 83.
- [4] Jelita, <http://jelita249.blogspot.com> Minggu 22 Agustus 2021.
- [5] R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Bina Cipta, 1992, hlm 1.
- [6] Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan perundang-undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hlm 17.

PROSES PEMULIHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA  
(NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF)  
DI BALAI REHABILITAS SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA  
“INSYAF”  
MEDAN SUMATERA UTARA.

Oleh

Suharniyati<sup>1</sup>), Mahzaniar<sup>2</sup>)

<sup>1,2</sup>Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

E-mail: <sup>1</sup>[suharniyati12@gmail.com](mailto:suharniyati12@gmail.com), <sup>2</sup>[mahzaniarfah@gmail.com](mailto:mahzaniarfah@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to determine the role of BRSKPN "Insyaf" in Empowering Drug Abuse Victims in Medan, North Sumatra in 2021. This study uses a descriptive method using a qualitative approach. The discovery of the sample used in this study was through data collection and interviews. Informants in this study were Rehabilitation Center staff and clients who were users and social workers. The results showed that the role of Social Rehabilitation for Drug Abuse Victims "Insyaf" in providing services was very good, it can be seen from the programs that have been given to clients so that clients are able to be more independent and can develop talents and interests. The Social Rehabilitation Center for Drug Abuse Victims provides training that is able to hone the skills of clients so that when clients leave the "Insyaf" Rehabilitation Center, they can support themselves and be able to compete with the general public.

**Keywords: Drugs, Roles, Encouragers and Inhibitors**

**PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peranan penting dalam menentukan kehidupan suatu bangsa. Sejatinya anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang menjadi tonggak harapan dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Mengingat pentingnya posisi mereka selaku pemuda dalam kehidupan bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dalam hal ini demi terwujudnya pemuda yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia. Namun yang terjadi hari ini, semakin banyak masyarakat khususnya anak-anak yang telah terseret dan terjerumus ke dalam perbuatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya yang oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia kemudian menyebutnya

dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Perbuatan ini tentunya tidak dapat dianggap sepele karena jika dibiarkan secara terus-menerus, perilaku ini berpotensi akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi, seperti akan timbulnya kejahatan-kejahatan lain atau beralih dan berkembangnya penyalahgunaan zat adiktif menjadi penyalahgunaan narkotika atau psikotropika kelas berat.

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien.

Para pasien yang masuk di pusat Rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri

dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan, oleh karena itu psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program Rehabilitasi. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang. Kurangnya informasi dalam hal cara penanganan menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu perlu diwujudkan lingkungan yang mendukung. Di Indonesia lingkungan yang paling penting adalah keluarga. Ketersediaan keluarga untuk menerima remaja yang pernah menggunakan narkoba di tengah keluarga merupakan dukungan yang amat berharga hidup dengan bekal pendidikan yang terbatas.

Bagi korban ketergantungan narkoba, diperlukan layanan terpadu untuk membawa mereka kembali ke tengah masyarakat. Layanan ini biasanya mampu membantu untuk melepaskan dirinya dari jeratan narkoba dan bisa kembali bersosialisasi ditengah masyarakat. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak social yang ditimbulkannya. Para remaja korban narkoba akan menanggung beban psikologis dan sosial. Oleh karena itu solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan tempat rehabilitasi guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna narkoba.

Narkotika merupakan bagian dari narkoba yaitu segolongan obat, atau zat adiktif lainnya yang apabila masuk kedalam tubuh akan berpengaruh pada jalannya fungsi otak dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam kesadaran, perasaan, pikiran dan perilaku pemakai. Sedangkan,

menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>1</sup>

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif) pada akhir-akhir ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam karena hal ini terkait dengan kelangsungan masa depan anak-anak penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang benar-benar serius khususnya melalui pendekatan sosiologi yang benar, penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang tidak berkonsep akan merupakan ancaman berlanjut kepada cucu generasi penerus bangsa. Barangkali sebagian warga masyarakat belum menyadari dan merasa penyalahgunaan NAPZA bukan urusannya, selama anaknya atau keluarganya belum menjadi korban.

Bagi korban ketergantungan narkoba diperlukan layanan yang terpadu untuk membawa mereka kembali ketengah masyarakat. Layanan ini biasanya mampu membantu untuk melepaskan dirinya dari jeratan narkoba dan bisa kembali bersosialisasi ditengah masyarakat sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk baik bagi segi kesehatan pribadinya maupun dampak social yang ditimbulkannya. Para remaja korban narkoba akan menanggung beban psikologis dan sosial, oleh karena itu solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan tempat rehabilitasi guna menyediakan tempat

<sup>1</sup>Miftah Toha, *Biokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, (Kencana: Jakarta), 2008, hal. 6.

untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna.

Banyak organisasi-organisasi non-pemerintah dalam negeri yang membantu rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkoba salah satunya adalah Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN) "Insyaf". BRSKPN "Insyaf" didirikan sebagai wujud keinginan dari komponen masyarakat yang mempunyai suatu kewajiban dan bentuk nyata kegiatan membantu pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional untuk berperan serta aktif dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkoba.<sup>2</sup>

Berdasarkan Uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran BRSKPN "Insyaf" Dalam Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Napza .
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat pola rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba dibalai Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA "Insyaf" Lau Bakeri Kecamatan Kutilimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peranan BRSKPN "Insyaf" dalam pemberdayaan korban penyalahgunaan Napza di Medan Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat pola rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba dibalai Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA "Insyaf" di Sumatera.

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan induktif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan yang khusus yang di kemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum. Dengan demikian, penelitian akan menggambarkan peranan balai rehabilitasi sosial Insyaf dalam pemberdayaan korban penyalahgunaan NAPZA medan sumatera utara, Berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Dalam penelitian sesuai dengan judul yang peneliti tetapkan, maka lokasi yang peneliti pilih adalah Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN) "Insyaf" Medan Sumatera Utara.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.

### b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip atau data. Serta atau bahan dari sumber lain yang menjadi faktor menunjang dari penelitian ini.

Dalam melakukan pengumpulan data, dilakukan 2 ( dua ) cara yaitu:

1. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku

<sup>2</sup>BNN, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, ( BNN : Senayan Jakarta ), 2003, hal. 14.

referensi atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen yang menunjang dalam objek-objek penelitian, dan pokok permasalahan yang ada.

2. Penelitian Lapangan (*field research*) atau wawancara, adalah suatu bentuk komunikasi siverbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau peranannya yang tepat. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian.

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh.

Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkam tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara ke dalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba (BRSKPN) “Insyaf” Medan Sumatera Utara

Berawal pada Tahun 1970 dilaksanakan rapat kordinasi Pemda Tk. I Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kanwil

Departemen Sosial Provinsi Sumatera utara untuk mengatasi anak nakal dan korban narkotika, hasil dari rapat koordinasi tersebut Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberikan tanah seluas 8.950 m<sup>2</sup> (128m x 70m) yang terletak di Jalan Pancing Williemi Iskandar Nomor 377.

Pembangunan lahan tersebut dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Sosial Provinsi Sumatera Utara, Selasai Tahun 1977 dan serta mulai beroperasi awal Tahun 1979, Panti ini diberi nama Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika (PSRANKN). Tujuannya untuk membina anak nakal dan koban narkotika dari kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara.

Seiring dengan meningkat dan meluasnya korban penyalahgunaan Napza dari tahun ke tahun dengan dimensi yang sangat beragam sehingga membutuhkan penanganan secara menyeluruh, maka lokasi PSPP “Insyaf” Medan saat ini tidak memungkinkan sebagai Panti Sosial Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza karena berada dipusat kota. Untuk departemen sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 tentang pemindahan lokasi PSPP “Insyaf” Medan ke Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Pada periode berikutnya dikeluarkan surat keputusan menteri sosial No. 09/HUK/2008 tentang pemindahan lokasi Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf” ke Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 23 Januari 2008. Maka dilakukan perpindahan sarana dan prasarana secara bertahap dan kegiatan operasional pelayanan rehabilitasi sosial mulai dilaksanakan bulan Juni 2008 di Lau Bakeri – Deli Serdang.

Kemajuan zaman dengan pertumbuhan jumlah korban Penyalahgunaan Napza yang terus meningkat mendorong kementerian Sosial menerbitkan Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2018 tentang perubahan panti menjadi

balai, dimana PSPP “Insyaf” Medan berubah menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) “Insyaf” Medan Sumatera Utara. Dengan peraturan menteri sosial tersebut, BRSKPN “Insyaf” lebih dapat memberikan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tingkat lanjut, terhadap korban penyalahgunaan Napza dalam lingkup yang lebih besar di wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat, disamping itu BRSKPN “Insyaf” juga menjadi rujukan bagi Institusi penerima Wajib Laport bagi penanganan Korban Penyalahgunaan Napza.

**B. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat rehabilitasi sosial dibalai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Insyaf” Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.**

Motivasi merupakan dorongan yang bersifat naluriah pada setiap individu. Tingkat motivasi seseorang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan dorongannya untuk melakukan perubahan. Motivasi juga tersusun secara konstruktif dan bersinergi terhadap pola tujuan masing-masing individu. Secara umum motivasi bersifat membangun dan memberikan arahan untuk bertindak lebih baik. Peranan seorang individu dalam mengatasi ketergantungannya pada narkoba tentu harus memiliki motivasi yang kuat agar rasa ketergantungan itu dapat hilang. Motivasi yang tinggi akan sangat membantu seorang pecandu untuk dapat lepas dari kondisi ketergantungan.<sup>3</sup>

Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu, takut atas murka Tuhan, apa bila dia berbohong, dengandasar takut murka atau

hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.

Sumpah pemutus bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, sumpah pemutus harus bersifat *deccisoir*, artinya bersifat memutus dan mengakhiri perakara. Dalam hal ini, hakim perlu mempertimbangkan benar-benar apakah sumpah yang diminta itu sudah bersifat *deccisoir*, sehingga bersumpah itu perkara menjadi selesai.

Banyak pecandu memiliki motivasi rendah terhadap dirinya sendiri, kebanyakan dari mereka yang memiliki motivasi rendah adalah mereka yang tidak ingin lepas dari ikatan narkoba dan telah merasakan kenyamanan tanpa mengetahui dampak kedepannya, berikut beberapa faktor pendukung berhasilnya proses rehabilitas.<sup>4</sup>

Program rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan pecandu pada ketergantungan narkoba. pada dasarnya rehabilitasi adalah untuk menyelamatkan para korban penyalahgunaan agar tidak terjerumus lebih jauh dan dapat terjadi perubahan perilaku dan psikologis. Keberhasilan rehabilitasi tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti yang telah banyak dipaparkan di atas adalah peranan diri sendiri untuk memiliki motivasi yang tinggi terhadap pemulihannya, peran dan dukungan aktif keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial.

Dari beberapa faktor pendukung program rehabilitasi diatas, ada juga beberapa faktor penghambat dalam proses rehabilitasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut penjelasannya:<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Ibnu Aljazuri Amri dkk, ”Pengaruh Motivasi Individu, Dukungan Keluarga dan Lingkungan Sosial Terhadap Peningkatan Keberhasilan Rehabilitasi di Wilayah Kerja Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Selatan” Jurnal Mirai Managenet, Vol.1 Nomor 2, Oktober 2016, hal. 464.

<sup>4</sup>Ibid. Hal. 465

<sup>5</sup>Evelyn Felicia, ”Kendala Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Yogyakarta”, jurnal Fakultas Hukum Universitas ATMA Yogyakarta, hal. 11.

### a. Faktor internal

- Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus.
- Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya.
- Pecandu takut dijadikan target operasi. Selain dari tiga faktor tersebut sikap pecandu merupakan faktor yang paling mendominasi terhambatnya pemulihan dalam rehabilitasi.

### b. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar diri pecandu diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>6</sup>

- Ketidak harmonisan hubungan antara orangtua, konflik yang terjadi dalam keluarga dapat berpengaruh terhadap ke harmonisan hubungan tidak hanya antar orangtua tetapi juga pada anak-anak
- Orangtua terlalu menekan anak, remaja yang terus menerus mendapat tekanan dalam lingkungan keluarga akan membuat anak merasa tidak nyaman, suasana hati yang tegang dan tidak nyaman jika berada dalam lingkungan keluarga menjadikan dia memiliki kecenderungan untuk mencari pengganti ketidakpuasan maupun kejengkelan diluar rumah.
- Perselisihan antara saudara, perselisihan antar saudara dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang
- Pengaruh pergaulan yang buruk dapat mengakibatkan remaja mengadopsi perilaku-perilaku menyimpang kelompok bermainnya
- Akses negatif dari keadaan sekolah

- Pengaruh negatif lingkungan terhadap perkembangan kepribadian, anak yang kurang mendapat dukungan, kemantapan kepribadian dalam keluarga sangat mudah terpengaruh terutama pengaruh perilaku yang tanpa kendali.

Dan adapun hasil dari penelitian wawancara serta observasi, ditemukan bahwa faktor penghambat sebagaimana kutipan dari bapak Robet Staff Tata Usaha, sebagai berikut:

*“Faktor pendukung ketika disaat kita muda melakukan pelayanan karena keluarganya mau bekerja sama, jadi tidak hanya kitanya saja yang mencoba untuk menyelamatkan si anak. Keluarga juga harus ikut mengambil aksi, jadi permasalahannya tidak hanya di aspek individual korban tapi juga ada di aspek sosial baik itu terkait dengan pendidikan dan lingkungannya. Jadi dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan agar pemulihan berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan korban yang mau bekerjasama, dan juga pemerintah yang mendukung penuh program pelayanan rehabilitasi. Jadi pendukungannya itu ada dri keluarga, korban, dan pemerintahan. Kebalikannya faktor menghambat pemulihan yaitu disaat keluarga tidak berpartisipasi maka program pelayanan tidak akan selesai dilakukan. Jadi ini bersifat dua arah Balai sama Keluarga, klien juga contohnya gini saat klien yang kita dampingin mau mengikuti apa yang diarahkan mau dibimbing dan menjalankan setiap aturan itu sangat mendukung program pelayanan Rehabilitasi namum ada juga yang tidak mengikuti aturan inilah yang menjadi penghambat untuk melakukan pemulihan terhadap klien.”<sup>7</sup>*

<sup>6</sup>BNN, ”ADVOKASI Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Hal. 74.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Haikal, Staff Rehabilitasi Balai Rehabilitasi Insyaf Medan Sumatera Utara, Tanggal wawancara : 29 September 2021.

**PENUTUP****Kesimpulan**

Dari Uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Balai Rehabilitasi Sosial Insyaf dalam pemberdayaan korban Penyalahgunaan Napza Medan memberikan pelayanan secara efektif dan efisien dan juga memberikan dukungan manajemen rehabilitasi secara transparan. Memberikan fasilitas pelayanan untuk penerima manfaat seperti fasilitas Konsumsi, Pakaian Olahraga, Sepatu, Pakaian Praktek Keterampilan, Pakaian Seragam Batik, Perlengkapan Mandi dan bantuan Stimulan.
2. Para penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Insyaf di berikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki, hal ini bertujuan agar ketika mereka telah selesai melakukan program rehabilitasi mereka bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Managenet, Vol.1 Nomor 2, Oktober 2016, hal. 464.

- [6] Miftah Toha, Biokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, (Kencana: Jakarta ), 2008, hal. 6.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] BNN, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja, (BNN : Senayan Jakarta), 2003, hal. 14.
- [2] BNN, "ADVOKASI Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Hal. 74.
- [3] Evelyn Felicia, "Kendala Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Yogyakarta", jurnal Fakultas Hukum Universitas ATMA Yogyakarta, hal. 11.
- [4] Hasil Wawancara dengan bapak Haikal, Staff Rehabilitasi Balai Rehabilitasi Insyaf Medan Sumatera Utara, Tanggal wawancara : 29 September 2021.
- [5] Ibnu Aljazuri Amri dkk, "Pengaruh Motivasi Individu, Dukungan Keluarga dan Lingkungan Sosial Terhadap Peningkatan Keberhasilan Rehabilitasi di Wilayah Kerja Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Selatan" Jurnal Mirai

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENGEMBANGAN SYSTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIK UNTUK  
MENCiptAKAN SEORANG PENDIDIK YANG PROFESSIONAL

Oleh

M. Nugroho Adi Saputro<sup>1)</sup>, Bachtiar Hadi<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Mahasiswa Program Pascasarjana Studi Manajemen Pendidikan Islam Univesitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: <sup>1</sup>[Saputro1610@gmail.com](mailto:Saputro1610@gmail.com), <sup>2</sup>[bachtiarhadi@gmail.com](mailto:bachtiarhadi@gmail.com)

**Abstract**

Artikel ini bertujuan untuk 1)menilisk pengembangan system penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidik 2) peran penjaminan mutu pendidikan dalam lembaga pendidikan dan 3) memahami esensi system penjaminan mutu pendidikan serta output yang ditawarkan oleh penjaminan mutu. Adapun metode dalam penulisan artikel ini menggunakan studi litelatur. Hasil dari penelitian ini adalah 1) pengembangan penjaminan mutu dalam suatu organisasi bisa dikatakan sebagai ruh dalam sebuah organisasi, termasuk pendidikan. khususnya seorang pendidik yang memiliki peranan penting sebagai penggerak utama. Pengembangan dari system penjaminan mutu terkhusus pendidik dapat diarahkan kepada pembangunan konsep pendidik professional yang lebih luas 2) sistem penjaminan mutu dapat dikatakan sebagai suatu instrumen metodologis yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan. 3) esensi dari penjaminan mutu ialah mutu itu sendiri, sedangkan yang menjadi tolak ukur adalah pelanggan sebagai focus utama dari penjaminan mutu, sedangkan output yang ditawarkan ialah produk atau pun jasa yang tentunya sesuai dengan pemangku kepentingan atas produk atau jasa yang ditawarkan. Sehingga kemudian dengan konsep pendidik professional yang tawarkan lebih mengarah pada pandangan yang lebih luas dengan menuntut keprofesionalan secara totalitas bukan hanya sekedar syarat. Meskipun terlihat samar sama, namun sejatinya konsep keprofesionalan ini memaparkan tingkat kejelasan yang lebih berarti yakni dengan memiliki jiwa pendidik sebagai landasan utamanya.

**Keywords: Pengembangan Penjaminan Mutu, Pendidik.**

**PENDAHULUAN**

Mutu pendidikan di Indonesia di tingkat ASEAN masih terbelang belum mencapai apa yang di harapkan, bahkan dengan Negara tetangga yakni Malaysia dan Brunai Darussalam. Berdasarkan data yang dilansir Programme for International Student Assesment (PISA) di tahun 2018, pendidikan Indonesia berada di posisi ke-lima ASEAN.<sup>1</sup> Sebab demikian, dengan mutu pendidikan yang baik sebagaimana pendapat umum dikatakan

bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas mutu pendidikannya. Lebih spesifik, dewasa ini, bangsa-bangsa yang mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ialah bangsa yang melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada aspek kemanusiaan yakni dengan pendidikan<sup>2</sup>. Mutu pendidikan selalu menjadi salah satu isu yang dianggap urgen dalam kehidupan bangsa. Mutu pendidikan haruslah bersifat kualitas juga kuantitas. Artinya, pendidikan kualitas ialah

1

<https://malangtimes.com/baca/46876/20191206/090800/kualitas-pendidikan-indonesia-peringkat-5-asean-warganet-20-tahun-reformasi-masih-kalah-dengan-malaysia-miris-jiwa> di akses 23-10-2020

<sup>2</sup> Kusnandi, "Konsep Dasar dan Stategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan", Dalam Jurnal IJEMAR Vol. 1 No. 1 2017, h. 107

sekolah haruslah meningkatkan dengan berbagai aspeknya dari waktu ke waktu sehingga akan terlihat perkembangan serta kemajuan suatu sekolah, dan pendidikan kuantitas ialah sekolah haruslah menyebar kesegala penjuru negeri agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan sehingga mampu meningkatkan sumber daya manusia.

Demikian dengan Indonesia, mutu pendidikan dianggap menjadi tolak ukur dalam menilai tercapainya tujuan pendidikan Nasional. Namun apa daya, nyatanya potret pendidikan Indonesia saat ini masih terbelang memiliki mutu yang rendah, meski pemerintah dalam kiat kali waktu selalu berusaha melakukan yang terbaik demi memajukan mutu pendidikan Indonesia. Pada dasarnya persoalan mutu pendidikan sangatlah kompleks dan rumit, persoalan tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Dimana mutu tidak hanya mengenai output melainkan juga input. Salah satu persoalan yang tidak kalah penting adalah pentingnya mutu dari pelaku pendidikan, dalam konteks ini yakni sumber daya manusia itu sendiri terkhusus ialah pendidik. Tak jarang seorang pendidik (guru) dan tenaga kependidikan tidak profesional dalam menjalani bidangnya. Sebagai imbasnya ialah sekolah tidak dapat melahirkan peserta didik yang utuh sebagai dirinya dan terkadang berimbas pada mutu lulusan. Tak jarang pula anak didik ketika lulus masih kebingungan akan siapakah dirinya? Artinya pendidikan dewasa ini mengalami degradasi makna akan pendidikan itu sendiri.

Berdasar amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang secara terpadu terkait dengan tujuan pendidikan nasional. Dan

menimbang salah satu nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembangkan serta meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia juga bangsa. Disisi lain, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau otonomi daerah, Undang-Undang tersebut memberi dampak positif pada pengelolaan pendidikan di daerah. Salah satunya ialah sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat berfokus pada kebutuhan serta persoalan yang dihadapi di daerah tersebut. Walaupun demikian, bukan berarti tak memiliki dampak negatif.

Melalui Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), pemerintah melakukan suatu upaya untuk menyikapi dampak negatif terbitnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 dengan melakukan sebuah standarisasi mutu baik yang bersifat regional maupun nasional sebagai bentuk perhatian dalam upaya peningkatan dan penjaminan mutu suatu pendidikan<sup>3</sup>. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan dalam konteks Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah yang juga berdampak pada pendidikan, bergantung pada tiga faktor utama yakni guru, kepala sekolah dan pengawas, sebab ketiga komponen inilah yang menjadi penentu serta penggerak utama demi tercapainya mutu pendidikan yang berkualitas (Mulyasa, 2012)<sup>4</sup>. Hal tersebut mengingatkan bahwa mutu pendidikan berkaitan erat dengan martabat bangsa dan mutu pendidikan merupakan aspek penting untuk terus dikaji terutama berkenaan dengan input (terkhusus guru) sebagai peran pelayanan dan output (peserta didik) dapat menjadi

<sup>3</sup> Haryono dan Budiyo, dkk, “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang,” *Jurnal PANJAR* 1, no. 1 (2019): h. 18.

<sup>4</sup> Kusnandi, “Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan,” *Jurnal IJEMAR* 1, no. 1 (Desember 2017): h.108.

manusia seutuhnya dan pelaku pengguna pendidikan yang lain.

Darmaji dkk<sup>5</sup> dalam artikelnya mengatakan implementasi penjaminan mutu internal sekolah memberikan dampak positif pada sekolah. Salah satunya sekolah mampu memperoleh beberapa predikat prestasi baik dalam kancah nasional maupun internasional. Hal demikian dilakukan dengan pola pengelolaan sekolah yang unggul dalam proses (*best process*) sekolah berhasil mendapatkan *output* dan *outcome* yang diinginkan. Kemudian Nyoman Sridana<sup>6</sup> memberi penekanan bahwa pengetahuan penjaminan mutu haruslah dipahami oleh pelaku pendidikan, khususnya kepala sekolah sebagai seorang supervisor dan diikuti oleh komponen pelaku pendidikan yang lain. Kembali ditekankan oleh Abdul Hadi<sup>7</sup> bahwa dengan menerapkan system penjaminan mutu khususnya *Total Quality Management* (TQM). TQM dalam satuan pendidikan sebagai bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan, lembaga pendidikan akan lebih terfokus pada memberikan layanan pendidikan yang tinggi, memusatkan perhatian pada pelanggan, dan sebagai sarana pemecahan masalah. Berdasarkan tulisan-tulisan tersebut penulis tergerak untuk melakukan sebuah pengembangan penjaminan mutu khususnya terhadap pendidik sehingga dapat memunculkan suatu konsep ataupun inovasi baru terhadap penjaminan mutu khususnya pendidik yang berkualitas.

## LANDASAN TEORI

Sistem penjaminan mutu merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Terutama

negara lewat pemerintah baik di kancah regional maupun nasional. Penjaminan mutu pada dasarnya berkaitan erat dengan fungsi manajemen, sebab dengan optimalnya suatu fungsi manajemen akan sangat berpengaruh pada pengembangan serta penjaminan mutu dalam suatu bidang jasa seperti pendidikan, sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya sebuah upaya untuk mengendalikan mutu agar semua aspek yang terkait terkelola dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep yang terkait dengan manajemen mutu yakni *Quality Assurance*.

Manajemen mutu bukan lagi konsep baru dalam pendidikan, manajemen mutu yang mulanya digunakan dalam dunia industry kini diadopsi dalam dunia pendidikan, khususnya Indonesia. Dengan adanya manajemen mutu ini kemudian dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia pendidikan.

### 1. Teori dan Hakikat Penjaminan Mutu Pendidikan

Definisi mutu pada dasarnya memiliki definisi yang bervariasi. Dalam pendidikan sendiri, mutu merupakan sebuah jaminan kepuasan layanan pendidikan. Baik di sekolah, proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Yang jelas secara keseluruhan dalam proses pendidikan. Sallis, 2007; Kambey, 2004 mengatakan kepuasan layanan pendidikan diukur dari kepentingan pelanggan pendidikan yang terdiri dari pelanggan *internal* dan *eksternal*.<sup>8</sup> Pelanggan *internal* meliputi para pendidik dan staf pendukung, atau dengan kata lain komponen pengelola pendidikan. Sedang pelanggan *eksternal* meliputi orang tua, serta

<sup>5</sup> Darmaji, Achmad Supriyanto, dan Agus Timan, "Sistem Penjaminan Mutu Internalsekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan," *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 3, no. 3 (28 Juli 2019): 130–36, <https://doi.org/10.17977/um025v3i32019p130>.

<sup>6</sup> Nyoman Sridana, Sudirman Wilian, dan Dadi Setiadi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA)," *Jurnal Pengabdian*

*Magister Pendidikan IPA* 1, no. 1 (22 Desember 2018), <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v1i1.212>.

<sup>7</sup> Abdul Hadi, "Konsepsi Manajemen Mutu Dalam Pendidikan," *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 269, <https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i2.5260>.

<sup>8</sup> Sitti Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: ZAHIR publishing, 2017), h. 11.

pelanggan tersier yakni pasaran kerja, pemerintah dan masyarakat (*stakeholder*).

Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus menggunakan berbagai cara untuk menterjemahkan kedalam produk atau suatu layanan baru yang inovatif. Mengingat bahwa mutu memiliki peranan penting terhadap suatu produk ataupun jasa serta para pelanggan. Sebagaimana dijelaskan Goets dan Davis (dalam Tjiptono, 2001) bahwa mutu atau kualitas merupakan suatu yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan<sup>9</sup>.

Kusnandi<sup>10</sup> (2017) dalam artikelnya menjelaskan bahwa proses pendidikan merupakan seperangkat upaya input menjadi output yang diharapkan. Yang artinya pendidikan menjadi suatu proses yang berjalan secara terus menerus yang meliputi pengelolaan kelembagaan, pengambilan keputusan, proses pengelolaan program, belajar-mengajar, proses monitoring dan evaluasi. Untuk itulah dalam pelaksanaan kesemuanya berkenaan dengan pelayanan. Penjaminan mutu dimulai pada saat input dan output, dimana output akan dinilai secara langsung oleh stakeholder. Lebih lanjut kusnandi menjelaskan output tidak hanya berupa lulusan, melainkan juga mengenai kinerja, prestasi sekolah, efektivitas, produktifitas, efisiensi, inovasi serta kehidupan kerja SDM yang ada. Hal ini sekali menunjukkan bahwa hakikat penjaminan mutu menjadi suatu keharusan dalam proses pendidikan.

## 2. Teori pengembangan lembaga pendidikan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata pengembangan berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan. Jika

dikaitkan dalam suatu lembaga atau organisasi maka artinya ialah cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu titik lebih baik. Mengingat lembaga atau organisasi khususnya pendidikan saat ini menghadapi persaingan yang semakin kompleks, baik yang bersifat actual maupun potensial. Actual berarti persoalan-persoalan yang bersifat nyata, sedang potensial berkenaan dengan persoalan-persoalan SDM yang sifatnya lebih kompleks dan mengarah pada proses visi misi kedepan. Dengan demikian, lembaga pendidikan khususnya dalam menghadapi persoalan tanpa mengabaikan hal-hal yang actual, hal yang paling dasar adalah hal-hal yang berkenaan dengan sumber daya manusia sebagai prioritas.

Para pakar mengatakan, peran SDM dipandang lebih penting dalam proses kemajuan lembaga atau organisasi<sup>11</sup>. Sanusi dalam pengantar buku konsep pengembangan organisasi pendidikan mengatakan pengembangan SDM merupakan prasyarat bagi pengembangan organisasi<sup>12</sup>. Artinya, tanpa adanya SDM yang memadai organisasi tidak akan mampu bertahan di dalam era kompetisi ini dan demikian sebaliknya.

Kaitannya dengan pengembangan organisasi lembaga pendidikan Iskandar (1982) pengembangan lembaga pendidikan ialah upaya lembaga baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka membawa nama lembaga kearah yang lebih baik dan bermutu<sup>13</sup> Senada dengan hal di atas H.M. Arifin (1998) mengatakan bahwa pengembangan pendidikan ialah proses perubahan secara bertahap ke arah tingkat yang berkecenderungan lebih tinggi dan lebih luas serta mendalam, yang secara menyeluruh dapat

<sup>9</sup> Roskina Mas, h. 15.

<sup>10</sup> "Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan."

<sup>11</sup> Rusdiana, *Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan*, 1 (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2016), h. 5.

<sup>12</sup> h 6.

<sup>13</sup> Iskandar Wiryokusumo, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 93.

tercipta kesempurnaan atau kematangan pada peserta didik<sup>14</sup>.

Dari definisi di atas, dapat pula diartikan pengembangan organisasi merupakan suatu proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi di dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang bersifat dinamis, oleh sebab itu untuk mencapai hal tersebut perlu adanya SDM yang memadai agar kinerja dalam organisasi dapat berjalan secara optimal dan organisasi dapat mempertahankan eksistensinya.

### 3. Peran penting pendidik dan tenaga kependidikan

Profesi pendidik merupakan profesi yang sangat penting khususnya dalam pendidikan dan kehidupan suatu bangsa. Pendidik sebagai unsur yang dominan dalam proses pendidikan, sehingga tidak lain kualitas pendidikan sedikit banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagai lapis kedua. Oleh sebab itu profesi pendidik menjadi syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa, dengan meningkatkan kualitas pendidik akan mendorong pada kualitas pendidikan sebagai proses dan hasilnya<sup>15</sup>.

Sebagaimana kita tahu bahwa tugas pendidik tidak lain adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta mampu mengembangkan kepribadian yang ada di dalam dirinya. Atas dasar tugas yang diemban oleh pendidik yang cukup berat, pendidik sudah semestinya berupaya untuk selalu mengembangkan diri sendiri agar dapat menjalankan perannya secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi nyata demi

kepentingan pembangunan bangsa dan tujuan pendidikan nasional.

Nana Syaodih dalam Mulyasa (2003) mengatakan, betapapun bagusnya suatu kurikulum, tetapi hasilnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh seorang pendidik dan peserta didik di kelas<sup>16</sup>. Kemudian ditegaskan oleh Sardiman (2001) peranan guru di sini sebagai motivator sangat penting, hal ini menyangkut esensi pekerjaan guru sebagai pendidik yang membutuhkan kemahiran social, menyangkut performance dalam arti personalisasi dan sosialisasi diri<sup>17</sup>.

Senada dengan hal di atas, Erni Munastiwi<sup>18</sup> mengatakan bahwa pendidik atau guru merupakan salah satu orang terdekat dengan anak didik setelah orang tua, oleh karena itu pendidik atau guru memiliki posisi strategis dalam mengupayakan perkembangan kreativitas anak didik. selain itu pendidik atau guru ialah seorang motivator bagi peserta didiknya. Tidak jarang dengan keprofesionalan seorang pendidik banyak dari peserta didik yang termotivasi. Lantas kemudian di simpulkan bahwa seorang guru haruslah berperan sebagai pendidik sejati, motivator, teladan, pengajar, pembimbing, pelatih, pengevaluasi.

Berdasarkan hal di atas setidaknya menggambarkan bahwa sejatinya peran seorang pendidik dalam mensukseskan pendidikan juga pembangunan nasional ialah sangat berpengaruh. Khususnya sumber daya manusia Indonesia

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis pendekatan Penelitian

*Pendidikan 2*, no. 1 (2 Maret 2012): h. 70, <https://doi.org/10.21831/jep.v2i1.656>.

<sup>17</sup> Suwarno, h. 72.

<sup>18</sup> Sartika M Taher dan Erni Munastiwi, "Peran Guru Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini Di TK Islam Terpadu Salsabila Al-Muthi'in Yogyakarta," . . *Juni 4*, no. 2 (2019): h. 39.

<sup>14</sup> H.M Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Pengarahan Agama* (Jakarta: Citra Mandala Pratama, 1998), h. 208.

<sup>15</sup> - Mustofa, "Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan 4*, no. 1 (29 Februari 2012): h. 80, <https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.619>.

<sup>16</sup> - Suwarno, "Peran Guru dalam Keberhasilan Implementasi Kurikulum 2004," *Jurnal Ekonomi dan*

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji data dan menggambarkan realita yang konkrit dan kompleks. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini mengkaji atau mengumpulkan data yang berbentuk kata-kata, atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh simpulan.<sup>19</sup>

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran penyajian laporan secara jelas terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan cara melihat-lihat dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, bisa berwujud rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data, surat-surat, rekaman gambar, maupun benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa.<sup>20</sup>

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti : Buku, Artikel, Jurnal yang di dalamnya mengkaji persoalan yang diteliti yaitu peran penting seorang pendidik (guru) sebagai salah satu penopang penjaminan mutu dan esensi konsep penjaminan mutu dalam pendidikan serta output yang ditawarkan.

## 3. Analisis Data

Analisis data dari pengumpulan hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menganalisa data dengan cara non statistic untuk data deskriptif atau tekstual.<sup>21</sup> Artinya

data deskriptif hanya dianalisis isinya dan karena itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, sebagai metode tafsir teks. Sebagaimana diungkapkan Fraenkel dan Wallen bahwa *content analysis* atau analisa isi adalah teknik yang dapat digunakan penulis untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti teks, buku, artikel, jurnal, koran amajalah dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.<sup>22</sup>

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami orang lain. Proses analisis daya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi “kasar” yang muncul dan catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuang data yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

b. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas. Jadi, setiap makna budaya yang muncul diuji kebenarannya, kekokohnya dan

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 6

<sup>20</sup> Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi dalam Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal 164

<sup>21</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal 85.

<sup>22</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 232-233

kecocokannya yakni merupakan vasiliditasnya.<sup>23</sup>

Analisis data ini adalah cara untuk mengolah data yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan sehingga dari situ kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Data yang dianalisis dilakukan dengan menggunakan pencarian fakta yang diinterpretasikan dengan tepat, kemudian data tersebut dipaparkan dari teori umum menuju kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dilansir Kompasiana (18 juni 2015), dikatakan ada beberapa penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidik atau pengajar. Dijelaskan bahwa pendidik yang seharusnya mempunyai motivasi untuk mengembangkan dan memperbaharui keilmuannya dengan melakukan berbagai hal seperti membaca dan mempelajari metode dan media pembelajaran, tidak dilakukan oleh pendidik yang terbilang senior. Sehingga tidak heran bila pendidik senior terbilang cenderung stagnan tidak berkembang. Secara implisif hal tersebut berdampak pada kemajuan pendidikan<sup>24</sup>.

Selain itu Media Mahasiswa Indonesia (4 april 2020)<sup>25</sup> menegaskan selain hal di atas, lemahnya pendidik dalam menggali potensi peserta didik menjadi salah satu point yang cukup actual. Tak jarang pendidik hanya sekedar melakukan *transfer of knowledge* tidak melakukan *transfer of value*. Sehingga hal ini berdampak pada mutu lulusan yang tidak kompeten dan hanya sekedar lulus, peserta didik tidak menemukan siapa jati dirinya. Hal ini disebabkan oleh tidak kreatifnya seorang

pendidik dalam mengajar dan kurangnya jiwa pendidik dalam diri pendidik.

Kembali ditegaskan oleh Nana Surya Permana<sup>26</sup> bahwa salah satu sebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidik (kompetensi, wawasan) sehingga berdampak tidak mempunya menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Dengan rendahnya kualitas pembelajaran di dalam maupun diluar kelas hal tersebut secara implisif akan berdampak pada peserta didik. Dimana peserta didik tidak mampu mengait materi yang diajarkan dan cenderung bersikap acuh tak acuh.

Senada dengan hal di atas dikutip Mustofa atas Dahrin, 2000 bahwa professional guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai utamanya dalam bidang keilmuan. Misalnya guru Biologi dapat mengajar Kimia atau Fisika. Ataupun guru IPS dapat mengajar bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mutu dan profesionalisme guru jauh dari harapan. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dan penyampaian materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar berkualitas.

Dari beberapa temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidik di Indonesia masih memiliki nilai yang jauh dari harapan. Sebagaimana kita tahu bahwa pendidik memiliki peran yang cukup esensial dan memberikan kontribusi yang cukup nyata dalam kemajuan bangsa khususnya sumber daya manusia. Oleh sebab demikian penting kiranya untuk kembali menggali mengenai professionalism pendidik sebagai salah satau upaya pengembangan konsep professionalism pendidik.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 44

<sup>24</sup> <https://www.kompasiana.com/yunitamn/54f99080a3331140548b496d/penyebab-rendahnya-mutu-pendidikan-di-indonesia> di akses 19-januari 2021

<sup>25</sup> <https://mahasiswaindonesia.id/rendahnya-kualitas-pendidikan/> di akses 19 januari 2021

<sup>26</sup> Nana Surya Permana, "Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi dan Sertifikasi Guru," *Studia Didaktika : Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11, no. 1 (2017): 8.

## Pembahasan

Sebagaimana dijelaskan di atas, terkait dengan mutu pendidikan pemerintah telah melakukan sebuah standarisasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, hal demikian terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi ruang lingkup SNP dalam pasal 2 ayat (1) yakni a) standar isi; b) standar proses; c) standar kompetensi lulusan; d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; e) standar sarana dan prasarana; f) standar pengelolaan; g) standar pembiayaan; h) standar penilaian pendidikan<sup>27</sup>. Untuk itulah mengapa penjaminan mutu pendidikan menjadi sesuatu yang sangat esensial untuk terus dikembangkan.

Dalam penulisan artikel ini, penulis membatasi terkait persoalan mengenai penjaminan mutu pendidikan, sebab sebagaimana telah diungkap, persoalan mutu pendidikan merupakan persoalan yang pelik nan sulit. Penulis dalam penulisan artikel ini berupaya untuk melakukan pengembangan penjaminan mutu khususnya pendidik dari sudut pandang pemahaman dan arti yang lebih luas, selain itu penulis juga menjelaskan peran penting sistem penjaminan mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan, esensi serta output yang ditawarkan sistem penjaminan mutu. Adapun penjelasan sebagai berikut:

## 1. Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidik

Sebagaimana kita ketahui, ada berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan, antara lain ialah : guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya. Dari sekian factor tersebut, factor utama yang memberikan kontribusi secara penuh terhadap pendidikan ialah pendidik (guru). Pengertian guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 (guru dan dosen) ialah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah<sup>28</sup>. Selain factor utama, UU guru dan dosen digunakan sebagai landasan hukum dalam pengembangan mutu pendidik.

Dalam islam sendiri dijelaskan pendidik ialah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan peserta didik dengan mengembangkan seluruh potensinya, baik spiritual, afektif, kognitif, psikomotorik ke arah yang lebih baik secara optimal dan seimbang yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam<sup>29</sup>.

Studi yang dilakukan Heyneman & Loxley pada tahun 1983 di 29 negara menemukan bahwa diantara berbagai masukan (input) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru<sup>30</sup>. Berdasarkan temuan tersebut tidak diragukan lagi bahwa guru memiliki peranan penting dalam proses pendidikan khususnya pembelajaran dan tentunya memiliki keterkaitan dengan mutu pendidikan itu sendiri. Sebagai salah satu contoh, Negara Singapore

<sup>27</sup> "Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan," t.t.

<sup>28</sup> "Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen," t.t.

<sup>29</sup> Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter* (Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 206.

<sup>30</sup> Eko Putro Widoyoko, "Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," dalam *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sertifikasi Guru* (Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2008), 9.

yang menduduki peringkat pertama pendidikan terbaik ditingkat ASEAN dan menjadi salah satu Negara yang memiliki kualitas pendidikan baik ditingkat internasional, salah satu yang menjadi sorotan adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, Singapore telah mengembangkan suatu kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang bermutu. Yakni dengan kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan serta kesejahteraan hidup para guru.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas seorang pendidik, salah satunya pada tahun 2005 Indonesia telah memiliki Undang-undang Guru dan Dosen. Secara umum maksud dan tujuan adanya UU Guru dan Dosen tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mutu pendidikan Indonesia dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya sebuah standarisasi seorang pendidik tentunya apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional akan tercapai, yakni lahirnya manusia yang unggul, beriman, bertaqwa, professional, berkarakter dan yang lebih penting adalah menjadi dirinya sendiri.<sup>31</sup>

Berbicara persoalan pendidik yang dianggap memiliki peran sangat penting dalam pengembangan pendidikan dan mutu pendidikan, penulis beranggapan bahwa setidaknya hal utama yang menjadi dasar adalah konsep pendidik professional. Konsep pendidik professional merupakan suatu komitmen dasar yang harus ada dalam diri seorang guru. Dengan komitmen sebagai kunci utama seiring berjalannya waktu apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional lambat laun akan tercapai dan tidak terlepas dari hakikat pendidikan itu sendiri yakni pendidikan yang memanusiakan manusia atau dalam islam disebut sebagai insan ulum albab.

<sup>31</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*, 1 ed. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012), h. 23.

✓ Konsep pendidik professional sebagai pengembangan penjaminan mutu pendidik

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 (guru dan dosen) pasal 10 ayat (1) ada beberapa kompetensi yang harus ada dalam diri seorang guru yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut merupakan suatu pondasi dasar yang harus ada dalam diri seorang guru. Kompetensi pedagogik ialah kemampuan dimana seorang guru haruslah mampu mengelola pembelajaran dengan baik dan tepat sasaran. Kompetensi kepribadian ialah kemampuan yang secara khusus melekat secara individual, seperti seorang guru haruslah memiliki budi pekerti yang baik, berakhlak mulia, berkepribadian mantap, arif dan berwibawa serta mampu menjadi teladan bagi anak didiknya. Kompetensi sosial ialah suatu kemampuan untuk berinteraksi, baik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran, sesama guru, orang tua wali dan masyarakat sekitar secara umum<sup>32</sup>. Dan kompetensi professional secara umum diartikan seorang guru haruslah menguasai bahan ajar secara luas dan mendalam terkait materi bahan ajarnya.

Berdasarkan paparan di atas, poin penting menurut penulis yang dianggap mengakomodasi peran penting seorang pendidik dalam penjaminan mutu ialah konsep keprofesionalan seorang guru. Dengan dalih bahwa professional secara makna memiliki arti ahli dalam penguasaan bidang tertentu sehingga dalam praktiknya dapat menunjang suatu keberhasilan.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya seorang pendidik yang professional tentu memiliki suatu kompetensi. Istilah kompetensi setidaknya memiliki berbagai makna, Broke

<sup>32</sup> Fitri Mulyani, "Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 03, no. 01 (2009): h. 2.

dan Stone (1995) mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai (*descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful*) yang artinya kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti (Mulyasa, 2008 :25). Pengertian lain yang senada disampaikan oleh Sarima (2009:17) kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya<sup>33</sup>. Ditegaskan oleh (Kessler 2011) bahwa kompetensi merupakan karakteristik utama yang dimiliki individu dalam setiap bidang profesi yang dapat membantunya ke arah keberhasilan<sup>34</sup>. Kemudian istilah kompetensi kembali dijabarkan oleh (Palan, 2007) setidaknya ada dua istilah atau aliran yang berbeda tentang konsep kompetensi yang dilihat dari kesesuaian dalam pekerjaan yakni *competency* (kompetensi) yang berarti deskripsi mengenai perilaku dan *competence* (kecakapan) yang berarti deskripsi tugas atau hasil suatu pekerjaan tertentu<sup>35</sup>. Kemudian pepatah Jawa mengatakan, “*Guru iku teges e digugu lan ditiru*”, jika dijabarkan setidaknya memiliki arti seorang guru ialah seorang teladan yang baik dan patut dicontoh untuk anak didiknya. Hal demikiannya yang kemudian menjadi dalih kuat bahwa kosep pendidik professional memiliki tempat yang special dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan (Imron, 1995). Lebih-lebih guru yang unggul (*the excellent teacher*) merupakan *critical resource in any excellent teaching learning*

*activities. A school system is only as good as the people make it.* Oleh karena itu, dalam membangun pembelajaran yang berkualitas di sekolah, guru professional mutlak diperlukan<sup>36</sup>. Bafadal (2004) mengemukakan guru yang professional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Mengingat perkembangan dan tuntutan zaman serta sebagai bentuk upaya peningkatan pendidikan mempersyaratkan bahwa guru haruslah seorang yang professional yakni seseorang yang memiliki pengetahuan luas, kematangan keimanan, serta mampu menggerakkan dirinya sendiri dalam rangka memajukan pendidikan. Dengan kata lain seorang guru haruslah memiliki jiwa pendidik dan kesadaran akan perannya untuk memajukan bangsa.

Senada dengan hal di atas, Erni Munastiwi beranggapan bahwa pendidik professional ialah seseorang yang memiliki setidaknya pengalaman mengajar, lebih dari itu seorang pendidik professional haruslah memiliki kemampuan intelektual, moralitas, imanm jiwa pengabdian, disiplin, tanggung jawab, berpandangan luas tentang dunia pendidikan, kemampuan manajerial, berkualitas, kreatif, berpikiran terbuka, professional dibidang potensi, membawa pengaruh terhadap perkembangan siswa<sup>37</sup>.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik sebuah konsep bahwa seorang guru yang professional ialah seorang yang memiliki kompetensi sebagaimana dijelaskan di atas serta mampu merancang dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan perkembangan pendidikan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu seorang guru yang professional haruslah menguasai pelbagai disiplin ilmu,

<sup>33</sup> Mulyani, h. 2.

<sup>34</sup> Koswara Koswara dan Rasto Rasto, “KOMPETENSI DAN KINERJA GURU BERDASARKAN SERTIFIKASI PROFESI,” *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 1, no. 1 (18 Agustus 2016): h. 63

<sup>35</sup> Koswara dan Rasto, h. 63.

<sup>36</sup> Nur Ainiyah, “Identitas Diri dan Makna Guru Profesional sebagai Komunikator Pendidikan (Perspektif Fenomenologis),” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1 (2 Oktober 2016): h. 3

<sup>37</sup> Ade Lisna dan Erni Munastiwi, “PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU” 5, no. 1 (2020): h. 11.

teori belajar, strategi-stategi pembelajaran dan yang jelas dapat mengantarkan peserta didik menjadi dirinya sendiri.

Dengan adanya konsep pendidik professional sebagaimana paparan di atas, tidak diragukan lagi bahwa peran seorang pendidik tidaklah hanya sekedar melakukan pembelajaran sebagai formalitas belaka, melainkan seorang pendidik yang professional memiliki progres yang jauh kedepan terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri dan tepatnya dapat membentuk peserta didik menjadi dirinya sendiri atau sering disebut dengan pendidikan yang memanusiakan manusia.

## 2. Strategi penjaminan mutu pendidikan

Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) digunakan sebagai elaborasi atau perpaduan dari UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. SPMP merupakan proses sistematis dan upaya sadar serta konsisten yang berjalan berkelanjutan dalam menentukan pencapaian standar pengelolaan pendidikan yang diyakini mampu memuaskan para pelajar, orang tua, sumber daya pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan<sup>38</sup>. Dimana standar pengelolaan pendidikan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005.

Lalu mengapa SPMP menjadi suatu keharusan dalam pengelolaan pendidikan? *Pertama*, SPMP digunakan sebagai acuan dalam memetakan mutu pengelolaan pendidikan baik ditingkat regional dan nasional. *Kedua*, proses dan produk SPMP dapat menjawab serta meyakinkan bahwa pendidikan mampu memberi kepuasan terhadap pemangku kepentingan pendidikan. *Ketiga*, SPMP digunakan untuk menentukan model fasilitasi peningkatan kinerja sekolah

yang meliputi sistem pembelajaran, manajemen berbasis sekolah, dan pemberdayaan masyarakat pendidikan dan masyarakat luas dalam pengelolaan pendidikan di sekolah<sup>39</sup>. Meski demikian, upaya yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan dengan cara dan pendekatan yang mungkin sama atau berbeda hal ini bergantung pada kondisi sosiologis tempat pengelolaan pendidikan.

Pengelolaan pendidikan sejatinya tidak dapat berhenti beroprasi meski itu sejenak karena hanya menunggu sistem, sarana, program, sumber daya yang sempurna. Upaya peningkatan mutu harus terus berjalan meski tahap demi tahap. Mengingat bahwa persoalan pendidikan sangatlah kompleks dan tuntutan zaman dengan perkembangan teknologi yang pesat pendidikan mau tidak mau harus siap untuk menjawab persoalan tersebut. Dalam setiap prosesnya, pengelolaan pendidikan haruslah selalu berpandangan progresif jauh kedepan. Drucker menyampaikan pesan bahwa pentingnya perubahan untuk persiapan masa depan berdasarkan kondisi saat ini, bahkan mutu pun mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis<sup>40</sup>. Apa yang dikatakan Drucker mengisyaratkan bahwa mutu dan program untuk mencapai mutu dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, sehingga dalam perjalanannya memerlukan upaya persiapan serta rencana yang sistematis.

Mutu bagi suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa maupun manufaktur termasuk lembaga pendidikan, penyediaan produk yang berkualitas sudah menjadi suatu tuntutan dalam persaingan (Banks, 1989). Semakin meningkatnya daya kebutuhan dari konsumen menuntut suatu produk untuk menjaga kualitasnya, oleh karena itu perlu adanya suatu standarisasi ataupun penjaminan mutu. Penjaminan mutu (*quality assurance*)

<sup>38</sup> | Made Alit Mariana dan et. al, *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali* (Denpasar: LPMP Provinsi Bali, 2013), h. 5.

<sup>39</sup> Mariana dan et. al, h. 3.

<sup>40</sup> Mariana dan et. al, h. 8.

adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga kosumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan<sup>41</sup>. Atas dasar inilah kemudian dalam pengelolaan pendidikan perlu adanya standar mutu, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri<sup>42</sup>. Mutu sama halnya dengan kualitas, artinya baik perusahaan atau pendidikan tentu antara satu dengan yang lain memiliki mutu atau kualitas yang berbeda-beda. Konsep mutu atau kualitas memiliki cakupan yang luas. Beberapa ahli menyatakan Reeves dan Bednar (1994) mendefinisikan kualitas sebagai nilai, kesesuaian dengan suatu spesifikasi atau persyaratan tertentu, atau juga kecocokan manfaat. Spencer (1994) mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang memuaskan konsumen, sehingga setiap upaya pengembangan kualitas harus dimulai dari pemahaman terhadap persepsi dan kebutuhan konsumen. Prakosa (1999) mendefinisikan kualitas sebagai perbedaan yang dirasakan oleh konsumen atas kualitas yang dijanjikan (promised quality) dengan kenyataan<sup>43</sup>. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan mutu adalah manfaat, nilai, dan kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu atas input, proses dan output yang dirasakan oleh konsumen. Sehingga definisi mutu pendidikan mencakup didalamnya input, proses juga output.

Berikut beberapa opsi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam penjaminan mutu pendidikan:

**a. Total Quality Management (TQM)**

Sekolah merupakan lembaga institusi pendidikan yang berfungsi sebagai agen perubahan. Oleh karena itu dalam rangka menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas, dunia pendidikan perlu mengimplementasikan konsep *total quality management* (TQM). TQM dalam sejarahnya digunakan dalam dunia industry dan terbukti telah sukses mengantarkan dunia bisnis dalam menciptakan mutu produksi yang berkualitas bahkan melebihi kepuasan standar para konsumen. Atas dasar itulah kemudian TQM mulai diadopsi didalam dunia pendidikan sebagai system penjaminan mutu, karena TQM dianggap relevan dalam menjawab perkembangan zaman.

Sebelum jauh membahas TQM, perlu untuk diketahui bahwa jantung dari TQM adalah ilmu manajemen. Sebagaimana dijelaskan oleh Erni Munastiwi bahwa manajemen adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin serta mengendalikan sumber daya organisasi dan penggunaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien<sup>44</sup>. Dengan kata lain manajemen dapat pula diartikan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya organisasi atau sebuah tata penyelenggaraan yang tidak lain tujuannya adalah agar apa yang sudah menjadi tujuan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

<sup>41</sup> Mochamad Nurhuda, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 1, no. 1 (6 Agustus 2018): h. 34

<sup>42</sup> Zaenal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, t.t.), h. 21.

<sup>43</sup> "Focused Short Course Data Management Training for Targeted Provincial Quality Assurance

Institutions (LPMPs) staff members" (Sekolah Pasca Sarjana UPI dan AUSAID, 2010), h. 1.

<sup>44</sup> Muhammad Abdul Latif dkk., "ANALISIS TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PADA PENDIRIAN TK ISLAM TERPADU MUTIARA PLUS BANGUNTAPAN," *AWLADY : Jurnal Pendidikan Anak* 6, no. 2 (30 September 2020): h. 305, <https://doi.org/10.24235/awlad.v6i2.5783>.

Mengutip pernyataan Bukhori<sup>45</sup> mengemukakan bahwa manajemen sistem pendidikan nasional merupakan suatu proses sosial yang direkayasa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien dengan mengikutsertakan kerjasama serta partisipasi seluruh masyarakat. Agar dapat melahirkan Fungsi, kisi dan kebijakan pendidikan nasional untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu tentu memerlukan pengelolaan pengelolaan sistem pendidikan secara keseluruhan dan berorientasi kepada mutu, yang kemudian dikenal dengan *total quality management* (TQM)<sup>46</sup>. Kemudian Ross (1995) mendefinisikan TQM adalah integrasi semua fungsi dan proses dalam organisasi untuk mencapai peningkatan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan secara berkelanjutan<sup>47</sup>. Berdasar dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa TQM ialah suatu system penjaminan mutu yang dilakukan dengan jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus untuk memuaskan pelanggan.

Pada dasarnya TQM memiliki tiga falsafah dasar, yaitu 1) berfokus pada kepuasan pelanggan/konsumen sehingga terjalin mata rantai hubungan yang dinamis antara pemasok dan pelanggan. 2) pemberdayaan dan pelibatan karyawan/*employee empowerment and involvement*, yang artinya SDM di dalamnya haruslah seorang ahli sehingga perlu diberikan pelatihan yang dapat menggugah kreasi dan semangat progresif. 3) peningkatan kualitas secara berkelanjutan/*continuous improvement*, yang artinya komitmen terhadap peningkatan kualitas harus tertanam dalam bentuk keyakinan pada seluruh SDM yang ada di

dalamnya agar kepuasan terhadap konsumen tetap ada.

Pada dasarnya konsep TQM adalah sistem manajemen yang membuka jalan menuju paradigma berfikir baru yang memberi penekanan pada kepuasan pelanggan, inovasi dan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan<sup>48</sup>. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah ketidak puasan pelanggan terhadap mutu pelayanan dan produk, manajamnya persaingan dan anggaran ekonomi. Dalam konteks pendidikan TQM merupakan sebuah metodologi tentang perbaikan secara terus menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis dalam memenuhi kebutuhan, dan harapan pelanggan saat ini dan masa mendatang.

Sekolah bermutu yang telah mengadopsi TQM sebagai metodologi penjaminan mutu setidaknya memiliki lima karakteristik 1) fokus pada kostumer; 2) keterlibatan total; 3) pengukuran; 4) komitmen; 5) perbaikan berkelanjutan<sup>49</sup>. Dan bentuk aktualisasinya dapat dilihat dari a) visi, yakni sejauh mana pandangan pendidikan kedepan; b) Strategi dan Tujuan, yakni tindak lanjut dari visi, seperti halnya program yang akan dibangun dan tujuan sebagai *goals*; c) Tim, yakni keterlibatan SDM untuk seling bekerja sama dan berintegritas; d) Alat, sebagai penjuang berupa sarana dan prasarana dalam menyelesaikan persoalan yang ada; e) *three Cs of TQM* yakni *culture* (budaya) yang didalamnya meliputi aturan-aturan, asumsi atau nilai-nilai implisit yang menyatukan suatu

<sup>45</sup> Dalam *jurnal Dinamika Ilmu* Vol. 12 No. 2 2012 Kepemimpinan Transformasional Pendidikan Berbasis Total Quality Management

<sup>46</sup> Miftahul Munir, "Keberadaan Total Quality Management Dalam Lembaga Pendidikan (Antara Prinsip Implementasi dan Pilar TQM Dalam Pendidikan)," *Jurnal Realita* 16, no. 1 (2018): h. 3.

<sup>47</sup> Ahmad Sonhadji K. Hasan, "Penerapan Total Quality Management dan ISO 9000 dalam Pendidikan Teknik," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (1999): h. 4.

<sup>48</sup> Nurul Indana, "Implementasi Total Quality Management (Tqm) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Mts Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng)," *Jurnal Al-Idaroh* 1, no. 1 (2017): h. 68.

<sup>49</sup> Indana, h. 70.

organisasi, *commitment* (komitmen), dan *communication* (komunikasi)<sup>50</sup>.

Dengan adanya TQM sebagai penjaminan mutu pendidikan, arah pendidikan akan lebih terorganisir dengan baik dan diharapkan mampu melahirkan out put lulusan yang berkualitas dan berkarakter.

#### b. International Organization for Standardization (ISO)

Tak jauh berbeda dengan TQM, ISO juga merupakan salah satu instrument metodologis yang digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu dan sebagai penjaminan mutu. ISO adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi diluar pemerintahan (*non-government organization/NGO*) yang berdiri sejak 1947. Adapun yang menjadi misi ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional, dan juga membantu pengembangan kerja sama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kegiatan ekonomi<sup>51</sup>.

ISO bergerak dalam ranah standarisasi yang berskala Internasional, ada berbagai macam ISO yang digunakan dengan berbagai macam dan aspek seperti 1) ISO-9001; 2) ISO-14001; 3) ISO-22000; 4) ISO/IEC-27001; 5) ISO-TS-16949 dan lain sebagainya. Dimana masing-masing ISO memiliki standarisasi serta fokus yang berbeda-beda meski pada prinsipnya sama. Dari berbagai macam ISO tersebut, ISO 9001 merupakan standar Internasional yang bergerak dibidang manajemen mutu, dan menjadi persyaratan manajemen yang paling populer. Sehingga

ISO-9001 dapat diterapkan dalam berbagai organisasi baik yang berskala besar atau pun kecil, apapun produk dan layanannya, apakah itu perusahaan business, layanan publik, pemerintahan dan pendidikan. Yang jelas adalah dalam pendekatan ISO-9001, selama berorientasi untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu, ISO-9001 dapat diterapkan termasuk pendidikan.

Perumusan ISO-9001 berawal dari ISO-9000:1987 yang kemudian mengalami beberapa kali revisi, revisi pertama yang dilakukan pada tahun 1994 menghasilkan ISO 9000:1994 yang memuat standar ISO 9000, 9001, 9002, 9003, dan 9004. Pada versi ini, ISO 9000 memuat petunjuk penggunaan, sedangkan ISO 9001, 9002, dan 9003 menangani sistem mutu untuk penjaminan mutu terhadap pihak eksternal, sementara ISO 9004 ditujukan untuk kebutuhan internal. Standar ini mengadopsi pendekatan berbasis proses dan delapan prinsip manajemen mutu<sup>52</sup>. Dimana pendekatan berbasis proses mensyaratkan untuk selalu melakukan indentifikasi, penerapan, pengelolaan dan melakukan peningkatan secara berkesinambungan (*continual improvement*). Saat ini ISO-9001 menjadi salah satu standar favorit dalam penjaminan mutu, dan setelah beberapa kali mengalami revisi ISO-9001 berubah menjadi ISO-9001:2008.

Tujuan penerapan ISO-9001:2008 dalam lembaga pendidikan ialah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan, membangun kesadaran tentang perlunya pelayanan prima terhadap konsumen, mendidik diri organisasi (lembaga pendidikan) agar taat terhadap sesuatu yang telah disepakati, dan menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan mutu<sup>53</sup>. Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang telah mengadopsi ISO-9001

<sup>50</sup> Luk-Luk Nur Mufidah, "Aktualisasi Tqm Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Tadris* 4, no. 1 (2009): h. 95.

<sup>51</sup> <https://kjm.ugm.ac.id/language/id/akreditasi-sertifikasi/tentang-iso/> di akses 5-11-2020

<sup>52</sup> Moh Zainal Fanani, "Implementasi Iso 9001:2008 Dalam Mengembangkan Budaya Mutu Madrasah," *Jurnal Realita* 15, no. 2 (2017): 26.

<sup>53</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2008), h. 307.

mendefinisikan “system manajemen mutu sebagai system manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu”<sup>54</sup>. Dengan kata lain system manajemen mutu dianggap sebagai suatu tatanan yang menjamin akan pelayanan proses, tujuan yang telah di rencanakan serta mutu output.

Sehingga dapat dikatakan ISO-9001:2008 merupakan salah satu standarisasi yang berorientasi pada pendekatan proses, dan berpegang pada prinsip-prinsip manajemen sebagai landasan utamanya. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut: 1) organisasi yang berfokus pada pelanggan; 2) kepemimpinan; 3) keterlibatan SDM; 4) pendekatan terhadap proses yang sistematis pada manajemen; 5) pembuatan keputusan berdasar persoalan yang dianalisis 6) pendekatan nyata; 7) hubungan simbiosis mutualisme; 8) peningkatan berkesinambungan. Dengan adanya kedelapan prinsip ini diharapkan pendidikan mampu meningkatkan mutunya sehingga mampu mencetak output yang dapat bersaing dan yang terpenting adalah anak dapat menjadi dirinya sendiri.

Sallis menterjemahkan bahwa lembaga pendidikan yang telah mengadopsi ISO-9001:2008 setidaknya memenuhi persyaratan berikut<sup>55</sup>:

No	Syarat ISO-9001:2008	Terjemahan Bidang Pendidikan
1.	Tanggung jawab manajemen	Komitmen manajemen sekolah terhadap mutu
2.	System mutu	System mutu
3.	Kontrak	Komitmen dengan pelanggan internal dan eksternal (hak pelajar, orang tua, pengguna kepentingan pendidikan)
4.	Kontrol dokumen	Kontrol dokumen
5.	Pengadaan bahan	Kebijakan seleksi dan ujian masuk
6.	Persediaan produk	Layanan pendukung pelajar yang mencakup kesejahteraan, konseling dan tutorial
7.	Identifikasi Produk	Catatan kemajuan belajar
8.	Kontrol proses	Pengembangan, desain dan penyampaian kurikulum, strategi pembelajaran
9.	Inspeksi dan tes	Penilaian dan tes

<sup>54</sup> Yunita Kumala Dewi, Yovitha Juliejantingsih, dan Nurkolis Nurkolis, “Implementasi Iso 9001:2015 Dalam Penjaminan Mutu Smp Negeri 2 Kabupaten Demak,” *Jurnal Manajemen Pendidikan*

10.	Perlengkapan inspeksi, penilaian dan tes	Konsistensi metode penilaian
11.	Status inspeksi dan tes	Prosedur dan catatan untuk mengidentifikasi kegagalan dan kesalahan
12.	Kontrol terhadap produk	Metode dan prosedur diagnostic untuk mengidentifikasi kegagalan dan kesalahan
13.	Tindakan perbaikan	Tindakan perbaikan terhadap kegagalan pelajar, system untuk menghadapi tuntutan
14.	Penanganan pengaman dan penyampaian	Fasilitas lingkungan fisik, fasilitas pembelajaran, ekstrakurikuler dan lainnya
15.	Catatan mutu	Catatan mutu
16.	Audit mutu internal	Prosedur dan pengembangan staf mencakup prosedur untuk menilai kebutuhan pelatihan dan evaluasi

Dan perlu untuk diketahui bahwa, sertifikasi ISO merupakan sebuah pengakuan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi Internasional setelah melalui proses audit internal dan eksternal

### 3. Esensi Konsep Penjaminan Mutu dan Output Yang Ditawarkan

Berbicara mengenai esensi, tentu berbicara mengenai sesuatu yang penting dan dinilai sebagai makna dari sesuatu. Untuk itu, penulis beranggapan bahwa penting kiranya untuk mengetahui esensi penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan serta output yang ditawarkan.

Ditinjau secara bahasa, kata *assurance* berarti jaminan. Dari pengertian ini mengandung makna perlindungan (terhadap pelanggan) dari kemungkinan kerugian. Sedangkan jika ditinjau dari segi tujuan dari suatu jaminan adalah kepuasan pelanggan. Dalam konteks pendidikan penjaminan mutu (*quality assurance*) berkenaan dengan apa yang kemudian ditawarkan oleh pendidikan terhadap pelanggan atau stakeholders. Ishikawa (1985) menjelaskan *quality assurance* dimaksudkan untuk menjamin mutu, dimana konsumen dapat membeli dan menggunakan dengan penuh kepercayaan dan kepuasan serta masih dapat

(JMP) 9, no. 1 (1 Oktober 2020): h. 7, <https://doi.org/10.26877/jmp.v9i1.6833>.

<sup>55</sup> Fanani, “Implementasi Iso 9001:2008 Dalam Mengembangkan Budaya Mutu Madrasah,” h. 6.

digunakan dalam jangka panjang<sup>56</sup>. Berdasar definisi tersebut dan mengingat esensi pendidikan menjadi salah satu tonggak pembangunan bangsa, penjaminan mutu menjadi sesuatu yang amat penting untuk diterapkan dalam pendidikan sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan dan cita-cita bangsa dapat tercapai.

Mengutip apa yang disampaikan Tom Vroeijenstijn penjaminan mutu (*quality assurance*) dengan “*continuous attention to reality for improvement and enhancement*” dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu 1) *are we doing the right things?*; 2) *in the right way?*; 3) *achive the right goals?*<sup>57</sup>. Kemudian Hoy, Jardine dan Wood mengatakan mutu pendidikan merupakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan dan dalam rangka mengoptimalkan potensi pelanggan (peserta didik) serta memiliki standar akuntabilitas yang telah disepakati oleh para pengguna pendidikan sehingga terjadi sebuah simbiosis mutualisme diantara keduanya<sup>58</sup>. Sehingga tujuan penjaminan mutu dalam berbagai jenjang pendidikan adalah untuk memberikan acuan dan arah program dengan terus melakukan sebuah pengembangan, perencanaan pengelolaan secara terpadu.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pengembangan penjaminan mutu ialah proses dan produk system penjaminan mutu mampu mengedukasi masyarakat luas dan meyakinkan semua pihak yang terkait bahwa melalui SPMP, pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara akuntabel, terukur, sistematis, transparan dan menghargai otonomi sekolah dengan acuan pengembangan peradapan<sup>59</sup>. Secara umum

dapat dipahami bahwa dengan adanya SPMP ini setidaknya mampu memberi rasa percaya dari pelanggan terhadap jasa yang diberikan serta output yang menjanjikan.

Sehingga esensi system penjaminan mutu didasarkan pada pemahaman mengenai makna kualitas secara komprehensif. Artinya jaminan kepuasan khususnya bidang jasa seperti pendidikan, layanan pendidikan sudah barang tentu berkaitan dengan mutu layanan pembelajaran yang dalam konteks ini dipegang oleh pendidik dan pada analisis yang terakhir berkaitan dengan hasil pendidikan, dengan kata lain ialah peserta didik yang menjadi dirinya sendiri dan kompeten.

Sallis (2007) menyatakan bahwa konsep mutu atau kualitas yang diturunkan dari wawasan *total quality management* (TQM) harus dipandang sebagai konsep yang relative bukan absolut<sup>60</sup>. Artinya definisi mutu yang relatif memiliki dua aspek yaitu 1) memenuhi spesifikasi dan 2) memenuhi persyaratan yang dituntut pelanggan. Maknanya adalah kualitas menurut produsen (lembaga pendidikan) dicapai bilamana produk atau jasa memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu produser yang konsisten. Kemudian produk tersebut didemonstrasikan oleh produsen dalam sebuah system yang dikenal sebagai system jaminan mutu yang memungkinkan untuk produksi yang konsisten untuk memenuhi standar atau spesifikasi tertentu<sup>61</sup>. Yang terakhir adalah bilamana produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi spesifikasi atau standar/kriteria yang telah dibuat maka produk atau jasa dapat dikatakan bermutu. Hal inilah yang kemudian

<sup>56</sup> Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*, h. 11.

<sup>57</sup> Ari Prayoga dan Azhar Lujjatul W et al., “Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah,” *Jurnal Murobbi* 3, no. 1 (2019): h. 75.

<sup>58</sup> Prayoga dan Lujjatul W et al., h. 73.

<sup>59</sup> Mariana dan et. al, *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali*, h. 5.

<sup>60</sup> Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*, h. 12.

<sup>61</sup> Mariana dan et. al, *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali*, h. 8.

disebut (*quality in fact*). Quality in fact menjadi dasar atau makna dari sistem penjaminan mutu.

Oleh sebab itu, jelas bahwa esensi dari penjaminan mutu dan output yang ditawarkan dalam dunia pendidikan, tidak lain adalah penjaminan mutu digunakan sebagai proses. Sedangkan output yang ditawarkan merupakan hasil dari proses. Maksud proses disini adalah upaya sistematis yang dilakukan lembaga atau institusi dalam penyelenggaraan suatu pendidikan di sekolah sesuai dengan konsesnus yang telah dibuat dan berorientasi pada tujuan pendidikan nasional sebagai *goalnya*. Sedangkan produk yang dimaksud adalah segala yang dihasilkan dalam pendidikan melalui sekolah dan harapan masyarakat serta bangsa sebagaimana yang tercantum tujuan pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang penulis simpulkan menjadi manusia seutuhnya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

System penjaminan mutu semakin nampak perannya. Untuk itulah pengembangan penjaminan mutu dilakukan terus menerus mengikuti perkembangan dan kebutuhan. Dengan kata lain penjaminan mutu bersifat relative, bukanlah absolut. Adapun hasil analisis yang dilakukan, penulis berasumsi bahwa 1) pengembangan penjaminan mutu dalam suatu organisasi bisa dikatakan sebagai ruh dalam sebuah organisasi lembaga pendidikan, terlebih seorang pendidik yang memiliki peranan penting sebagai penggerak utama. Dengan adanya pemahaman yang luas dan matang serta kesadaran akan profesi pedidik (guru) akan menghasilkan sebuah keprofesionalan yang hakiki. 2) sistem penjaminan mutu dapat dikatakan sebagai suatu instrumen metodologis yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan. 3) esensi dari penjaminan mutu ialah mutu itu sendiri, sedangkan yang menjadi tolak ukur adalah pelanggan sebagai focus

utama dari penjaminan mutu, sedangkan output yang ditawarkan ialah produk atau pun jasa yang tentunya sesuai dengan pemangku kepentingan atas produk atau jasa yang ditawarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ainiyah, Nur. "Identitas Diri dan Makna Guru Profesional sebagai Komunikator Pendidikan (Perspektif Fenomenologis)." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1 (2 Oktober 2016): 1–20. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.32>.
- [2] Arifin, Zaenal. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, t.t.
- [3] Darmaji, Achmad Supriyanto, dan Agus Timan. "Sistem Penjaminan Mutu Internalsekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan." *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 3, no. 3 (28 Juli 2019): 130–36. <https://doi.org/10.17977/um025v3i32019p130>.
- [4] Dewi, Yunita Kumala, Yovitha Juliejantiningsih, dan Nurkolis Nurkolis. "Implementasi Iso 9001:2015 Dalam Penjaminan Mutu Smp Negeri 2 Kabupaten Demak." *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)* 9, no. 1 (1 Oktober 2020). <https://doi.org/10.26877/jmp.v9i1.6833>.
- [5] Fanani, Moh Zainal. "Implementasi Iso 9001:2008 Dalam Mengembangkan Budaya Mutu Madrasah." *Jurnal Realita* 15, no. 2 (2017): 26.
- [6] "Focused Short Course Data Management Training for Targeted Provincial Quality Assurance Institutions (LPMPs) staff members." Sekolah Pasca Sarjana UPI dan AUSAID, 2010.
- [7] Hadi, Abdul. "Konsepsi Manajemen Mutu Dalam Pendidikan." *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 269.

- <https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i2.5260>.
- [8] Haryono, dan Budiyo, dkk. "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang." *Jurnal PANJAR* 1, no. 1 (2019).  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/panjar/>.
- [9] H.M Arifin. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Pengarahan Agama*. Jakarta: Citra Mandala Pratama, 1998.
- [10] Indana, Nurul. "Implementasi Total Quality Management (Tqm) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Mts Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng)." *Jurnal Al-Idaroh* 1, no. 1 (2017): 25.
- [11] Koswara, Koswara, dan Rasto Rasto. "Kompetensi Dan Kinerja Guru Berdasarkan Sertifikasi Profesi." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 1, no. 1 (18 Agustus 2016): 61.  
<https://doi.org/10.17509/jpm.v1i1.3269>.
- [12] Kusnandi. "Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan." *Jurnal IJEMAR* 1, no. 1 (Desember 2017).
- [13] Latif, Muhammad Abdul, Erni Munastiwi, Deska Puspita, dan Adinda Putri Amanah. "ANALISIS TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PADA PENDIRIAN TK ISLAM TERPADU MUTIARA PLUS BANGUNTAPAN." *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak* 6, no. 2 (30 September 2020): 301.  
<https://doi.org/10.24235/awlad.v6i2.5783>.
- [14] Lisna, Ade, dan Erni Munastiwi. "PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU" 5, no. 1 (2020): 6.
- [15] Maragustam. *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter*. Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- [16] Mariana, I Made Alit, dan et. al. *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali*. Denpasar: LPMP Provinsi Bali, 2013.
- [17] Mufidah, Luk-Luk Nur. "Aktualisasi Tqm Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Tadris* 4, no. 1 (2009): 15.
- [18] Mulyani, Fitri. "Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 03, no. 01 (2009): 8.
- [19] Mulyono. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2008.
- [20] Munir, Miftahul. "Keberadaan Total Quality Management Dalam Lembaga Pendidikan (Antara Prinsip Implementasi dan Pilar TQM Dalam Pendidikan)." *Jurnal Realita* 16, no. 1 (2018).  
<https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.880>.
- [21] Mustofa, -. "Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 4, no. 1 (29 Februari 2012).  
<https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.619>.
- [22] Nurhuda, Mochamad. "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 1, no. 1 (6 Agustus 2018): 32–60.  
<https://doi.org/10.33367/ijies.v1i1.518>.

- [23] “Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,” t.t.
- [24] Permana, Nana Surya. “Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi dan Sertifikasi Guru.” *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11, no. 1 (2017): 8.
- [25] Prayoga, Ari, dan Azhar Lujjatul W et al. “Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah.” *Jurnal Murobbi* 3, no. 1 (2019): 70–84.
- [26] Putro Widoyoko, Eko. “Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” Dalam *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sertifikasi Guru*, 9. Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2008.
- [27] Roskina Mas, Sitti. *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: ZAHIR publishing, 2017.
- [28] Rusdiana. *Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan*. 1. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2016.
- [29] Sonhadji K. Hasan, Ahmad. “Penerapan Total Quality Management dan ISO 9000 dalam Pendidikan Teknik.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (1999).
- [30] Sridana, Nyoman, Sudirman Wilian, dan Dadi Setiadi. “Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA).” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 1, no. 1 (22 Desember 2018).  
<https://doi.org/10.29303/jpmi.v1i1.212>.
- [31] Suwarno, -. “Peran Guru dalam Keberhasilan Implementasi Kurikulum 2004.” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 2, no. 1 (2 Maret 2012).  
<https://doi.org/10.21831/jep.v2i1.656>.
- [32] Taher, Sartika M, dan Erni Munastiwi. “Peran Guru Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini Di TK Islam Terpadu Salsabila Al-Muthi’in Yogyakarta.” .. *Juni* 4, no. 2 (2019): 16.
- [33] “Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,” t.t.
- [34] Wibowo, Agus. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. 1 ed. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012.
- Wiryokusumo, Iskandar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- [35] <https://www.kompasiana.com/yunitamn/54f99080a3331140548b496d/penyebab-rendahnya-mutu-pendidikan-di-indonesia>
- [36] <https://malangtimes.com/baca/46876/20191206/090800/kualitas-pendidikan-indonesia-peringkat-5-asean-warganet-20-tahun-reformasi-masih-kalah-dengan-malaysia-miris-jiwa>
- [37] <https://mahasiswaindonesia.id/rendahnya-kualitas-pendidikan/>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ANALISIS PENGARUH PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IKAN BANDENG (*Chanos chanos*) DI KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG

Oleh

Mutia Ardini<sup>1)</sup>, Cut Gustiana<sup>2)</sup>, Silvia Anzitha<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra, Indonesia.

Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Langsa Kota, Aceh 24416

E-mail : [mutiaardini602@gamil.com](mailto:mutiaardini602@gamil.com)

Abstract

This study aims to analyze influence of consumer preferences for purchasing decisions of milkfish (*Chanos chanos*) in Seruway District, Aceh Tamiang Regency. The independent variables used in this study are price, location and quality. While the dependent variable used is consumer preferences for milkfish purchasing decisions. Determination of the sampling technique using the Nonprobability Sampling method, namely the saturated sampling method as many as 35 respondents. The data used are primary data and secondary data with a quantitative descriptive approach. Data analysis includes income analysis and multiple linear regression. The results showed that the price variable ( $X_1$ ) had a significant effect on consumer preferences on milkfish purchasing decisions (*Chanos chanos*), the location variable ( $X_2$ ) had no significant effect on consumer preferences on milkfish purchasing decisions (*Chanos chanos*), quality variable ( $X_3$ ) has a significant effect on consumer preferences on purchasing decisions of milkfish (*Chanos chanos*) in Seruway District, Seruway Regency.

**Keywords:** Milkfish, Influence Of Consumer Preferences

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki prospek pertanian yang baik, salah satunya sub sektor dari pertanian yaitu perikanan. Sub sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional (Kurniawati, Isfaeni., & Komala, 2015). Peranan sub sektor perikanan dalam pembangunan ekonomi adalah mendorong pertumbuhan agroindustri melalui penyediaan bahan baku, meningkatkan devisa melalui peningkatan ekspor hasil perikanan, menciptakan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani nelayan, serta menunjang pembangunan daerah. Sektor perikanan merupakan salah satu subsektor pertanian yang berperan penting dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Produk-produk yang

dihasilkan sektor perikanan juga dinilai memberikan manfaat dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya pemenuhan gizi protein hewani.

Ikan memegang peranan penting dalam pemenuhan sumber gizi dan keamanan hidup bagi manusia pada negara berkembang (Roopma et al., 2012). Ikan juga berfungsi sebagai sumber dari asam lemak tidak jenuh jamak (PUFA), protein, mineral dan vitamin. Meskipun ikan kaya akan gizi, tetapi ikan merupakan bahan yang cepat busuk dan mempunyai umur simpan yang pendek. Jenis ikan yang sering dikonsumsi beranekaragam jenisnya. Beberapa jenis ikan yang dipasarkan adalah kakap, nila, lele, mujaer, bandeng, dan berbagai jenis ikan lainnya.

Ikan bandeng (*Chanos chanos*) merupakan salah satu jenis ikan yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia. Berkembangnya teknologi budidaya ikan

bandeng di masyarakat tidak terlepas dari keunggulan komparatif dan 2 strategisnya. Ikan bandeng dapat dibudidayakan di air payau, laut, toleran terhadap perubahan mutu lingkungan serta tahan terhadap serangan penyakit. Ikan bandeng juga dapat digunakan sebagai umpan hidup tuna dan cakalang, dan telah menjadi komoditas ekspor (Kordi, 2009).

Preferensi konsumen adalah pilihan atau minat seseorang untuk mengatakan suka atau tidak suka terhadap suatu produk (Simamora, 2013). Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang disukai oleh konsumen. Kemudian pemahaman preferensi konsumen bertujuan untuk meneruskan strategi pemasaran yang secara berkelanjutan agar barang atau jasa yang dijual atau dipasarkan tetap diminati oleh konsumen, hal ini juga merupakan keputusan akhir dalam proses pembelian untuk dapat dinikmati oleh konsumen sehingga dapat mencapai kepuasan konsumen. Hal ini dapat diasumsikan bahwa perilaku konsumen dapat membuat pilihan secara rasional, mereka memilih barang untuk memaksimalkan kepuasan yang diraih konsumen.

Provinsi Aceh memiliki peluang yang besar untuk pengembangan kawasan perikanan. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi penghasil bandeng di Indonesia, wilayah yang membudidayakan bandeng meliputi Kabupaten Simelue, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Biruen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang (Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Aceh, 2018).

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial dalam kegiatan budidaya ikan bandeng. Khususnya di Kecamatan Seruway dimana terdapat banyak nelayan dan pembudidaya ikan bandeng yang memberikan peluang besar bagi

perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang pada sektor perikanan yaitu komoditas ikan bandeng. Berikut merupakan tabel produksi budidaya tambak ikan bandeng di Kabupaten Aceh Tamiang.

**Tabel 1.** Produksi Budidaya Ikan Bandeng di Kabupaten Aceh Tamiang

No	Kecamatan	Ton/Tahun
1	Seruway	130,50
2	Bendahara	18,25
3	Banda Mulia	55,02
4	Manyak Payet	80,50
Kabupaten Aceh Tamiang		284,27

*Sumber : Dinas Pangan, Kelautan Dan Pertanian, 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi bandeng pada tambak yang paling tinggi adalah terdapat pada Kecamatan Seruway yaitu dengan total produksi 130.50 ton permusim panennya. Sedangkan produksi yang paling rendah yaitu ditempati oleh Kecamatan Bendahara dengan jumlah total produksi yaitu 18.25 ton permusim panennya. Kemudian dengan jumlah total keseluruhan produksi bandeng di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu 284,27 Ton/tahun. Kecamatan Seruway berpotensi sebagai sentra produksi bandeng karena merupakan kawasan budidaya air payau.

Masyarakat Kecamatan Seruway sebagai produsen ikan bandeng terus berupaya menawarkan ikan yang baik dalam keadaan segar dengan harga yang terjangkau. Sedangkan kesadaran terhadap pemenuhan kebutuhan akan protein hewani membuat permintaan ikan bandeng dipasar Seruway semakin diminati. Dibandingkan dengan ikan tuna yang harganya Rp 30.000, harga ikan bandeng yang lebih murah yaitu Rp 25.000. Hal ini membuat konsumen di pasar Seruway yang mayoritasnya adalah ibu rumah tangga lebih berminat untuk mengkonsumsi ikan bandeng karena harga yang lebih murah. Hasil olahan dari ikan bandeng juga banyak disukai oleh masyarakat Seruway seperti masakan khas Aceh yaitu gulai Aceh.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Menurut Sugiyono (2014), metode survey merupakan metode yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi besar maupun kecil, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Non probability Sampling yaitu Teknik *accidental sampling* dimana penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi dengan konsumen yang membeli ikan bandeng di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari instansi terkait yaitu, Dinas Pangan, Kelautan Dan Pertanian, Dan Badan Pusat Statistik, Kabupaten Aceh Tamiang, serta internet yang menyediakan data mengenai objek penelitian serta jurnal online yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka di dapatkan hasil 15 item pernyataan yang valid, dengan jumlah keseluruhan item adalah 15 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Validitas

No	Kode	rhitung (X <sub>1</sub> )	rhitung (X <sub>2</sub> )	rhitung (X <sub>3</sub> )	Rtabel 0,05%	Ket
1	S1	0,522			0,344	Valid
2	S2	0,522			0,344	Valid
3	S3	0,389			0,344	Valid
4	S4	0,483			0,344	Valid
5	S5	0,463			0,344	Valid
6	S6		0,564		0,344	Valid
7	S7		0,409		0,344	Valid
8	S8		0,477		0,344	Valid
9	S9		0,459		0,344	Valid
10	S10		0,385		0,344	Valid
11	S11			0,527	0,344	Valid
12	S12			0,556	0,344	Valid
13	S13			0,407	0,344	Valid
14	S14			0,353	0,344	Valid
15	S15			0,348	0,344	Valid

Ket :

S = Sampel

S1-S5 = Harga (X<sub>1</sub>)

S6-S10 = Lokasi (X<sub>2</sub>)

S11-S15 = Kualitas (X<sub>3</sub>)

Sumber : (Lampiran 7)

### Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil analisis uji reliabilitas diukur menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Apabila nilai koefisien Cronbach's Alpha  $\geq 0,6$  maka instrument yang mengukur item pernyataan dari kuisisioner dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 8.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil Uji
S1	0,698	Reliabel
S2	0,704	Reliabel
S3	0,720	Reliabel
S4	0,703	Reliabel
S5	0,708	Reliabel
S6	0,695	Reliabel
S7	0,709	Reliabel
S8	0,704	Reliabel
S9	0,702	Reliabel
S10	0,717	Reliabel
S11	0,697	Reliabel
S12	0,694	Reliabel
S13	0,709	Reliabel
S14	0,718	Reliabel
S15	0,719	Reliabel

Sumber : (Lampiran 7)

Dapat dilihat pada tabel hasil uji reliabilitas di atas, menunjukkan hasil uji reliabilitas dari setiap item pernyataan masing-masing variabel penelitian, hasil pengujian menggunakan *Software SPSS 20* bahwa nilai koefisien Cronbach's Alpha seluruh item pernyataan yaitu  $\geq$  dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel penelitian

yang digunakan ini *Reliable* dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian hasil asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 3 uji yaitu Uji normalitas, Uji multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas.

#### 1. Uji Normalitas

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.18763692
	Kolmogorov-Smirnov Z	.509
Asymp. Sig. (2-tailed)		<b>.958</b>

Sumber: (Lampiran 8)

Berdasarkan hasil output dari pengujian normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai diperoleh nilai *Asymp.sig* (2-tailed) sebesar 0,958 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal dan nilai tersebut lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian memenuhi syarat uji normalitas. Apabila hasil menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0,05 dan data tidak menyebar serta mengikuti arah garis diagonal maka data penelitian dikatakan tidak normal.

#### 2. Uji Multikolinieritas

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Harga	0,776	1,291	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Lokasi	0,853	1,172	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kualitas	0,744	1,345	Tidak Terjadi Multikolinieritas

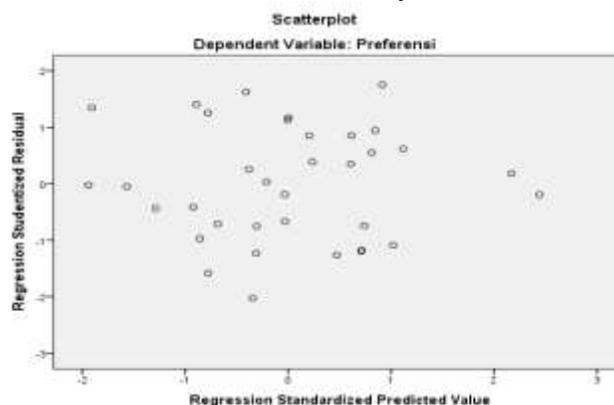
Sumber: (Lampiran 8)

Pada Tabel 8 hasil perhitungan nilai *Tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 dengan nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen yaitu, harga bernilai sebesar 0,776, lokasi sebesar 0,853, dan kualitas sebesar 0,744. Sementara itu hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu tidak adanya

nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dengan nilai VIF masing-masing variabel independen bernilai harga 1,291, lokasi sebesar 1,172, dan kualitas sebesar 1,345. Menunjukkan hasil perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari segala multikolinieritas.

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 7. Grafik Scatterplot



Sumber : (Lampiran 8)

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil ke empat uji asumsi klasik diatas dapat disimpulkan bahwa data yang sudah di uji menggunakan SPSS sudah memenuhi berbagai uji asumsi klasik.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	Sig
Constanta	-2,495	-,756	,455
X1 = Harga	,478	3,654	,001
X2 = Lokasi	-,099	-,672	,506
X3 = Kualitas	,672	3,925	,000
R-Square = 0,624			
F-Hitung = 17,148			
F-tabel = 2,90			
t-tabel = 2,036			

Sumber: (Lampiran 9)

Dari tabel diatas, nilai-nilai yang tertera digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -2,495 + 0,478 X1 + -0,099 X2 + 0,672 X3$$

Dimana :

Y : Preferensi Konsumen

- a : Koefisien  
 b<sub>1</sub> : Koefisien regresi variabel harga (X<sub>1</sub>)  
 b<sub>2</sub> : Koefisien regresi variabel Lokasi (X<sub>2</sub>)  
 b<sub>3</sub> : Koefisien regresi variabel kualitas (X<sub>3</sub>)  
 e : Standart Error  
 X<sub>1</sub> : Harga (skor)  
 X<sub>2</sub> : Lokasi (skor)  
 X<sub>3</sub> : Kualitas (skor)

Hasil Analisis Pada koefisien determinasi dari nilai *Adjusted R Square* yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dalam *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,588 yang berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sebesar 58,8% sedangkan sisanya yaitu sebesar 41,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar analisis seperti umur, pekerjaan, pendidikan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen meliputi harga (X<sub>1</sub>), lokasi (X<sub>2</sub>) dan kualitas (X<sub>3</sub>) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Preferensi konsumen dalam pembelian ikan bandeng di Kecamatan Seruway Aceh Tamiang. Sedangkan berdasarkan uji F diperoleh nilai  $F_{hitung} 16,428 > F_{tabel} 2,90$  sehingga dapat disimpulkan bahwa harga (X<sub>1</sub>), lokasi (X<sub>2</sub>) dan kualitas (X<sub>3</sub>) secara simultan berpengaruh sangat positif terhadap Preferensi konsumen terhadap pembelian ikan bandeng di Kecamatan Seruway Aceh Tamiang.

Hasil uji t pada masing-masing variabel Harga (X<sub>1</sub>), Lokasi (X<sub>2</sub>), dan Kualitas (X<sub>3</sub>) adalah sebagai berikut :

#### 1. Harga (X<sub>1</sub>)

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,654 > t_{tabel} 2,036$  serta berdasarkan nilai signifikansi diketahui variabel harga (X<sub>1</sub>) adalah sebesar  $0,01 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H<sub>a</sub> diterima pada variabel harga (X<sub>1</sub>) berpengaruh sangat signifikan

terhadap Preferensi konsumen dalam keputusan pembelian ikan bandeng di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Harga berpengaruh positif preferensi konsumen dalam pembelian ikan bandeng. Hal ini terlihat dari uji t yang menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu sebesar  $3,654 > 2,037$  dengan taraf signifikansi sebesar  $0,01 < 0,05$ . Kemudian dibuktikan dengan nilai  $\alpha 0,01 < 0,05$  berpengaruh sangat nyata dan koefisien regresi yang diperoleh bernilai positif yaitu 0,478. Dari analisis yang dilakukan, harga memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan konsumen dalam pembelian ikan bandeng yaitu sebesar 0,478, Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan dan wawancara bahwa produksi ikan bandeng terbanyak terdapat di kecamatan seruway, dan produsen berupaya menawarkan ikan yang baik dalam keadaan segar dengan harga terjangkau, kemudian tampilan ikan bandeng juga diminati karena memiliki rasa yang enak, gurih dan daging netral/tidak asin, sehingga keinginan konsumen membeli ikan bandeng semakin diminati. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh harga terhadap keputusan pembelian ikan bandeng yang ditawarkan terhadap konsumen akan cenderung membuat konsumen melakukan pembelian terhadap barang tersebut.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Dimas Ali Setyo Budi, I Made Sudarma, I Dewa Gede Agung (2020) berdasarkan penelitian Pengaruh harga terhadap preferensi konsumen Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel independen harga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen preferensi konsumen dengan nilai t-statistik sebesar 2,859 lebih besar dari nilai (t-tabel signifikansi 5% = 1,96) sehingga hipotesis H<sub>4</sub> dapat diterima. Variabel harga berpengaruh terhadap preferensi konsumen dan memiliki nilai positif sebesar 0,155 yang berarti mencerminkan harga berpengaruh nyata terhadap preferensi konsumen sebesar 15,5%.

#### 2. Lokasi (X<sub>2</sub>)

Hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar  $-0,672 < t_{tabel} 2,036$  serta berdasarkan nilai signifikansi diketahui variabel lokasi ( $X_2$ ) adalah sebesar  $0,506 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis  $H_a$  ditolak dan Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel lokasi ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen dalam pembelian ikan bandeng di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *IBM SPSS Statistic 20* melalui uji *t-test* yang dilakukan diperoleh nilai thitung untuk variabel lokasi terhadap preferensi konsumen dalam pembelian ikan bandeng menunjukkan nilai thitung  $-0,672 < t_{tabel} 2,036$  yang memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,506 > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian ikan bandeng di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Dimas Ali Setyo Budi, I Made Sudarma, I Dewa Gede Agung (2020) bahwa Pengaruh lokasi terhadap preferensi konsumen Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel independen lokasi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen preferensi konsumen dengan nilai *t*-statistik sebesar 3,091 lebih besar dari nilai (*t*-tabel signifikansi 5% = 1,96) sehingga hipotesis  $H_3$  dapat diterima. Variabel lokasi berpengaruh terhadap preferensi konsumen dan memiliki nilai positif sebesar 0,170 yang berarti lokasi berpengaruh nyata terhadap preferensi konsumen sebesar 17%.

### 3. Kualitas ( $X_3$ )

Hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar  $3,925 > t_{tabel} 2,036$  serta berdasarkan nilai signifikansi diketahui variabel harga ( $X_3$ ) adalah sebesar  $0,00 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_a$  diterima pada variabel Kualitas ( $X_3$ ) berpengaruh sangat signifikan terhadap Preferensi konsumen dalam

pembelian ikan bandeng di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan hasil uji data menggunakan *IBM SPSS Statistic 20* melalui uji t hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel kualitas terhadap preferensi konsumen dalam pembelian ikan bandeng menunjukkan nilai thitung  $3,925 > t_{tabel} 2,036$  yang memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya terdapat pengaruh positif antara kualitas terhadap preferensi konsumen dalam pembelian ikan bandeng, hal ini dibuktikan dengan hipotesis  $H_a$  yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara kualitas terhadap preferensi konsumen dalam pembelian ikan bandeng.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Robby Gunawan (2021) Berdasarkan penelitian kualitas produk terhadap minat beli pada UMKM ikan lele di desa Purwodadi Kecamatan pagar Merbau. Diperoleh nilai  $t_{hitung} 2,551 > t_{tabel} 1,984$  dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,012 < 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap minat beli pada UMKM ikan Lele di Desa Purwodadi Kecamatan Pagar Merbau.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel bebas secara parsial mempengaruhi preferensi konsumen terhadap keputusan pembelian ikan bandeng di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi Harga ( $X_1$ ) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,01 < 0,05$  dan Kualitas ( $X_3$ ) dengan nilai  $0,00 < 0,05$  maka variabel harga dan kualitas berpengaruh terhadap preferensi konsumen terhadap keputusan pembelian ikan bandeng di Kecamatan Seruway, Sedangkan variabel Lokasi ( $X_2$ ) dengan nilai signifikansi sebesar 0,506 maka

.....

variabel lokasi tidak berpengaruh terhadap preferensi konsumen terhadap keputusan pembelian ikan bandeng di Kecamatan Seruway.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat statistik, 2019. *Statistik Daerah Kecamatan Seruway*. Aceh Tamiang. Dinas Pangan, Kelautan dan Pertanian, 2019. *Produksi Ikan Bandeng Pada Tambak*. Aceh Tamiang.
- [2] Roopma, G., Shalini, S, Meenakshi, K., & Sweta, G. (2012). *Effect of chilling and freezing on fishmuscle*. IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences (IOSRJPBS), 2(5), 02-09. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [3] FAO. 2014. *Indonesia Sebagai Negara Penghasil Perikanan terbesar*. Jakarta
- [4] Kordi, G.M. 2009. *Sukses Memproduksi Bandeng Super untuk Umpan, Ekspor, dan Indukan*. Penerbit Andi. Jakarta.

HALAMAN INI SENGAJA DIKSONGKAN

---

**OPTIMALISASI INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI**

Oleh

Hukman Faathir Turmuji<sup>1)</sup>, Mubarak<sup>2)</sup>, Engkus<sup>3)</sup><sup>1,2,3</sup>Jurusan Administrasi Publik; Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungE-mail: <sup>1</sup>[faathir.hukman07@gmail.com](mailto:faathir.hukman07@gmail.com), <sup>2</sup>[mubarak.crd@gmail.com](mailto:mubarak.crd@gmail.com),<sup>3</sup>[ekustyana16@gmail.com](mailto:ekustyana16@gmail.com)**Abstract**

Pajak hiburan ialah suatu pajak yang memang diselenggarakan di suatu daerah serta yang dikenakan terhadap semua jasa hiburan dengan memungut bayaran. Permasalahan di Bapenda Kota Bekasi yaitu kurang optimalnya penerimaan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2017 – 2020, yang memang belum mencapai ketetapan yang disebabkan karena minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak, penurunan tarif pajak khususnya film dari 11 sampai dengan 15% menjadi 5 sampai 10% juga industri hiburan di Kota Bekasi terkena dampak pandemi covid-19. Rendahnya penerimaan pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi menimbulkan pemikiran untuk mencari solusi serta cara melalui strategi apa yang bisa meningkatkan dalam hal penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi belum optimal. Hal tersebut karena basis data objek di Bapenda Kota Bekasi jarang melakukan pemuktahiran data sehingga data yang diambil cenderung tidak akurat dan pemanfaatan teknologi seperti *Tapping Box* yang juga sebagai alat pengawasan belum berjalan dengan optimal, terbukti masih banyak alat yang memang belum terpasang di setiap masing – masing wajib pajak hiburan di Kota Bekasi.

**Keywords: Pajak Hiburan, Intensifikasi, Bapenda Kota Bekasi****PENDAHULUAN**

Pendapatan negara Indonesia terefleksi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Pemerintah, 2003), yang menyebutkan bahwa sumber pemasukan negara berasal dari pemasukan sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pemberian atau hibah. Sampai sejauh ini memang ketiga sumber pendapatan negara tersebut menjadi penunjang belanja negara. Seluruh penerimaan dana yang didapatkan tersebut bertujuan untuk menunjang ketersediaan dana dalam kas negara. Saat ini yang sedang menjadi primadona salah satu penerimaan negara yaitu berasal dari sektor pajak. Dari sektor pajak inilah bukan hanya sebagai tumpuan sumber penerimaan negara

yang utama tetapi diharapkan sebagai penyangga dalam pembiayaan negara, peningkatan pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pasal 1 UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berubah menjadi UU No. 28 Tahun 2007 (Pemerintah, 2007), menyebutkan bahwa “Pajak ialah kontribusi wajib serta tertuju kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang - undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk digunakan dalam keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memang memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan di suatu negara. Sejalan dengan (Fajarwati,2014) dalam

(Sari & Nuswantara, 2017) yang mengatakan bahwa pajak memang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara, tetapi kebutuhan pembangunan di Indonesia ini semakin meningkat dan tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak. meningkatnya pembangunan infrastruktur serta sarana fasilitas publik dikarenakan banyaknya sumber pajak yang dipungut sehingga dapat menghasilkan suatu peningkatan di sektor tersebut. Sama halnya dengan pajak daerah, untuk bisa mencapai titik ukur serta kemandirian keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, serta menjalankan program pembangunan daerah di Indonesia ini, apabila terdapat peningkatan dalam segi penerimaan daerah.

Sumber penerimaan terbesar dari pendapatan asli daerah memang berasal dari pajak daerah. tingginya tingkat kemandirian di daerah tersebut, juga disebabkan karena adanya pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Peraturan yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi bahwasannya “Pajak daerah ialah pajak yang memang berkontribusi wajib baik kepada daerah atau yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang – undang, dengan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besar kemakmuran rakyat.

#### Grafik Rasio Realisasi PAD Kota Bekasi Tahun 2017 -2020



Gambar 1.

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Jawa Barat LKPD Kota Bekasi Tahun 2017-2020

#### (Diolah oleh peneliti)

Tingkat kontribusi pajak daerah Kota Bekasi dari rasio realisasi PAD di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 – 2019 memang melampaui sektor – sektor Pendapatan daerah lainnya. Di tahun 2017 penerimaan pajak daerah mencapai 92,56 %, melampaui pendapatan daerah lainnya, juga di tahun 2018 penerimaan pajak daerah mencapai 90,74 %, di tahun 2019 menurun tetapi bisa melampaui sektor pendapatan lain yaitu mencapai 77,46 %. Tiga tahun berturun – turut memang pajak daerah memberikan kontribusi yang begitu besar serta mendominasi dalam penerimaan PAD di Kota Bekasi ini. Tetapi di tahun 2020 jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah memang menurun. Terbukti penerimaan pajak daerah menempati posisi kedua yaitu capaian nya hanya 98,21 %, sedangkan untuk retribusi daerah sendiri mencapai 105,25 % yang paling besar di antara sektor PAD Kota Bekasi lainnya di tahun 2020. Berdasarkan analisis peneliti bahwasannya adanya suatu penurunan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi Tahun 2020, yang memang diakibatkan adanya suatu permasalahan dari salah satu elemen pajak daerah yaitu penurunan penerimaan di pajak hiburan itu sendiri.

Satu dari jenis pajak daerah yang memang potensial untuk dilakukan pemungutannya yaitu dari pajak hiburan. Sedangkan dalam Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2017, (Perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan) tentang Pemungutan pajak hiburan (Bupati Bekasi, 2017), dikatakan bahwa pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hiburan adalah semua jenis pertunjukan, tontonan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek dari pajak hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Pasal 11 ayat (2) No.10 Tahun 2017 Tentang Pajak Hiburan (Perubahan atas Perda Kota Bekasi No.07 Tahun 2011) meliputi :

- a. Tontonan film ;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, atau busana ;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ;
- d. Pameran;
- e. Karaoke, diskotik, klab malam dan sejenisnya ;
- f. Sirkus, akrobatik dan sulap ;
- g. permainan ketangkasan , pacuan kuda,;
- h. mandi uap/*spa* ,panti pijat, refleksi, dan *fitness center* (pusat kebugaran) ; dan
- i. Pertandingan olahraga.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan**  
**Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	48.800.400.500,00	50.116.332.253,00	102,70
2018	63.000.000.000,00	42.087.395.665,00	66,81
2019	78.224.922.160,00	52.539.322.522,00	67,16
2020	42.292.461.045,00	24.495.228.842,00	57,92

**Sumber : LKIP Badan pendapatan Daerah Kota Bekasi 2020, (Diolah oleh peneliti)**

Dapat kita lihat dari tabel di atas, bahwasannya realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi pada tahun 2017 mampu melampaui ketetapan yaitu mencapai 102,70 %. Sedangkan di tahun 2018 – 2020 tidak mencapai ketetapan yaitu 66,81 %, 67,16 % dan 57,92 %. Bahkan di tahun 2020 ini menurun secara drastis dibandingkan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan LHP BPK Provinsi Jawa Barat, terkait LKPD Kota Bekasi Tahun 2020, peneliti telah menemukan suatu permasalahan terkait dengan penurunan penerimaan dari pajak hiburan sendiri. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu optimalnya pemungutan pajak hiburan yang disebabkan karena adanya tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, juga penurunan tarif pajak khususnya film dari 11 sampai dengan 15 % untuk film impor dan

nasional menjadi 5 sampai dengan 10%, serta industri hiburan di Kota Bekasi terkena dampak dari pandemi covid-19, dimana Kota Bekasi memberlakukan pembatasan operasional selama PSBB dan ATHB.

Salah satu tumbuhnya perekonomian yang baik, dikarenakan adanya suatu penerimaan pajak yang memang sesuai dengan target, juga akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupan masyarakat. Dalam (Lawati, 2018) mengatakan bahwa peningkatan pajak adalah salah satu program yang sangat strategis mengingat bisa berkontribusi serta memberikan manfaat bagi peningkatan PAD. Rendahnya penerimaan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi menimbulkan pemikiran untuk mencari solusi serta cara melalui strategi apa yang bisa meningkatkan dalam hal penerimaan pajak daerah sehingga mampu memaksimalkan serta memberikan suatu kontribusi bagi PAD di Kota Bekasi.

Selanjutnya Nirzawan (2001:75 ) dalam (Worumi, 2019) mengatakan bahwa strategi yang bisa diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstentifikasi. Sedangkan dalam penelitian yang digunakan peneliti hanya menggunakan salah satu strategi peningkatan penerimaan pajak yaitu kegiatan optimalisasi juga penggalian penerimaan pajak melalui upaya intensifikasi pajak yang sudah tercatat dalam administrasi ditjen pajak sesuai SE-06/PJ.9/2001.

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwasannya karena kurang optimalnya kegiatan dalam pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2017 – 2020, yang memang belum mencapai ketetapan dan dibuktikan dengan data realisasi penerimaan pajak hiburan yang disebabkan karena minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak, penurunan tarif pajak khususnya film dari 11 sampai dengan 15% menjadi 5 sampai 10% juga industri hiburan di Kota Bekasi terkena dampak pandemi covid-19, dimana Kota Bekasi memberlakukan

pembatasan operasional selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Maka dari itu, sesuai dengan penjelasan terkait permasalahan di atas dapat dikaji dengan menggunakan teori dari (Anggara,2016) mengenai optimalisasi melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan juga retribusi daerah. Yang terdapat lima aspek yaitu, mencakup :

1. Memperluas basis penerimaan ;
2. Memperkuat proses pemungutan ;
3. Meningkatkan pengawasan ;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan ;
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik ;

## LANDASAN TEORI

### Pajak

Menurut Andriani dalam (Saputri & Prasetyo, 2020) bahwasannya pajak merupakan iuran atau pembayaran masyarakat yang ditunjukkan untuk negara (yang dapat dipaksakan) juga terutang yang harus atau wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundangan untuk tidak mendapat timbal balik yang bertujuan untuk membiayai tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo dalam (Kamagi.G, 2016) bahwa pajak daerah ialah iuran atau pembayaran wajib yang harus dilakukan orang pribadi atau badan ke daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dikenakan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

### Pajak Hiburan

Menurut Putri & Iskandar dalam (Faisal Reza, 2021) mengatakan bahwa pajak hiburan ialah suatu pajak yang memang diselenggarakan di suatu daerah serta yang dikenakan terhadap semua jasa hiburan dengan memungut bayaran. Sedangkan Pajak hiburan menurut (Tjip Ismail, 2019), adalah suatu jasa

atas penyelenggaraan pelaksanaan hiburan serta dipungut dengan bayaran.

## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu di instansi pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder dengan mengambil data dari realisasi dan penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi pada tahun 2017 – 2020, serta melakukan wawancara terhadap beberapa kasubid di Badan Pendapatan Kota Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif seperti yang dikemukakan (Mathew.B Miles, 2014). Selain itu maksud dari penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu pemahaman yang bisa dijelaskan secara mendalam serta komprehensif terhadap tujuan penelitian tadi. Selain itu peneliti, mengumpulkan semua data yang dilanjutkan dengan melakukan pengamatan secara seksama sehingga akan menghasilkan gambaran yang utuh serta komprehensif.

### Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi juga studi literatur sebagai teknik dari pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh (Engkus & A.Syamsir 2021). Selain itu pada bagian observasi dan wawancara, peneliti melakukan pengamatan langsung ke kantor Bapenda Kota Bekasi serta peneliti akan melaksanakan agenda wawancara dengan metode pemilihan informannya menggunakan *purposive sampling* dengan tiga informan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yaitu (1) Kasubid Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, (2) Kasubid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, dan juga (3) Kasubid Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada studi dokumentasi, dilakukan melalui dokumen ataupun peraturan perundang

– undangan seperti kebijakan mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Barat mengenai LKPD Kota Bekasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP Bapenda Kota Bekasi) serta dokumen pendukung lainnya. Sedangkan untuk studi literatur dengan melakukan telaah terhadap referensi – referensi seperti buku, jurnal serta pemberitaan di media elektronik.

### Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model dari (Mathew.B Miles, 2014) pada bagian teknik analisis data, yaitu reduksi data, *display data*, dan *conclusion drawing*. Selain itu peneliti melakukan uji validitas data dengan menggunakan Teknik triangulasi sehingga tingkat keabsahan hasil penelitian lebih tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, maka peneliti melakukan analisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sahya Anggara mengenai optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut ini merupakan hasil analisis dari penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa aspek :

### 1. Memperluas Basis Penerimaan

(Anggara, 2016), menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah serta dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis data objek, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

### Mengidentifikasi Pembayar Pajak Baru

Terkait dengan hal tersebut memang perlu dilakukan identifikasi terhadap pembayar pajak baru. Khususnya untuk pajak hiburan memang sudah dilakukan dan di Bapenda Kota Bekasi sendiri memang telah berjalan dengan baik. Terkait dengan identifikasi pembayar

pajak baru tentu Bapenda mempunyai 12 unit dinas pendapatan yang terdapat di masing – masing kecamatan serta membantu dalam hal pelaksanaan teknis adanya pembayar pajak baru serta sebagai perpanjangan tangan Bapenda Kota Bekasi, juga pengawasan terhadap wajib pajak baru yang terdapat di Kota Bekasi. Unit ini memang ditugaskan di semua fungsi, dan ketika adanya pendaftaran terkait dengan wajib pajak baru, unit yang ditugaskan oleh Bapenda Kota Bekasi ini yaitu untuk mengurus persyaratan apa yang harus dibutuhkan oleh wajib pajak baru.

Selain itu unit ini disebut juga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memang bertugas untuk ketika adanya wajib pajak baru juga potensi baru yang menjadi tanggung jawab UPTD terkait untuk selalu diawasi. Karena memang untuk target potensi wajib pajak di masing – masing kecamatan ada di UPTD. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Wali Kota Bekasi No.6 Tahun 2021 (Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi No.92 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan dan Dinas Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi). Bahwa pada Pasal 2 ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis di bidang pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Berikut daftar 12 Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Bekasi :

**Tabel 1.3**

Unit	
UPTD Wilayah Bekasi Barat	
UPTD Wilayah Bekasi Selatan	
UPTD Wilayah Bekasi Timur	
UPTD Wilayah Bekasi Utara	
UPTD Wilayah Bantar Gebang	
UPTD Wilayah Jati Asih	<b>12 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BAPENDA KOTA BEKASI</b>
UPTD Wilayah Jati Sampurna	
UPTD Wilayah Medan Satria	
UPTD Wilayah Mustika Jaya	
UPTD Wilayah Pondok Gede	
UPTD Wilayah Pondok Melati	
UPTD Wilayah Rawa Lumbu	

**Sumber :** Bapenda Kota Bekasi diolah  
(oleh peneliti)

### **Memperbaiki Basis Data Objek**

Menurut (Jatnika,2012) bahwa basis data merupakan kumpulan mengenai obyek, orang dan lain – lain. Data dinyatakan dengan nilai (angka,deretan karakter, atau simbol). Tujuan basis data sendiri untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu kasubid di Bapenda Kota Bekasi sendiri, memang basis data objek pajak hiburan memang menjadi permasalahan yang krusial dan memang belum berjalan dengan baik. Karena kekurangan di Bapenda Kota Bekasi sendiri memang jarang melakukan pemuktahiran atas databasenya.

Meskipun di Bapenda Kota Bekasi mempunyai sub bidang yang memang berhubungan dengan permasalahan data tetapi sering kali tidak akurat antara data objek yang terdapat di Bapenda dengan data dilapangan. Upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi sendiri untuk bisa mengatasi masalah tersebut tentu ketelitian dalam hal mengecek kembali data yang memang sudah terdapat di Bapenda Kota Bekasi sendiri dan data dengan di lapangan terkhusus untuk pajak hiburan.

### **Menghitung Kapasitas Penerimaan Dari Setiap Jenis Pungutan**

Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, memang dalam prosesnya, apa yang dilaporkan pertama kali oleh wajib pajak, akan dianggap benar, sampai kemudian ditentukan oleh fiscus atau petugas. Untuk itu petugas perlu menguji terlebih dahulu terkait dengan kewajarannya, kepatuhannya dan juga pemeriksaan.

Untuk pajak hiburan sendiri memang dalam proses perhitungannya menggunakan sistem *self assessment*, artinya menurut (Mardiasmo,2016) dalam (Aryanti & Andayani, 2020) mengatakan bahwa *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang atas

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan dalam hal memperhitungkan potensi penerimaan sendiri terkhusus pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi mempunyai sub bidang perencanaan yang memang bertugas untuk menghitung potensi penerimaan tersebut yang memang bertujuan untuk menentukan target penerimaan tahun depan.

Tentu Bapenda Kota Bekasi terkait dengan memperhingkan penerimaan terkhusus pajak hiburan ini memang setiap tahunnya telah berjalan dengan baik. terbukti dalam tabel di atas, memang Bapenda Kota Bekasi sudah memperhitungkan objek pajak hiburan juga menetapkan target untuk tahun selanjutnya demi mengoptimalkan pajak daerah di Kota Bekasi. Selain itu pun dalam memperhitungkan pajak hiburan ini memang Bapenda Kota Bekasi mengacu kepada Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 Tentang Pajak Hiburan (Perubahan atas Perda Kota Bekasi No.07 Tahun 2011) yang memang di dalamnya terkait dengan besaran tarif pajak untuk setiap hiburan di Kota Bekasi.

### **2. Memperluas Basis Penerimaan**

Menurut (Anggara, 2016), upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan Perda, dan mengubah tarif.

### **Mempercepat Penyusunan Peraturan Daerah**

Terkait dengan Peraturan Daerah, Bapenda Kota Bekasi memang sudah mempercepat serta memperbaharui terkait dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Bekasi No.10 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi No.7 Tahun 2011, dikarenakan ada beberapa hal yaitu terkait dengan penyesuaian tarif untuk jenis tontonan film yang memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini, juga dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi No.52/PUU-IX/2011, jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2)

huruf g Tentang Pajak dan Retribusi Daerah jenis hiburan golf yang tidak lagi sebagai objek pajak hiburan. Terkait dengan diubahnya Peraturan Daerah tersebut tentu Bapenda Kota Bekasi terus berupaya untuk mengoptimalkan jenis objek pajak hiburan yang sudah ditetapkan, agar bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak hiburan.

### **Perubahan Tarif**

Perubahan Tarif, Bapenda Kota Bekasi terkait dengan perubahan tarif khususnya untuk jenis objek pajak hiburan memang hanya untuk jenis tontonan film yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian yaitu penurunan tarif pajak khususnya film impor dan lokal dari 11 sampai dengan 15% menjadi 5 sampai 10% yang sesuai dengan Pasal 14 (a) Peraturan Daerah Kota Bekasi No.10 tahun 2017. Dan untuk jenis objek pajak hiburan lainnya memang tetap sama tidak ada perubahan tarif pajak.

### **3. Meningkatkan Pengawasan**

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pengawasan menurut (Anggara, 2016) yaitu dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiscus.

#### **Pemeriksaan Mendadak & Berkala**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kasubid pengawasan, terkait dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, tentu Bapenda Kota Bekasi sendiri memang mempunyai sub bidang pengawasan yang bertugas mengawasi wajib pajak terkait dengan pembayaran maupun wajib pajak yang telat untuk membayar pajaknya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan secara mendadak dan berkala memang sudah dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi sendiri.

Tentu dalam penerapan *self assessment system* untuk pajak hiburan memang dianut

dalam sistem perpajakan sekarang ini. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menuntut Bapenda Kota Bekasi untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melakukan pemeriksaan.

Tujuan dari pemeriksaan pajak ini menurut (Suandy, 2006:100) dalam (Rahmawati, 2017) adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya – upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sub bidang pengawasan sendiri, memang merekap hasil pengawasan dari UPTD terkait sekaligus melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang sudah di sampaikan oleh UPTD sesuai dengan data yang di Bapenda ataukah tidak sesuai.

#### **Memperbaiki Proses Pengawasan**

Memang di Bapenda sendiri terkhusus dalam proses pengawasannya masih terdapat beberapa kendala. Seperti di internal Bapenda sendiri yang mengeluhkan jaringan internet yang kadang kala kurang stabil. Bapenda Kota Bekasi pun menggunakan teknologi informasi yang diharapkan bisa membantu dalam penyelenggaraan pengawasan itu sendiri. Selain itu mengingat banyaknya wajib pajak di Kota Bekasi yang memang setiap tahun selalu bertambah, maka dari itu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki proses pengawasan dengan menghadirkan suatu teknologi Sistem Informasi yang disebut *Tapping Box* yang dipinjamkan oleh Bank Jabar Banten.

Dari sekian banyak wajib pajak di Kota Bekasi, Bapenda Kota Bekasi hanya mendapatkan 471 wajib pajak yang terpasang yang diharapkan bisa memudahkan sub bidang pengawasan dalam mengawasi wajib pajak itu sendiri. Meskipun tapping box itu bukan sebagai alat penetapan, tetapi hanya sebagai alat pengawasan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus, 2020) yang berjudul “Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

(Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Kendari)”, bahwa pemasangan tapping box memberikan dampak yang positif terhadap besaran jumlah penerimaan daerah dibandingkan dengan sebelum adanya pemasangan alat tersebut. Terbukti penerimaan pajak hiburan yang di tahun 2018 sebesar Rp.7,2 miliar mengalami peningkatan menjadi Rp. 8,5 miliar pada tahun 2019.

Selain itu dalam proses kerjanya pun melapor dan beberapa kemudian akan terlihat di Bapenda sendiri dengan tapping itu berapa, serta sesuai atau tidaknya dan wajar atau tidak wajar. Memang untuk optimalisasi penerimaan pajak hiburan sendiri lebih ke fungsi – fungsi pengawasan serta yang pasti, juga menggali potensinya. Tetapi dalam hal ini belum optimal, karena masih saja terdapat kendala dan belum sepenuhnya akurat. Karena itulah Bapenda Kota Bekasi tidak sepenuhnya mengandalkan sistem informasi tersebut tetapi ada upaya lain yaitu dengan berkoordinasi dengan sub bidang pelaporan terkait kepastian data wajib pajak apakah sudah dilakukan pembayaran atau belum. Selain itu sub bidang pengawasan di Bapenda Kota Bekasi pun ketika adanya suatu wajib pajak yang memang tidak taat membayar pajak, sub bidang pengawasan pun persuasif dan akan ditindak lanjuti dan berkoordinasi juga dengan sub bidang pemeriksaan dan penagihan.



## Gambar 2

### Sumber : Data Pemasangan Tapping Box Bapenda Kota Bekasi (Diolah oleh peneliti)

Dari data pemasangan *Tapping Box* di Bapenda Kota Bekasi, memang pemasangan *Tapping Box* terkhusus untuk wajib pajak hiburan memang masih sedikit. Terbukti baru 43 wajib pajak atau 9% yang terpasang di setiap kecamatan di Kota Bekasi. Jika dibandingkan dengan pemasangan terhadap wajib pajak restoran memang terlampaui jauh yaitu 370 wajib pajak yang terpasang. Meskipun dalam hal ini Bapenda Kota Bekasi menggunakan teknologi untuk bisa memperbaiki pengawasan, tetapi hanya sebagai pembanding saja dan tetap harus dilakukan pemeriksaan agar kolaborasi dari upaya tadi bisa berjalan dengan optimal.

### Menerapkan Sanksi Terhadap Penunggak Pajak & Sanksi Terhadap Pihak Fiscus

Terkait dengan hal tersebut Bapenda Kota Bekasi dalam hal penerapan sanksi mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 11 Tahun 2016 Mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah, (Walikota Bekasi, 2016) khususnya untuk pajak hiburan yang memang dalam aturannya terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, yang menjelaskan bahwa pajak hiburan sendiri dalam perhitungannya dihitung dan ditetapkan oleh wajib pajak sendiri. Selain itu dalam Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan oleh lain Wali Kota. Dalam Pasal 13 ayat (9) pun menyebutkan bahwa apabila pembayaran pajak terhutang tersebut dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung sejak saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Selain itu terkait dengan sanksi terhadap pihak fiscus, tentu dalam hal sanksi tersebut Bapenda Kota Bekasi mengacu kepada Undang – Undang No.28 Tahun 2007 (Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pada Pasal 41 ayat (1) bahwa pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu dalam Pasal 41 ayat (2) yaitu pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan**

Menurut (Anggara, 2016), tindakan yang dilakukan oleh daerah, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

#### **Memperbaiki Prosedur Administrasi Pajak melalui Penyederhanaan Administrasi Pajak**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Pendaftaran & Penetapan pajak bahwasannya memang terkait dengan perbaikan bagaimana prosedur administrasi pajak khususnya untuk pajak hiburan sendiri sudah dilakukan. Terbukti semenjak di tahun 2015, dalam tata Kelola pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB Bapenda Kota Bekasi memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran secara online.

Selain itu pun Peraturan Wali Kota Bekasi No.64 Tahun 2015 Tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online, (Walikota Bekasi,2015) yang bertujuan dalam rangka tertib administrasi pajak daerah dan mendukung program *smart city* serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak perlu dilakukan inovasi dalam pelayanan perpajakan daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Sebelum tahun 2015, wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, mereka harus mengisi blanko pelaporan pajaknya berupa SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan harus bertemu dengan petugas untuk melaporkan itu. Tetapi semenjak Bapenda Kota Bekasi memakai sistem informasi pelaporan dan pembayaran pajak secara online, wajib pajak bisa melapor dan membayar pajak dimanapun.

Khususnya untuk pajak hiburan yang memang termasuk ke dalam *self assessment* yang dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Wali Kota Bekasi No.64 Tahun 2015 Tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online, menyebutkan bahwa pemberlakuan bagi wajib pajak *self assessment* adalah untuk pelayanan pelaporan transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang. Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa pelaporan transaksi usaha disampaikan oleh wajib pajak melalui e-SPTPD dan pembayaran pajak terutang dan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana perbankan pelaksana operasional online sistem. Tujuan Bapenda Kota Bekasi sendiri, karena jika semakin intensnya pertemuan petugas dengan wajib pajak itu pasti akan banyak potensi deviasi atau negatif yang timbul. Harapannya dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online ini pertemuan dengan petugas dengan wajib pajak itu kita minimalisir dengan sedikit mungkin. Kecuali memang diperlukan



sosialisasi kemungkinan bisa bertemu.

### **Meningkatkan Efisiensi Pemungutan dari Setiap Jenis Pemungutan**

Kepala Sub Bidang Pendaftaran & Penetapan Pajak pak Muhammad Luthfi saat peneliti wawancarai mengatakan bahwa "Tidak bisa dipungkiri perubahan zaman, kemajuan teknologi, itu adalah sebuah keniscayaan. Organisasi yang tidak adaptif terhadap sebuah perubahan itu akan tergerus". Bapenda Kota Bekasi terkait dengan tata Kelola, tentu memperhatikan aspek efektif dan efisien. Lagi – lagi kita memanfaatkan sistem informasi untuk tata Kelola. (Anggara, 2016) pun mengatakan bahwa dukungan teknologi informasi secara terpadu mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up to date*. Jadi untuk jenis objek BPHTB yang dulunya semua jenis pelayanan BPHTB itu memakai pertemuan tatap muka dan hardcopy berkas yang disampaikan.

Tetapi semenjak tahun 2021 BPHTB itu, Bapenda Kota Bekasi dalam tata kelolanya memakai sistem validasi online. Jadi dalam validasi online tersebut, harapannya wajib pajak tidak perlu datang ke kantor, cukup melapor melalui sistem informasi yang sudah diberikan aksesnya kepada notaris. jadi berkas diinput dan dilaporkan melalui sistem,

persyaratan – persyaratan di upload dan kemudian validasinya berupa online.

Dan yang dulu berupa hardcopy sekarang itu berupa online dan Bapenda Kota Bekasi sendiri sudah berintegrasi dengan kantor Badan Pertahanan Nasional. Itu salah satu bentuk efisiensi administrasi di Bapenda Kota Bekasi. Termasuk juga dalam hal pajak hiburan, memang sebelum tahun 2015 Bapenda Kota Bekasi terlebih dahulu harus mencetak blanko SPTPD setelah kita memakai sistem pelaporan online, dan wajib pajak tidak perlu lagi mencetak blanko SPTPD. Itu bentuk efisiensi Bapenda Kota Bekasi. Termasuk efisiensi wajib pajak juga, sekarang juga begitu wajib pajak misalnya seperti pajak lainnya restoran, melapor melalui sistem informasi yang disediakan, dapat kode bayar dan langsung membayar di bank manapun. Seperti pembayaran melalui M-banking, melalui bank, alfamart atau indomart juga bisa.

### **5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Baik**

(Anggara, 2016), mengatakan bahwa upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, juga adanya ekstentifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar pada daerah pada masa mendatang.

Sesuai dengan penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Selain itu pun perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor – impor. Pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran

atau pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor – impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak dan Retribusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Di Bapenda Kota Bekasi sendiri, memang terkait dengan keempat jenis pajak daerah tadi meskipun dalam undang – undang memperluas basis pajak yang sudah ada, memang di Bapenda Kota Bekasi tidak memungut Pajak Sarang Burung Walet tersendiri. Karena dari segi potensi penerimaannya pun yang sangat kecil menjadikan alasan Pajak Sarang Burung Walet untuk tidak dipungut. Salah satu pajak daerah di Kota Bekasi yang memang potensial untuk dilakukan pemungutannya dan meningkatkan penerimaan pajak daerahnya yaitu pajak hiburan. Mengingat di Kota Bekasi dari segi objek pajak hiburan tersendiri yang berpotensi meningkatkan penerimaan, tetapi dalam hal ini belum optimal dan memang harus ada suatu tindakan untuk bisa mengoptimalkan penerimaan dari pajak hiburan ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti lakukan pada setiap dimensi terkait dengan optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa optimalisasi intensifikasi penerimaan pajak hiburan di Bapenda Kota Bekasi belum optimal jika menggunakan teori yang peneliti gunakan. Hal tersebut karena terdapat dua

dimensi yang memang belum terpenuhi yaitu dimensi memperluas basis penerimaan dan dimensi meningkatkan pengawasan.

Selain itu dalam dimensi memperkuat proses pemungutan memang Bapenda Kota Bekasi sudah membuat Peraturan Daerah terkait dengan hal memperkuat pemungutan objek pajak khususnya untuk pajak hiburan yang memang ada perubahan yang tadinya objek pajak golf yang tidak dipungut kembali, juga penurunan tarif pajak khususnya film impor dan lokal dari 11 sampai dengan 15% menjadi 5 sampai 10% yang sesuai dengan Pasal 14 (a) Peraturan Daerah Kota Bekasi No.10 tahun 2017.

Terkait dengan dimensi meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, memang Bapenda Kota Bekasi memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya untuk mengintensifkan penerimaan pajak agar optimal terbukti dalam prosedur administrasi pajak Bapenda Kota Bekasi sudah menggunakan e-SPTPD dalam penyelenggaraan pelayanannya agar efektif juga efisien. Dimensi yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, tentu perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru.

Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi. Di Bapenda Kota Bekasi sendiri, memang terkait dengan keempat jenis pajak daerah tadi meskipun dalam undang – undang memperluas basis pajak yang sudah ada, memang di Bapenda Kota Bekasi tidak memungut Pajak Sarang Burung Walet tersendiri. Karena dari segi potensi penerimaannya pun yang sangat

kecil menjadikan alasan Pajak Sarang Burung Walet untuk tidak dipungut.

### Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan Badan Pendapatan Daerah di Kota Bekasi, peneliti menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak hiburan khususnya yang terindikasi tidak patuh terhadap kewajibannya.
2. Melakukan pemuktahiran atau memperbaharui atas basis data objek khususnya untuk pajak hiburan sehingga meminimalisir kekeliruan atas data objek pajak tersebut.
3. Memanfaatkan dan juga mengembangkan inovasi untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui teknologi seperti yang sedang berjalan yaitu alat *tapping box, e-SPTPD, SIMPATDA* dan lain sebagainya.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV.PUSTAKA SETIA.
- [2] Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21.
- [3] Bekasi, P. K. (2017). *Peraturan Daerah Kota Bekasi No 10 Tentang Pajak Hiburan*.
- [4] Engkus, A. S. (2021). Kinerja Organisasi Publik: Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Lingkungan Kota Bandung. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(4), 380–394.
- [5] Faisal Reza, A. L. (2021). ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HIBURAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.
- [6] Firdaus. (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Kendari). *Jiabi*, 4(2), 143–161.
- [7] Jatnika, H. (2012). *Pengantar Sistem Basis Data*. Bandung :CV.ANDI OFFSET.
- [8] Kamagi.G, C. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 1037–1049.
- [9] Lawati, S. (2018). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 1(1), 40–56.
- [10] Mathew.B Miles, M. H. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- [11] Pemerintah. (2003). *Undang - Undang Republik Indonesia No 17 Tentang Keuangan Negara*.
- [12] Pemerintah. (2007). *Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- [13] Rahmawati, R. (2017). ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP IMPLIKASINYA PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ( Studi Kasus pada KPP Pratama Bireuen ). 5, 109–118.
- [14] Saputri, D. A., & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 5(1), 11–22.
- [15] Sari, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). *Pengaruh Persepsi Manfaat Tax*

- 
- Amnesty*. 2, 176–183.
- [16] Tjip Ismail, E. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- [17] Peraturan Wali Kota Bekasi No.64 Tahun 2015 Tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online, 15 (2015).
- [18] Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 11 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, (2016).
- [19] Worumi, H. (2019). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 6(3), 23–39.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENGARUH SENAM HAMIL DENGAN KEJADIAN RUPTURE PERINEUM DI  
PUSKESMAS MINASAUPA MAKASSAR TAHUN 2021

Oleh

Ninda Sari L<sup>1)</sup>, Zulaeha A.Amdadi<sup>2)</sup>, Hidayati<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar

Email: <sup>1</sup>[nindasari211@poltekkes-mks.ac.id](mailto:nindasari211@poltekkes-mks.ac.id), <sup>2</sup>[zulaehaamdadi@poltekkes-mks.ac.id](mailto:zulaehaamdadi@poltekkes-mks.ac.id),  
<sup>3</sup>[hidayati@poltekkes-mks.ac.id](mailto:hidayati@poltekkes-mks.ac.id)

**Abstract**

Efforts to accelerate the reduction of the Maternal Mortality Rate (MMR) can be carried out by ensuring that every mother is able to access quality maternal health services. Through the pregnancy exercise program, which is intended for pregnant women to tighten the body system and elasticate the abdominal wall muscles, ligaments and ligaments of the pelvic floor muscles associated with the delivery process to reduce the incidence of rupture of the perineum which can cause maternal death due to bleeding. This type of research is quantitative. By using an analytical case control survey approach. The sampling technique was taken by consecutive sampling as many as 44 respondents. The statistical test used was the chi square test in both groups, it was found that the p value (Asymp. Sig 2-tailed) was  $0.001 < 0.05$ . that there is a significant effect between pregnancy exercise and the incidence of perineal rupture.

**Keywords: Maternal Mortality Rate, Mother, Pregnant**

**PENDAHULUAN**

Kehamilan merupakan salah satu anugrah yang sangat luar biasa dengan keunikan yang khas serta berbeda beda, yang di berikan Tuhan pada setiap individu yang merasakannya. Kehamilan merupakan fakto fisiologis yang akan terjadi pada setiap wanita yang akan menimbulkan kecemasan serta ketakutan dalam dirinya. Di mulai dari konsepsi sampai lahir janin, lamanya hamil normal Adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) kehamilan ini di bagi atas 3 semester yaitu : kehamilan trimester pertama 0-14 minggu , dan kehamilan trimester kedua mulai dari 14-28 minggu, dan kehamilan trimester ketiga di mulai dari 28-42 minggu (yuli, 2017)

Menurut WHO tahun 2015 AKI di dunia yaitu 289.000 jiwa dan Asia Tenggara menjadi ke-4 yang memiliki jumlah AKI terbesar yaitu 16.000 jiwa. Salah satu penyebab AKI yaitu perdarahan post partum. Rupture perineum menjadi penyebab utamanya. Kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin di dunia pada tahun 2015 terdapat 2,7 juta kasus di manah angka ini

di perkirakan akan mencapai 6,3 juta pada tahun 2050 jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang baik.

Di Kawasan asean AKI di ASEAN pada tahun 2015 ketika AKI di Indonesia mencapai 290, AKI di singapura hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 33 per 100.000 kelahiran hidup. Filipina 112 per 100.000 kelahiran hidup serta Malaysia dan Vietnam sama sama mencapai 160 per 100.000 kelahiran hidup, Salah satu penyebab AKI yaitu perdarahan post partum. Rupture perineum menjadi penyebab utamanya.

Di Indonesia laserasi perineum di alami oleh 75% ibu melahirkan pervaginam. Pada tahun 2017 menemukan bahwa dari total 1951 kelahiran spontan pervagina, 57% ibu mendapat jahitan perineum( 28% karena episiotomy dan 29% kerena robekan spontan ) ( Depkes RI, 2017), sedangkan penyebab kematian ibu di provinsi Sulawesi selatan untuk tahun 2017 perdarahan sebanyak 62 kasus (41,61%) Rupture perineum menjadi penyebab utamanya. Jumlah kasus angka kematian ibu sebanyak 149 per100.00 kelahiran hidup di Sulawesi Selatan(Dinkes

Prov.Sulsel,2015) kejadian ruptur perineum di puskesmas minasa upa provinsi Sulawesi selatan kota makassar tahun 2019 mencapai 52 kasus dari 358 kasus kelahiran hidup pertahun.

Kematian ibu menurut World Health Organization (WHO) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang di sebabkan karena kehamilannya atau menanganannya, tetapi bukan karena sebab sebab lain kecelakaan dan terjatuh

Menurut prawirohardjo ( 2009 ), perdarahan pasca persalinan dapat menyebabkan kematian ibu 45% terjadi pada 24 jam pertama pasca melahirkan 68-73% dalam satu minggu setelah melahirkan, dan 82-88%dalam 2 minggu setelah melahirkan. Yang terjadi pada 24 jam pertama setelah melahirkan sala satunya adalah robekan jalan lahir.

Rupture perineum adalah perlukaan jalan lahir yang terjadi pada saat kelahiran bayi baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Penyebab dari kejadian ruptur perineum adalah parita, berat badan bayi, pimpinan persalinan tidak sebagaimanah mestinya , perineum yang kaku, ekstraksi cunam, ekstraksi fakum, trauma alat dan episiotomy, ruptur perineum terjadi hampir pada semua persalinan pertama dan tidak jarang juga ada persalinan berikutnya. Robekan jalan lahir selalu memberikan perdarahan dalam jumlah yang bervariasi banyaknya. Perdarahan yang berasal dari jalan lahir harus selalu di evaluasi yaitu sumber dan perdarahan sehingga dapat di atasi.

Robekan yang terjadi bisa ringgan (lecek atau laserasi), luka episiotomy, ruptur uteri, robekan perineum spontan derajat 1 sampai derajat IV (spinter ani ) terputus, robekan pada dinding vagina, fornix uteri ,serviks, daerah sekitar klitoris uretra dalam meningkatkan kualitas taraf kesehatan ibu, antenatal care menyediakan kelas senam hamil untuk ibu hamil agar mendapatkan informasi yang lebih terbaru seputar kehamilan hingga ke proses persalinan nantinya.

Senam Hamil, adalah program kebugaran yang di peruntuhkan bagi ibu hamil dalam rangka mengencangkan sistem tubuh dan menyiapkan otot otot yang di perlukan sebagai tambahan yang harus di alami selama kehamilan meskipun aktivitas rutin sering di lakukan gerakan yang di berikan kepada ibu hamil untuk menghadapi dan mempersiapkan persalinan yang cepat aman dan spontan( hulina, 2011),

Degan melakukan senam hamil secara rutin dapat membuat ibu dan janin lebih siap menghadapi proses kelahiran karena senam hamil bertujuan baik terhadap ibu , yang di manah senam hamil ini memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot oto dinding perut, lingamen lingamen otot otot dasar panggul yang berhubungan degan proses pesalinan. Membentuk sikap tubuh, sikap tubuh yang baik selama kehamilan dan persalinan, dapat mengatasi keluhan keluhan umum pada wanita hamil, dapat membuat letak janin normal dan mengurangi sesak nafas akibat bertambah besarnya perut.

Degan sering rutin melakukan senam hamil maka akan membuat tubuh semakin siap menghadapi persalinan, rileksasi yang di dapatkan saat melakukan senam hamil akan membuat tubuh dapat tanang dan lebih beranin untuk menghadapi proses persaliinan.

persalinan yang normal ialah persalinan yang di mulai secara spontan, beresiko rendah pada awal pesalinan tetap demikian selama proses pesalinan bayi lahir secara spontan dalam presentasi belakang kepala pada usia kehamilan 37-42 minggu lengkap dan setelah bersalin ibu maupun bayi berada dalam kondisi sehat , persalinan adalah proses pengeluaran konsepsi ( janin dan uri ) yang sudah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir degan bantuan atau tanpa bantuan ( Manuaba, 2010).

Berdasarkan penelitian sebelumnya Yang telah di lakukan oleh peneliti pada tanggal 19 desember 2016, di RSUD PKU muhamadiyah Bantul telah di dapatkan data jumbla persalinan normal yaitu sebanyak 452 pada bulan januari-Desember 2016 dan terdapat 81 ibu (17,19 % )

yang mengalami rupture perineum pada saat persalinan. dan pada tanggal 17-25 Mei 2017 terdapat 10 ibu bersalin normal di antaranya 6 yang mengalami rupture perineum di manah 4 ibu yang melakukan senam hamil dan 2 ibu yang tidak pernah melakukan senam hamil dan terdapat 4 ibu bersalin yang tidak mengalami rupture perineum dan rutin melakukan senam hamil.

Berdasarkan uraian di atas dan data yang di peroleh oleh peneliti di Puskesmas Minasaupa, maka peneliti tertarik Untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh “senam hamil terhadap kejadian rupture perineum” Di puskesmas minasaupa.

## LANDASAN TEORI

### a. Pengertian Senam hamil

Senam hamil adalah latihan fisik berupa beberapa gerakan tertentu yang dilakukan khusus untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan terapi latihan gerak yang diberikan kepada ibu hamil untuk mempersiapkan dirinya, baik persiapan fisik maupun mental untuk menghadapi dan mempersiapkan persalinan yang cepat, aman dan spontan (Huliana, 2011).

Senam hamil merupakan gerakan secara terstruktur yang di lakukan oleh ibu hamil untuk mengengjangkan otot otot perineum. Dengan senam hamil ibu hamil dapat melatih keelastisan otot otot perineum, yang nantinya akan memudahkan ibu dalam proses persalinan kelak, dengan rutin melakukan senam hamil, membuat ibu lebih siap untuk menghadapi persalinannya kelak

### b. Tujuan Senam Hamil

Senam hamil sangat bermanfaat. dilakukan selama kehamilan. Berlatih senam hamil pada masa kehamilan dapat membantu melatih pernafasan dan membuat ibu hamil merasa relaks sehingga memudahkan adaptasi ibu terhadap perubahan tubuh selama kehamilan (Ayodya, 2015).

### c. Faktor-faktor yang mempengaruhi senam hamil

#### 1) Usia Kehamilan

Senam hamil pada kehamilan normal dapat di mulai pada kehamilan kurang lebih 16- 38

minggu pada sumber lain di katakana senam hamil biasanya bias di berikan setelah keluhan keluhan yang bias timbul pada periode kehamilan muda seperti mual sampai muntah, tidak ada pendarahan pada kehamilan atau kehamilan sudah memasuki trimester yaitu sekitar usia 20 minggu ke hamilan karena pada usia kehamilan ini plasenta telah terbentuk sempurna, sehingga kemungkinan terjadinya ancaman keguguran lebih kecil.

#### 2) Pendidikan dan pengetahuan

Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu mempengaruhi keikutsertaan ibu dalam senam hamil. maka makin tinggi pula minat ibu dalam melakukan senam hamil.

#### 3) Status kesehatan ibu

Ibu yang dapat melakukan senam adalah ibu dengan status kesehatan yang baik dan memenuhi syarat untuk senam hamil. Maka dari itu, sebelum melakukan senam hamil ibu terlebih dahulu di priksa kesehatannya, apakah ibu memiliki kondisi yang kontradikasih dengan senam hamil atau tidak.

#### d. Rupture Perineum

Rupture perineum adalah robekan yang terjadi pada perineum sewaktu persalinan. Perineum merupakan bagian yang sangat penting dalam fisiologi, yang tidak hanya berperan pada proses persalinan. Perineum merupakan bagian yang sangat penting dalam fisiologi yang tidak hanya berperan pada proses persalinan, tetapi juga di perlukan untuk mengontrol buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktifitas perstatik normal dan fungsi seksual yang sehat (Waspodo, 2001).

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini kuantitatif. Dengan menggunakan pendekatan survei analitik *case control*.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan rappocini, wilayah kerja puskesmas Minasaupa kota Makassar pada bulan Februari- Mei 2021.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi terjangkau ialah ibu hamil dengan usia kehamilan 28– 38 minggu yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Minasa upa kota Makassar. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 44 subjek yang terdiri dari 22 subjek pada kelompok kasus dan 22 subjek pada kelompok control. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara *Consecutive Sampling*. Dengan pengolahan data menggunakan computer program SPSS (*Statistical Package For Social Science*) dengan tahapan *editing, coding, entry data, cleaning data* dan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

**Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bivariate yang digunakan untuk mencari hubungan variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan tabel. Adapun uji yang digunakan adalah uji *Chi Square* dengan nilai  $p < 0,05$ .

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan data primer yang diawali dengan memberikan *informed consent* kepada 44 responden kemudian di lanjutkan dengan pemberian lembar *cheklis* untuk mengumpulkan semua data. Data yang diperoleh sesuai variabel dalam penelitian ini. Setelah dilakukan pengolahan data maka hasil penelitian disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Distribusi frekuensi kelompok kasus dan kelompok kontrol**

No.	Senam Hamil	Kelompok Kasus		Kelompok Kontrol	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Senam Hamil	22	100	0	0
2	Tidak Senam Hamil	0	0	22	100
	Total	22	100	22	100

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan pada tabel 5.1 di ketahui bahwa dari total 44 respondent. Pada kelompok kasus terdapat 22 orang ibu yang melakukan senam hamil (50%), yang terdiri dari 17 ibu post partum (38,6%) yang tidak mengalami ruptur

dan terdapat 5 ibu post partum (11,4%) yang mengalami ruptur, 5 ibu post partum yang mengalami ruptur di manah 3 orang ibu mengikuti kelas senam sebanyak 3 kali dan 2 lainnya hanya 2 kali mengikuti kelas senam hamil, sedangkan pada kelompok kontrol yang terdiri dari 22 orang ibu yang tidak melakukan senam hamil (50%) sebanyak 16 ibu post partum (36,4%) yang mengalami ruptur dan hanya 6 orang ibu post partum (13,6%) yang tidak mengalami ruptur.

**Analisis Bivariat**

**Tabel 2. Pengaruh Senam Hamil dengan Kejadian Ruptur Perineum pada Persalinan Normal di Puskesmas Minasa Upa**

Kategori	Ruptur Perineum		Tidak Ruptur Perineum		Ruptur Total	P-Value	CC
	F	%	F	%			
Senam Hamil	5	11,4	17	38,6	22	50	0,001
Tidak Senam Hamil	16	36,4	6	13,6	22	50	
Total	21	47,8	23	52,2	44	100	

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan uji statistik chi square didapatkan nilai p-value sebesar 0,001 Yang berarti terdapat pengaruh senam hamil terhadap kejadian ruptur perineum, uji korelasi Chi square dengan nilai signifikan  $p \text{ value } 0,001 \leq 0,05$  hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara senam hamil dengan kejadian ruptur perineum. Hasil analisis didapatkan nilai keeratan pengaruh atau CC (contigen coefficient) sebesar 0,448 yang memiliki arti keeratan cukup, nilai coifficien yang positif bahwa semakin rutin ibu melakukan senam hamil maka akan semakin kecil resiko kejadian ruptur perineum pada ibu saat bersalin.

**Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan dari 44 responden (100%) 22 ibu post partum (50%) yang mengikuti senam hamil sebanyak 5 ibu post partum (11,4%) mengalami ruptur perineum pada persalinan normal, hal ini disebabkan karena ibu tidak rutin dalam melakukan senam hamil.

Menurut Anggraeni (2010) senam hamil di lakukan sejak usia kehamilan 28 minggu sampai degan masa kelahiran. Manfaat dari senam hamil yang di lakukan secara teratur membantu dalam menjaga kesehatan dan kelancaran proses persalinan dan nifas karena senam hamil akan membuat tubuh menjadi lentur terutama pada otot otot jalan lahir. Kelenturan otot ini sangat di perlukan karena saat menghadapi persalinan ibu biasanya menghadapi kecemasan dan panik (Eli, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian dari 44 responden (100%) 22 ibu post partum (50%) yang tidak melakukan senam hamil terdapat 16 ibu post partum (36,4%) yang mengalami rupture dan yang tidak mengalami rupture sebanyak 6 ibu post partum (13,4%). Hasil penelitian menunjukan sebagian besar ibu bersalin yang mengalami robekan karena tidak mengikuti senam hamil. Penelitian ini sejalan degan penelitian yang di lakukan Turlina (2015) Tentang hubungan senam hamil degan terjadinya robekan perineum di peroleh hasil ibu bersalin spontan , yang tidak mengikuti senam hamil sebagian besar (62,5%) mengalami robekan perineum dan hampir sebagian (37,5%) tidak mengalami robekan perineum.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasari ibu bersalin yang mengikuti senam hamil dan tidak mengalami robekan perineum spontan saat hamil sering melakukan latihan latihan relaksasi yang dapat membuat perineum menjadi lentur. Latihan senam hamil pada umumnya dan khususnya pada senam kebugaran panggul.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari total 44 responden,(100%) 22 orang ibu yang melakukan senam hamil (50%) sebanyak 17 ibu post partum (38,6%) tidak mengalami robekan pada persalinan normal. Hasil penelitian ini sejalan degan hasil penelitian Turlina (2015), hasil menunjukan sebagian responden mengikuti senam hamil sebanyak (61,9%) tidak mengalami robekan dan sebagian responden mengalami robekan hanya derajat 1.

Responden yang tidak mengalami robekan perineum di mungkinkan karena pengaturan posisi yang benar pada saat persalinan, dan menurut data yang di peroleh dari 17 responden yang tidak mengalami robekan perineum sebagian besar aktif dalam mengikuti senam hamil pada saat kehamilanya. Hal ini sesuai degan teori yang menyebutkan bahwa pencegahan robekan perineum sesuai dengan teori Aprillia (2011) yaitu dapat di cegah degan pengaturan posisi yang benar saat persalinan, senam hamil, perineum message, dan yoga prenatal.

Berdasarkan hasil penelitian dari 44 responden (100%) 22 ibu post partum (50%) yang tidak melakukan senam hamil hanya 6 ibu post partum (13,6%) yang tidak mengalami rupture. Menurut asumsi penelitian 6 ibu post partum (13,6%) yang tidak melakukan senam hamil dan tidak mengalami rupture di karenakan oleh factor lain seperti paritas, dan Teknik meneran ibu yang bagus dan ibu degan persalinan yang lebih dari dua kali atau multipara, sehingga otot kewanitaanya sudah lentur, sehingga memudahkan ibu dalam proses persalinan.

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Ardiani (2013), dari 23 responden yang meneran tidak benar di dapatkan (71,9%) yang mengalami kejadian rupture perineum. Hal ini disebabkan oleh cara ibu dalam mengatur nafas saat mengedan dan juga cara melakukan dorongan saat meneran, sehingga diperlukan pimpinan maksimal penolong agar ibu dapat mengedan dengan benar untuk mengurangi kejadian rupture perineum. Ibu harus didukung untuk meneran degan benar pada saat ia merasakan dorongan dan memang ingin mengejan.

Ibu mungkin merasa dapat meneran secara efektif pada posisi tertentu selain teknik meneran yang benar juga karena ibu rutin dalam melakukan pemeriksaan ANC, dan aktifitas ringan dirumah seperti berjalan dipagi hari sehingga ibu dapat meminimalkan resiko pada saat persalinan seperti robekan perineum, dengan melakukan pemeriksaan selama kehamilan atau antenatal care.

Dapat terpantaunya kehamilan ibu, mulai dari kondisi janin sampai taksiran berat janin, sehingga dapat meminimalisir dan mengantisipasi komplikasi pada saat persalinan nanti. Selain itu penjegahan terjadinya rupture yaitu degan melakukan senam hamil pada ibu hamil merupakan salah satu persiapan fisik dalam menghadapi persalinan. Senam ibu hamil yang dilakukan secara rutin sangat membantu kelancaran dalam proses persalinan (widiandi & proverawati, 2010).

Hasil analisis Bivariat menunjukkan uji Chi square dengan nilai signifikan p value  $0,001 \leq 0,05$  hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara senam hamil degan kejadian rupture perineum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai contingency coeffcent (cc) 0,448 berarti pengaruh senam hamil degan kejadian rupture perineum pada persalinan normal dalam kategori cukup erat.

Penelitian ini sejalan degan penelitian yang di lakukan oleh Turlina (2015), Hasil penelitian menunjukkan sebagian responden mengikuti senam hamil sebanyak (61,9%) hasil observasi robekan perineum menunjukkan sebagian tindakan mengalami robekan perineum (38,1 %) hasil pengujian degan uji koefisien Phi diperoleh nilai sebesar 0,485 dengan signifikan sebesar 0,026 ( $p < 0,05$ ), hal ini di simpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara senam hamil dengan kejadian robekan perineum spontan.

Selain itu penelitian yang di lakukan oleh Riswati (2015) hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden tidak aktif senam hamil (62,8 %) dan sebagian besar responden mengalami robekan perineum (55,8 %). Ada hubungan yang signifikan antara senam hamil terhadap robekan perineum pada ibu bersalin primigravida di puskesmas tegalrejo, kecamatan argomulyo, kota salatiga. (p-value  $0,029 < (0,05)$  )

Responden yang aktif mengikuti senam hamil tidak mengalami robekan perineum di karenakan senam hamil yang di lakukan secara teratur sehinga dapat membantu elastisitas otot

dasar panggul dan akan memperoleh hasil yang efektif. Hal ini sesuai dengan teori bahwa dengan mengikuti senam hamil dapat bermanfaat dalam proses persalinan yaitu ibu dapat melatih ketenagan menghadapi proses persalinan, memperkuat dan mempertahankan elastisitas pada saat mengejan otot dasar panggul dan otot mengejan dan otot paha bagian dalam mengendur secara aktif sehingga otot dasar panggul yang lemas tidak akan muda robek saat melahirkan (Huliana, 2012).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh senam hamil degan kejadian rupture perineum di Puskesmas Minasa upa Makassar”, peneliti mengambil kesimpulan umum bahwa ada pengaruh senam hamil dengan kejadian rupture perineum, serta terdapat perbedaan kejadian rupture perineum pada kelompok kasus dan kontrol pada persalinan normal.

### Saran

1. Bagi ibu hamil, keluarga dan masyarakat Untuk mengantisipasi terjadinya rupture perineum degan rutin melakukan senam hamil yang bertujuan untuk melenturkan otot otot jalan lahir, sehingga dapat meminimalisir terjadinya robekan jalan lahir pada saat persalinan.
2. Di harapkan bagi instansi Puskesmas minasa upa kota Makassar dengan mengadakan kelas senam hamil sebagai motivasi petugas kesehatan untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan konseling tentang pentingnya melakukan senam hamil, dan minimal sebanyak 6 kali senam hamil sehingga kejadian rupture perineum pada persalinan normal bisa di minimalisir
3. Diharapkan bagi institusi Pendidikan untuk selalu memperbaharui informasi mengenai senam hamil terhadap kejadian rupture baik melalui hasil penelitian maupun artikel tentang manfaat senam hamil untuk persalinan.

4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan lebih luas

Pelaksanaan Senam Hamil di Puskesmas Purwekerto Batar. volume 2, 5.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, J. . (2018). Efektifitas Senam Hamil Terhadap kejadian Rupture perineum pada Ibu Bersalin di Puskesmas limboto. volume, 1.
- [2] Asih, S. . (2018). Pengaruh Senam Hamil Terhadap Kejadian Rupture Perineum pada Ibu Bersalin Primigravida. volume 1, 1.
- [3] Juwita, S. (2017). Hubungan Senam Samil degan Robekan Perineum pada Ibu Nifas. volume 1, 1.
- [4] Layli, U. (2015). Analisis faktor faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Senam Samil pada Ibu Hamil di BPS Nina Surabaya. volume 8, 2.
- [5] LESTARI, Y. . (2018). Hubungan Senam Hamil dengan Kejadian Rupture Perineum di Puskesmas Milati II. Senam Hamil Rupture Perineum.
- [6] M.Si, P. . (2010). Metodologi Penelitian.
- [7] Maya, R. . (2018). Faktor yang Mempegaruhi Pelaksanaan Senam.
- [8] Renda, a. . pratama. (2018). Faktor yang Mengaruhi Pelaksanaan Senam Hamil. volume 9, 3.
- [9] SARI, D. . (2017). Hubungan Senam Hamil Dengan kejadian Rupture perineum pada Persalinan Normal Di RSUD PKU Muhamad Bantul.
- [10] Setyatama, I. . (2017). Pengaruh Senam Hamil Terhadap Kejadian Laserasi Perineum di Desa Gembong Kecamatan.
- [11] SSiT, M. . royani chairiya. (2020). Hubungan Senam Hamil dengan Rupture Perineum pada Ibu Bersalin di BPS Hj Warsingsi Persalin. VOLUME 11, 1.
- [12] Wijaya, H. (2018). Metode Penelitian dalam Penulisan Jurnal Ilmiah Elektronik.
- [13] Yunisari, s. . annisa dwi. (2014). Analisis faktor faktor yang Berhubungan degan

HALAMAN INI SENGAJA DIKSONGKAN